



Bunga Rampai

PENGEMBANGAN MASYARAKAT

DI ERA GLOBALISASI

Drajat Tri Kartono (Editor)

Dini Hidayanti, Ery Purwanti, Hastin Ika Indriyastuti, Helfi Agustin, Isma Yuniar,
Lutfia Uli Na'mah, Miftah Faridl Widhagdha, Nadya Puspita Adriana,
Ratih Prananingrum, Sulistyani Prabu Aji, Wida Pradiana

PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI

Bunga Rampai



Drajat Tri Kartono (Ed)

Dini Hidayanti, Ery Purwanti, Hastin Ika Indriyastuti, Helfi Agustin,
Isma Yuniar, Lutfia Uli Na'mah, Miftah Faridl Widhagdha,
Nadya Puspita Adriana, Ratih Prananingrum, Sulistyani Prabu Aji,
Wida Pradiana

PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI

Bunga Rampai

Editor:

Drajat Tri Kartono

Penulis:

Dini Hidayanti, Ery Purwanti, Hastin Ika Indriyastuti, Helifi Agustin,
Isma Yuniar, Lutfia Uli Na'mah, Miftah Faridl Widhagdha,
Nadya Puspita Adriana, Ratih Prananingrum, Sulistyani Prabu Aji,
Wida Pradiana

ISBN:

978-623-5586-11-3

Cetakan ke-1 Tahun 2022

Diterbitkan atas kerjasama:

Program Studi Doktor Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan
Masyarakat, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami No. 36A Jebres, Surakarta
dan
Prospect Publishing by Arjuna Wijaya Karya
Jl. Sam Ratulangi No. 35A Manahan, Banjarsari, Surakarta

Sitasi:

Kartono, Drajat Tri (Ed). (2022). Pengembangan Masyarakat di Era
Globalisasi. Surakarta: Prospect Publishing.

KATA PENGANTAR

Pengembangan masyarakat menjadi diskursus yang semakin berkembang seiring dengan semakin terbukanya wacana tentang kesetaraan dan keadilan sosial di tingkat global. Perkembangan pembangunan dunia melalui tujuan pembangunan berkelanjutan / *sustainable development goals (SDGs)* melalui semangatnya yaitu “*No One Left Behind*” juga semakin membuka wacana tentang bahwa masyarakat dalam konteks global harus selalu ditempatkan sebagai subjek dalam proyek-proyek pembangunan agar tidak menyisakan masalah baru dalam pembangunan. Isu-isu seputar kesehatan masyarakat menjadi topik utama dalam buku ini melalui tulisan-tulisan tentang pencegahan stunting, tuberculosis, HIV/AIDS, hingga pencegahan penyakit tidak menular. Isu kesehatan masyarakat masih menjadi permasalahan primer dan menjadi hambatan dalam pengembangan masyarakat secara umum karena merupakan faktor yang sangat penting bagi kesejahteraan individu sebelum melangkah kepada kekuatan komunitas atau masyarakat yang lebih luas. Selain itu, ada juga tulisan tentang pengembangan pendidikan melalui pengalaman antar budaya yang dianggap menjadi pintu bagi berkembangnya pemikiran globalisasi dengan tetap mengedepankan budaya lokal, serta tulisan tentang perkembangan pengembangan masyarakat di bidang pertanian melalui program *Food Estate*, kemudian sebagai bagian untuk memantik debat akademis, juga terdapat tulisan yang mengkaji tentang peran perusahaan dalam pengembangan masyarakat.

Buku ini diharapkan dapat mengisi dan menyumbangkan wacana dalam kajian pengembangan masyarakat yang kini tidak bisa

dilepaskan dari tren globalisasi, dimana keterkaitan satu sama lain semakin tidak bisa dihindari, baik itu keterkaitan antar negara sampai keterkaitan antar isu pembangunan menjadi semakin kompleks dan saling bersinggungan.

Buku ini merupakan hasil tulisan mahasiswa yang sedang menempuh studi Doktor Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat yang terbagi dalam tiga peminatan utama yaitu Promosi Kesehatan, Pendidikan Luar Sekolah dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai arus utama dalam mempelajari teori dan praktik pengembangan masyarakat di era globalisasi.

Surakarta, 20 Juni 2021

Drajat Tri Kartono

Staf Pengajar Mata Kuliah Pengembangan Masyarakat,
Program Doktor Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan
Masyarakat, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret
Email: drajattri@staff.uns.ac.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	8
DAFTAR ISI	10
DAFTAR TABEL.....	12
DAFTAR GAMBAR	13
PRINSIP BERPIKIR GLOBAL BERTINDAK LOKAL PADA PENGEMBANGAN MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN ANTARBUDAYA	15
<i>Dini Hidayanti Herpamudji</i>	
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENYELAMATAN KARST GOMBONG SELATAN 42 <i>Ery Purwanti</i>	
PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENCEGAHAN STUNTING	69
<i>Hastiti Ika Indriyastuti</i>	
MAHASISWA PENCERAH: MENGUBAH “BAD HABIT” MENJADI “GOOD HABIT”, SEBUAH PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN BERKELANJUTAN DARI PINGGIR KALI BRANTAS, MALANG	98
<i>Helmi Agustin</i>	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KADER DALAM KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI TUBERKULOSIS (KMP-TB) DI KECAMATAN PURING, KEBUMEN	124
<i>Isma Yuniar</i>	

UPAYA PENCEGAHAN HIV/AIDS MELALUI PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	145
<i>Lutfia Uli Na'mah</i>	
PENGEMBANGAN MASYARAKAT OLEH PERUSAHAAN: SEBUAH KEWAJIBAN ATAU KESUKARELAAN?.....	165
<i>Miftah Faridl Widhagdha</i>	
PENGEMBANGAN MASYARAKAT DALAM PROMOSI KESEHATAN.....	184
<i>Nadya Puspita Adriana</i>	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN STIMULASI TUMBUH KEMBANG BALITA.....	205
<i>Ratih Prananingrum</i>	
PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERKOTAAN UNTUK PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR.....	223
<i>Sulistiyani Prabu Aji</i>	
PENGEMBANGAN MASYARAKAT BIDANG PERTANIAN MELALUI PROGRAM FOOD ESTATE.....	251
<i>Wida Pradiana</i>	
GLOSARIUM.....	270
PROFIL PENULIS.....	273

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Implementasi Prinsip Ekologis Pengembangan Masyarakat	23
Tabel 2. Implementasi Prinsip Keadilan Sosial dan HAM Pengembangan Masyarakat.....	25
Tabel 3. Implementasi Prinsip Menghargai Lokal Pengembangan Masyarakat.....	27
Tabel 4. Implementasi Prinsip Proses Pengembangan Masyarakat.	30
Tabel 5. Implementasi Prinsip Global dan Lokal Pengembangan Masyarakat.....	34
Tabel 6. Tahapan Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat.....	55
Tabel 7. Aksi sosial politik pemberdayaan masyarakat oleh PERPAG	58
Tabel 8. Prinsip Pengembangan Masyarakat Menurut Ife.....	85
Tabel 9. Resiko penularan HIV/AIDS dari ibu ke bayi	148
Tabel 10. Periode Perkembangan Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	169
Tabel 11. Berbagai Aliran Pemikiran Green	187
Tabel 12. Pengembangan Masyarakat Berdasarkan Prinsip Ekologis	257
Tabel 13. Pengembangan Masyarakat Berdasarkan Prinsip Keadilan Sosial.....	258
Tabel 14. Pengembangan Masyarakat Berdasarkan Prinsip Menghargai Lokal	259
Tabel 15. Pengembangan Masyarakat Berdasarkan Prinsip Proses	260
Tabel 16. Pengembangan Masyarakat Berdasarkan Prinsip Global & Lokal.....	262

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Program Pertukaran Pelajar J-ASEAN 1 Tahun 200....	36
Gambar 2 AFS support LGBT community.....	37
Gambar 3. AFS Families Say It All.....	39
Gambar 4. Aksi penolakan tambang semen di DPRD Kebumen ...	60
Gambar 5. Aksi massa di Kabupaten Kebumen dan Propinsi Jawa Tengah.....	61
Gambar 6. Tracing Mata Air Bawah Tanah di Sikayu PERPAG dengan Pusat Studi Karst UGM.....	62
Gambar 7. Penghijauan Karst Gombang Selatan dengan KLHK..	63
Gambar 8. Kegiatan budaya lokal sebagai satu proses pemberdayaan masyarakat dengan tujuan pemererat solidaritas.....	64
Gambar 9. kampung warna-warni-Jodipan.....	100
Gambar 10. Peluang usaha dan cenderamata tiket kampung warna-warni.....	101
Gambar 11. Siklus Pemberdayaan.....	126
Gambar 12. Model Hubungan Pemberdayaan Masyarakat	128
Gambar 13. Penggerakkan dan Pola Jejaring Dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	132
Gambar 14. Pengisian kuesioner dakam proses FGD.....	134
Gambar 15. Pendampingan kader ke keluarga pasien TBC	140
Gambar 16. Pemberian penyuluhan oleh kader TB ke masyarakat beresiko.....	140
Gambar 17. Riwayat perjalanan infeksi HIV	151
Gambar 18. Siswa SMK Bukit Asam dalam Program Beasiswa Pendidikan	174
Gambar 19. Petani Kakao di Berau.....	175
Gambar 20. Pelatihan Pemadaman Kebakaran di Sungai Pakning, Bengkalis.....	177
Gambar 21. Kemasan Olahan Tempe.....	178
Gambar 22. Arah dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	196

Gambar 23. Siklus Pemberdayaan	197
Gambar 24. Tumbuh Kembang Balita	206
Gambar 25. Praktik Pemijatan Bayi.....	209
Gambar 26. Daftar penyakit tidak menular (PTM)	233
Gambar 27. Sebuah model yang diusulkan untuk mengklasifikasikan faktor risiko PTM.	234
Gambar 28. Pengamatan Kawasan.....	255
Gambar 29. Kegiatan ubinan	255

PRINSIP BERPIKIR GLOBAL BERTINDAK LOKAL PADA PENGEMBANGAN MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN ANTARBUDAYA

Dini Hidayanti Herpamudji

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi,

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Email: Dini_Hidayanti_2022@student.uns.ac.id

Globalisasi Pendidikan

Lebih dari 3500 siswa Indonesia yang berangkat program pertukaran pelajar Bina Antarbudaya. Kurang lebih tiga ribu siswa diseleksi tiap tahunnya (3.167 siswa di 2019) untuk semua program (Asia Kakehashi Project, KL-YES, dan AFS). Pada dasarnya program pertukaran dibagi dalam dua jenis yaitu Program Tahunan atau Program Pendek dan beasiswa penuh atau partial. Beberapa nama alumni yang cukup dikenal di Indonesia adalah sebagai berikut. Taufiq Ismail, penyair; Tanri Abeng, Menteri; Anies Baswedan dan Fadli Zon, politisi; Najwa Shihab, jurnalis; Indra Herlambang dan Chantal Della Concetta, presenter; Mario Teguh, motivator; Joko Anwar, sutradara.

Program pertukaran pelajar yang disponsori oleh YBA

tergantung pada lamanya program, misi, kerjasama, atau persyaratan khusus dari negara atau yayasan lain. Dua program utama yang tersedia saat ini adalah Program Pertukaran Pemuda (YES) dan Program Tahunan AFS. Sejak tahun 2004, Departemen Luar Negeri AS telah bermitra dengan YBA untuk meluncurkan program YES dengan misi pertukaran budaya dan pemahaman tentang Islam. Saat ini, YBA sedang menggarap program lain seperti pertukaran guru dan pertukaran sukarelawan. Relawan dan returnee yang kembali juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mengadakan seminar dan lokakarya untuk pengembangan diri.

Taufiq Ismail, Kartono Mohamad, Tanri Abeng, Sophie Gunawan Satari dan Irid Agoes mendirikan Yayasan Bina Antarbudaya (YBA) tepat pada Hari Pendidikan (Hardiknas) di Republik Indonesia tanggal 2 Mei 1985. YBA telah memantapkan dirinya sebagai organisasi berbasis pendidikan yang terus bekerja untuk menciptakan pemahaman global. YBA adalah organisasi non-pemerintah, nirlaba, berbasis sukarelawan yang merupakan mitra dalam Program Antarbudaya AFS, yang bekerja untuk membangun dunia yang lebih baik melalui program pertukaran lintas budaya. Tujuan diadakannya Bina Antarbudaya adalah untuk mempersiapkan pemimpin masa depan yang peka terhadap lingkungannya serta memiliki pemahaman lintas budaya.

Peserta program pertukaran belajar untuk berbagi, berkomunikasi, menghormati, dan memahami perbedaan dengan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai negara. Kedepannya, YBA berharap memiliki pemimpin yang menghargai perbedaan, sangat peka terhadap nilai-nilai perdamaian dan persahabatan, membangun hubungan yang positif dan saling memahami dengan orang-orang dalam kelompok dan negara lain. YBA tidak berafiliasi dengan agama, ras, suku, kelompok sosial ekonomi, atau partai politik manapun. YBA berkomitmen untuk menjadi organisasi nirlaba yang selalu bekerja untuk kepentingan kemanusiaan. Dengan pengalaman

lebih dari 50 tahun dalam pemahaman lintas budaya, Vina Antal Budaya telah mengirimkan tiga ribu siswa ke berbagai negara dan menyambut lebih dari 1.500 siswa internasional untuk tinggal dan belajar di Indonesia. Pada tahun 1990, YBA menerima penghargaan dari Japan Foundation, dan bersama para pemenang penghargaan dari berbagai negara, Kak Irid Agoes, yang saat itu Managing Director YBA, diundang ke Istana Kekaisaran oleh Yang Mulia Kaisar dan Permaisuri Michiko.

Penghargaan ini memotivasi YBA untuk memenuhi misinya dan mempertahankan nilai-nilai sebelumnya. YBA membuka peluang untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik individu maupun bisnis, untuk terus mengirimkan siswa Indonesia ke berbagai negara untuk menjadi pemimpin masa depan. Impian yang didambakan dan harus dijelmakan tercantum dalam visi organisasi yaitu: “Pemimpin Masa Depan yang mengangkat harkat, martabat serta kesejahteraan bangsa Indonesia dan umat manusia”. Sedangkan tugas yang harus ditunaikan tertuang dalam misi organisasi yaitu: “Mengabdikan untuk mengangkat harkat, martabat serta kesejahteraan bangsa Indonesia dan umat manusia”.

ROTA YBA 2021-2023 Pada bidang organisasi memiliki tujuan: (1) Organisasi yang sigap dan Tangguh terhadap perubahan melalui penguatan rrlawan dan membangun Kerjasama dengan pemerintah, organisasi lain demi kemajuan bangsa, (2) One Organisation: Keluarga Antarbudaya AFS. Dengan strategi: (2021) Penguatan organisasi (nasional dan chapter), Strategic Development Session Bersama chapter, Program Pendampingan Chapter yang lebih efektif, (2022) Melaksanakan kerjasama yang berorientasi pada hasil, (2023) *Delivering Impact*.

Pada bidang program memiliki tujuan mencapai 850 peserta dalam kurun waktu 2020-2023 dengan: (1) Mmperkuat program utama (AFS, YES, Kakehashi), (2) Mendorong percepatan program Virtual (Global You Adventurer, (3) Inovasi Program Domestik.

Dengan strategi: (2021) Sistem seleksi yang lebih efisien, tepat guna dan tepat sasaran (adaptasi dengan platform online), (2022) Pemasaran dan Komunikasi Program yang lebih massif dan terstruktur (optimalisasi platform digital), (2023) Kemitraan dan Kolaborasi (Corporate dan Family Foundation, Government, Embassy, etc).

Pada bidang Volunteer Development memiliki tujuan volunteer yang berkualitas (Tangguh, berkemampuan dan bersedia) untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dengan strategi: (2021) Sistem rekrutmen dan database volunteer, (2022) Pelatihan (Need Base), (2023) Sistem Penghargaan Volunteer.

Pada bidang Communication dan PR memiliki tujuan: (1) Organisasi yang menciptakan pemimpin masa depan untuk mengatasi tantangan social dan lingkungan, melalui edukasi dan pemahaman antarbudaya, (2) AFS Story Book Launch 2021. Dengan strategi: (2021) Positioning our organization: Video Beautiful Indonesia by Chapter, (2022) Membangun system komunikasi untuk menjangkau dan memberdayakan volunteer, optimalisasi digital platform, (2023) Advokasi dan Kolaborasi untuk mendukung pertumbuhan organisasi.

Pada bidang Fund Raising memiliki tujuan Dukungan Sumber Daya untuk memenuhi target jumlah peserta Program (850 orang) dengan memberikan beasiswa parsial untuk 250 orang. Dengan strategi: (2021) Menetapkan kebijakan di tingkat nasional dan chapter, optimalisasi FR melalui Volunteer Network untuk mencapai target beasiswa (parsial) bagi 50 siswa, (2022) Membangun system donasi online untuk mencapai target beasiswa (parsial) bagi 100 siswa, (2023) Memperluas kemitraan (korporasi, sekolah, pemerintah, kedutaan besar dll).

Kantor pusat Bina Antarbudaya berada di Jl. Limau 1 No. 22, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain itu, YBA mencakup 20 cabang atau biasa disebut chapter yang tersebar di Medan, Aceh, Padang, Palembang, Karawang, Bogor, Jakarta, Bandung, Semarang,

Malang, Yogyakarta, Mataram, Surabaya, Samarinda, Denpasar, Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Ambon, Makassar. Semua kegiatan di cabang dikelola oleh para relawan. Relawan mencakup semua lapisan anggota masyarakat dengan latar belakang yang berbeda baik usia, pendidikan maupun sosial ekonomi.

Kita akan membahas satu program kerja yang ada di salah satu Chapter yaitu Semarang. Kantornya berkedudukan di Jl. Durian II No.18, Lamper Kidul, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50249. Dengan sasaran area 35 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Program di Chapter ini juga terdiri dari tiga program utama seperti di pusat yaitu Hosting, Sending dan Global You Adventurer. Fokus kita pada program hosting yang sudah mengadakan 2 program secara virtual untuk 2020/21 (NSLI-Y 15 siswa, 6 minggu dan YES Abroad 5 siswa, 10 bulan) dan merencanakan hosting untuk 2021/22 secara in-person, virtual atau kombinasi.

Program Hosting memiliki tujuan: (1) Menghidupkan kembali kegiatan hosting di masa pandemic (2) Membentuk sistem dan jaringan komunikasi yang jelas di hosting. Dengan strategi: (1) Melakukan recruitment volunteer hosting baru (2) Memperkenalkan virtual hosting, (3) Membuat susunan acara yang jelas selama 1 tahun jika ada siswa hosting.

Rencana Program Kerja Hosting dibagi dalam 5 kegiatan sebagai berikut:

1. Recruitment hosting volunteer (CP, Bahasa sebagai support team untuk anak hosting mendampingi selama 2-3 bulan pertama
2. Promosi hosting untuk mencari calon host family
3. Membuat video testimony dari anak hosting yang tinggal di Semarang
4. Membuat susunan acara hosting untuk dilaksanakan secara online dan offline
5. Mencari calon host family yang tertarik untuk melakukan program

hosting secara virtual

Tulisan kali ini akan menganalisis kondisi ideal dan kondisi saat ini program kegiatan hosting yang dilakukan Chapter Semarang Yayasan Bina Antarbudaya berdasarkan 26 prinsip dalam pengembangan masyarakat menurut Jim Ife (2002) dikategorikan ke dalam prinsip-prinsip ekologi, prinsip-prinsip keadilan sosial, prinsip-prinsip menghormati lokal, prinsip-prinsip proses, dan prinsip-prinsip global dan lokal.

Ife menekankan bahwa prinsip-prinsip pengembangan masyarakat tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dan berhubungan. Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yang dikemukakan oleh Ife (2002) adalah sebagai berikut:

Prinsip Pengembangan Masyarakat

1. Prinsip Ekologi

Pertama, prinsip ini memiliki lima elemen yang menjadi dasar pengembangan masyarakat. Holistik, keberlanjutan, keragaman, pembangunan organik, pembangunan seimbang.

2. Prinsip Keadilan Sosial

Dalam pengembangan masyarakat, selalu penting untuk menggabungkan pendekatan ekologis dengan ide-ide untuk keadilan sosial. Komposisi; Fokus pada kelemahan struktural, wacana yang merugikan, pemberdayaan, definisi kebutuhan (definition of needs) dan hak asasi manusia (human rights).

3. Prinsip Menghargai Lokal

Perilaku berbasis kesadaran lokal saat ini sedang menarik perhatian berbagai kalangan. Tema ini semakin kuat karena sentralisme terbukti gagal dalam melaksanakan pembangunan. Prinsip-prinsip lokal tersebut dapat diartikan sebagai berikut: penghargaan pada nilai kearifan lokal, nilai budaya lokal, nilai sumber daya lokal dan nilai proses lokal.

4. Prinsip Proses

Keempat, banyak penerapan prinsip-prinsip utama pengembangan masyarakat berfokus pada gagasan proses, karena pengembangan masyarakat menganggap proses lebih penting daripada hasil. Komposisi: Proses, Hasil dan Visi (*Process, Outcome and Vision*), Integrasi Proses (*Process Completeness*), Peningkatan Kesadaran (*Awareness Raising*), Partisipasi (*Participation*), Kerjasama dan Konsensus (*Cooperation and Consensus*), Gerakan Pembangunan (*Pace Development*), Perdamaian dan non-kekerasan (*peace and nonviolence*), inklusi, pembangunan komunitas (*community building*).

Prinsip Global Dan Lokal

Kelima, hubungan global dan lokal sekarang menjadi bagian nyata dari semua praktik pengembangan masyarakat dan perlu menjadi bagian dari kesadaran semua pekerja masyarakat. Prinsip global dan lokal dalam hal ini adalah memadukan praktik global dengan lokal dan anti kolonial.

Bina Antarbudaya kedatangan relawan atau pelajar internasional setiap tahun untuk tinggal dan belajar di sekolah Indonesia selama sekitar 10 bulan. Selama tinggal di sini, setiap pelajar/relawan internasional tinggal bersama *host family* (keluarga angkat) dan hidup seperti pelajar/ relawan lokal.

Sebagai aturan umum, keluarga yang ingin, termotivasi, dan memiliki waktu untuk memperkenalkan kehidupan keluarga mereka kepada peserta program dapat menjadi keluarga angkat. Namun, berdasarkan pengalaman YBA, ada beberapa kriteria ideal yang harus dimiliki oleh keluarga angkat di masa depan:

1. Seluruh keluarga menerima siswa/relawan internasional di rumah dan menyatakan minat serta kesediaannya untuk menjadikan anggota keluarga.
2. Kedua orang tua atau salah satu berusia di atas 30 tahun.
3. Keluarga memiliki anak laki-laki/perempuan berusia 15 sampai 18

- tahun atau kira-kira seusia dengan pelajar/relawan internasional di keluarga.
4. Terdapat anggota keluarga dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris.
 5. Keluarga tetap menjaga nilai dan budaya lokal Indonesia, tetapi juga bisa belajar tentang budaya global.
 6. Keluarga dapat dan bersedia menghabiskan waktu bersama siswa/relawan luar negeri dan bersedia berbagi waktu, kasih sayang, dan kesempatan.
 7. Keluarga memiliki ikatan keluarga yang hangat, terbuka dan kuat.

Sebuah keluarga bisa mengikuti program hosting setelah melalui beberapa tahapan. Pertama tentunya mendaftarkan keluarga dan mengisi data keluarga yang diminta dengan benar dan lengkap. Setelah proses pendaftaran selesai dan data masuk dalam database baru kemudian bisa segera difollow up.

Relawan YBA di cabang tempat tinggal calon keluarga angkat akan segera menghubungi mereka untuk melakukan wawancara keluarga di rumah. Setelah wawancara keluarga, calon keluarga angkat akan diberitahu untuk mengisi ulang pendaftaran online dan menambahkan informasi yang diperlukan. Jika organisasi menemukan profil pelajar/ relawan luar negeri yang cocok dengan profil keluarga angkat, staf atau relawan YBA akan mengirimkan profil siswa / relawan luar negeri yang akan bergabung dengan keluarga angkat. Seluruh calon keluarga angkat wajib mengikuti orientasi keluarga angkat yang diselenggarakan oleh YBA di cabang, setidaknya dua minggu sebelum pelajar/relawan internasional datang di Indonesia.

Di sisi lain, peserta yang dapat ditampung tidak hanya siswa Program Pertukaran Pelajar AFS dan YES yang berusia 15 sampai 18 tahun, tetapi juga para relawan yang mengikuti program pengabdian masyarakat dan berusia 18 tahun ke atas.

Selanjutnya akan dijabarkan penerapan dan analisis 26 prinsip *community development* Jim Ife pada program kegiatan hosting di Yayasan Bina Antarbudaya Chapter Semarang.

Tabel 1. Implementasi Prinsip Ekologis Pengembangan Masyarakat

No	Prinsip	Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini
1	Holisme	Setiap tindakan yang kita lakukan dapat mengubah dunia.	Kata-kata dan tindakan <i>host family</i> dapat menjadi hal kecil yang membawa lahirnya pemimpin masa depan.
2	Keberlanjutan	Prosesnya harus berkelanjutan dan bertahan dalam jangka panjang.	Proses interaksi antara <i>Host family</i> dengan siswa pertukaran pelajar bukan hanya sebentar akan tetapi pada year program mereka hidup Bersama selama satu tahun dan tetap berhubungan setelah itu. Sukarelawan pendukung memandu keluarga dan siswa melalui kegiatan Perjalanan Pembelajaran Antarbudaya Keluarga Tuan Rumah YBA untuk membantu menjadikan seluruh pengalaman lebih bermakna dan bertahan lama.
		Menghargai perbedaan,	Semua jenis keluarga

3	Keanekaragaman	tidak ada jawaban tunggal, Apa yang benar menurut suatu masyarakat mungkin berbeda untuk masyarakat lainya.	didorong untuk melamar menjadi <i>host family</i> ; tidak ada keluarga angkat YBA yang “khas”. Beberapa keluarga YBA memiliki anak di rumah. Beberapa adalah pasangan sesama jenis. Lainnya bersarang kosong dengan anak-anak dewasa atau pasangan tanpa anak sama sekali. Dewasa lajang dan orang tua tunggal juga dipersilakan. Bahkan keluarga yang sibuk pun menemukan waktu untuk menikmati menjamu siswa YBA.
4	Perkembangan Organik	Pekerja masyarakat menghormati dan menghargai keunikan masyarakat dan mengizinkan serta mendorongnya untuk berkembang dengan caranya sendiri.	Saat siswa asing datang ke Indonesia harus menghormati adat istiadat yang ada disini, walaupun berbeda latar belakang agama, ras maupun suku.
5	Keseimbangan	Seimbang dalam bidang social, politik , ekonomi, lingkungan, budaya, dan pengembangan personal spiritual	Penentuan host family juga mempertimbangkan keenam aspek disamping agar pas dan sesuai.

Sumber: Analisis Penulis

Tabel 2. Implementasi Prinsip Keadilan Sosial dan HAM
Pengembangan Masyarakat

No	Prinsip	Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini
6	Mengatasi struktur yang merugikan	Relawan perlu membantu orang berbicara tentang masalah dan ketakutanya dan mulai menemukan hal-hal bersama, bukan secara individu, sehingga mereka dapat melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri.	Keluarga besar YBA mengatasi penindasan struktural baik itu gender, golongan, usia, ras maupun etnis secara bersama-sama dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga host.
7	Mengatasi wacana ² yang merugikan	Pekerja Masyarakat selayaknya mampu mencari dan membongkar wacana-wacana kekuasaan yang merugikan dan memahami bagaimana wacana-wacana ini secara efektif mengistimewakan, memberdayakan beberapa, dan mengecilkan dan melemahkan yang lain.	Relawan YBA memberikan dukungan pada siswa asing maupun relawan asing yang datang untuk tinggal di Indonesia tanpa membedakan perlakuan ataupun melemahkan mereka berdasarkan asal, usia dan faktor lainnya.
8	Pemberdayaan	Dengan menciptakan struktur berbasis komunitas yang lebih efektif, ini membantu membangun komunitas yang lebih adil secara sosial dan memberdayakan anggota komunitas lokal.	Memberikan kesempatan yang sama untuk semua yang terlibat dalam program mendapatkan kebermanfaatn pemahaman antarbudaya.
		Hak asasi manusia baik negatif (melindungi HAM)	Selama program hosting siswa asing memiliki

9	Hak Asasi Manusia	<p>dan positif (mempromosikan HAM) dan penting untuk kegiatan masyarakat. Dalam arti negatif, proyek pengembangan masyarakat harus sejalan dengan prinsip HAM seperti hak atas pekerjaan yang layak, kebebasan berserikat dan kebebasan berbicara (dokumen PBB).</p>	<p>kebebasan dalam melakukan segala sesuatunya dengan koridor aturan YBA demi kebaikan dan keamanan semua pihak. Saling menghormati dan menghargai segala norma yang ada baik host family maupun siswa asing tanpa melanggar hak dan kebebasan masing-masing individu. Dan membangun komitmen dan kesepakatan bersama akan aturan-aturan tertulis maupun tidak.</p>
10	Definisi kebutuhan	<p>Fokus utama dari praktik sosial yang sangat mendasar adalah untuk membantu orang lebih memahami kebutuhan "nyata" mereka tanpa mengikuti definisi kebutuhan orang lain, yaitu berpartisipasi dalam dialog.</p>	<p>Proses seleksi dan memasang calon host family dengan calon siswa asing berdasarkan kebutuhan mereka. Pada form awal maupun tahap wawancara YBA berusaha menggali secara bottom up bukanya menentukan langsung secara top down.</p>

Sumber: Analisis Penulis

Tabel 3. Implementasi Prinsip Menghargai Lokal Pengembangan Masyarakat

No	Prinsip	Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini
11	Menghargai pengetahuan lokal	Keahlian dan pengetahuan lokal memiliki nilai terbesar dalam memberikan informasi <i>community development</i> , dan pengetahuan dan keahlian lokal tidak tunduk pada pengetahuan dan keahlian luar, tetapi diidentifikasi dan diterima. Tentu saja, pengetahuan eksternal mungkin perlu, tetapi sebainya menjadi pilihan terakhir setelah pengetahuan dalam komunitas lokal tidak tersedia.	Saat timbul permasalahan selama program hosting baik itu di sekolah maupun di keluarga, maka penanganan masalah akan diutamakan timbul dari internal keluarga maupun sekolah itu sendiri. Relawan YBA hanya mendampingi dan membantu Ketika permasalahan tidak dapat mereka selesaikan sendiri secara internal. Pengalaman, pengetahuan pihak-pihak yang terlibat di sekolah maupun keluarga menjadi yang paling bernilai.
12	Menghargai budaya lokal	Selama budaya lokal diakui dan didukung sebagai bagian dari proses pengembangan masyarakat, kami percaya bahwa penghormatan terhadap budaya lokal diperlukan untuk mengatasi masalah globalisasi budaya	Meskipun menggunakan Bahasa Inggris atau Bahasa asing lainnya saat program hosting di sekolah maupun di keluarga dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan baru untuk pihak yang terlibat

		yang mengesampingkan identitas budaya lokal. Prinsip-prinsip budaya lokal konsisten dengan prinsip-prinsip HAM, keberlanjutan dan kebutuhan untuk mengatasi struktur dan wacana yang merugikan.	akan tetapi siswa asing dituntut untuk mempelajari Bahasa Indonesia ataupun Jawa guna memperlancar kehidupannya sehari-hari. Begitupun untuk makanan dan kebiasaan maka akan mengikuti budaya lokal.
13	Menghargai sumber daya lokal	Menurut Prinsip 10, gagasan kemerdekaan berarti bahwa masyarakat harus berusaha untuk menggunakan sumber daya sendiri (keuangan, teknis, alam, manusia) daripada mengandalkan dukungan eksternal meningkat.	<i>Host family</i> memperlakukan siswa asing sebagai bagian dari keluarganya sendiri termasuk kebutuhan makan dipenuhi oleh orangtua kepada anaknya. Siswa datang dengan uang belanja sendiri untuk kegiatan sosial dan sekolah, pakaian, dll. Keluarga angkat tidak perlu menyediakan uang belanja atau tunjangan. Sedangkan biaya sekolah akan dibahas bersama. Siswa YBA memiliki asuransi kesehatan, jika perawatan kesehatan diperlukan.
		Bagaimanapun, penduduk setempatlah yang paling	Walaupun relawan YBA turut mendampingi

14	Menghargai keterampilan masyarakat lokal	mengetahui situasi di masyarakat dan wilayahnya, dan keterampilan yang dikembangkan secara lokal dapat menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan di lingkungan.	proses hosting akan tetapi kemampuan dan ketrampilan keluarga bersama-sama siswa asing menjadi solusi utama dalam pelaksanaan program. Relawan tidak boleh meniadakan fungsi utama host family dalam program melainkan saling melengkapi.
15	Menghargai proses lokal	Struktur dan proses berbasis komunitas diperhitungkan karena semuanya tidak berfungsi jika dipaksakan secara eksternal. Sebagai alternatif yang lebih rasional. Pendekatan pengembangan masyarakat perlu datang dari dalam masyarakat dengan cara yang spesifik konteks dan sangat sensitif.	Setiap keluarga pastinya memiliki kebijakan dan aturannya sendiri yang dirasa paling cocok dengan kondisinya. YBA tidak dapat memaksakan keluarga untuk sama dalam menangani setiap siswa asing. Kecuali hal-hal mendasar yang berkaitan dengan keadilan social dan Hak Asasi Manusia segala proses diharapkan berasal dari peserta program.
16	Partisipasi	Budaya masyarakat, tradisi dan lingkungan. Pekerja di masyarakat perlu memahami kompleksitas partisipasi, cara yang ditempuh, dan beragam	Relawan YBA memahami dan menghargai kekurangan dan kelebihan setiap individu yang terlibat dalam program hosting.

		<p>tujuan yang ingin dicapai. Kelas, jenis kelamin, ras / etnis harus dipertimbangkan saat masuk (untuk menjaga inklusi)</p> <p>Analisis partisipasi sebagai pemberdayaan sangat penting. Memahami seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan partisipasi dan penggunaan keterampilan merupakan inti dari proses <i>bottom-up</i>.</p>	<p>Demi meningkatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat baik itu keluarga, sekolah, siswa dan lingkungan. Didukung oleh sukarelawan dan staf yang berdedikasi, keluarga angkat membantu siswa menavigasi sekolah dan komunitas baru mereka, berteman, belajar bahasa, dan menikmati tahun mereka di luar negeri. Berbagi budaya dan tradisi membantu ikatan keluarga, menciptakan persahabatan seumur hidup.</p>
--	--	--	--

Sumber: Analisis Penulis

Tabel 4. Implementasi Prinsip Proses Pengembangan Masyarakat

No	Prinsip	Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini
17	Proses, hasil dan visi	Mengutamakan visi, bukan hasil; hal ini memang kurang spesifik dibandingkan gagasan mengenai hasil, tapi masih menekankan pentingnya menempatkan gagasan	Dalam rangka mencapai visi YBA “Pemimpin Masa Depan yang mengangkat harkat, martabat serta kesejahteraan bangsa Indonesia dan umat

		mengenai dimana kita mulai, dan untuk apa semua itu, serta penting bahwa ide ini dicakup dalam mempertimbangkan proses, karena ide tersebut memberikan visi yang menetapkan tujuan bagi proses.	manusia”. Relawan YBA fokus pada proses menjalani misi “Mengabdikan untuk mengangkat harkat, martabat serta kesejahteraan bangsa Indonesia dan umat manusia”.
18	Integritas proses	Proses dalam <i>community development</i> lebih penting daripada hasil, tetapi dalam pengertian yang sesungguhnya hasil tetap penting; bagaimanapun, tujuan diharapkan untuk membangun proses masyarakat yang dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, proses harus sesuai dengan, dan juga mencerminkan harapan visi atau hasil, menyangkut isu keberlanjutan, keadilan sosial dan HAM.	Relawan beserta seluruh pihak yang terlibat dalam proses hosting baik itu sekolah, siswa, keluarga maupun lingkungan mencerminkan sikap untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai bersama sesuai visi. Proses dikenakan batasan-batasan prinsip ekologis dan keadilan sosial, dan dievaluasi secara kritis, untuk apa proses tersebut.
19	Menumbuhkan kesadaran	Pekerja masyarakat perlu dapat melihat dan menggunakan peluang apapun untuk melakukan penumbuhan kesadaran secara informal, selama percakapan sehari-hari	Seluruh pihak dalam proses hosting Bersama dengan relawan YBA berdiskusi, berbicara, berbagi gagasan mereka, harapan, kecemasan,

		dengan orang2 di masyarakat. Ada empat aspek penumbuhan kesadaran, yaitu: hubungan personal dan politik, mengembangkan hubungan dialogis, berbagi pengalaman tentang penindasan, dan membuka kemungkinan untuk bertindak.	keberhasilan, dan kekecewaan; dan berbagi pengalaman. Hal ini sangat penting bagi proses penumbuhan kesadaran dan untuk membangun solidaritas di antara pihak yang terlibat.
20	Kerja-sama dan konsensus	Pendekatan ekologis dan non-kekerasan menekankan pentingnya struktur kooperatif daripada struktur kompetitif. Oleh karena itu, tidak perlu membentuk struktur atau proses alternatif berdasarkan kerjasama. Konsensus atau konsensus pengambilan keputusan konflik.	Program hosting seharusnya bertujuan untuk membangun struktur dan proses alternatif, yang didasarkan pada kerja sama, bukan konflik. Pembuatan keputusan mufakat merupakan salah satu dari tujuan ini, selain itu termasuk pembentukan kerja sama dalam berbagai bentuknya
21	Langkah pembangunan	Konsekuensi alamiah dari pembangunan organik adalah masyarakat itu sendiri yang harus menentukan langkah-langkah pembangunan. Mencoba untuk	Relawan dan staf YBA lokal yang berpengalaman mempersiapkan keluarga angkat menghadapi tantangan menyambut anggota baru dari negara

		"mempromosikan" proses pengembangan masyarakat terlalu cepat dapat membahayakan proses dan menyebabkan masyarakat kehilangan rasa kepemilikan dan keterlibatan pemangku kepentingan.	lain. Kontak darurat lokal 24 jam dan dukungan tambahan dari kantor nasional YBA tersedia. Relawan dan staf terlatih akan mendukung selama program hosting, termasuk bertemu dengan keluarga angkat setidaknya sebulan sekali untuk memastikan semuanya berjalan lancar.
22	Perdamaian dan anti- kekerasan	Dalam konteks ini, prinsip non-kekerasan lebih dari sekadar pembebasan kekerasan fisik di antara orang-orang. Konsep kekerasan struktural berarti bahwa struktur dan institusi sosial dapat dilihat sebagai bentuk kekerasan. Proses ini harus bekerja secara paralel, tidak bersaing, menengahi, dan tidak menghadapi, daripada mengklaim, menyerang, merangkul, atau menghilangkan.	YBA menghargai pendapat, pemahaman, sikap, keputusan maupun perilaku msding-msding individu sehingga tidak ada pemaksaan dalam setiap programnya. Selalu mengedepankan <i>win-win solution</i> apabila terdapat hambatan dan permasalahan antara sekolah, keluarga, siswa, relawan, staf, lingkungan, pemerintahan dll.
		Proses yang sedang berlangsung selalu mencoba memasukkan,	YBA selalu mencoba untuk merangkul bukan mengucilkan; semua

23	Inklusivitas	bukan mengecualikan. Pada dasarnya setiap orang dihormati dan orang mungkin memiliki kesempatan untuk mengubah posisi mereka, bahkan jika mereka tidak setuju. Untuk membebaskan mereka dari masalah tanpa "wajah kekalahan".	orang pada hakikatnya dihargai sekalipun mereka menyampaikan pandangan yang bersebrangan Semua jenis keluarga didorong untuk melamar menjadi <i>host family</i> ; tidak ada keluarga angkat YBA yang "khas".
24	Membangun masyarakat	Kami terus berupaya untuk memperkuat ikatan di antara anggota kami dan membuat orang sadar bahwa mereka menekankan konsep saling ketergantungan (<i>interdependence</i>) daripada ketergantungan (<i>dependence</i>) dan kemandirian (<i>independence</i>). Jadi perkuat hubungan antara orang-orang melalui membangun komunitas	YBA berorientasi pada kelompok (<i>group-oriented</i>), bukan individualis, dan upaya membentuk <i>team-build- ing</i> . Mendorong kewajiban timbal balik dan saling menguntungkan dalam <i>hosting</i> . Keluarga, siswa, relawan, sekolah saling membantu satu dengan lainnya.

Sumber: Analisis Penulis

Tabel 5. Implementasi Prinsip Global dan Lokal Pengembangan Masyarakat

No	Prinsip	Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini
----	---------	---------------	------------------

25	Menghubungkan yang global dan lokal	Dalam memahami suatu masyarakat, seorang pekerja masyarakat harus mampu memahami global maupun lokal, dan bagaimana keduanya saling mempengaruhi/berinteraksi	YBA memiliki prinsip berfikir global bertindak lokal dalam setiap program kegiatannya. Menghargai nilai-nilai global yang ada dan menerapkannya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di lokal. Pemahaman atas globalisasi dan pengaruhnya, dan kesadaran tentang bagaimana isu-isu internasional memengaruhi penerapannya
26	Praktik anti-kolonialis	Pekerja Masy. perlu melawan praktek kolonialis	Siswa pertukaran Ketika berada di negara kita menjadi kaum minoritas. Keluarga angkat, sekolah, relawan maupun lingkungan tidak boleh memaksakan siswa untuk berubah faham maupun keyakinan agama, pandangan politik dsb.

Sumber: Analisis Penulis

Linking The Global And The Local

Dalam dunia yang terglobalisasi, praktik *community development* tidak dapat mengabaikan isu-isu global, tetapi harus mengangkat keprihatinan lokal. Kekuatan global mempengaruhi semua masyarakat dan berkontribusi pada masalah dan masalah yang

mereka hadapi. Oleh karena itu, untuk memahami masyarakat, pekerja harus mampu memahami global dan lokal, dan bagaimana mereka saling mempengaruhi dan berinteraksi. Akan tetapi ini bukan hanya persoalan pemahaman, dan hubungan global dan lokal harus bergerak melebihi analisis untuk tindakan. Komunitas diperlukan kemampuannya menghubungkan lokal dan global dalam berbagai cara yang akan mengarah pada perubahan.

Implementasi di tingkat lokal dan global merupakan tantangan besar bagi relawan. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan *bottom-up* untuk globalisasi, restrukturisasi agenda globalisasi untuk kepentingan orang dan masyarakat secara keseluruhan, dan menghubungkannya dengan tindakan akar rumput global untuk perubahan. Ada banyak pendekatan yang dapat diterapkan pada praktik global/lokal, karena *community development* tidak memiliki pendekatan yang sederhana untuk banyak hal, tetapi isu yang berbeda dalam konteks yang berbeda menyebabkan pendekatan implementasi yang berbeda. Contohnya, penggunaan teknologi komputer dan internet mungkin sangat sesuai untuk satu konteks dan tidak cocok untuk konteks yang lain.



Gambar 1. Program Pertukaran Pelajar J-ASEAN 1 Tahun 2001
(Sumber: Dokumen Penulis)

Hal yang penting bagi relawan adalah selalu menyadari hubungan antara lokal dan global, dan mencari cara menghubungkan masyarakat dengan gerakan global untuk perubahan.



1.881 suka

afsprograms Happy Pride month! AFS is proud to support and celebrate the LGBTQ+ community, many of whom are important and valued members of the AFS Global Family.

Here's what we have done, and what we still have to do to make AFS a truly welcoming place for everyone at the link in our bio!

Gambar 2 AFS support LGBT community

Sumber: Instagram @afsprograms

Saat ini AFS internasional sebagai afiliasi dari YBA memiliki

prinsip *no one left behind*, mendukung dan menghargai LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Dimana prinsip itu kurang tepat untuk dipraktikkan di Indonesia.

Sebagai gambaran dari buku Husnaini Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau yang biasa disebut dengan LGBT, pada Sabtu, 27 Juni 2015 secara resmi Amerika Serikat mengesahkan perkawinan sesama jenis. Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang sekarang telah menjadi Presiden secara terbuka mengakui peran tokoh-tokoh yahudi dalam mengubah persepsi bangsa Amerika tentang LGBT. Maka jadilah amerika serikat sebagai negara ke-21 yang secara resmi mengesahkan perkawinan sesama jenis.

Indonesia sebagai negeri muslim terbesar pun tidak lepas dari tantangan global berupa LGBT ini. Pada tahun 2006, di kota Yogyakarta, secara resmi dideklarasikan Piagam Hak Asasi Manusia bertajuk *The Yogyakarta Principles*, oleh tokoh-tokoh HAM dunia. Isi dari piagam tersebut menyerukan diakhirinya diskriminasi atas dasar gender dan orientasi seksual. Piagam ini telah menjadi pedoman bagi gerakan aktivis LGBT seluruh dunia, sehingga kampanye legalisasi LGBT di Indonesia atas dasar HAM (sekular) pun terus bergema kemana-mana dan dukungan negara dan lembaga donor asing dilakukan secara terang-terangan.

AFS yang berpusat di Amerika Serikat tentunya mendukung LGBT, sedang Yayasan Bina Antarbudaya yang berpusat di Indonesia dengan jumlah muslim mayoritas belum mengeluarkan statement tentang hal ini. Akan tetapi individu-individu yang menjadi relawan dan keluarga besar YBA memiliki pandangan yang berbeda-beda. YBA menghargai setiap pandangan relawan dan keluarga besar YBA tanpa memaksakan untuk menerima LGBT.

Praktik Anti Penjajah (*Anti-Colonialist Practice*)

Kolonialisme dapat mempengaruhi relawan dalam banyak

cara. Kolonialisme paling terlihat dalam konteks ini, tetapi tidak terbatas pada relawan internasional. Relawan dapat menjajah orang-orang yang bekerja dengan mereka, mengambil alih agenda, merusak budaya dan pengalaman komunitas, dan menghilangkan identitas orang-orang. Kolonialisme bisa menjadi ideologi yang sangat menggiurkan; hanya ada langkah pendek dari keyakinan bahwa sebagai pekerja masyarakat 'saya mempunyai sesuatu untuk ditawarkan' dan dari penghargaan terhadap latar belakang budaya seseorang dan pengalamannya untuk praktik yang menjajah yang



menekekalkan dominasi kaum kolonialis.

Gambar 3. AFS Families Say It All (Sumber: <https://afs.org/host-an-afser/>)

Relawan perlu menghindari praktek kolonialis:

1. Melalui kesadaran politik, kesadaran diri yang kritis (*self-awareness*), dan perenungan.
2. Relawan yang berada dalam budaya dominan atau menguasai

- perlu menjabarkan implikasinya.
3. Menyediakan ruang untuk memunculkan wacana dan tindakan pilihan, mengungkapkan perlawanan alamiah dari pihak yang terjajah
 4. Dengan mendengar, melangkah mundur, dan belajar, sebelum terburu-buru mengambil keputusan melakukan sesuatu.
 5. Menjaga solidaritas dengan komunitas dan berbagi agenda umum
 6. Bekerja dengan komunitas
 7. Menempatkan diri dalam posisi komunitas yang dikenai pengembangan masyarakat, dan bertanya bagaimana rasanya bila situasinya terbalik.

Godaan kolonialisme sangatlah kuat, dan mudah meyakinkan diri sendiri bahwa siapa pun bekerja 'untuk kepentingan' terbaik masyarakat sebagai sasaran kerjanya. Karena kebanyakan-praktik kolonialis dilakukan dari maksud yang terbaik, mungkin akan sangat sulit untuk mengidentifikasi dan meragukannya. Akan tetapi sangat penting dilakukan jika suatu program pengembangan masyarakat benar-benar diharapkan dapat memberdayakan dan ingin mengatasi struktur dan wacana penindasan. Di sini, pemikiran post-kolonial merupakan perspektif penting bagi pekerja masyarakat.

Kesimpulan

Yayasan Bina Antarbudaya telah menerapkan sebagian besar prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yang terbagi dalam 5 Dimensi menurut Jim Ife. Dan fokus dalam penerapan Prinsip global dan lokal dalam hal ini adalah Mengkaitkan Global dan Lokal (*Linking the global and the local*) dan Praktik Anti Penjajah (*Anti-colonialist practice*).

DAFTAR PUSTAKA

Wikipedia.org. (2022, 26 April). Bina Antarbudaya. Diakses pada 29 April 2022, dari

https://id.wikipedia.org/wiki/Bina_Antarbudaya

Yayasan Bina Antarbudaya. (2014). Bina Antarbudaya. Diakses pada 29 April 2022, <http://www.bina-antarbudaya.or.id/en/home>

AFS Indonesia. (2022). AFS Indonesia. Diakses pada 29 April 2022, <https://afsindonesia.org/>

Retno dkk (2021). Rencana kerja chapter Semarang 2022-2023 versi: draft 1.0 terakhir direvisi: 11 April 2021. Semarang: YBA Chapter Semarang.

Ife, J. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*. Australia: Longman.

Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENYELAMATAN KARST GOMBONG SELATAN

Ery Purwanti

Program Studi D III Keperawatan, Universitas Muhammadiyah

Gombong

Email: stimugoery20@gmail.com

Bentang Alam Karst Gombong Selatan dan Manfaatnya

Karst adalah bentang alam dengan ciri minimnya aliran permukaan dan dijumpai aliran bawah permukaan. Fungsi esensial dari karst menurut Ford dan William adalah sebagai sumber air bersih sebanyak 25 persen populasi dunia dimana sumber air tersebut tersimpan dalam akuifer karst (Myloie, 2011). Salah satu kawasan karst di Indonesia yang memiliki karakteristik fungsi penyimpan air adalah kawasan Karst Gombong Selatan di Kebumen Jawa Tengah tepatnya kawasan karst di Desa Sikayu Kecamatan Buayan. Seluruh masyarakat di Desa Sikayu bergantung pada mata air dari karst untuk memenuhi kebutuhan air mulai dari kebutuhan domestik, irigasi pertanian bahkan jangkauannya lebih luas lagi yakni sebagai sumber mata air PDAM (perusahaan daerah air minum) yang memenuhi pasokan air di daerah sekitar Buayan dan Kebumen bagian selatan

yang bersumber dari mata air karst di Kalisirah dan Jumbeng Desa Sikayu (Kelompok Studi Karst UGM, 2019). Penelitian lain mengenai karakteristik keunikan Karst Gombang Selatan khususnya di Desa Sikayu pernah dilakukan oleh tim peneliti geologi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jogjakarta dengan hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat 122 gua bawah tanah, salah satunya Gua Jeblosan yang terdapat mata air Kalisirah dan merupakan akuifer karst yang tidak pernah mengalami kekurangan debit air dalam musim kemarau sekalipun. Artinya karakteristik karst Gombang Selatan khususnya di Desa Sikayu mampu menjadi sumber air utama yang keberadaannya harus dilindungi (Triadi et al., 2021).

Musuh terbesar Bentang Alam Karst Gombang Selatan adalah Pabrik Semen

Akuifer karst yang menjadi sumber air di Desa Sikayu menjadi sumber utama irigasi masyarakat, memiliki ancaman kerusakan yang disebabkan oleh rencana penambangan yang dilakukan oleh Pabrik Semen (PT SG) yang menambang di Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gombang Selatan tepatnya di Gunung Karst Sikayu. Keberadaan rencana tambang oleh Pabrik Semen yang akan menambang Gunung Karst Sikayu tersebut mendapatkan respon perlawanan dari masyarakat yang berada di KBAK yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombang (PERPAG). Organisasi yang terbentuk di Desa Sikayu ini kemudian mewadahi perjuangan masyarakat dengan visi penyelamatan kawasan karst Gombang selatan. Anggota PERPAG terdaftar dalam Kementerian Hukum dan HAM sebagai organisasi masyarakat yang memiliki anggota berjumlah 2000 orang dan terus berkembang seiring upaya ekspansi basis massanya.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh PERPAG yang menggandeng berbagai elemen mulai dari perguruan tinggi yakni pusat studi karst Fakultas Geologi UGM, Pusat Studi Geologi

Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, yang menyatakan hasil kajian bahwa fungsi utama Karst Gombang dengan melihat karakteristik karstnya adalah menyerap air hujan di kawasan karst, menyimpan dan mendistribusikan air. Fungsi tersebut akan terancam jika penambangan dilakukan. Jika tambang tetap dilakukan setidaknya 82.692 jiwa yang bergantung pada zona inti karst Gombang (8,27 % total penduduk Kebumen) dan sekurangnya 1.142.000 jiwa dalam zona perikarst Gombang (dari 33 Kecamatan dan 4 Kabupaten) akan kehilangan sumber mata air. Adapun yang paling terdampak adalah di Desa Sikayu dan Banyumundal yang merupakan desa yang memiliki potensi pengembangan komoditas pertanian yakni padi sawah, jagung, ubi kayu, padi ladang, kacang tanah, kacang panjang, terong dan kacang hijau. PERPAG yang berdiri di Desa Sikayu memperjuangkan penolakan terhadap penambangan semen oleh Pabrik Semen, karena desa Sikayu memiliki luas areal tanam dan panen komoditas padi sawah yang mencapai 87, 51 dengan produksi 1.198.531 Ton, sementara untuk Banyumundal luas areal tanam dan panen 60 Ha dengan produksi 851.040 ton. Selain itu juga di desa Sikayu terdapat komoditas kedelai dengan luasan 50 Ha dengan produksi panen mencapai 56,20 ton yang sekaligus menjadi desa dengan penghasil komoditas kedelai terbesar di Kecamatan Buayan (Badan Pusat Statistik, 2020).

Profil singkat Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombang (PERPAG) dan Gerakannya

Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombang (PERPAG) adalah organisasi masyarakat yang lahir di Desa Sikayu Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen sebagai wadah penolakan terhadap penambangan Pabrik Semen yang telah memiliki izin operasi di Desa Nagaraji dan rencana tambang batu gamping sebagai bahan utama semen di Gunung Karst wilayah Desa Sikayu. PERPAG telah terdaftar di kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia

sebagai organisasi masyarakat yang memiliki visi dan misi penyelamatan lingkungan hidup. Selain itu PERPAG juga terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sebagai organisasi masyarakat yang memiliki berbagai kegiatan dan riset di bidang lingkungan hidup khususnya karst.

Anggota PERPAG tersebar di seluruh wilayah Desa Sikayu dengan keanggotaan lebih dari 2000 orang. Dalam melakukan kegiatan aksi aksinya PERPAG telah menggandeng banyak elemen mulai dari akademisi yakni pusat studi karst Fakultas Geografi UGM, pusat studi geologi UPN Veteran Yogyakarta, LBH Yogyakarta, AGRA Jawa Tengah, serta berbagai elemen masyarakat baik individu maupun masyarakat dan komunitas yang konsern terhadap isu lingkungan hidup.

Dukungan lain yang didapatkan PERPAG mengenai upaya penolakan Penambangan semen oleh Pabrik Semen juga datang dari Prof. Emil Salim yang secara tegas menyatakan bahwa upaya penambangan karst di selatan Gombong akan sangat merusak fungsi karst itu sendiri. Cara pandang pengusaha semen yang beranggapan pembangunan pabrik bermanfaat bagi daerah karena mengurangi kemiskinan dan menaikkan pendapatan asli daerah adalah pandangan keliru, justru dengan adanya pembangunan pabrik semen akan merusak gua karst Gombong yang disana terdapat habitat tempat bersarang burung walet dan kelelawar serta menghancurkan fungsinya sebagai “waduk alam” penyimpan air (Salim, 2013).

PERPAG menjadi garda terdepan upaya penolakan terhadap Pabrik Semen yang direncanakan didirikan di Desa Sikayu. Selain upaya penolakan dalam berbagai aksi dan kampanye, PERPAG juga melakukan berbagai upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi lokal sebagai wujud penentangan terhadap paradigma pembangunan Pabrik Semen yang menganggap bahwa dengan adanya Pabrik Semen perekonomian masyarakat sekitar terangkat.

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Penyelamatan Karst Gombang Selatan

Atas dasar keadaan realita di lapangan dan didukung dengan berbagai studi yang dilakukan oleh ahli yang merangkul berbagai perguruan tinggi, maka PERPAG menjadi organisasi pertama dan terbesar di Kebumen yang tetap teguh melawan upaya perusakan lingkungan karst. Upaya penolakan dilakukan dengan merangkul berbagai elemen masyarakat yang berangkat dari berbagai latar belakang baik di Desa Sikayu sendiri maupun dukungan dari berbagai elemen masyarakat dari berbagai wilayah. Mulai dari Jatam (Jaringan Advokasi Tambah), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat yang sama-sama menjadi korban tambang semen serta organisasi keagamaan. Selain itu upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi sosial juga dilakukan untuk meneguhkan keyakinan masyarakat bahwa keberadaan Pabrik Semen bukan mengarah kepada kesejahteraan ekonomi namun malah merusak sumber kehidupan masyarakat yang telah lama bertani dan juga usaha perikanan yang mengandalkan sumber air dari karst Gunung Sikayu.

Fenomena penolakan Penambangan Semen di Gombang Selatan tersebut merupakan salah satu dari banyaknya potret konflik yang terjadi di Indonesia akibat adanya penambangan untuk pembangunan. Perspektif pembangunan yang tidak mengedepankan keberlanjutan lingkungan hidup justru akan merusak lingkungan itu sendiri. Pembangunan pertambangan khususnya banyak menimbulkan kerusakan lingkungan. [Berdasarkan data JATAM](#), setidaknya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir melaporkan terjadinya 45 konflik pertambangan, dan 22 kasus merupakan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan. Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut terjadi akibat eksploitasi kekayaan alam yang berorientasi pada pembangunan, (Listiyani, 2017). Pembangunan yang tidak mengedepankan *ekosentris* (berpusat pada

ekologi) akan menyebabkan krisis ekologis, lebih dari itu menurut Ife (2008) pembangunan yang mengeskploitasi alam selain menimbulkan krisis ekologis juga menyebabkan krisis keadilan sosial bahkan berpotensi melanggar HAM. Kegiatan-kegiatan pembangunan pada berbagai sektor telah banyak mengakibatkan kerusakan alam yang serius di darat dan di laut, dan pada saat yang sama telah memporandakan sistem-sistem sosial yang ada di Indonesia (Ife, 2008).

Kasus penolakan Pabrik Semen oleh organisasi masyarakat PERPAG di Desa Sikayu yang dilakukan dengan berbagai upaya aksi dan pemberdayaan muncul akibat satu paradigma kesadaran masyarakat yang mengalami ketakutan akan adanya krisis ekologis yang dalam konsep berfikir Ife (2008) adalah satu bentuk landasan pengembangan masyarakat perspektif ekologis. Artinya proses pengembangan yang ada di masyarakat muncul dilandasi akibat permasalahan ekologis yang kemudian menggerakkan masyarakat khususnya pekerja masyarakat untuk menggunakan pengetahuannya yang berbasis landasan alasan kerusakan ekologis sebagai salah satu kekuatan untuk menolak keberadaan tambang semen. Perspektif ekologis menjadi satu landasan untuk pengembangan masyarakat (Ife, 2008).

Pengembangan Masyarakat oleh PERPAG

Menurut Ife (2002), prinsip-prinsip dalam pengembangan masyarakat meliputi prinsip ekologis, prinsip keadilan sosial, prinsip menghargai lokal, prinsip proses, serta prinsip global dan local yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Pengembangan masyarakat merupakan komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah mengenai pilihan nyata menyangkut masa depannya. Masyarakat tersebut umumnya adalah terdiri dari masyarakat kelas bawah yang tidak mampu mengontrol sarana

produksi yakni kaum buruh dan tani, nelayan dan masyarakat marginal lainnya. Kegiatan pengembangan masyarakat difokuskan terhadap upaya menolong orang-orang lemah yang memiliki minat untuk bekerja sama dalam kelompok, melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dan problematika sosial. Pengembangan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui program-program pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh daya dukung dan kekuatan dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu juga dilakukan dengan kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut dipenuhi oleh pihak yang bertanggung jawab. Artinya pengembangan masyarakat dapat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan individu-individu dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya (Zubaedi, 2013).

Pengembangan masyarakat meliputi usaha memberdayakan masyarakat untuk memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat untuk menciptakan solidaritas anggota masyarakat, menumbuhkan sikap semangat kebersamaan, serta membantu berkomunikasi dengan pihak lain yang didasari penuh pemahaman yang kemudian ditindaklanjuti melalui aksi sosial nyata. Para aktivitis pengembangan masyarakat menolak ide pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ia memunculkan ide pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan hubungan kemanusiaan (Akmaruzzaman, 2013).

Solidaritas yang dibangun dengan berlandaskan isu ekologis yang menolak adanya pembangunan dan penambangan semen di Desa Sikayu oleh PERPAG kemudian menciptakan satu pengembangan masyarakat yang menuju pada pemberdayaan masyarakat melalui berbagai cara. Konsep pemberdayaan masyarakat yang muncul akibat penolakan terhadap pembangunan sebenarnya

muncul dari pandangan yang menempatkan manusia sebagai subyek dari dunianya sendiri. Pola dasar gerakan pemberdayaan kemudian menekankan pada keberpihakan kepada kelompok yang tak berdaya. Dalam sejarahnya, pemberdayaan menjadi sebuah gerakan perlawanan pembangunan alternatif terhadap *hegemoni developmentalisme* (teori modernisasi) yang menganggap bahwa adanya pembangunan yang gencar malah semakin memiskinkan manusia. (Soimin & Wisnu Indrajit, 2014)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan beberapa kerangka teoritis yang ada, menarik untuk dikaji mengenai pengembangan masyarakat di Desa Sikayu melalui organisasi PERPAG yang teguh menolak Pabrik Semen. Pengkajian terhadap pengembangan masyarakat di Desa Sikayu melalui PERPAG tentunya berguna sebagai satu referensi gerakan pengembangan masyarakat yang ada di pedesaan khususnya desa yang berpotensi terkena tambang dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan. Dalam penulisan ini diulas konsep-konsep pengembangan masyarakat berbasis kesadaran kerusakan ekologis yang sudah dilakukan PERPAG yang nantinya dapat dijadikan sumber yang bermanfaat dalam ilmu pengetahuan khususnya bidang pemberdayaan masyarakat yang tidak selalu muncul karena alasan kemiskinan belaka namun juga muncul akibat kekhawatiran akan kondisi ekologis.

Pengembangan Masyarakat yang dilakukan PERPAG, mengikuti tahapan-tahapan penyadaran masyarakat, tahap pemberian motivasi, tahap pengembangan, tahap penguatan potensi dan tahap pemberdayaan dan kemandirian. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan melalui pertemuan masyarakat, pertemuan kelompok, pertemuan individu maupun melalui media dengan pemberian materi terkait ekologi, lingkungan hidup, kawasan karst, sehingga dapat menyadarkan masyarakat akan kebutuhan mereka terkait dengan lingkungan dan masa depannya.

Pengembangan masyarakat yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Ife (2002) yaitu Prinsip pertama ekologi (*Ecological principles*), dimana PERPAG menerapkan 1) Pembangunan Menyeluruh terutama di bidang ekonomi dan lingkungan (*Holism*), 2) Berkelanjutan (*Sustainability*), dengan memperhatikan aspek ekologis, dimana PERPAG bergerak dalam rangka mempertahankan kawasan karst untuk kesejahteraan masyarakat, 3) Keragaman (*Diversity*), dimana pengembangan masyarakat dibangun sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat akan pentingnya kawasan karst untuk kehidupan masyarakat terutama kebutuhan akan sumber air yang sangat menopang perekonomian di kawasan Gombang Selatan. Perspektif pembangunan membutuhkan komunikasi yang bersifat horizontal, pertanggungjaaban terhadap komunitas dan pengakuan adanya keberagaman, 4) Pembangunan Organik (*Organic development*), dimana PERPAG memberikan pemahaman kepada masyarakat kawasan karst Gombang Selatan mengenai hubungan yang kompleks antara masyarakat dan lingkungan terutama pentingnya kawasan karst untuk kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dan 5) Pembangunan Yang Berkelanjutan, di sini PERPAG mengakomodir permasalahan lingkungan karst sebagai obyek dari pembangunan yang harus diperjuangkan.

Prinsip yang ke dua adalah Prinsip Keadilan Sosial (*Social justice principles*). Dalam *community development*, perpaduan antara pendekatan ekologis dengan gagasan keadilan social sangat penting sekali. Terdiri dari 1) Memusatkan Perhatian pada Keadaan Struktur yang Merugikan (*Addressing structural disadvantage*), dalam hal ini PERPAG membantu masyarakat untuk membicarakan permasalahan terancamnya kawasan karst oleh pabrik semen dan bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut, 2) Memusatkan Perhatian pada Wacana yang Merugikan (*Addressing discourses of disadvantage*), dimana PERPAG mengidentifikasi adanya wacana yang menguntungkan pabrik semen untuk beroperasi menambang kapur di kawasan karst

Gombang Selatan, dan menumbuhkan sifat kritis terhadap hal tersebut melalui penyadaran dan pemberian motivasi kepada masyarakat 3) Pemberdayaan (*Empowerment*). Dalam hal ini PERPAG membantu menciptakan masyarakat yang berkeadilan social dengan pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terkait kebutuhan air dan ekonomi yang terancam karena adanya pabrik semen yang mengancam keberadaan kawasan karst dan 4) Mendefinisikan Kebutuhan (*Need definition*) PERPAG melakukan dialog dengan berbagai elemen masyarakat untuk mencapai konsensus pada prioritas kebutuhan terkait terancamnya kawasan karst Gombang Selatan dan 5) Hak Asasi Manusia (*Human rights*), PERPAG memperhatikan HAM antara lain kebebasan untuk menyampaikan masyarakat, hak kebebasan untuk berekspresi kebebasan berkumpul, hak berpartisipasi dalam masyarakat dan hak mendapatkan perlindungan terkait permasalahan kawasan karst Gombang Selatan yang terancam dengan keberadaan pabrik semen. Hal ini selaras Hak Azasi Manusia yang ditetapkan PBB.

Prinsip yang ke tiga adalah, Prinsip Menghargai Lokal (*Valuing the local*) yang terdiri dari 1) Menghargai Pengetahuan Lokal (*Valuing local knowledge*), 2) Menghargai Kebudayaan Lokal (*Valuing local culture*), 4) Menghargai Sumber Daya Lokal (*Valuing local resources*), 5) Menghargai Keahlian Lokal (*Valuing local skills*), dan Menghargai Proses Lokal (*Valuing local processes*). PERPAG menghargai sekali dengan hal-hal tersebut baik pengetahuan dengan informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait lingkungan kawasan karst, kebudayaan dengan melestarikan budaya kerja bakti membersihkan sumber mata air yang dilakukan setahun sekali. Menghargai sumberdaya baik itu sumber daya alam maupun sumberdaya manusia, dengan usaha yang dilakukan PERPAG untuk mencegah kerusakan kawasan karst Gombang Selatan merupakan gambaran yang terlihat jelas bahwa PERPAG menghargai sumber daya alam. Demikian juga untuk sumber daya manusia, di sini PERPAG

memberdayakan masyarakat untuk mencegah kerusakan alam akibat penambangan kapur oleh pabrik semen yang ada. Menghargai keahlian lokal terlihat dari gerakan PERPAG yang menghargai keahlian sebagai petani yang mayoritas dimiliki oleh masyarakat Desa Sikayu dengan mengadakan pelatihan terkait pertanian di kawasan karst untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Prinsip keempat adalah Prinsip Proses (*Process principles*). *Community development* memandang lebih penting pada prosesnya daripada pada hasilnya, oleh karena itu banyak penerapan prinsip-prinsip penting *community development* terfokus pada gagasan proses, yang terdiri dari 1) Proses, Hasil, dan Visi (*Process, outcome and vision*), 2) Keterpaduan Proses (*The integrity of process*), 3) Meningkatkan Kesadaran (*Consciousness raising*), 4) Partisipasi (*Participation*), 5) Kerjasama dan Konsensus (*Cooperation and consensus*), 6) Gerak Pembangunan (*The pace of development*), 5) Damai dan Tanpa Kekerasan (*Peace and non-violence*), 6) Inklusif (*Inclusiveness*), dan 7) Membangun Masyarakat (*Community building*). PERPAG menerapkan kesemua prinsip proses tersebut dalam pengembangan masyarakat untuk menolak terhadap penambangan kapur di kawasan Karst Gombang Selatan. Sejak awal masyarakat sudah dilibatkan untuk pembuatan perencanaan program sampai dengan evaluasi. PERPAG juga bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat maupun Lembaga Lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Sehingga gerakan yang muncul adalah gerakan yang damai tidak bersifat anarkhis.

Prinsip kelima adalah Prinsip Global dan Lokal (*Global and local principles*). Hubungan global dan lokal menjadi bagian yang nyata dari seluruh praktik *community development*, dan perlu dijadikan bagian untuk menyadarkan setiap *community worker*. Prinsip global dan lokal adalah Mengkaitkan Global dan Lokal (*Linking the global and the local*) dan Praktik Anti Penjajah (*Anti-colonialist practice*). Prinsip ini juga diterapkan oleh PERPAG untuk membangun solidaritas masyarakat

dalam upaya menolak penambangan kapur oleh Pabrik semen, untuk penyelamatan karst Gombong Selatan.

Pemberdayaan Masyarakat oleh PERPAG

Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh PERPAG yaitu pendekatan tiga tahapan Pemberdayaan Masyarakat dan pendekatan empat Perspektif Pemberdayaan Masyarakat oleh Jim Ife.

1. Pendekatan Tiga Tahapan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan PERPAG

Metode pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan PERPAG, menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat Jim Ife yang terdiri dari tiga tahapan yakni 1) pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan, 2) pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial politik dan gerakan, dan 3) melalui pendidikan dan pertumbuhan kesadaran (Ife, 2008). Metode tersebut digunakan untuk mengkaji pemberdayaan masyarakat dikarenakan pandangan Ife yang relevan dengan kondisi yang ada di masyarakat desa Sikayu yang mana pemberdayaan masyarakat muncul akibat landasan kondisi ekologis yang mengancam. Dalam bukunya *community development* Ife (2008) menjelaskan alasan mengenai pemberdayaan masyarakat yang ada berangkat dari kondisi ekologis dan sosial. Sehingga konsep pemberdayaan masyarakat Ife digunakan untuk memetakan dan memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Sikayu melalui PERPAG.

Kegiatan pengembangan masyarakat diharapkan berujung pada terealisasinya proses pemberdayaan masyarakat (*Community Empowering*). Hal itu bisa dipahami karena kegiatan pengembangan masyarakat pada awalnya memang difokuskan pada pencapaian target perubahan kuantitatif yang diindikasikan dengan tersedianya sarana fisik dan perbaikan tingkat kehidupan materiil. Akan tetapi,

para aktivis pengembangan masyarakat tidak berhenti di situ. Mereka menjadikan realisasi target perubahan kuantitatif ini sebagai modal awal menuju proses perubahan kualitatif yang ditandai dengan terberdayakannya masyarakat baik dalam cara berpikir, bersikap dan mengambil keputusan. Jika masyarakat sudah mampu mandiri dalam berpikir, bersikap dan mengambil tindakan serta sudah mampu berorientasi jangka panjang, makro dan subtansil berarti mereka sudah berada dalam tahapan terberdayakan (Zubaedi, 2013).

Pentingnya mengetahui metode dan konsep pemberdayaan masyarakat dalam sebuah kelompok masyarakat adalah guna mengetahui karakteristik pemberdayaan masyarakat serta mengetahui sejauh mana pemberdayaan masyarakat melalui programnya dapat menjangkau masyarakat tersebut. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Jim Ife yang menyatakan bahwa semua pengembangan masyarakat seharusnya bertujuan untuk membangun masyarakat. Artinya penilaian suatu pemberdayaan masyarakat tentunya dari pembangunan masyarakat itu sendiri yang terdiri dari pengembangan modal sosial, memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat, menyatukan masyarakat serta membantu mereka untuk saling berkomunikasi dengan cara yang dapat mengarah pada dialog yang sejati, melakukan edukasi dan pemahaman dan yang terpenting adalah aksi sosial. Dalam paradigma Jim Ife terdapat tahapan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari tiga tahapan yakni 1) pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan, 2) pemberdayaan melalui aksi sosial dan 3) melalui pendidikan guna membangun kesadaran dalam aspek yang luas.

Merujuk pada pendapat Ife (2008) dalam kaitannya dengan tujuan pemberdayaan oleh PERPAG di Sikayu, yakni untuk membangun masyarakat melalui interaksi sosial guna menyatukan masyarakat melalui aksi sosial untuk menumbuhkan kesadaran yang berangkat dari isu ekologis, adalah hal yang sangat tepat mengingat berdirinya PERPAG berakar dari keprihatinan dan kemauan yang

kuat masyarakat desa Sikayu khususnya petani yang merasa terancam akibat rencana penambangan Pabrik Semen. Dalam bukunya *Community Development*, Ife (2008) menyatakan bahwa permasalahan yang memunculkan adanya pemberdayaan masyarakat berangkat dari landasan perspektif ekologis dan sosial masyarakat serta hak asasi manusia. Oleh karena itu berdirinya PERPAG yang tujuannya mengorganisir masyarakat di sekitaran kawasan karst Gombang Selatan untuk menolak keberadaan tambang semen yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan melanggar hak asasi manusia khususnya di desa Sikayu dan sekitarnya sangat relevan dengan pemikiran Ife mengenai tujuan dari *Community Development*.

Untuk mencapai tujuan dari PERPAG yakni gagalnya izin usaha Pabrik Semen, maka dilakukan upaya upaya tahapan pemberdayaan masyarakat. Jika dianalisis menggunakan tahapan pemberdayaan masyarakat Jim Ife maka tahapan pertama yakni pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan telah dilaksanakan oleh PERPAG. Tahapan perencanaan sendiri dilakukan dengan berbagai langkah.

Tabel 6. Tahapan Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat

Perencanaan	Sasaran	Kegiatan
Pembentukan struktur organisasi	Internal PERPAG	Rapat rutin anggota
Penyusunan Program	Internal PERPAG melibatkan solidaritas masyarakat (AGRA, LBH dan Akademisi)	Perumusan Program rencana aksi dan pemberdayaan
Pemberdayaan Masyarakat	Anggota dan Masyarakat Luas	- Penyusunan Kegiatan Ekonomi

		<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Pelaksanaan Program Ekonomi - Program Penghijauan berbasis masyarakat - Penyusunan program antar divisi
--	--	---

Sumber : Wawancara dengan pengurus PERPAG (2022)

Selain perencanaan program, upaya untuk menekan berbagai kebijakan yang menjadi tahapan pertama dalam pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan oleh PERPAG. Menurut penulis, upaya pemetaan kebijakan menjadi tahapan pertama, karena hukum adalah alat legitimasi dari sebuah kejadian yang tentunya jika hukum atau kebijakan tersebut mampu dinilai dan dikritisi, tentunya bahan perencanaan kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dengan tepat karena telah mengetahui bahwa sesungguhnya kebijakan yang ada tersebut yang menjadi sumber dari permasalahan. Adapun berbagai kebijakan yang dikritisi oleh PERPAG yakni:

1. Menuntut dikembalikannya Kawasan Karts Gombang Selatan sesuai dengan kebijakan awal yakni kawasan ekokarst sesuai dengan Kepmen No. 961K/40/MEM/2003 yang menyatakan bahwa kawasan karst Gombang selatan adalah Kawasan Bentang Alam Karts (KBAK) Gombang dengan luas 48,94 Km². PERPAG menolak pengurangan KBAK Gombang menjadi 40,89 Km² semenjak adanya Persetujuan Izin Usaha Pertambangan seluas 271 Ha Kepala Kantor Pelayanan Ijin Terpadu dan Penanaman Modal dengan No. 503/16/KEP/2012 pada 19 November 2012 serta melalui keputusan kementerian ESDM dengan No. 3043K/40/MEM/2014.

2. PERPAG menuntut sidang AMDAL Pabrik Semen (PT SG) tidak layak. Aksi penolakan tersebut terjadi pada tanggal 8 juni 2016 dalam sidang Komisi Penilai Amdal Kabupaten Jateng di Semarang yang pada akhirnya memutuskan bahwa Amdal Pabrik Semen tersebut tidak layak dengan alasan bahwa pertama kawasan IUP (Ijin Usaha Perdagangan) eksplorasi yang dilakukan Pabrik Semen (PT SG) adalah bagian dari ekosistem karst, sehingga tidak diperbolehkan untuk ditambang. Penambangan batu gamping akan berakibat pada perubahan pola karst, baik ekokarst maupun endokarst. Kedua, ekosistem karst Gombang Selatan masuk Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gombang yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang diklasifikasi sebagai karst kelas satu sehingga tidak boleh ditambang.
3. PERPAG bersama pemerintah desa Sikayu membuat Peraturan Desa (Perdes) Tentang Lingkungan Hidup. Peraturan Desa tentang lingkungan hidup memiliki makna yang sangat esensial mengingat upaya membuat kesadaran pentingnya lingkungan hidup telah dimulai dari level terkecil yakni pemerintah desa. Posisi Perdes sendiri merujuk dalam Kepmendagri No 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa yang memiliki kekuatan hukum yang sangat besar karena nantinya Perdes dapat dijadikan acuan dan landasan dalam peraturan daerah yang merupakan satu produk hukum yang diakui eksistensinya dalam sistem hukum hierarki perundang-undangan di Indonesia.

Selanjutnya tahapan kedua dari pemberdayaan masyarakat dalam pandangan Ife (2008) adalah melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan sesuai dengan perjuangan politik dan gerakan. Tahapan kedua ini jika dianalisis maka aksi sosial dan politik telah dilaksanakan oleh PERPAG dengan jangkauan kegiatan yakni dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 7. Aksi sosial politik pemberdayaan masyarakat oleh PERPAG

Tahun	Kegiatan Aksi sosial politik sesuai arah perjuangan organisasi	Lokasi	Kategori
2011-2018	Aksi Massa di DPRD Kebumen menolak delinasi kawasan karst gembong dan menuntut pencabutan Izin usaha Pabrik Semen	DPRD Kebumen	Aksi massa
2015-2017	Aksi Massa di BLH Jawa Tengah	Semarang	Aksi Massa
2016	Penghijauan Gunung Karst bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Pejabat daerah Penyusunan Kertas Kebijakan oleh Komnas HAM tentang pelanggaran HAM di kawasan karst Gembong selatan	Sikayu Komnas HAM	Aksi Lingkungan Aksi Hak asasi
2017	Penelusuran tim Masyarakat Speleologi Indonesia (MSI) dan Belajar Caving Asyik (BAC) mengenai sungai bawah tanah di Sikayu	Sikayu	Aksi Lingkungan
2019	Study Tracer sumber air oleh FG UGM	Sikayu	Aksi Lingkungan
2018	Study Tracer Gua Bawah Tanah oleh UPN Yogyakarta	Sikayu	Aksi Lingkungan
2020-2021	Penyusunan Kajian Hukum dan Rekomendasi kebijakan bersama LBH Yogyakarta		Aksi Hukum

2022	Melakukan konsolidasi internal dengan penyadaran edukasi masyarakat mengenai pentingnya mata air dan penolakan tambang semen Gombong Aksi tanam kolektif	Sikayu	Aksi politik dan ekonomi
------	---	--------	--------------------------

Sumber : Observasi dan wawancara dengan anggota PERPAG

Melihat tahapan aksi sosial dan politik sebagai tahapan kedua pemberdayaan masyarakat pasca perencanaan dan analisis kebijakan yang dilakukan oleh PERPAG telah banyak melakukan kegiatan pemberdayaan berbasis kegiatan yang jika diamati banyak melakukan aksi pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan hidup. Hal ini tentunya sesuai dengan tujuan berdirinya PERPAG yakni sebagai organisasi penyelamat lingkungan hidup. Ife (2008) menyampaikan bahwa gagasan pemikiran ekologis *green* menjadi isu yang sangat banyak mempengaruhi adanya pemberdayaan masyarakat terlebih pasca globalisasi. Isu lingkungan menjadi isu yang sangat kontemporer untuk dibahas di tengah wacana pembangunan berkelanjutan (Zubaedi, 2013).

Menurut penulis, isu lingkungan mampu menjadi isu penggerak pemberdayaan masyarakat karena kesadaran dari masyarakat yang telah terbentuk secara mayoritas karena diakibatkan rasa memiliki akan lingkungan tersebut yang kemudian menyebabkan kekhawatiran jika terjadi ancaman yang datang dari luar atas nama pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aksi sosial politik yang muncul di Indonesia akibat penolakan pembangunan khususnya pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan.

Sebagaimana di Desa Sikayu, organisasi PERPAG yang konsern di lingkungan hidup kemudian sangat bersemangat untuk melakukan pemberdayaan masyarakat karena ancaman yang nyata

ada di depan mereka sehingga berbagai langkah upaya direncanakan dan dijalankan guna mewujudkan tujuan untuk bebas dari rencana penambangan semen di kawasan mereka. Berbagai aksi dan kegiatan dilakukan oleh PERPAG guna mewujudkan tujuan dari pemberdayaan yakni masyarakat yang memiliki kekuasaan atas sumber daya alamnya sendiri dalam hal ini adalah air.

Berbagai aksi dilakukan PERPAG mulai dari aksi massa yang dilakukan di tingkat Kabupaten maupun Provinsi. Berikut dokumentasi kegiatan aksi massa PERPAG menolak tambang Pabrik Semen:



Gambar 4. Aksi penolakan tambang semen di DPRD Kebumen
(Sumber : Dokumentasi PERPAG)



Gambar 5. Aksi massa di Kabupaten Kebumen dan Propinsi Jawa Tengah (Sumber : Dokumentasi PERPAG)

Seluruh aksi massa yang dilakukan oleh PERPAG tidak mendapatkan dana dari manapun dan murni dari hasil swadaya masyarakat. Kekuatan solidaritas ini merupakan satu kekuatan yang menentukan berjalannya pemberdayaan masyarakat menurut Ife (2008). Kekuatan masyarakat tersebut tercermin dalam proses partisipatif masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada para pelaku atau tokoh pemberdayaan. (Hayati, 2020).

Selain aksi massa, aksi lingkungan hidup juga dilakukan oleh PERPAG melalui berbagai kegiatan, hal tersebut sebagai bentuk nyata dari kecintaan PERPAG terhadap lingkungan hidup. Selain itu pula kegiatan aksi lingkungan hidup sebagai bentuk pressure politik kepada pemerintah yang hingga saat ini belum mencabut izin usaha Pabrik Semen. Berbagai aksi kegiatan lingkungan hidup adalah aksi

tracing sumber air bawah tanah untuk memastikan sekaligus sebagai bahan kajian penolakan terhadap tambang Pabrik Semen.



Gambar 6. Tracing Mata Air Bawah Tanah di Sikayu PERPAG dengan Pusat Studi Karst UGM (Sumber : Dokumentasi PERPAG)

Aksi lingkungan selanjutnya sebagai salah satu proses pemberdayaan masyarakat adalah penghijauan kawasan karst Gunung Sikayu yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen. Kegiatan tersebut sebagai wujud menjaga kawasan karst serta sebagai upaya mengajak KLHK untuk melihat kondisi di Sikayu yang sangat banyak terdapat sumber air yang terancam dengan keberadaan Pabrik Semen. Artinya dalam kegiatan tersebut selain terdapat aksi lingkungan juga terdapat aksi politis.



Gambar 7. Penghijauan Karst Gombang Selatan dengan KLHK
(Sumber : Dokumentasi PERPAG)

Kegiatan lain yang dilakukan adalah kegiatan budaya masyarakat sebagai satu wujud pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan budaya lokal yakni melalui upaya peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di atas Gunung Karst serta bersih bersih mata air yang menjadi tradisi tahunan di Sikayu.



Gambar 8. Kegiatan budaya lokal sebagai satu proses pemberdayaan masyarakat dengan tujuan mempererat solidaritas (Sumber : Dokumentasi PERPAG)

Selain aksi massa, budaya, lingkungan dan politik, PERPAG juga mengadakan kajian hukum guna menyusun kertas kebijakan bersama dengan LBH Yogyakarta serta Komnas HAM. Kedua organisasi tersebut adalah organisasi yang teguh membela kepentingan masyarakat petani di kawasan Gombang Selatan khususnya di Sikayu. Penguatan kelembagaan melalui pendidikan hukum dilakukan oleh PERPAG guna memberikan *brief policy* kepada pemerintah bahwa keberadaan karst Gombang tidak bisa diubah menjadi kawasan selain pada kawasan bentang karst yang harus dilindungi karena menjadi sumber air bagi warga. Selain menggandeng LBH Yogyakarta, PERPAG juga menggandeng AGRA Jawa Tengah yakni organisasi tani sebagai mitra untuk pemberdayaan masyarakat khususnya pendidikan politik tani yang keberadaannya terancam akibat rencana penambangan. Upaya tersebut sekaligus sebagai tahapan ketiga dalam tahapan pemberdayaan masyarakat perspektif Jim Ife. Seluruh upaya edukasi baik edukasi hukum,

lingkungan maupun politik bagi petani yang merupakan masyarakat sasaran pemberdayaan dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan untuk terus tumbuh dan bersatu serta sebagai upaya penguatan solidaritas.

2. Pendekatan Empat Perspektif Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan PERPAG

Melihat ketiga tahapan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh organisasi PERPAG di Desa Sikayu yang menggandeng berbagai elemen masyarakat dalam aksi pemberdayaannya maka jika dianalisis lebih lanjut dengan pendekatan 4 perspektif pemberdayaan masyarakat yakni *pluralis*, *elitis*, *strukturalis* dan *post strukturalis* sebagaimana dijelaskan oleh Ife (2008) , maka yang telah dilakukan oleh PERPAG adalah melakukan pendekatan perspektif *pluralis* karena pemberdayaan dilakukan atas latar belakang ingin menolong masyarakat dari kondisi yang kurang menguntungkan dalam hal ini masyarakat tani dan mayoritas penduduk Sikayu yang menggantungkan kebutuhan air dari karst. Selain itu juga sebenarnya pemberdayaan masyarakat di Sikayu telah mengarah pada pendekatan *perspektif post strukturalis* mengingat dalam menentukan program kegiatan dan bahan kajian telah melakukan kerjasama atau menggandeng akademisi hingga enviroment guna memberikan legitimasi ilmu pengetahuan yang mana menyatakan bahwa kawasan karst Gombong Selatan adalah sumber air yang tidak bisa dialihfungsikan.

Penutup

Pengembangan masyarakat yang dilakukan PERPAG merujuk pada tahapan pengembangan masyarakat dan prinsip-prinsip masyarakat menurut Jim Ife. Pengembangan masyarakat dilakukan secara intensif untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya kawasan karst untuk kehidupan dan kesejahteraan masyarakat

sehingga menimbulkan motivasi masyarakat untuk memelihara, merawat, dan memanfaatkannya dengan bijak serta melindunginya apabila ada hal hal yang dapat merusak kawasan karst tersebut seperti adanya pabrik semen yang akan menambang kapur di wilayah kawasan karst Gombong Selatan. PERPAG juga memberikan pelatihan untuk mengembangkan pertanian di kawasan karst. Adanya ancaman rusaknya kawasan karst karena adanya penambangan oleh Pabrik Semen, memotivasi masyarakat untuk melakukan tindakan guna penyelamatan kawasan karst di Gombong Selatan tersebut dengan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam semua proses dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Pemberdayaan masyarakat merupakan goal akhir dari pengembangan masyarakat.

Melihat gigihnya proses pemberdayaan masyarakat di Desa Sikayu yang dilakukan oleh PERPAG memberikan gambaran bahwa kekuatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat mampu memberikan pressure kepada pemerintah untuk memperhatikan dan bijak dalam membuat kebijakan pembangunan khususnya pertambangan. Selain itu pemberdayaan masyarakat Desa Sikayu berbasis lingkungan hidup menjadi pengingat bahwa pembangunan yang tidak mengedepankan *ekosentris* sejatinya adalah pembangunan yang sia sia karena pada akhirnya akan menuju pada kerusakan ekologis yang tentunya akan merugikan manusia itu sendiri.

Dengan melihat proses pemberdayaan masyarakat di atas dapat disimpulkan bahwa yang sudah dilakukan oleh PERPAG (Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong) di Desa Sikayu berorientasi pada tujuan penyelamatan ekologis kawasan karst dari ancaman tambang Pabrik Semen. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tiga tahapan yakni pertama perencanaan dan analisis kebijakan yang berhasil memetakan dan mengkritisi kebijakan yang bermasalah serta menyusun peraturan desa lingkungan hidup. Kedua, dilakukan aksi sosial politik membawa tujuan pemberdayaan yakni aksi lingkungan

hidup melalui kegiatan tracing mata air yang melibatkan ahli karst, kegiatan penghijauan yang melibatkan menteri KLHK, kegiatan budaya bersih mata air dan upacara di atas Gunung Karst. Ketiga tahapan pendidikan untuk mengedukasi keberlanjutan tujuan organisasi dan pemberdayaan dengan menggandeng LBH Yogyakarta dan AGRA Jawa Tengah.

Implikasi dari kegiatan ini tentunya memetakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan PERPAG yang mana tersusun satu bahan book chapter yang bisa digunakan sebagai referensi bagi pemberdayaan masyarakat serupa. Selain itu juga sebagai sumbangsih pemikiran mengenai upaya penolakan kerusakan lingkungan hidup yang mengatasmakan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmaruzzaman. (2013). Strategi Mensinergikan Program Pengembangan Masyarakat Dengan Program Pembangunan Daerah. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 5(1), 47–60. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v5i1.24193
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kecamatan Buayan Dalam Angka*.
- Hayati, N. (2020). Jurnal pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 7(2), 120–132.
- Ife, J. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Pustaka pelajar.
- John E. Mylroie. (2011). Karst Features of Guam In General Model of Carbonate Island Karst. *Journal Of Cave and Karst Studies*, 63(1), 9–22.
- Kelompok Studi Karst UGM. (2019). *Studi Water Tracing di Daerah Tangkapan Air Mataair Kali Sirah dan Mataair Jumbleng, Karst Karangbolong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah*.
- Listiyani, N. (2017). Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak

- Warga Negara. *Al'Adl*, 9(April), 71.
- Salim, E. (2013). *Menyelamatkan Karst Gombang*. Indonesian Speleological Society. www.caves.or.id/arsip/535
- Soimin & Wisnu Indrajit. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*. Intrans Publishing.
- Triadi, W. S., Jauhari, A., Paripurno, E. T., & Kusumayudha, S. B. (2021). Characteristics of kalisirah karst subterranean stream subdistrict of buayan, kebumen, central java with tracing test. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 683(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/683/1/012004>
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat Wacana dan dan Praktik*. Kencana Prenada Media Group.

PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENCEGAHAN *STUNTING*

Hastin Ika Indriyastuti

Universitas Muhammadiyah Gombong

Email: hastin.myu@student.uns.ac.id

Dasar Pemikiran

Indonesia adalah salah satu Negara yang masih berjuang menghadapi masalah Stunting. Stunting masih menjadi masalah kesehatan yang serius dan prevalansinya masih lumayan tinggi di Indonesia. Kondisi atau keadaan dimana terjadi kegagalan untuk mencapai perkembangan yang di ukur berdasarkan panjang dan tinggi badan menurut umur. Menurut World Health Organization (WHO) batasan stunting itu jika umur berdasarkan Z-Score sama dengan atau kurang dari -2 Sama dengan di bawah standar (pendek) dan jika nilai Z-Score kurang dari -3 di kategorikan sangat pendek. Tinggi nya angka kejadian stunting pada anak menjadi masalah khusus pemerintah. Kurang asupan yang di serap oleh tubuh mulai dari masih di dalam kandungan samai dengan setelah lahir dan kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan masih menjadi salah satu penyebab dari stunting itu sendiri.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 sampai 2024, prioritas dari pembangunan nasional yaitu terwujudnya sumber daya manusia (SDM) berkualitas serta berdaya saing. Semua orang mengerti bahwa sumber daya manusia adalah aset nasional untuk mencapai pembangunan nasional yang inklusif dan merata di Indonesia. Indikator terkait dengan pembangunan sumber daya manusia yang bermutu adalah tercapainya tujuan dan sasaran dibidang kesehatan, dan salah satu indikatornya adalah penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Presiden memberikan perhatian khusus terhadap masalah stunting di Indonesia dengan mencanangkan strategi nasional percepatan penurunan stunting di Indonesia. Strategi ini melibatkan berberapa pemangku kepentingan pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat, serta media massa dan dikoordinasikan oleh Wakil Presiden. Strategi ini dikembangkan karena penting untuk bekerja sama antar sektor. Padahal, stunting tidak hanya dilihat sebagai masalah kesehatan.

Prevalensi Stunting

Menurut WHO 2018, prevalensi pada stunting di seluruh dunia adalah 22,8%, dan prevalensi stunting di Indonesia adalah 30,8% menurut Riskesdas 2018. Dapat disimpulkan bahwa angka stunting di Indonesia meningkat dari prevalensi global. Menurut data WHO yang dihimpun, Indonesia menempati urutan ketiga terbesar di Asia Tenggara dengan 36,4%. Prevalensi stunting anak di bawah usia 2 tahun masih tinggi yaitu 29,9%. Aceh memiliki prevalensi stunting tertinggi pada anak di bawah usia dua tahun, dan DKI Jakarta memiliki yang terendah. Dua tahun merupakan waktu yang amat penting dihidup. Pada Masa saat ini disebut masa emas sebab pertumbuhan serta perkembangan sangat pesat dan mempengaruhi masa depan anak. Malnutrisi yang terjadi pada tahap ini dan tidak segera ditangani dapat bertahan hingga dewasa. Pada titik ini, anak kurang gizi memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit degeneratif

dibandingkan anak dengan gizi normal.

Stunting dan gizi buruk ditemukan tidak hanya di bagian yang jauh dari ibu kota, tetapi juga di bagian yang dekat dengan ibu kota, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurut survei tahun 2016 di Semarang, Jawa Tengah, prevalensi stunting pada anak adalah 33,3%. Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Jawa Tengah lebih dari 30%. Jawa Tengah merupakan salah satu negara bagian terpadat di Indonesia. Pembangunan di Jawa Tengah diyakini sangat berhasil karena pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Tingginya prevalensi stunting di Jawa Tengah dan Jawa Timur menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat meningkatkan status gizi penduduk, terutama anak balita. Dalam hal target presiden yang ditetapkan pada tahun 2024, prevalensi stunting bisa turun menjadi 14%, melebihi target 19% yang ditetapkan oleh Bapenas. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan stunting sebagai suatu kondisi di mana anak-anak di bawah usia 5 tahun lebih tinggi secara tidak proporsional dari usia mereka.

Penyebab Stunting

Ada banyak penelitian yang menunjukkan penyebab dari stunting baik peneliti dari dalam negeri maupun penelitian dari luar negeri. Namun faktor resiko atau penyebab utama dapat di kategorikan menjadi:

A. Faktor Genetik

Beberapa penelitian mengemukakan jika tinggi badan seseorang memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan retardasi pertumbuhan pada anak. Salah satu penelitian tahun 2011 di kota Semarang menyimpulkan jika ibu yang pendek (<150 cm) merupakan faktor risiko stunting pada anak usia 12 tahun. Ibu berukuran kecil 2,34 kali lebih mungkin memiliki anak disgenetik daripada ibu berukuran normal. Ayah yang pendek (<162 cm)

merupakan faktor risiko stunting pada usia 12 tahun. Ayah pendek 2,88 kali lebih mungkin memiliki anak disgenetik daripada ayah dengan tinggi badan normal.

Sebuah penelitian metaanalisis yang dilakukan di 2016 mengemukakan kalau tinggi badan orang tua dapat mempengaruhi kejadian stunting pada anak. Research tersebut mengatakan tinggi badan ibu mempengaruhi kejadian stunting pada anak. Tinggi badan pada orang tua sendiri pada hakekatnya juga mempengaruhi dan menjadi faktor internal.

B. Status Ekonomi

Perhitungan ekonomi diperlukan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Kurangnya status keuangan dapat menjadi penyebab utama stunting karena daya beli yang buruk. Sebenarnya anak membutuhkan zat gizi lengkap untuk tumbuh kembangnya, namun kekurangan kualitas serta kuantitas makanan mengakibatkan asupan zat gizi anak tidak tercukupi. Studi menunjukkan bahwa orang tua yang pembelian rendah jarang memberi makan telur, daging, ikan, dan kacang-kacangan setiap hari. Artinya, suplay protein anak Anda tidak terpenuhi karena anak Anda tidak cukup mengonsumsi protein. Anak-anak sering diasuh oleh saudara laki-laki dan neneknya karena ibu mesti pergi bekerja membantu keuangan atau melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Jika saudara kandung terlalu muda atau nenek yang terlalu tua, akan ada kurangnya pengawasan terhadap anak. Anak-anak sering jatuh sakit karena bermain pada tempat kotor atau memasukkan benda-benda kotor dimulutnya, yang kemudian membuat mereka sakit. Masih banyak ibu dengan pengetahuan gizi yang rendah pada kelompok dengan status keuangan rendah dan status keuangan cukup. Mereka pergi ke Posyandu secara teratur, tetapi Posyandu jarang memberikan informasi gizi kepada mereka. Informasi gizi sebenarnya di

berikan oleh tenaga kesehatan yang menjenguk saat anak tidak enak badan, dan hanya sedikit. Ibu kurang suka membaca artikel tentang kesehatan, sehingga jarang mendapatkan informasi dari media massa atau cetak. Minimnya status keuangan seharusnya tidak menjadi halangan untuk memenuhi kebutuhan gizi pada keluarga, sebab harga pangan di negara kita kurang mahal dan sangat terjangkau. Ragam bahannya sangat beragam dan bisa didapatkan dimana saja. Namun, karena kurangnya pengetahuan tentang nutrisi, banyak orang tua yang percaya bahwa nutrisi yang baik hanya dapat ditemukan pada makanan dengan harga tinggi. Menciptakan makanan bergizi serta lezat membutuhkan kesabaran. Karena keterbatasan waktu, orang tua mungkin lebih suka membeli makanan ringan daripada memasak sendiri. Aditif yang dapat berbahaya bagi kesehatan Anda sering ditambahkan ke makanan ringan Anda. Selain itu, kebersihan dan keamanan makanan tidak terjamin.

C. Jarak Kelahiran

Hasil penelitian mengemukakan jika jarak kelahiran yang sempit (<2 tahun) merupakan faktor indikasi terjadinya stunting hingga usia 12 tahun. Anak-anak usia yang terpisah dua atau lebih atau terpisah dari saudara kandung mereka 10,5 kali lebih mungkin untuk mengembangkan stunts daripada anak-anak yang terpisah dua atau lebih.

Jarak kelahiran mempengaruhi pola pengasuhan anak. Jarak kelahiran yang sempit berarti orang tua cenderung lebih banyak bermasalah dan tidak optimal dalam mengasuh anaknya. Anak yang dewasa belum mandiri dan masih membutuhkan banyak perhatian. Terutama di rumah-rumah yang kurang mampu secara ekonomi tanpa pembantu dan guru TK. Mengasuh anak sepenuhnya diurus oleh ibu sendiri, tetapi ibu juga harus melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Akibatnya, kurang

memperhatikan gizi anak.

Juga, jika jarak kelahiran <2 tahun, susu adik diprioritaskan, sehingga salah satu anak, biasanya lebih dewasa, tidak kebagian susu. Akibat kekurangan susu dan asupan makanan yang tidak memadai, anak-anak menderita gizi buruk, yang dapat menyebabkan keterlambatan pertumbuhan. Untuk mengatasi hal tersebut, program KB perlu diremajakan. Saat setelah melahirkan, ibu dan ayah harus disarankan untuk menggunakan kontrasepsi sesegera mungkin untuk mencegah kehamilan. Banyak orang tua yang ragu untuk menggunakan kontrasepsi secepat setelah anak mereka lahir. Akibatnya, kehamilan sering memakan waktu beberapa bulan.

Jika jarak kehamilan yang mepet, tidak hanya bayi yang baru lahir tetapi juga ibu yang akan terkena dampak buruk. Kesehatan ibu bisa dipengaruhi oleh kondisi fisik yang matang setelah melahirkan dan perawatan bayi secara simultan, yang membutuhkan banyak waktu serta perhatian. Ibu hamil yang kurang enak badan menyebabkan kebingungan pada janin dikandungnya. Gangguan terjadi pada bayi didalam kandungan juga menghambat perkembangan dan menyebabkan gagal tumbuh.

D. Riwayat BBLR

Dari beberapa peneliti menjelaskan jika terdapat hubungan antara kejadian BBLR dengan Kejadia stunting. Dari sebuah penelitian menggambarkan bahwa anak dengan riwayat BBLR 3 kali lebih beresiko stunting dibanding anak yang tidak ada sejarah kelahiran BBLR. Saat kelahiran dengan BBLR menandakan bahwa pada janin mengalami malnutrisi sejak dalam kandungan. Penyebab utama stunting sendiri adalah keadaan malnutrisi yang terlalu lama. Stunting akan terjadi beberapa bulan kemudian, bahkan pada hal ini orang tua jarang menyadarinya. Orang tua akan mengetahui anaknya stunting biasanya pada saat

anak bergaul dengan anak lain sehingga bisa terlihat perbedaannya misal lebih pendek dari anak-anak yang lain. Maka dari itu bayi terlahir dengan berat badan kurang perlu di waspadai akan terjadinya stunting. Semakin dini melakukan pencegahan malnutrisi maka kejadian stunting akan semakin kecil risikonya.

E. Anemia Ibu

Beberapa penelitian menemukan bahwa ada pengaruh antara anemia dengan ibu hamil dengan perkembangan BBLR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RR adalah 2.364. berarti, ibu hamil yang anemia 2,364 kali lebih mungkin mengalami stunting pada anaknya dibandingkan ibu hamil tanpa anemia. Hasil penelitian lain juga menemukan jika ibu menyusui yang didiagnosis anemia memiliki bayi yang kurang gizi dibandingkan ibu menyusui tanpa anemia.

Anemia sendiri dikarenakan oleh kekurangan zat gizi mikro, yang terpenting adalah zat besi. Kekurangan zat besi di ibu hamil dapat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan janin serta menyebabkan kekurangan gizi pada janin saat lahir. Jika malnutrisi pada bayi tidak segera ditangani, dapat berkembang menjadi malnutrisi kronis dan menyebabkan pertumbuhan terhambat. Wanita hamil dengan Anemia mengurangi suplai oksigen untuk metabolisme ibu dan dapat menyebabkan kelahiran prematur (kelahiran prematur), sehingga meningkatkan risiko melahirkan anak yang lebih ringan. Bayi juga memiliki efek metabolik yang kurang optimal karena kurangnya kadar hemoglobin yang mengikat oksigen. Akibatnya, nutrisi di dalam perut tidak cukup kemudian bayi yang keluar lebih ringan. Adapun hal di atas juga bisa berakibat fatal: kematian ibu saat melahirkan atau kematian bayi yang baru lahir.

F. Defisiensi Zat Gizi

Asupan zat gizi menjadi factor yang paling utama menjadi factor resiko terjadinya stunting. Zat gizi sangat berpengaruh dan penting bagi tubuh terutama bagi perkembangan. Pertumbuhan sendiri merupakan kenaikan ukuran serta massa konstituen tubuh. Metablisme tubuh juga termasuk salah satu dari pertumbuhan. Metabolism adalah proses yangmana organisme dalam tubu mengambil serta mengubah zat yang padat dan xair yang di gunakan untuk memelihara pertumbuhan, kehidupan, fungsi normal organ dan produksi energy. Berdasarkan beberapa penelitian, asupan makanan yang dapat mempengaruhi perkembangan retardasi pertumbuhan adalah protein, kalsium, zat besi, dan seng.

Kebijakan Nasional Penurunan Stunting

Dengan mengacu pada pola pikir UNICEF/Lancet, masalah stunting lebih dominan Upaya akan dilakukan di bawah ini untuk membahas pola pengasuhan, cakupan dan kualitas layanan medis, implikasi lingkungan dan ketahanan pangan dalam konteks pengasuhan. Kedua kondisi tersebut berkaitan pada strategi implementasi program yang perlu dilaksanakan. Hubungan orangtua-anak, termasuk pemberian ASI dini (IMD), menyusui hingga 6 bulan, dan menyusui dengan makanan tambahan (MPASI) hingga 2 tahun, adalah proses yang mendukung pertumbuhan. Dan perkembangan bayi Dan anak-anak. Apa kebijakan dan strategi yang mengatur pembangunan ini? UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 128, Tata Tertib Tahun 2012 Nomor 33 Tahun 2015-2019 tentang ASI dan Renstra Kementerian Kesehatan, Undang-Undang Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015. Kewajiban UU No. 36 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Semua bayi berhak untuk menyusui sendiri selama 6 bulan sejak lahir, kecuali ada indikasi medis.

Selama menyusui, pemerintah, keluarga, pemerintah daerah, serta masyarakat perlu memberikan dukungan yang maksimal kepada ibu dengan mengadakan waktu dan peralatan khusus. Kewajiban hukum tertera di PP No. 33 Tahun 2013 tentang ASI, yang menyatakan: Semua ibu giving birth hanya perlu menerima ASI saja. Pengaturan menyusui Tujuan eksklusif: a. Menjamin terpenuhinya hak bayi atas ASI eksklusif sejak lahir sampai dengan 6 bulan, dengan memperhatikan tumbuh kembang bayi. b. Lindungi ibu Anda dengan memberi makan bayi Anda hanya dengan ASI. C. Memperkuat peran dan dukungan pemberian ASI oleh keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah

- b. Profesional perawatan kesehatan dan penyedia layanan kesehatan berkewajiban untuk memulai menyusui dini bayi baru lahir setidaknya satu jam dari ibu mereka. Seperti disebutkan di atas, permulaan menyusui dini dilaksanakan dengan mendekapkan bayi telungkup di dada atau perut ibu yang pada akhirnya kulit bayi bertemu dengan payudara ibu.

Seperti disebutkan sebelumnya, beberapa masalah, terutama yang berkaitan dengan IMT rendah dan menyusui, mempengaruhi konsultan menyusui yang tidak merata di semua ASI. Pelatihan menjadi konsultan menyusui sudah dilakukan sampai ke tingkat kabupaten, namun belum ada informasi berapa persen Puskesmas sudah memiliki konsultan menyusui. Jika Puskesmas sudah memiliki konselor ASI, tidak mengetahui berapa % karyawan yang menasihati ibu untuk memastikan bahwa mereka hanya disusui dengan IMD.

Kesenjangan lainnya adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran susu formula dan penegakan hukum, serta tidak semua tempat kerja menyediakan tempat menyusui sesuai kebutuhan. Ketika bayi berusia enam bulan, persiapan menyusui berlanjut hingga usia dua tahun, tetapi bayi membutuhkan makanan pendamping

untuk mencapai pertumbuhan gizi. Berdasarkan peraturan WHO/UNICEF, bayi hingga 623 bulan harus mengkonsumsi setidaknya 4 atau 7 makanan atau lebih (sereal/umbi-umbian, kacang-kacangan, produk susu, telur, sumber protein lain, sayuran, vitamin-A). Jika demikian, Anda diwajibkan mendapatkan makanan pendamping ASI yang sesuai. -Buah-buahan yang berlimpah, sayuran dan buah-buahan lainnya (keragaman makanan minimum / MMD)

Ini juga memperhitungkan bahwa bayi harus memenuhi persyaratan diet minimum (MMF). Artinya, bayi berusia 623 bulan yang diberi ASI atau tidak dan diberi ASI (tidak diberi ASI, disusui makanan lunak/padat). Makanan diberi ASI))) harus diberikan pada frekuensi berikut: sebuah.

a. Untuk bayi yang diberi ASI:

- Usia 68 bulan : 2x/hari atau lebih;
- Usia 923 bulan : 3x/hari atau lebih

b. Untuk bayi 6-23 bulan yang tidak diberi ASI: 4 kali atau lebih setiap hari.

Selain itu, untuk memberikan MPASI kepada bayi berusia 623 bulan, Anda harus memenuhi Minimum Acceptable Diet (MAD) yang memadukan kepatuhan MMD dan MMF. Kenyataannya, kondisi ini tidak terpenuhi, dan pencapaian indikator pola makan bayi yang tepat berdasarkan Standar Gizi Bayi (WHO/UNICEF) masih rendah, mencapai pola makan yang dapat diterima, hanya 36,6% dari bayi berusia 623 bulan. (Diet minimum yang diizinkan / MAD).

Beberapa hal berikut ini direkomendasikan untuk strategi masa depan terkait parenting:

1. Mengawasi pelatihan ulang konsultan menyusui, terutama di tingkat kecamatan dan desa.
2. Penerapan sanksi atas pelanggaran ASI PP

3. Pemberian konseling menyusui bagi ibu hamil yang datang ke pemeriksaan kehamilan/ANC (4 minggu pertama kehamilan) untuk persiapan menyusui.
4. Meningkatkan kampanye dan komunikasi menyusui
5. Kursus konsultasi dan pelatihan tentang penyampaian dan manajemen sesuai dengan standar MAD.

Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga merupakan aspek penting dalam pencegahan stunting. Masalah ketahanan pangan meliputi ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, kualitas pangan yang dikonsumsi (asupan), dan stabilitas ketersediaan pangan itu sendiri. Hal ini terkait dengan akses masyarakat dalam berbelanja. Isu ketahanan pangan domestik merupakan isu umum, termasuk Indonesia, yang terkait erat dengan kejadian gizi buruk, dengan bukti prevalensi berat badan kurang pada semua kelompok umur. Dalam jangka panjang, masalah ini akan menyebabkan peningkatan prevalensi retardasi pertumbuhan, gagal tumbuh yang dimulai selama kehamilan, sebagai akibat dari asupan gizi yang buruk sebelum dan selama kehamilan. Kewajiban ketahanan pangan Indonesia didasarkan pada UU Pangan No. 18 Tahun 2012 dan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009.

Pendampingan Keluarga

A. Definisi Pendampingan Keluarga

Pemberdayaan keluarga merupakan serangkaian kegiatan seperti: Memberikan saran, mempromosikan layanan rujukan, mempromosikan dukungan Dengan media sosial yang ditujukan guna mempercepat akses informasi bagi keluarga serta keluarga berisiko stunting yang ditargetkan Prioritas: wanita hamil, ibu pasca melahirkan, anak usia 0 sampai dengan 59 bulan, dan Semua calon pengantin dan usia subur Dukungan pranikah 3 bulan merupakan bagian yang layanan Pernikahan guna deteksi dini faktor penyebab

stunting dan usaha Meminimalkan atau mencegah efek faktor penyebab retardasi pertumbuhan.

B. Tim Pendampingan Keluarga

Dukungan keluarga diberikan oleh tim dukungan keluarga Kerlahan terdiri dari bidan, pelaksana PKK dan pelaksana KB. dari Berbagai kondisi, komposisi tim pendukung keluarga kelurahan Bisa dikoordinasikan dengan bidan. Keterlibatan desa/kelurahan lain atau perawat dan petugas kesehatan yang lain. Untuk tim dukungan keluarga, lihat Bidan, Prioritas diberikan kepada bidan yang telah atau akan ditugaskan Terdaftar di Desa/Kelurahan. Namun, jika kondisi tertentu Bidann disebutkan dalam tim dukungan keluarga dapat berupa: Wanita yang telah menyelesaikan atau berencana untuk menyelesaikan pelatihan kebidanan Silahkan mendaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga untuk pengurus TPPKK yang bekerja di tim asisten Keluarga dapat mencakup pengurus dan/atau anggota semua kelompok kerja I, II, dan III. Dan IVTP PKK Desa/Kelurahan. Sementara eksekutif keluarga berencana terlibat Tim dukungan keluarga, PPKBD, sub PPKBD, Pengurus Kelompok Pengembangan Keluarga, Pengurus Dasawisma, Pekerja Penggerak program Kenkana yang bangga, pekerja lapangan program Bangga dengan Kenkana dan Pengurus Organisasi Keagamaan.

Struktur dan kriteria normal untuk tim pendukung keluarga adalah:

- a.** Bidan dengan kriteria sebagai berikut:
 - Minimal memiliki izin kebidanan
 - Memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik
 - Ada fungsi untuk menggunakan gadget.
- b.** Pengurus/pengurus TPPKK di tingkat desa/kelurahan dengan kriteria sebagai berikut:
 - Memiliki SK serta misi
 - Bertempat tinggal di desa yang di tuju

- Punya kemampuan komunikasi yang sangat baik.
- Ada fungsi untuk menggunakan gadget.
- c. Tim Keluarga Berencana, dengan standar PPKBD / Sub PPKBD / Tim Poktan / Penggerak Pelaksana Desa/Kecamatan/Keluarga Berencana
- Memiliki SK atau surat tugas sebagai pengurus atau anggota tim IMP/KB;
- Bertempat tinggal di desa yang di tuju
- Bisa mengkomunikasikan dengan sangat baik.
- Bisa menggunakan socialmedia.

C. Mekanisme Kerja Tim Pendamping Keluarga

1. Tugas Utama

Tim dukungan keluarga memberikan bantuan berikut: mempromosikan konseling, layanan penempatan, mempromosi penerimaan Program kesejahteraan dan Perawatan Keluarga (termasuk) Calon pengantin / menantu dan / atau calon pasangan masa depan dari keluarga yang terancam punah Pengerdilan dan pemantauan sasaran prioritas Deteksi dini faktor penyebab stunting.

2. Peranan

Untuk memperkuat pelaksanaan tugas dukungan keluarga Setiap anggota tim dukungan keluarga memiliki ruang Peran, yaitu:

- a. Bidan menjadi koordinator dukungan keluarga dan pengasuh Pelayanan kesehatan.
- b. Desa sebagai penggerak / Kader / Pengelola TPPKK tingkat Kerlahan Moderator layanan untuk keluarga.
- c. Tim KB sebagai pencatat data dan pelaporan/pengembangan Pelaksanaan dukungan bagi keluarga dan/atau kelompok sasaran

3. Lima Langkah Kerja Tim Pendamping Keluarga

a. Langkah pertama: penyesuaian/koordinasi

Tim dukungan keluarga berkumpul dengan TPPS. Memecahkan masalah dalam melaksanakan rencana kerja, sumber daya dan dukungan keluarga di tempat.

b. Langkah kedua: melakukan konseling, mempromosikan layanan penempatan, dan mempromosikan adopsi program kesejahteraan Pelaksanaan bantuan termasuk saran dan moderasi Mempromosikan perolehan layanan rujukan dan program bantuan sosial Tujuan utama dari mempercepat pengurangan deselerasi menurut Kebutuhan mereka dalam rangka percepatan perlambatan..

c. Langkah ketiga: pencatatan dan pelaporan

Tim pendamping keluarga membimbing dan membantu keluarga yang beresiko stunting serta mencatat dan melaporkan hasil tindakan yang di perlukan untuk mempercepat penurunan stunting. Pengumpulan dan pelaporan dilakukan melalui system aplikasi dan bisa manual.

D. Mekanisme Pembentukan Tim Pendamping Keluarga

1. Persiapan

Tahap persiapan implementasi mekanisme penyebaran tim Anggota keluarga yang melakukan hal-hal seperti ini:

a. Mengadakan rapat koordinasi untuk mempersiapkan tim Anggota keluarga yang memulai TPPS Kecamatan bersama Pemangku kepentingan dan mitra strategis lainnya (manajer Program Kabupaten, Manajer Puskesmas, Organisasi Khusus IBI, Manajer KUA, Koordinator Program Kabupaten Bangga, Penyuluh (KB / PLKB, dll.) Diskusikan strategi untuk mengerahkan tim pendukung keluarga.

b. identifikasi dan pemetaan sesuai standar dan kebutuhan berdasarkan data keluarga di Desa / desa.

- c. Menyiapkan sarana prasarana (bentuk, bahan, dll) Untuk mendukung pelaksanaan penawaran tim dukungan keluarga. Dengan kata lain, mendorong pelaksanaan dukungan keluarga dan Tim Dukungan Keluarga Desa / Kerlahan disediakan.

2. Pengorganisasian

Selama fase organisasi, kebijakan atau pedoman diterbitkan Kebijakan yang mendasari untuk menerapkan dan mengelola penerapan tim Pendamping keluarga. Proses penyediaan tim pendamping keluarga Pencantuman TPPS di semua tingkat wilayah (dari pusat hingga desa/kerlahan). TPPS menyelenggarakan persiapan, implementasi, dan pemantauan penyebaran Tim dukungan keluarga di panggung termasuk mekanismenya Koordinasi dengan peralatan dan petugas lainnya desa / desa

3. Pelaksanaan

Tahap ini penyediaan tim dukungan keluarga adalah Tingkat Pemerintahan Desa/Kerlahan melalui Tahapan Selanjutnya:

- a. TPPS Desa/Kelurahan akan dilakukan pendataan calon Seorang anggota kelompok pendukung keluarga.
- b. Nama yang disarankan untuk anggota tim dukungan keluarga Desa/Kelurahan telah divalidasi dan disahkan oleh Penyuluh KB/PLKB.
- c. Data tim dukungan keluarga tingkat desa/kerlahan ditentukan oleh SK Oleh walikota/Lula atau staf bersertifikat Tanggal untuk tim dukungan keluarga di tingkat kabupaten adalah sebagai berikut:
- d. Data gabungan dari tim pendukung desa/keluarga Kerlahan Dirangkum oleh TPPS Kabupaten untuk membuat surat keterangan bertanggungjawab mutlak Kamat atau SK oleh Kamat atau pihak berwenang Disetujui. Catatan tim dukungan

keluarga di tingkat kabupaten/kota Peraturan Bupati/Walikota atau Peraturan Kepala Dinas OPDKB Petugas yang berwenang.

- e. Data tim dukungan keluarga tingkat negara bagian adalah ringkasan Dengan data kelompok Dukungan Keluarga Tingkat Kabupaten/Kota Dalam bentuk profil kelompok dukungan keluarga tingkat negara bagian Silakan lapor ke pusat.
- f. Data dari kelompok dukungan keluarga pusat akan digabungkan
- g. Data tim dukungan keluarga tingkat negara bagian.

4. Anggaran

a. Anggaran Penyediaan Tim Pendamping Keluarga

Anggaran untuk implementasi keseluruhan untuk menyediakan tim pendukung Keluarga bisa mendapatkan dari APBN dan APBD, Anggaran pendapatan dan belanja desa bisa sumber lainnya Alokasikan jumlah anggaran sesuai ketentuan aturan Hukum yang berlaku.

b. Anggaran Tim Pendamping Keluarga Berisiko *Stunting*

Tim dukungan yang berisiko dengan masalah kekurangan gizi tersedia untuk mendapatkan Dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APB Desa dan sumber lainnya Lainnya yang mengalokasikan jumlah anggaran sesuai aturan Hukum dan peraturan yang berlaku.

5. Prinsip-prinsip Pengembangan Masyarakat

Tabel 8. Prinsip Pengembangan Masyarakat Menurut Ife (2000)

PRINSIP-PRINSIP DESKRIPSI		KONSEKUENSI /	
EKOLOGIS	1	Holisme	Filosofi ekosentris, Menghormati kehidupan dan alam, Menolak solusi linear, Perubahan organik.
	2	Keberlanjutan	Konservasi, Mengurangi konsumsi, Ekonomi tanpa-pertumbuhan, Membatasi perkembangan teknologi, Anti-kapitalis.
	3	Keanekaragaman	Menghargai perbedaan, tidak ada jawaban tunggal, Desentralisasi, Komunikasi jejaring dan lateral, Teknologi tingkat rendah.
	4	Perkembangan Organik	Menghormati & menghargai sifat2 khusus suatu masyarakat, dan memungkinkan serta mendorongnya untuk berkembang sesuai dengan caranya yang unik.
	5	Keseimbangan	Global/lokal, Yin/Yang, Gender, Hak/tanggungjawab, Perdamaian dan koperasi.
	6	Mengatasi struktur	Struktur2 & proses2 pengembangan masyarakat dpt memperkokoh struktur2 penindasan yg dominan, mis. dengan membabi-buta ikut memenuhi prosedur2 pihak penguasa.

	yang merugikan	Pekerja Masy. perlu membantu masyarakat untuk membicarakan permasalahan dan kegelisahan mereka, dan mulai menemukan segala sesuatu secara bersama, bukan secara perorangan, agar mereka mampu melakukan sesuatu mengenai diri mereka.
7	Mengatasi wacana2 yang merugikan	Perlu bagi pekerja untuk mampu mengidentifikasi dan membongkar wacana kekuasaan dan memahami bagaimana wacana itu memberikan hak istimewa secara efektif dan memberdayakan sebagian masyarakat, sementara memarjinalkan dan melemahkan sebagian masyarakat lainnya.
8	Pemberdayaan	Pemberdayaan adalah suatu bentuk perubahan yang radikal, yang akan menjatuhkan struktur2 dan wacana dominasi yang ada.
		Membantu menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan secara sosial, dan pemberdayaan untuk anggota masyarakat lokal, terciptanya struktur berbasis masyarakat yang lebih efektif.

	9	Hak Asasi Manusia	<p>Hak Asasi Manusia penting bagi kerja masyarakat baik dalam pengertian negatif (<i>perlindungan</i> hak asasi manusia), maupun pengertian positif (promosi mengenai hak asasi manusia). Dalam pengertian negatif, sangat diperlukan bahwa proyek pengembangan masyarakat selaras dengan prinsip2 dasar hak asasi manusia, antara lain hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk kebebasan berkumpul, dan hak kebebasan berekspresi perlu dilindungi (dokumen PBB).</p>
	10	Definisi kebutuhan	<p>Fokus penting dari praktik sosial yang sangat mendasar (Fay, 1987) adalah mengajak masyarakat berdialog yang akan mengantarkan mereka menjadi lebih memahami kebutuhan mereka 'yang sesungguhnya' (Marcuse, 1964), dan bukan meminta definisi kebutuhan yang dibuat oleh orang/pihak lain.</p>

		orang/pihak lain.
11	Menghargai pengetahuan lokal	Bahwa pengetahuan dan keahlian lokal mungkin menjadi paling bernilai dalam memberikan informasi tentang pengembangan masyarakat, dan pengetahuan serta keahlian lokal ini perlu diidentifikasi dan diterima, bukan ditempatkan lebih rendah dari pengetahuan dan keahlian orang luar. Tentunya ada saat2 kapan pengetahuan dari luar diperlukan, tapi hal ini harus menjadi opsi terakhir, hanya setelah pengetahuan yang diperlukan dari masyarakat itu tidak tersedia.
12	Menghargai budaya lokal	Menghargai budaya lokal diperlukan untuk mengatasi persoalan globalisasi budaya yang merampas identitas budaya masyarakat, dan bahwa tradisi dan proses budaya lokal diakui dan didukung sebagai bagian dari proses pengembangan masyarakat, dengan catatan budaya lokal itu tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, keberlanjutan dan kebutuhan untuk mengatasi struktur dan wacana yang merugikan.
13	Menghargai sumber daya lokal	Gagasan mengenai menetapkan kebutuhannya sendiri (self-reliance) pada prinsip no. 10, mengimplikasikan bahwa masyarakat seharusnya berupaya memanfaatkan sumber dayanya sendiri (sumber daya finansial, teknik, alam dan manusianya), bukan mengandalkan

		dukungan dari luar.
14	Menghargai keterampilan masyarakat lokal	Bagaimanapun, masyarakat lokal adalah orang2 yang paling mengetahui masyarakat dan konteks lokalnya, dan keterampilan2 yang telah dikembangkan secara lokal mungkin menjadi keterampilan2 yang akan sangat dibutuhkan dalam lingkungan tersebut.
15	Menghargai proses lokal	Karena segala sesuatu tidak akan berhasil ketika dipaksakan dari luar, sehingga struktur dan proses berbasis masyarakat dipandang sebagai alternatif yang lebih tepat.
		Pendekatan pengembangan masyarakat perlu benar2 bertolak dari dalam masyarakat, dengan cara yang sesuai dengan konteks yang spesifik dan sangat peka terhadap budaya masyarakat lokal, tradisi dan lingkungan.
16	Partisipasi	Pekerja masyarakat perlu memahami kompleksitas partisipasi, cara yang diperjuangkan dan tujuan yang berbeda yang hendak dicapai. Golongan, gender, dan ras/etnis perlu diperhatikan dalam partisipasi

		(untuk menjaga inklusivitas)
		Sebuah analisis partisipasi sebagai pemberdayaan sangatlah penting. Suatu apresiasi dari serangkaian pengetahuan dan keterampilan sangat diperlukan untuk memaksimalkan partisipasi dan penggunaan keterampilan ini menjadi sentral untuk proses bottom-up.
17	Proses, hasil dan visi	Sangat untuk membicarakan visi, bukan hasil; hal ini memang kurang spesifik dibandingkan gagasan mengenai hasil, tapi masih menekankan pentingnya menempatkan gagasan mengenai dimana kita mulai, dan untuk apa semua itu, serta penting bahwa ide ini dicakup dalam mempertimbangkan proses, karena ide tersebut memberikan visi yang menetapkan tujuan bagi proses.
18	Integritas proses	Proses dalam pengembangan masyarakat lebih penting daripada hasil, tetapi dalam pengertian yang sesungguhnya hasil tetap penting; bagaimanapun, tujuan diharapkan untuk membangun proses masyarakat yang dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, proses harus sesuai dengan, dan juga mencerminkan harapan visi atau hasil, menyangkut isu-isu keberlanjutan, keadilan sosial dan hak asasi manusia.

19	Menumbuhkan kesadaran	Pekerja masyarakat perlu dapat melihat dan menggunakan peluang apapun untuk melakukan penumbuhan kesadaran secara informal, selama percakapan sehari-hari dengan orang ² di masyarakat.
		Ada empat aspek penumbuhan kesadaran, yaitu : hubungan personal dan politik, mengembangkan hubungan dialogis, berbagi pengalaman tentang penindasan, dan membuka kemungkinan untuk bertindak.
20	Kerja-sama dan konsensus	Perspektif ekologis dan pendekatan tanpa kekerasan, keduanya menekankan pentingnya struktur kooperatif, bukan struktur kompetitif. Oleh karena itu, perlu membangun struktur dan proses alternatif, yang didasarkan pada kerjasama, bukan konflik, dengan pembuatan keputusan secara mufakat atau konsensus.
21	Langkah pembangunan	Konsekuensi alamiah dari perkembangan organis, yaitu bahwa masyarakat itu sendiri yang harus menentukan langkah untuk melakukan perkembangan. Usaha untuk 'mendorong' proses pengembangan masyarakat yang terlalu cepat dapat menimbulkan proses yang dikompromikan, masyarakat jadi kehilangan rasa memiliki proses itu, dan hilang juga komitmen orang ² yang terlibat.

22	Perdamaian dan anti-kekerasan	<p>Dalam konteks ini, prinsip anti kekerasan menyatakan lebih dari sekadar membebaskan kekerasan fisik di antara orang-orang.</p> <p>Gagasan tentang kekerasan struktural berarti bahwa struktur dan institusi sosial dapat dipandang sebagai suatu bentuk kekerasan.</p>
		Bahwa proses harus mencoba untuk menegaskan, bukan menyerang, untuk mencakup, bukan mengucilkan, bekerja berdampingan, bukan bersaing, dan menengahi, bukan menghadapi.
23	Inklusivitas	Bahwa proses yang berjalan selalu mencoba untuk merangkul bukan mengucilkan; semua orang pada hakikatnya dihargai sekalipun mereka menyampaikan pandangan yang bersebrangan, dan orang2 dimungkinkan memiliki peluang untuk mengubah posisi mereka dari suatu persoalan tanpa 'wajah kekalahan'.
24	Membangun masyarakat	Selalu berupaya menyadarkan orang2nya, memperkuat ikatan di antara anggota2nya dan menekankan ide tentang saling- ketergantungan (interdependen), bukan
		ketergantungan (dependen), bukan juga kemandirian (independen). Jadi memperkuat hubungan di antara orang2 melalui membangun masyarakat (community building).

25	Menghubungkan yang global dan lokal	Dalam memahami suatu masyarakat, seorang pekerja masyarakat harus mampu memahami global maupun lokal, dan bagaimana keduanya saling mempengaruhi/berinteraksi
26	Praktik anti-kolonialis	Pekerja Masy. perlu melawan praktek kolonialis :
		1. melalui kesadaran diri yang kritis (self- awareness), kesadaran politik dan perenungan
		2. pekerja yg menempatkan dirinya dalam budaya yg dominan atau menguasai perlu menjabarkan implikasinya
		3. menyediakan ruang utk memunculkan wacana dan tindakan alternatif, mengungkapkan perlawanan alamiah dari pihak yang terjajah
		4. dengan melangkah mundur, mendengar dan belajar, sebelum terburu-buru mengambil tindakan
		5. menjaga solidaritas dengan masyarakat dan berbagi agenda umum
		6. bekerja dengan masyarakat

			7. menerapkan uji timbal balik, dan bertanya bagaimana pekerja akan merasakan jika situasinya terbalik, dan dirinya yang dikenai 'pembangunan' yang diajukan untuk masyarakat
--	--	--	---

Dukungan keluarga Wujudkan Indonesia bebas Stunting

Oleh karena itu, energi Teman keluarga berkualitas tinggi, kolaborasi antar industri dan antar sistem Pendampingan yang baik adalah kunci sukses percepatan Pengurangan stunting. Pedoman pelaksanaan dukungan keluarga dengan upaya percepatan Pengurangan stunting pada tingkat desa/kerlahan dirangkai sebagai berikut: Menyelesaikan pekerjaan percepatan pengurangan stunting akibat lalu lintas Sektor tingkat desa/kerlahan yang ada. Konsep pemberdayaan Keluarga merupakan cara kerjasama antara program serta kegiatan lintas budaya Daerah tingkat desa. Jangan pada program, kegiatan dan konsep Dukungan keluarga pun bekerja dengan eksekutif lapangan Saran lintas departemen untuk membantu Anda bekerja dengan keahlian Anda Setiap fitur untuk mengisi kesenjangan implementasi Mempercepat pengurangan stunting. Kelompok dukungan keluarga mencakup Bidan, Pengurus TP PKK, Pengurus Keluarga Berencana, dan Pengurus lainnya di Desa Memimpin proses pengurangan stunting, terutama di tingkat hulu. Menerapkan langkah-langkah deteksi dini untuk meminimalkan atau mencegah upaya Faktor risiko retardasi pertumbuhan. Oleh karena itu, diharapkan kerjasama ini dapat terlaksana. Bentuk sinergisitas dan upaya dalam pelaksanaan penanggulangan stunting Dapat secara efektif dan efisien mempercepat dan melaksanakan pengurangan stunting konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018. Departemen Kesehatan Republik Indonesia ; 2018
- Keputusan Menteri tentang Standar Antropometri Anak
- World Health Organization. Global Health Observatory (GHO) data 2019. Available at <https://www.who.int/gho/child-malnutrition/stunting/en/>.
- Indonesia KKR. Buletin Stunting. Kementeri Kesehat Republik Indones. 2018;301(5):1163–78.
- The World Bank. Gross Development Per Capita. 2018. Available at [https:// data. Worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?page=1](https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?page=1)
- M. Ghazian, and Candra A. Pengaruh Suplementasi Seng Dan Zat Besi Terhadap Tinggi Badan Balita Usia 3-5 Tahun Di Kota Semarang. Journal of Nutrition College, vol. 5, no. 4, pp. 491-498, May.2017.<https://doi.org/10.14710/jnc.v5i4.16463>
- Candra A, Puruhita N, JS. Risk Factors Of Stunting Among 1-2 Years Old Children In Semarang City. Medical bulletin. MEDIA Med Indones [Internet]. 2011 Available from:<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmi/article/view/3254>
- Goodarz Danaei, KGA, Christopher R. Sudfeld1, Gu`nther Finkl, Dana, Charles McCoy, Evan Peet1, AS, et al. Risk Factors for Childhood Stunting in 137 Developing Countries: A Comparative Risk Assessment Analysis at Global, Regional, and Country Levels; Available from: 49 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5089547/pdf/pmed.1002164.pdf>
- Ife, Jim. 1997. Community Development, Creating Community Alternatives Vision, Analysis and Practice. Melbourne: Addison Wesley Longman.

- Rehman AM, Gladstone BP, Verghese VP, Muliyl J, et al. Chronic growth faltering amongst a birth cohort of Indian children begins prior to weaning and is highly prevalent at three years of age. *Nutrition Journal* 2009;8:44.
- El Taguri A, Betilmal I, Mahmud SM, Monem Ahmed A, et al. Risk factors for stunting among under-fives in Libya. *Public Health Nutrition* 2009 Aug;12(8):1141-9.
- Rehman AM, Gladstone BP, Verghese VP, Muliyl J, et al. Chronic growth faltering amongst a birth cohort of Indian children begins prior to weaning and is highly prevalent at three years of age. *Nutrition Journal* 2009; 8:44.
- Audrey HM, Candra A. Hubungan Antara Status Anemia Ibu Hamil Trimester Iii Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah Di Wilayah Kerja Puskesmas Halmahera, Semarang. *J Kedokt DIPONEGORO* [Internet]. 2016 [cited 2019 Oct 8];5(4):966–71. Available from: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/medico/article/view/14458/13988>
- Saptyaningtuyas N, Candra A. Hubungan Kejadian Anemia Pada Ibu Menyusui Dengan Status Gizi Bayi Usia 7-12 Bulan. *J Nutr Coll.* 2013;2(4):713–9.
- Vilcins D, et al. Environmental Risk Factors Associated with Child Stunting: A Systematic Review of the Literature. *Annals of Global Health.* 2018; 84(4), pp. 551– 562. DOI: <https://doi.org/10.29024/aog>
- Candra A., Nugraheni N., Hubungan Asupan Mikronutrien Dengan Nafsu Makan Dan Tinggi Badan Balita," *Jnh (Journal Of Nutrition And Health)*, Vol. 3, No. 2, Aug. 2015
- Sari EM, Juffrie M, Nurani N, Sitaresmi MN. Asupan protein, kalsium dan fosfor pada anak stunting dan tidak stunting usia 24-59 bulan. *J Gizi Klin Indones.* 2016;12(4):152.

- Ghosh S, Suri D, Uauy R. Assessment of protein adequacy in developing countries: quality matters. *Br J Nutr* 2012;108(Suppl 2):S77–87.
- Semba RD, Shardell M, Sakr Ashour FA, Moaddel R, Trehan I, Maleta KM, Ordiz MI, Kraemer K, Khadeer MA, Ferrucci L, et al. Child stunting is associated with low circulating essential amino acids. *E BioMedicine* 2016 ;6:246–52.
- Nuss ET, Tanumihardjo SA. Quality protein maize for Africa: closing the protein inadequacy gap in vulnerable populations. *Adv Nutr* 2011;2:217–24.
- Van Stuijvenberg ME, Nel MNutr J, Schoeman MCur SE, Lombard CJ, du Plessis MNutr LM, Dhansay FCPaed MA. Low intake of calcium and vitamin D, but not zinc, iron or vitamin A, is associated with stunting in 2-to 5- year-old children. [cited 2020 Jan 9]; Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.nut.2014.12.011>
- Uush T. Calcium intake and serum calcium status in Mongolian children. *J Steroid Biochem Mol Biol* [Internet]. 2014 [cited 2020 Jan 9];144:167–71. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jsbmb.2014.01.010>
- Torbjorn Lind, Bo Lönnnerdal, Hans Stenlund, Indria L, et al. Acommunity-based randomized controlled trial of iron and zinc Supplementation in Indonesian infants: effects on growth anddevelopment. *Am J Clin Nutr* 2004; 80: 729–36.

MAHASISWA PENCERAH: MENGUBAH “*BAD HABIT*” MENJADI “*GOOD HABIT*”, SEBUAH PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN BERKELANJUTAN DARI PINGGIR KALI BRANTAS, MALANG

Helfi Agustin

Universitas Ahmad Dahlan

Email: helfi.agustin@ikm.uad.ac.id

Riset Untuk Praktikum “Event”

Pada bulan Februari 2016, sekelompok mahasiswa jurusan *public relation* Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mendapat tugas praktikum. Dosen meminta mereka agar membuat sebuah acara sehingga untuk itu mahasiswa harus membangun relasi dengan pihak tertentu. Sebulan kemudian mereka sepakat akan membangun relasi dengan PT. Inti Daya Guna Aneka Warna (Indana), sebuah perusahaan cat yang telah 32 tahun menjalankan usaha di Kota Malang. Mereka mencari informasi secara mendalam perilaku masyarakat di sana terhadap produk cat produksi PT. Indana. Hasil penelitian tersebut adalah masyarakat Kota Malang kurang mengenal merk cat PT. Indana. Pada bulan yang sama kelompok mahasiswa tersebut berdiskusi dan membuat proposal konsep event untuk

diajukan kepada *marketing communication* PT. Indana, tetapi ternyata proposal mereka ditolak karena dianggap kurang menarik. Kabar baiknya adalah mahasiswa diberi harapan, PT Indiana bersedia mendanai program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan syarat mahasiswa membuat proposal pemberdayaan masyarakat.

Bulan berikutnya mahasiswa berdiskusi kembali dengan pembimbing mengenai konsep CSR, atas saran dosen pembimbing, mereka kembali kepada *marketing communication* untuk mengulik dalam bentuk apa kegiatan CSR PT. Indana. Ternyata CSR yang dilakukan lebih banyak bersifat amal yang sifatkan insidental (tidak ada keberlanjutannya). Kemudian mahasiswa melakukan riset tentang perilaku kurang baik di masyarakat yang perlu mereka ubah melalui kegiatan pemberdayaan. Mereka melakukan susur sungai dan berjalan di kampung-kampung kumuh bantaran Kali Brantas. Akhirnya Kelurahan Jodipan menjadi pilihan lokasi pemberdayaan setelah mereka mendapat masukan dari dosen. Jarak pemukiman yang jauh dengan tempat pembuangan sampah mendorong warga Kampung Jodipan mencari cara termudah dengan membuang sampah ke luar jendela mereka yang di bawahnya mengalir Kali Brantas. Mahasiswa ingin membangun budaya baru pada Masyarakat agar Kali Brantas tetap bersih.

Pada April 2016, bertemunya permasalahan warga dengan permasalahan PT. Indana akhirnya menghasilkan ide mewarnai Kampung Jodipan. Diharapkan warna-warni di rumah warga menjadi pengingat bagi warga agar tidak lagi membuang sampah di sungai, sehingga tidak mengotori sungai. Pada tahap persiapan di bulan Mei 2016, mahasiswa melakukan sosialisasi kepada warga sekaligus mengadvokasi pemuka masyarakat setempat tentang program *decofresh* dan tujuannya. Kegiatan ini akan menghasilkan budaya baru warga dan mengubah kampung yang tadinya berkesan kumuh menjadi semarak dengan warna sekaligus juga menjadi promosi bagi klien mahasiswa. Ternyata masyarakat antusias dan

bersedia melakukan gotong royong. Pada bulan Mei warga Jodipan, bersama dengan pasukan TNI AU dan 10 orang tukang cat PT. Indana, serta komunitas Pegiat Mural Malang mulai melakukan pengecatan dan membuat mural. Warga berlomba-lomba mengecat warna rumahnya sesuai warna pilihan dengan syarat warnanya harus berbeda dengan warna rumah tetangga di sebelahnya.



Gambar 9. kampung warna-warni-Jodipan

Sesuai rencana pada tanggal 4 September 2016, peresmian dilakukan oleh Walikota Malang, Rektor UMM dan *vice president* PT. Indana. Namun sebelumnya yaitu pada Bulan Agustus 2016 sebagai bagian dari advokasi mahasiswa dan dosen pembimbing mengajak Walikota Malang dan *vice president* PT. Indana ke Kampung Warna-warni Jodipan, pada saat itu ada ide dari Walikota Malang agar *vice president* PT. Indana membantu pembangunan jembatan penghubung antara kampung Jodipan dan Kampung Kesatrian yang berada di seberang sungai Kampung Jodipan. Permintaan kedua adalah agar Kampung Kesatrian juga dicat seperti Kampung Jodipan. Menangkap ide jembatan tersebut, tim ahli di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang mendesain jembatan kaca. Desain jembatan kaca dibuat oleh mahasiswa teknik sipil Mahatma Aji Pangestu dan Khairul Ahmad di bawah bimbingan dosennya Lukito Prasetyo. Kedua mahasiswa tersebut pernah memenangkan kontes desain jembatan dan desain bangunan Gedung Indonesia pada tahun 2015.

Pada saat peresmian, mahasiswa mengundang wartawan dan memanfaatkan berbagai platform media social sehingga dalam waktu singkat kampung warna-warni Jodipan menjadi viral di Indonesia, dan banyak dikunjungi oleh wisatawan. Sementara itu, kegiatan untuk mengedukasi masyarakat agar berperilaku bersih, tidak membuang sampah ke sungai dan mempersiapkan mental masyarakat terhadap kunjungan wisatawan masih terus menerus dilakukan.

Pada bulan September dan November 2016 berturut-turut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Basuki Hadimulyono) dan duta besar Australia mengunjungi Kampung Warna-warni Jodipan karena tertarik dengan kegiatan pemberdayaannya. Pada tanggal 9 Mei 2017 menjadi hari bersejarah karena peletakan batu pertama pembangunan jembatan kaca yang menghubungkan 2 kampung berseberangan di Kali Brantas Kota Malang. Pada tanggal 9 Oktober 2017 jembatan kaca yang diberi nama Jembatan Ngalam diresmikan dan menjadi fasilitas baru bagi wisatawan sehingga pengunjung dapat masuk dari pintu masuk Kampung Kesatrian maupun Kampung Jodipan.



Gambar 10. Peluang usaha dan cenderamata tiket kampung warna-warni

Dari tiket masuk bagi wisatawan Rp.5000 (per tanggal 9 Mei 2022) diganti dengan cenderamata gantungan kunci atau stiker seperti gambar di atas. kegiatan wisata Kampung Warna-warni Jodipan yang

instagramable 100% dikelola oleh warga, tiket masuk menjadi pemasukan bagi kas untuk pemeliharaan kampung warna-warni. Selain itu warga juga dapat berdagang memanfaatkan peluang usaha untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama berkunjung. Masyarakat yang sebelumnya banyak menganggur menjadi punya kesempatan untuk berusaha.

Sekelumit fakta yang penulis ceritakan dikutip dari monumen sejarah kampung warna-warni Jodipan. Perjalanan proses pembelajaran mahasiswa dalam memberdayakan masyarakat, akan menjadi pembahasan kita pada buku ini. Bahkan mahasiswa sebagai bagian dari komunitas yang sedang dalam proses belajar, juga dapat menjadi penggerak, katalisator, fasilitator, pen jembatan/penghubung masyarakat dengan pihak-pihak yang sulit diakses oleh masyarakat sendiri agar bisa bangkit dari kondisi yang kurang adil dalam porsi pembangunan. Mari kita lihat hubungan fakta di atas dengan teori tentang pembangunan dan pemberdayaan pada sub bab 3.

Teori-Teori Pembangunan

Banyak sekali definisi tentang pembangunan. Ada yang mendefinisikan pembangunan sebagai peningkatan kualitas hidup dan kondisi kehidupan (Wahyudi, 2018). Pembangunan juga didefinisikan sebagai perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan dengan sengaja melalui upaya-upaya yang terorganisir dan terencana (Portes, 2015) atau secara tidak langsung disebut sebagai cita-cita baik yang diharapkan. Merujuk pada definisi pembangunan menurut ekonomi, pembangunan adalah proses yang dilakukan secara sadar untuk kenaikan pendapatan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi bangsa dan negara. Pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (kuantitas, keahlian dan jiwa kewirausahaan), sumber daya modal, lapangan pekerjaan, kestabilan politik dan kebijakan pemerintah (Jamaludin, 2016).

Kata pembangunan dikenal secara historis setelah Perang Dunia II (1944), ketika itu ekonom Barat memperkenalkan konsep pembangunan dengan slogan modernisasi untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara bekas jajahan. Dengan harapan negara baru merdeka tersebut meniru negara Barat yang mereka anggap lebih maju. Teori modernisasi menawarkan empat isu pokok yaitu pertumbuhan ekonomi (tercermin dari pendapatan per kapita (*Growth National Product*), akumulasi modal yang ditandai dengan investasi (kebanyakan berinvestasi untuk modal industrialisasi), transformasi structural dan peran pemerintah (Mashud, 2014).

Para pendiri bangsa Indonesia yang pada saat itu baru merdeka dari imperialisme barat, bercita-cita membawa masyarakatnya kepada kesejahteraan seperti yang dimuat dalam UUD 45 pasal 33, bahwa negara bertanggung jawab terhadap kemakmuran rakyat. Pemimpin Indonesia baik Soekarno dan Soeharto terpengaruh untuk menggunakan pembangunan ala Eropa (westernisasi) dengan dikirimnya para pakar ekonomi untuk studi di barat. Pada tahun 1980an, konsep pembangunan modernisasi dievaluasi dan dinilai gagal bahkan dianggap sebagai bentuk kolonialisme gaya baru. Pemberian bantuan dana cair dan dana untuk pembangunan infrastruktur serta bantuan teknis transaksi perdagangan yang melindungi hambatan perdagangan menurut negara barat melalui pembentukan badan khusus yang mereka namakan IMF, Bank Dunia dan World Trade Organization (WTO) justru mencekik negara miskin yang dihutangi. (Mashud, 2014).

Kegagalan teori modernisasi menjadi tonggak lahirnya teori dependensi yang bertolak belakang dengan teori modernisasi. Tokohnya adalah Karl Max. Menurut teori dependensi, keterbelakangan negara dunia ketiga terjadi karena kapitalisme. Penguasaan modal yang dianggap sebagai faktor produksi menyebabkan kaum buruh dieksploitasi karena dengan prinsip modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-

besarnya menjadikan pekerja bekerja keras untuk dibayar rendah namun di sisi lain menjadikan pemilik modal semakin kaya. Pemilik modal adalah representasi negara maju, sedangkan kaum buruh adalah representative dari negara yang belum maju (negara dunia ketiga). Bentuk pemerasan ini ada tiga jenis yaitu kapitalisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme. Eksploitasi kapitalisme adalah dengan perdagangan dimana produksi dan penguasaan sumber daya alam negara ketiga oleh negara Eropa dengan pembentukan perusahaan multinasional (penanaman modal asing dan modal pemerintah). Kedua eksploitasi kolonialisme dalam bentuk sistem perbudakan yaitu pemberian upah tenaga kerja murah terhadap negara dunia ketiga; misalnya investasi pabrik sepatu merk *Nike* di Indonesia, ketika ada tuntutan UMR maka pengusaha memindahkan pabriknya ke Vietnam karena kesediaan Vietnam untuk kesepakatan upah yang lebih murah. Ketiga adalah eksploitasi dimana penduduk negara miskin yang jumlahnya sangat besar menjadi calon konsumen bagi pedagang kapitalis.

Kenyatannya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak dapat mengakomodir pembangunan bagi semua masyarakat. Suatu hal yang tidak dapat dielakkan, proses pembangunan akan selalu menghasilkan dua kutub komunitas yaitu komunitas yang beruntung dan komunitas yang tidak beruntung. Pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, hanya mampu mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik pada segelintir orang. Hasil pembangunan ekonomi yang telah dicapai tidak merata dan adil antar daerah maupun antar kelompok sosial ekonomi (Jamaludin, 2016).

Paradigma pembangunan yang berkeadilan memunculkan teori baru yakni *people centered development theory*. Teori pembangunan yang bertumpu pada rakyat ini menekankan pembangunan yang dilakukan harus bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan hanya semata berorientasi pada pertumbuhan

ekonomi maupun menjadikan negara kuat dalam bidang tertentu saja. Perbedaan pandangan tentang teori pembangunan ini dengan teori modernitas dan teori dependensi, membuat teori ini disebut dengan teori pembangunan alternatif (*alternative development theory*) (Mardikanto, 2010).

Konsep pembangunan alternatif adalah usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat untuk mengarahkan minat mereka membuat keputusan yang menekankan kekuatan manusia bukan untuk mengabadikan ketergantungan kepada birokrasi sehingga pembangunan harus menjadikan manusia sebagai sasaran pokok dan sumber paling strategis.

Konsep Pengembangan Masyarakat

Menurut analisis Marxisme, pendekatan pembangunan dengan teori modernism telah mendorong kapitalisme industri. Layanan sosial oleh negara seperti kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesejahteraan yang menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pelayan publik juga diambil alih oleh industri kapitalisme dengan hadirnya rumah sakit swasta, sekolah swasta, perumahan yang dijual oleh pihak swasta, asuransi swasta, dll, Menurut analisis Marxis negara akan memelihara hubungan simbiotik layanan publik dengan swasta melalui pendekatan kapitalisme lanjut (*advance capitalism*). Sistem kapitalisme industri yang melibatkan pemerintah ini pada akhirnya tumbuh menjadi sistem industri ekonomi global. Globalisasi berarti di dalam sebuah dunia (lingkungan) yang terbatas dibangun suatu pertumbuhan ekonomi tanpa batas. Globalisasi mendorong eksploitasi yang melahirkan tersentralisasinya kekayaan pada beberapa orang saja (Ife and Tesoriero, 2016) .

Peningkatan konsentrasi kekuatan ekonomi ke segelintir orang telah mengikis komunitas dan mendorong individualism pada masyarakat Barat. Kompetisi melemahkan ikatan sosial karena kegagalan berprestasi dikaitkan dengan kekurangan individual

sehingga untuk menang dalam kompetisi individu cenderung menyingkirkan yang lain, pihak yang lain bukan lagi dirangkul untuk diajak bersatu tetapi ditakuti, dicurigai bahkan dikeluarkan. Kepercayaan terkikis diganti dengan kecurigaan. Kompetisi bukan hanya terjadi pada antar individu tetapi kebijakan yang kompetitif level pemerintah telah mengubah hubungan kerja sama antar organisasi sehingga informasi tidak dapat dibagi bersama karena ketakutan akan daya saing pada proses kompetisi.

Seiring dengan hancurnya masyarakat tradisional sebuah perubahan mendasar terjadi dalam proses interaksi manusia yaitu perubahan struktur dan pola interaksi masyarakat. Pola interaksi yang relatif sedikit dan hanya dengan orang yang mereka kenal dengan baik saja disebut dengan *geminschaft* dimana ini biasanya terjadi di desa. Sedangkan orang yang berinteraksi dengan interaksi terbatas terhadap banyak orang yang memiliki peran tertentu disebut dengan *gesselschaft*, misalnya individu berkontak dengan penjaga toko, guru, sopir bus, pelanggan, perawat, sekretaris dll karena peran tertentu mereka. Pengetahuan yang di luar peran khusus mereka dianggap tidak perlu. Adanya transformasi dari *gemeinschaft* ke *gesselschaft* menimbulkan transisi dari interaksi yang akrab sebagai tetangga menjadi interaksi karena hubungan kerja yang semakin profesional yang banyak kita temui di perkotaan. Pengembangan masyarakat pada hakikatnya bertujuan mengembalikan kecenderungan pergeseran pola interaksi masyarakat yang bersifat interaksi terbatas (*gesselschaft*) ke interaksi yang lebih dalam (*gemeinschaft*) sehingga masyarakat menjadi lebih akrab dan saling membantu dalam kehidupan komunitasnya (Ife and Tesoriero, 2016).

Keanggotan dalam suatu kelompok mengandung konsekuensi hak dan kewajiban, sehingga orang akan memberikan kontribusi atau berpartisipasi dalam komunitas. Ciri-ciri komunitas sebagai suatu bentuk organisasi sosial : 1). Kelompok kecil dalam masyarakat sehingga orang dengan dapat berinteraksi dalam kendali yang mudah.

2). Adanya perasaan sebagai bagian dari kelompok sehingga memberikan rasa diterima, dihargai dan bagian dari identitas kelompok.

Eksplorasi sumber daya yang tanpa batas pada masa sekarang, akan menjadi barang langka/hilang bagi generasi berikutnya. Sehingga muncullah suatu ide tentang pembangunan berkelanjutan. Menurut perspektif Green, Generasi yang akan datang diharapkan masih dapat memanfaatkan sumber daya yang ada ketika pada masanya mereka nanti membutuhkannya. Konsep keberlanjutan yang mendasari perspektif ekologis terus berkembang pada kajian hayati dan fisik. Analisis Green yang pada awalnya berfokus pada populasi, kelangsungan spesies polusi, energi kemudian diterapkan dalam sistem ekonomi. Perpaduan perspektif ekologis dan keadilan sosial/HAM memperluas konsep keberlanjutan sosial. sehingga sistem berlanjut dari keluarga, komunitas, birokrasi, lembaga pendidikan dan organisasi relawan hingga lembaga sosial.

Terdapat empat strategi pengembangan masyarakat (*community development*), yakni 1) strategi pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) yang dilakukan terhadap masyarakat yang dianggap lemah, 2) strategi pengorganisasian masyarakat (*community organizing*) yakni strategi yang dilakukan terhadap masyarakat yang sudah kuat tetapi belum terorganisir, 3) strategi penguatan masyarakat (*community engagement*) bertujuan menguatkan hubungan komunitas dengan cara menjadi penghubung bagi masyarakat dengan jejaring yang dibutuhkan untuk pembangunan, serta 4) strategi advokasi (*community advocacy*) dimana yang diintervensi bukan masyarakatnya akan tetapi pemerintah. Strategi-strategi tersebut mengaktifkan komunitas, sebuah komunitas perlu dipelihara, dirawat, dihidupkan kembali dalam suatu gerakan.

Prinsip Fundamental Perubahan Sosial Di Kampung Warna-Warni Jodipan

Jika kita menghubungkan fakta empirik yang ditemukan pada proses pengembangan masyarakat di Kampung Jodipan dengan teoritik, maka semua strategi pengembangan masyarakat diaplikasikan oleh mahasiswa UMM, mereka melakukan strategi pemberdayaan pada masyarakat daerah aliran sungai yang merupakan orang yang lemah dari struktur ekonomi dan kekuasaan sehingga tersingkir menempati tanah-tanah di pinggir aliran sungai dan jauh dari fasilitas warga seperti tempat pembuangan sampah yang kemudian membawa mereka pada perilaku membuang sampah ke sungai. Walaupun dalam pelaksanaannya mahasiswa UMM lebih melihat sungai sebagai asset yang mesti diselamatkan dari sampah-sampah.

Strategi pengorganisasian digunakan ketika mahasiswa mendatangi warga menggunakan jalur-jalur struktur sosial kemasyarakatan yaitu *kulonuwun* kepada pak RW dan RT, baru kemudian mensosialisasikan program mereka kepada masyarakat luas. Setelah kampung mereka menjadi destinasi wisata, masyarakatpun mengorganisasikan diri dengan membentuk kepengurusan pengelolaan wisata, warga juga mengatur perannya sendiri dalam pengelolaan kampung wisata, misalnya ada yang di bagian tiket, bendahara kas, ketua, sekretaris dll. Strategi *community engagement* digunakan ketika mahasiswa menjadi penghubung bagi masyarakat dengan dosen, dengan pihak PT. Indana, dengan Bapak Walikota, dengan TNI AU, wisatawan bahkan menteri dan duta besar yang menjadi tamu mereka, serta media massa penggiat media social. Strategi *community advocacy* dilakukan dengan membuat proposal kepada PT. Indana, mengundang walikota untuk meresmikan jembatan, mengundang tamu. Hasil perubahan social yang dilakukan oleh mahasiswa UMM mendukung penelitian sebelumnya yang menguatkan pertimbangan kembali keterlibatan komunitas

universitas sebagai katalis untuk pembangunan berkelanjutan. Dimana peneliti melihat tersebut berdasarkan latar belakang pencarian Afrika untuk pembangunan, yang menuntut universitas-universitasnya untuk berbuat lebih banyak dalam berkontribusi pada dorongan pembangunan (Mbah, 2019).

Prinsip fundamental dalam pengembangan masyarakat di Kampung Jodipan yaitu (Ife and Tesoriero, 2016):

a. Perubahan dari bawah

Menurut teori pembangunan alternatif, ciri pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah prakarsa pembangunan harus datang dari masyarakat itu sendiri, sehingga proses pengambilan keputusan untuk melakukan perubahan tahap demi tahap dilakukan oleh masyarakat walaupun adakalanya perlu pemantik inisiatif dari pihak luar.

Dalam hal ini, mahasiswa UMM adalah bagian dari komunitas terpelajar. Melalui bimbingan dosen, mahasiswa UMM mahasiswa mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan sosial di Kampung Jodipan. Mahasiswa melakukan tahap-tahap yang dikelola berdasarkan kaidah ilmu seperti melakukan riset untuk menganalisis situasi sebelum membuat *project event*, membuat proposal yang merupakan bentuk perencanaan. Mahasiswa mensosialisasikan tentang permasalahan yang mereka temukan di Kali Brantas kepada pemuka masyarakat Jodipan dan masalah pemasaran cat PT Indana yang belum dikenali oleh masyarakat kepada *manajer marketing*. Hal ini dilakukan menetapkan kebutuhan mereka masing-masing dan bagaimana memenuhinya. Mahasiswa juga menjadi pen jembatan antara masyarakat dengan PT Indana, pemerintah daerah, kementerian PUPR, kedutaan besar Australia, TNI AU, serta pihak media dan influencer yang memviralkan keberadaan Kampung Warna-warni.. Diskusi dengan masyarakat penting untuk mengkaji gagasan dari bawah dan siapa saja yang terlibat. Kemudian Bersama-

sama dengan masyarakat melaksanakan perubahan fisik/lingkungan, dan perubahan perilaku social. Hal ini juga sebagai bentuk penghargaan terhadap sumber daya lokal, menghargai keterampilan lokal (misalnya seni mural), menghargai proses lokal, pengetahuan lokal serta menghargai kebudayaan lokal. Salah satu prinsip mendasar pemberdayaan masyarakat, pengalaman masyarakat lokal harus disyahkan sebagai titik awal bagi setiap pekerja pengembangan masyarakat. Landasan ideologis dan teoritis dari perubahan dari bawah adalah: pluralism (adanya keragaman modal dasar dan kehendak), sosialisme demokratis (setiap pendapat dihargai), anarkhisme (kesediaan untuk melakukan perubahan karena pada dasarnya manusia sulit untuk diajak berubah), post kolonialisme (merdeka dari tekanan pihak lain).

b. Adanya partisipasi

Pengembangan masyarakat di Jodipan memaksimalkan partisipasi masyarakat. Masyarakat bersedia hadir dalam musyawarah, masyarakat bersedia bergotong royong mencat kampung, memilih warna cat dan meyepakati warnanya agar berbeda dengan warna cat di sebelah rumah mereka, membuat mural, membersihkan sungai serta partisipasi untuk tidak lagi membuang sampah di sungai, partisipasi menjadi anggota aktif dalam kepengurusan area wisata seperti menjual karcis, memelihara keamanan kampung, partisipasi berjualan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, membuat souvenir/cenderamata, dll. Partisipasi bertujuan membuat semua orang yang berada dalam masyarakat terlibat secara aktif dalam proses dan kegiatan masyarakat. Semakin banyak orang yang terlibat menjadi peserta aktif akan lengkap partisipasinya. Menumbuhkan kesadaran untuk berpartisipasi merupakan suatu pertimbangan penting dalam memahami peran warga dalam demokrasi. Faktor penghalang dalam nilai individualistik yang dominan, pandangan yang tidak seimbang antara hak dan

tanggung jawab. Hambatan ekstrinsik untuk berpartisipasi adalah faktor di luar organisasi yang jelas tidak bisa mengontrol, contohnya konteks sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan yang terjadi pada saat pandemi COVID -19 sehingga membatasi partisipasi masyarakat dalam komunitas di Kampung Wisata Jodipan karena terhalang oleh peraturan isolasi guna pengendalian pandemi.

c. Adanya kepentingan lokal dan global

Pengembangan masyarakat merupakan sebuah strategi yang ditujukan pada perubahan tindakan dan pemikiran di level lokal dan global. Tujuan pengembangan masyarakat Jodipan dalam hal ini adalah perubahan perilaku membuang sampah ke Kali Brantas, walaupun Kali Brantas adalah lingkungan di pemukiman warga Jodipan akan tetapi Sungai sebagai bagian dari ekologi merupakan sumber kehidupan bagi makhluk manusia, hewan dan tumbuhan di sepanjang aliran Kali Brantas. Budaya sungai bersih diakui oleh masyarakat yang lebih luas sebagai bentuk kecintaan terhadap lingkungan dan bumi. Perubahan perilaku tidak membuang sampah ke sungai itu diikuti dengan inovasi menjadikan area kampung berwarna warni sehingga menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung dan berfoto selfie. Foto selfie yang diunggah ke media sosial dan media mainstream menjadikan Jodipan dikenal dan membawa wisatawan lebih banyak datang dari berbagai daerah bahkan para pejabat yang mengapresiasi upaya pemberdayaan masyarakat local sehingga secara tidak langsung meningkatkan sumber ekonomi kampung dan warga. Perekonomian masyarakat secara langsung meningkat tanpa menunggu efek tetesan dari pihak pemodal (*trickle down effect*). Ini mempercepat kesejahteraan masyarakat. Menghubungkan global dan lokal menjadi tantangan besar dalam pengembangan masyarakat. Internet sangat bermanfaat menghubungkan berbagai aktifitas lokal dengan berbagi cerita, pengalaman, keberhasilan dan kegagalan, serta berdialog antar aksi

bersama yang dilakukan pada level global. Hubungan aktifitas-aktifitas lokal dan proses global yang terjadi juga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pembangunan.

Dalam pengembangan masyarakat, proses yang baik merupakan hasil ‘terpenting’ untuk dicapai. Perubahan perilaku membuang sampah tidak terjadi melalui pemaksaan seperti membuat ancaman dan aturan. Adanya proses peningkatan kesadaran muncul bersamaan dengan manfaat yang mereka rasakan setelah wisatawan berkunjung dan menyenangi suasana kampung yang unik, bersih dan nyaman, masyarakat berusaha untuk terus meningkatkan kenyamanan pengunjung melalui Tindakan mereka dalam menjaga kebersihan sungai dan kampung. Proses perubahan perilaku itu tidak dapat dipaksakan namun menggunakan langkah yang alamiah (*natural*) Ketika memulai dan mendorong masyarakat dalam proses perubahan lingkungan dan perilaku melalui pengecatan warna kampung dan gotong royong pembersihan sungai tersebut, merefleksikan tujuan pengembangan masyarakat yang akan menjadi kampung warna warni menjadi kampung wisata yang bersih dan unik. Hasil dari bertambahnya jumlah wisatawan dan semakin dikenalnya kampung warna warni Jodipan menunjukkan proses itu telah berjalan.

Mahasiswa senantiasa berdiskusi dan bermusyawarah baik dengan masyarakat dan dengan PT Indana sebagai pihak penyelenggara CSR dan stakeholder lainnya, Kegiatan pengembangan masyarakat kampung Jodipan bersifat fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal. Musyawarah untuk mencari kesepakatan dan mendapatkan konsensus dari seluruh kelompok/masyarakat yang bertujuan mencapai solusi. Terbinanya relasi antara birokrasi dan komunitas untuk menjaga keseimbangan antar struktur vertikal dan horizontal. Mahasiswa UMM telah berhasil membangun masyarakat. Prinsip pengembangan masyarakat yaitu memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat, menyatukan, membantu untuk saling berkomunikasi dengan cara yang dapat

mengarah pada dialog sejati, pemahaman dan aksi social serta melibatkan pengembangan modal sosial. Komunitas mahasiswa telah menghilangkan isolasi, atau rasa tersisih masyarakat kampung Jodipan yang bermukim di wilayah pinggir sungai, membangkitkan rasa percaya diri masyarakat sehingga menghilangkan perpecahan diantara sesama masyarakat dan terhadap pemerintah, mendorong gotong royong dan melemahkan individualisasi. Pengembangan masyarakat oleh mahasiswa UMM telah mendorong pencapaian pembentukan struktur dan proses level masyarakat yang baik dan langgeng. Adanya pembelajaran sosial dengan prinsip saling belajar dengan melibatkan kolaborasi dan menghasilkan komunitas yang saling menghormati, saling bekerja sama dan cepat menyelesaikan setiap masalah.

Pengembangan masyarakat perlu memperhatikan dimensi kehidupan masyarakat. Begitupula dengan masyarakat Kampung Jodipan yang sebelumnya bergelut dengan masalah ekonomi (kemiskinan), kehidupan social yang terpinggirkan, partisipasi politik yang kurang mendapat perhatian pemerintah, budaya, lingkungan, dan personal yang kurang bersih telah mengalami perubahan dengan meningkatnya level ekonomi, perubahan budaya (perilaku) membuang sampah ke sungai, dan lebih siap dan percaya diri menerima wisatawan serta kondisi lingkungan yang lebih baik sebagai hasil dari pengembangan masyarakat. Dengan pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat akan menghasilkan kondisi dimana; kemiskinan dan pengangguran akan menurun/rendah, relatif adanya kesetaraan, demokrasi dalam berpolitik, tidak adanya persoalan terhadap peran gender, meningkatnya kemampuan masyarakat serta pembangunan yang berkelanjutan.

Tidak terdapat praktik penindasan dalam proses pengembangan masyarakat di Kampung Jodipan, baik penindasan melalui/terhadap institusi media, tidak merusak sistem sosial yang ada, justru menambah struktur organisasi baru yang terlibat langsung

dalam pengelolaan kampung wisata, tidak merubah bahasa, tidak mengganggu ekonomi/pasar dan iklan pihak-pihak tertentu, tidak ada penindasan karena umur, tidak ada penindasan karena ketidakmampuan fisik, tidak ada masalah gender dan ras. Program pengembangan masyarakat di Kampung Jodipan merupakan bentuk dari penghargaan hak asasi manusia. Bahwasanya warga yang hidup di pemukiman pinggir kali Brantas berhak mendapatkan kehidupan yang baik, lingkungan yang sehat dan nyaman serta memiliki hak untuk memperjuangkan hak hidup mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan produktif secara ekonomi. Hak mendapatkan air, udara dan tanah yang bersih, hak untuk hidup sehat dan ha katas rasa aman dari bencana banjir dan longsor. Hak mendapatkan fasilitas jalan dan jembatan yang layak sebagai bagian dari warga negara. Pengembangan Masyarakat di Kampung Jodipan berhasil membangun tatanan masyarakat baru dari segi sosial dengan pola interaksi yang optimis dan percaya diri dalam berpartisipasi pada pembangunan pariwisata Kota Malang, membangun ekonomi warga kampung, dan mampu membangun aspirasi mengembangkan pariwisata, yang prosesnya dan strukturnya dikelola secara berkelanjutan, tidak mengeksploitasi sumber daya air sungai dan mempertimbangkan warisan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mereka berikutnya.

Salah satu strategi pengembangan masyarakat yang diterapkan di Kampung Jodipan adalah pemberdayaan masyarakat. Prinsip pemberdayaan adalah menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan pekerjaan yang membutuhkan kesabaran dan komitmen karena prosesnya yang menuntut banyak waktu, energi untuk masyarakat sementara hasilnya belum tentu memuaskan. Negara yang kuat bukanlah negara yang arogan dan otoriter, tetapi

birokrasi yang mampu menangkap aspirasi dan merespons dengan baik aspirasi tersebut, bertanggung jawab dan transparan. Untuk itu dibutuhkan demokrasi yang inklusif sehingga muncul kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi melalui kesediaan berpartisipasi dalam pembangunan dan kesediaan birokrasi memindahkan power (kekuatan/kekuasaan) kepada masyarakat agar masyarakat mengambil kesempatan untuk bertanggung jawab dalam proses pembangunan (Mardikanto, 2010).

Politik merupakan strategi yang dilakukan mencapai tujuan tertentu. Strategi perubahan perilaku individu di Kampung wisata ini adalah dengan melakukan perubahan lingkungan sehingga warga merasa malu untuk membuang sampah ke sungai karena Kali Brantas telah dibersihkan. oleh masyarakat lain yang telah berkomitmen. Proses pengembangan masyarakat mendorong rasa memiliki yang mendorong mereka untuk memelihara fasilitas/material yang merupakan fasilitas yang dipergunakan secara bersama dan rasa memiliki secara struktural proses seperti nilai dan norma yang akan menjadi alat kontrol masyarakat. Kepemilikan struktur dan proses kontrol masyarakat disepakati dalam suatu musyawarah sehingga keterikatan emosional warga terhadap kampung semakin kuat dan institusi kampung semakin kokoh.

Setiap pengembangan masyarakat harus berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki, Masyarakat Kampung Jodipan pada awalnya adalah masyarakat yang lemah secara ekonomi dan terpinggirkan secara struktur geografis dan politik sehingga membutuhkan bantuan dari pihak luar untuk memberdayakan mereka. Akan tetapi dalam proses memandirikan itu masyarakat disiapkan untuk melepas ketergantungan pada penyandang dana (dalam hal ini PT. Indana) dengan menjadi salah satu destinasi wisata untuk berswafoto yang sedang menjadi trend wisata untuk diunggah di media sosial. Jenis pariwisata berjalan memasuki perkampungan yang berwarna

sehingga menarik untuk difoto ini mampu menarik minat para wisatawan. Kedatangan wisatawan mengangkat ekonomi masyarakat lebih cepat, sehingga masyarakat mandiri untuk mengelola dana pemeliharaan kampung secara berkelanjutan. Rasa percaya diri masyarakat telah pulih ditandai dengan kemampuan masyarakat mengidentifikasi dan mencoba memanfaatkan secara mandiri sumber daya yang dimiliki seperti: keuangan, teknis, alam dan manusia tanpa terus menggantungkan diri terhadap bantuan dari luar.

Dalam perspektif baru pemberdayaan masyarakat, strategi pengembangan masyarakat berbasis aset tidak lagi memandang masyarakat yang diberdayakan adalah kelompok lemah dan tidak memiliki potensi. Pandangan ini meninggalkan cara berpikir penyelesaian masalah, membangkitkan rasa optimisme bahwa masyarakat merupakan sebuah misteri yang perlu diapresiasi dan dicari apa asset/potensinya. Perspektif Strategi pengembangan masyarakat ini disebut konsep *Asset Based Community Development* (ABCD). Manusia itu sendiri adalah modal, ada pula modal sosial informal dalam bentuk keluarga, teman, koneksi, informasi yang dimiliki, modal sosial formal atau modal organisasi, modal politik dalam bentuk kesempatan berpartisipasi, modal sumber daya alam, termasuk ada pula modal budaya dan lingkungan yang kooperatif semua merupakan aset atau modal yang perlu diapresiasi.

Ketika pendekatan ini dilakukan di Sambiledok Sleman, menghasilkan dampak peningkatan orientasi masa depan dan efisiensi pribadi bagi masyarakat (Maulana, 2019). Pengembangan masyarakat dengan pendekatan ABCD juga terbukti berhasil meningkatkan partisipasi anak-anak dan remaja dalam kegiatan promosi kesehatan masyarakat di sekolah (Agdal, Midtgård and Meidell, 2019). Walaupun pendekatan ABCD cukup menjanjikan untuk membangun kapasitas masyarakat dalam mempromosikan keterhubungan, namun cukup sulit memastikan prosedur yang sesuai bagi penderita penyakit kronis karena pengaruh faktor atribut pribadi seperti kepercayaan diri

dari orang dengan penyakit kronis untuk mendapatkan kualitas hidup dan kesejahteraan atas dukungan masyarakat, karena pengalaman pengabaian (Blickem *et al.*, 2018).

d. Kebebasan dari Negara.

Dukungan dari pemerintah yang diterima oleh warga Jodipan dalam bentuk dukungan moril, ide dan jejaring misalnya pada saat peresmian oleh Walikota muncul ide untuk membangun jembatan Kali Brantas dan mewarnai kampung seberang yaitu Kampung Kesatrian seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat, PT Indana dan stakeholder lainnya. Permintaan itu disampaikan oleh Walikota kepada pimpinan PT Indana dan pimpinan UMM sehingga wilayah dan masyarakat yang terlibat dalam pengembangan masyarakat semakin meluas. Walaupun ada teori yang mengatakan bahwa pemberdayaan dilakukan untuk mengisi kekosongan kehadiran pemerintah pada masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan dan meminimalkan jurang ketimpangan, tetapi tidak masalah membangun hubungan jejaring kolaboratif bersama pemerintah.

Pengembangan masyarakat perlu mendorong masyarakat agar memiliki visi. Mahasiswa UMM telah menjawab tantangan menjadikan Kali Brantas menjadi lingkungan yang bebas sampah melalui perubahan perilaku warga yang tidak lagi membuang sampah ke sungai. Alasan mereka tidak membuang sampah ke sungai adalah menjaga agar kampung mereka tetap bersih, nyaman dan indah sehingga tetap dikunjungi oleh wisatawan. Semakin nyaman wisatawan di pekarangan rumah mereka semakin besar peluang usaha mereka dan semakin meningkat perekonomian masyarakat mereka. Masyarakat menjadi lebih terhbung satu sama lain agar tetap dapat memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan. Pengembangan masyarakat yang dilakukan oelh mahasiswa menghubungkan tujuan

langsung dengan visi jangka panjang, dan sebuah visi jangka pendek relevan dengan visi berikutnya secara berkelanjutan.

Pengembangan masyarakat di kampung Jodipan harus mampu menjadi pembangunan organik yang didasarkan atas musyawarah dengan sesama warga dan relasi lainnya, memberi kesempatan untuk berkembang dengan caranya sendiri. Masyarakat memaknai sungai sebagai sumber kehidupan mereka. Menjaga kebersihan sungai berarti menjaga kelangsungan pariwisata di wilayah mereka. Disamping itu wisatawan juga harus menghormati dan menghargai masyarakat lokal, melalui sebuah pemahaman terhadap kompleksitas hubungan antara masyarakat dengan lingkungannya.

Konsekuensi pembangunan organik adalah masyarakat Kampung Jodipan mendapatkan peluang ekonomi yang lebih beragam setelah menjadi kampung wisata, warga juga lebih percaya diri dan mempertahankan perilaku baru untuk tidak membuang sampah dan siap menerima orang asing (wisatawan) dimana penulis memandang ini sebagai sebuah ketahanan. Pengembangan masyarakat dapat dianggap sebagai proses pelibatan, pemberdayaan, dan tindakan yang menumbuhkan ketahanan masyarakat. Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat juga dapat membangun aspek ketahanan tertentu seperti kapasitas adaptif, interaksi dalam keseluruhan sistem, dan kesetaraan (Cavaye and Ross, 2019).

e. **Kepakaran Eksternal.**

Walaupun masih dalam proses pembelajaran dan dibantu oleh keahlian dosen, kemampuan mahasiswa sangat membantu pemerintah dan masyarakat. Pada studi kasus instrumental dalam komunitas Afrika menguatkan pertimbangan keterlibatan komunitas universitas Afrika sebagai katalis untuk pembangunan berkelanjutan (Mbah, 2019). Prinsip tidak ada satu cara yang paling benar dan tidak ada jawaban tunggal yang paling cocok diterapkan bagi setiap masyarakat serta prinsip bahwa lingkungan adalah unik; Apa yang

berhasil diterapkan di suatu suatu belum tentu berhasil di lingkungan lain membutuhkan orang dari luar karena perspektif yang berbeda dari pihak luar. Namun inovasi tersebut perlu diteliti untuk melihat kecocokan dengan situasi lokal.

Belajar dari konsep pengembangan akademik menurut pengalaman di Suriah, untuk pengembangan masyarakat akademik perlu mendorong perubahan kurikuler yang berfokus pada program bukan pada individu. (Parkinson, McDonald and Quinlan, 2020). Pemberian pengalaman belajar pemecahan masalah dan membangun relasi di masyarakat merupakan pengembangan akademik, dimana semua pihak (mahasiswa, dosen, masyarakat) sebenarnya belajar untuk mendapatkan pengalaman bersama, memenuhi kebutuhan, harapan dan akses.

Pengembangan masyarakat yang pada awalnya memecahkan masalah smapah kemudian berkembang menjadi pembangunan pariwisata dengan berjalan dan berfoto di Kampung warna-warni Jodipan telah menghasilkan perubahan social dan menghasilkan wajah baru masyarakat. Perubahan social itu terlihat dari perubahan pola interaksi sosial, gotong royong yang membangun kebersamaan dan komunikasi yang semakin erat dengan sesamanya dalam rangka menciptakan dialog, saling membangun pengertian dan pemahaman masing-masing.

Kasus ini berbeda dengan temuan praktik ekotourisme di Afrika Selatan dimana status sosial ekonomi masyarakat yang mempraktikkan ekowisata di Afrika Selatan tidak menghasilkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, karena lembaga yang berada di garis depan ekowisata di Afrika Selatan belum bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat yang berbeda dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk memastikan bahwa pembangunan masyarakat yang mereka lakukan dapat berkelanjutan (Mnisi and Ramoroka, 2020).

- f. Prinsip pengembangan masyarakat di Kampung Jodipan tanpa kekerasan.

Masyarakat dibangun berdasarkan prinsip-prinsip perdamaian. Proses pengembangan masyarakat untuk memperkuat bukan untuk menyerang, menentang, atau berkonfrontasi. bukan menyisihkan mereka yang memiliki pandangan yang berlawanan dan memberi ruang untuk orang yang mengubah posisinya tanpa merasa malu dan kehilangan harga diri.

- g. Kooperatif.

Proses pengembangan masyarakat yang relatif singkat. Mahasiswa UMM mendapat tugas dari dosen pada bulan Februari, melakukan riset dan membuat proposal kepada PT. Indana pada bulan Maret, hasilnya proposal mereka ditolak dan mereka ditantang untuk membuat kegiatan pemberdayaan. Kemudian bulan berikutnya mereka kembali melakukan riset dan pada bulan Mei mulai membangun relasi dengan warga kampung Jodipan, PT Indana, pemerintah, TNI AU, media massa dan influencer sebagai pihak-pihak yang dapat berkontrobusi. Kampung warna-warni Jodipan diresmikan pada September 2016, maka dapat disimpulkan bahwa warga sangat kooperatif dan tidak banyak pertentangan dan konflik selama proses. Berbeda dengan temuan penelitian di River Town yang merasa terganggu dengan pendatang yang terbuka terhadap pembangunan sehingga memunculkan ketakutan akan kehilangan kendali politik lokal yang akan terutama untuk keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan pembangunan tradisional (Ulrich-Schad, 2018).

Proses pengembangan masyarakat oleh mahasiswa UMM berhasil menumbuhkan kerja sama dan tolong menolong sesama warga. Pengembangan masyarakat harus selalu mencoba memaksimalkan partisipasi, dengan tujuan agar setiap orang dalam

masyarakat bisa terlibat aktif dalam proses dan kegiatan masyarakat. Mahasiswa UMM merupakan mahasiswa dan dosen *public relation*, mereka telah berhasil menghubungkan orang, jaringan, dan kepercayaan dalam hubungan sehingga membentuk dasar kekuatan komunitas. Para akademi sendiri memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk memfasilitasi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kapasitas komunitas yang ada untuk mempengaruhi perubahan (Goel, 2014).

DAFTAR PUSTAKA

- Agdal, R., Midtgård, I. H. and Meidell, V. (2019) 'Can asset-based community development with children and youth enhance the level of participation in health promotion projects? A qualitative meta-synthesis', *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(19). doi: 10.3390/ijerph16193778.
- Blickem, C. *et al.* (2018) 'What is Asset-Based Community Development and How Might It Improve the Health of People With Long-Term Conditions? A Realist Synthesis', *SAGE Open*, 8(3), pp. 15–21. doi: 10.1177/2158244018787223.
- Cavaye, J. and Ross, H. (2019) 'Community resilience and community development: What mutual opportunities arise from interactions between the two concepts?', *Community Development*, 50(2), pp. 181–200. doi: 10.1080/15575330.2019.1572634.
- Goel, K. (2014) 'Understanding Community and Community Development Defining the Concept of Community. Community Work: Theories, Experiences and Challenges', *Community Work: Theories, Experiences and Challenges*, (January 2014), pp. 1–15.
- Ife, J. and Tesoriero, F. (2016) *Community Development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*. ke-3. Edited by Saifuddin Zuhri Qudsy. Yogyakarta.

- Jamaludin, A. N. (2016) *Sosiologi Pembangunan, Pustaka Setia Bandung*.
- Mardikanto, T. (2010) *Model-model Pemberdayaan Masyarakat*.
- Mashud, M. M. (2014) ‘Sosiologi Pembangunan dan Teori Pendekatannya’, *Modul Universitas Terbuka*, 2(1), pp. 1–38. Available at: <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/SOSI4411-M1.pdf>.
- Maulana, M. (2019) ‘Asset-Based Community Development : Strategi Pengembangan Masyarakat’, *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2), p. 259. doi: 10.24235/empower.v4i2.4572.
- Mbah, M. (2019) ‘Can local knowledge make the difference? Rethinking universities’ community engagement and prospect for sustainable community development’, *Journal of Environmental Education*, 50(1), pp. 11–22. doi: 10.1080/00958964.2018.1462136.
- Mnisi, P. and Ramoroka, T. (2020) ‘Sustainable Community Development: a Review on the Socio-Economic Status of Communities Practicing Ecotourism in South Africa’, *International Journal of Economics and Finance Studies*, 12(2), pp. 505–519. doi: 10.34109/ijefs.202012216.
- Parkinson, T., McDonald, K. and Quinlan, K. M. (2020) ‘Reconceptualising academic development as community development: lessons from working with Syrian academics in exile’, *Higher Education*, 79(2), pp. 183–201. doi: 10.1007/s10734-019-00404-5.
- Portes, A. (2015) *The Sociology of Development: From Modernization to the “Institutional Turn.”* *The Sociology of Development*, 1(1), 20– 42.
- Ulrich-Schad, J. D. (2018) ‘“We Didn’t Move Here to Move to Aspen”: Community Making and Community Development in an Emerging Rural Amenity Destination’, *Journal of Rural and Community Development*, 13(4), pp. 43–65.
- Wahyudi (2018) *Pemik Pembangunan Dalam Perspektif Sosiologi*

Pembangunan, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELAU KADER DALAM KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI TUBERKULOSIS (KMP-TB) DI KECAMATAN PURING, KEBUMEN

Isma Yuniar

Program Studi Keperawatan Program Sarjana Universitas
Muhammadiyah Gombong
Email: yuniarisma40@gmail.com

Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Pengembangan masyarakat (Community Development) memiliki tujuan agar masyarakat bisa dan mampu menetapkan kebutuhannya sendiri, mengambil tanggung jawab terhadap kesejahterannya, mengelola sumber daya sehingga dapat mewujudkan tujuan hidupnya untuk membangun Community Development juga bertujuan untuk *supportive communities*, suatu struktur masyarakat yang kehidupannya didasarkan pada pengembangan dan pembagian sumber daya secara adil serta adanya interaksi sosial, partisipasi dan upaya saling mendorong antara satu dengan yang lain. Sehingga pengembangan masyarakat membutuhkan suatu proses yang memungkinkan sebuah masyarakat mempunyai akses kepada struktur

kekuasaan di masyarakat, sumber daya, dan mampu mengontrol sumber daya. Pada pengembangan masyarakat, prinsip keadilan dan prinsip ekologi menjadi sangat penting. Keduanya mempunyai peran sebagai dasar dari pengembangan masyarakat (Zubaidi, 2013)

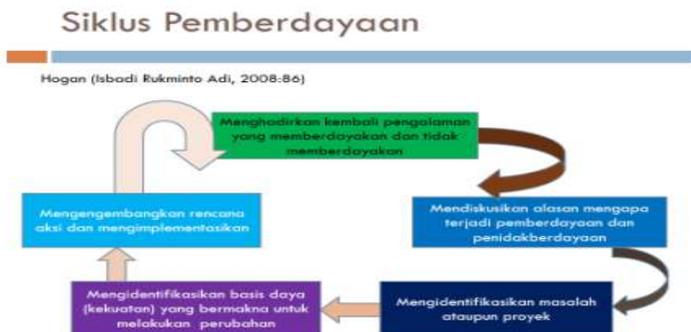
Dalam pengembangan masyarakat, prinsip keadilan sosial menjadi sangat penting. Perspektif ekologi dan prinsip keadilan sosial bekerja saling melengkapi. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Keduanya berperan sebagai fondasi bagi pengembangan masyarakat. Prinsip keadilan sosial dibangun di atas enam prinsip yaitu: ketimpangan (*structural disadvantage*), hak asasi manusia (*human rights pemberdayaan* (*empowerment*), perdamaian tanpa kekerasan (*peace non-violence*), kebutuhan (*needs*), dan demokrasi partisipatif (*participatory democracy*) (Ife, Jim, 1997: 51).

Pengembangan masyarakat merupakan suatu model pendekatan dalam pembangunan (*bottoming up approach*) dengan melibatkan secara aktif peran di masyarakat dengan sumber daya lokal yang ada. Pada pengembangan masyarakat perlu diperhatikan bahwa masyarakat mempunyai budaya, adat istiadat dan budaya yang mempunyai sebagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai modal sosial (Yusuf, W, 2007)

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk meninggkatkan martabat suatu masyarakat yang berada pada kondisi miskin, sehingga dapat terbebaskan dari kondisi kemiskinan. Suatu pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi dengan nilai-nilai yang bernilai sosial. Hal ini dapat mencerminkan paradigma baru suatu pembangunan yang memiliki sifat “*people centered*”, *empowering*, *sustainable* dan *participatory*. Konsep pemberdayaan ini lebih luas tidak hanya sekedar usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar atau hanya sekedar untuk mencegah proses pemiskinan (*safety net*).

Dikatakan oleh Jim Ife, bahwa konsep pemberdayaan mempunyai hubungan yang cukup erat antara dua konsep dasar

yakni: konsep disadvantaged (“ketimpangan”) dan power (“daya”) Pengertian pemberdayaan bisa dijelaskan dmenggunakan empat perspektif yaitu: perspektif elitis pluralis, , strukturalis dan post-strukturalis.



Gambar 11. Siklus Pemberdayaan

Pemberdayaan sudah sesuai dengan perspektif baru promosi kesehatan yang mulai terbentuk sejak tahun 1980-an (Ferreira dan Castiel, 2009). Pemberdayaan masyarakat dapat diterima dalam praktik promosi kesehatan dan telah menjadi stratetegi dalam pengembangan dan impelementasi suatu program. Dalam promosi kesehatan, penberdayaan merupakan konsep yang tidak asing bersatu dengan konsep lain seperti “memampukan dan memediasi (enabling dan mediating). pemberdayaan digunakan dalam praktik promosi kesehatan pada proses pengorganisasian masyarakat. Suatu pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan adalah salah satu subsistem dalam SKN merupakan suatu bentuk dan suatu cara penyelenggaraan dalam upaya kesehatan, oleh individu/kelompok, maupun masyarakat yang dilakukan dengan sistematis dan terencana, terpadu dan berkesinambungan untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang paling optimal.

Pada kajian pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk memberikan kekuasaan untuk dapat berkontribusi kepada suatu perencanaan maupun keputusan yang dapat mempengaruhi masyarakatnya (Alexander, D 2008). Konsep pemberdayaan bisa diawali dengan penguatan suatu modal sosial di masyarakat yang meliputi Patuh Aturan (role), Kepercayaan (trusts), dan Jaringan (networking). Apabila memiliki modal social yang baik, akan ada kemudahan untuk mengatur (direct) masyarakat, mengarahkan dan serta mudah mentransfer knowledge kepada masyarakat. modal social yang kuat dapat menjadikan kekuatan dalam modal, knowledge, dan people. Hal ini memiliki arti bahwa pemberdayaan masyarakat dapat mendelagasikan kekuasaan melalui pengiatan modal sosial kelompok untuk lebih produktif untuk menggapai kesejahteraan bersama. Modal sosial yang kuat dapat digunakan untuk menjamin keberlanjutan dalam membangun rasa kepercayaan di dalam masyarakat

Peranan Kader Kesehatan Kesehatan Dalam Konteks Modal Sosial Dalam Penanggulangan Tuberkulosis

Negara Indonesia pada tahun 2019 menempati urutan kedua tertinggi penderita tuberkulosis. Seperti kita tahu, bahwa penyakit ini merupakan penyakit yang sudah ada jaman dahulu disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*. World Health Organization sudah menetapkan adanya program End TB Strategy pada tahun 2035, sehingga diperlukan komitmen, usaha, strategi dan kerjasama lintas sektoral.

Adanya modal sosial memberikan suatu sikap positif dalam bidang kesehatan. Jaringan sosial merupakan suatu hal yang cukup penting dalam program penanggulangan tuberkulosis. Hasil penelitian menyebutkan bahwa seseorang yang tinggal dalam masyarakat dengan modal sosial tinggi dilaporkan mempunyai kondisi yang lebih sehat secara jasmani dan rohani. Menurut Naphiet et al,

1998, dalam modal sosial kita mengenal ada 3 dimensi, yaitu :

1. kognitif, pada aspek ini dijelaskan tentang adanya pemahaman dan makna bersama antara individu dan kelompok pada masyarakat, sehingga memiliki rasa yang sama dengan yang lain
2. Relasional, pada dimensi ini menjelaskan tentang karakter koneksi diantara individu dalam masyarakat
3. Struktural, dimensi ini menjelaskan tentang kemampuan individu dalam membuat suatu ikatan yang kuat dan lemah dalam suatu sistem



Gambar 12. Model Hubungan Pemberdayaan Masyarakat

Peran kader kesehatan dalam penanggulangan tuberkulosis merupakan suatu peran yang strategis, yaitu memberikan pelayanan dalam hal promosi kesehatan, ikut membantu dalam kuratif yaitu pengobatan dan pemeriksaan di pelayanan kesehatan serta rehabilitatif. Kader merupakan salah satu kunci untuk keberhasilan

program penanggulangan TB, kader harus dilibatkan dalam program ini mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Peran kader menjadi sangat penting, karena kader di masyarakat dapat membangun suatu jaringan yang cukup kuat dengan para masyarakat khususnya penderita dan masyarakat yang beresiko tinggi. Masyarakat mempunyai dukungan yang besar terhadap keberadaan kader kesehatan di wilayahnya. Hal ini menjadi kekuatan yang berdampak pada aspek psikologis, khususnya pasien TB.

Kader dapat menjadi motivator utama bagi pasien TB, dukungan dari keluarga, tetangga dan masyarakat sangat membuat penderita TB tidak tertekan, bisa menerima dan lebih terbuka terhadap penyakitnya. manfaat potensial yang dapat diperoleh oleh pasien dan keluarga yaitu keluarga dan pasien tidak merasa dikucilkan, tidak menutupi kondisi penyakitnya, serta manfaat dari aspek material yaitu mendapatkan dukungan, dorongan serta kepercayaan diri dari dirinya sendiri. Menurut hasil penelitian menyebutkan bahwa tingkat pendidikan dan pengetahuan yang cukup merupakan suatu sumber daya yang berharga untuk seorang kader, kader yang berada pada masyarakat yang homogen dapat lebih dipercaya oleh masyarakat. Kepercayaan ini menjadi suatu modal yang sangat penting karena masyarakat lebih nyaman (Ainy et al., 2012)

Dijelaskan oleh Awofeso (2008) bahwa peran seorang kader kesehatan dterkait dengan program untuk pengendalian Tuberkulosis adalah sebagai berikut; (1) memberikan pendidikan kesehatan atau penyuluhan kepada masyarakat , (2) merujuk penderita ke pelayanan kesehatan dan membagi pot dahak pada keluarga, (3) bersama keluarga melakukan pengawasan terhadap kedisiplinan minum obat, (4) memberikan motivasi tentang kesadaran untuk berobat secara lengkap dan mencegah drop out (5) memberikan penyuluhan tentang pencegahan serta penularan penyakit Tuberkulosis kepada

masyarakat, serta (6) melakukan pendokumentasian untuk pencatatan dan pelaporan.

Hasil studi yang kita lakukan di KMP Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen didapatkan informasi bahwa kader saat melakukan tugas dan perannya di masyarakat kerap kali mendapatkan penolakan dari keluarga klien, selain itu minimnya pengalaman yang dimiliki kader menjadi hambatan saat melakukan pelaksanaan peran dan tugasnya. Padahal penemuan penderita Tuberkulosis Paru secara aktif di masyarakat sangat penting untuk mencegah penularan lebih lanjut sehingga kinerja kader yang baik sangat diperlukan dalam penemuan suspek Tuberkulosis paru demi keberhasilan Program Pencegahan penularan TB. Belum semua kader mendapatkan pelatihan tentang penemuan suspek Tuberkulosis paru sehingga pengetahuannya tentang tuberkulosis paru masih kurang, ditinjau dari tingkat pendidikan kader masih terdapat kader dengan tingkat pendidikan dasar (SMP/SMA) dan dilihat dari kinerjanya pun masih kurang maksimal dikarenakan oleh berbagai faktor salah satunya karena kecilnya insentif yang diterima kader

Pemberdayaan Kader Tb Dalam Kelompok Masyarakat Peduli Tuberkulosis (Kmp-Tb)

Kader TB mempunyai peran yang penting dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat. Keberadaan kader bertujuan untuk meningkatkan angka kesuksesan pasien TB yang sembuh, menurunkan angkakesakitan dan kematian akibat penyakit TB serta pendampingan dalam pengobatan. Berbagai macam peran dari ader kesehatan adalah peran sebagai fasiliator, peran terkait pendidikan, peran untuk perwakilan dan peran teknis (Dydiet Hardjito, Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian, Jakarta: Raja Indo Persada, 1997.

Program pemberantasan tuberkulosis tidak dapat berjalan sendiri, akan tetapi harus berbasis masyarakat, hal ini mempunyai arti bahwa program penanggulangan tuberkulosis harus melibatkan masyarakat. Kelompok Komunitas Peduli TB (KMP-TB) merupakan suatu upaya untuk menyukseskan program penanggulangan TB. Kelompok ini dibentuk bertujuan untuk memberikan dukungan dalam program pemerintah terkait tuberkulosis di setiap kecamatan.

Kelompok Masyarakat Peduli (KMP-TB) merupakan kelompok masyarakat yang terdiri dari kader kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama serta masyarakat yang pernah sembuh dari TB maupun penderita. Kelompok ini terdiri dari berbagai macam latarbelakang karena dalam penatalaksanaan tuberkulosis melibatkan berbagai unsur sosial budaya dalam masyarakat. Nilai budaya sangat kuat dipegang masyarakat, seperti adanya kepercayaan bahwa penyakit ini adalah kutukan, sehingga masyarakat cenderung tidak terbuka, menutup diri tidak mau melakukan pemeriksaan karena malu

KMP-TB ini dibawah arahan dari puskesmas setempat Dengan adanya KMP-TB harapannya dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendeteksian diagnosa tuberkulosis, pendampingan minum obat sampai tuntas dan penemuan suspet untuk memutuskan mata rantai penularan. Karena tingginya dan kompleksnya permasalahan TB di Indonesia tidak bisa diatasi hanya bergantung dari tenaga kesehatan saja. Upaya penanganan masalah kesehatan masyarakat, dilakukan melalui upaya pencegahan primer, sekunder dan tersier. Dalam upaya pencegahan primer, peran kader dengan melakukan identifikasi masyarakat yang resiko, memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan tuberkulosis pada masyarakat, memberikan dukungan social, emosional untuk klien dan keluarga.

Sedangkan dalam upaya pencegahan sekunder, peran kader kesehatan adalah dalam upaya deteksi dini, serta memotivasi pada pasien, keluarga dan masyarakat. Sedangkan Pencegahan tersier, kader kesehatan membantu klien dan keluarga dalam pendampingan

pengobatan secara paripurna (Neeraja, 2009; Nursalam, 2014).

Dalam pelaksanaannya KMP TB dapat bekerja sama dengan berbagai sektor, baik swasta, pemerintah, maupun organisasi masyarakat lainnya. Hal ini sangat penting dalam memberikan dukungan ketersediaan, keterjangkauan pelayanan tuberkulosis di masyarakat

Sesuai dengan prinsip pada pemberdayaan masyarakat, Kader TB memiliki prinsip memnadirikan masyarakat yang diharapkan kedepannya dapat berdaya, mandiri dapat mengatasi masalah sendiri yang ada di masyarakat berkaitan dengan permasalahan tuberkulosis. Dalam proses memberdayakan masyarakat, ada faktor internal dan meksternal yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Faktor internal sebagai self-organizing dari masyarakat juga pastinya dipengaruhi faktor eksternal. Dalam memberdayakan masyarakat, diperlukan suatu fasilitator yang berkompeten



Gambar 13. Penggerak dan Pola Jejaring Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pada pemberdayaan kader TB di KMP TB, merupakan suatu proses, upaya untuk membangun kemampuan masyarakat khususnya masyarakat beresiko dan penderita TB untuk dapat mendorong, memotivasi dan membangun kesadaran untuk penanggulangan tuberkulosis dan meningkatkan derajat kesehatannya, agar tercipta pemutusan rantai penularan, penyembuhan secara paripurna dan peningkatan kualitas hidup pada klien tuberkulosis. Kegiatan Pemberdayaan Kesehatan, oleh Kader TB ini merupakan suatu kegiatan penanggulangan penyakit TBC yang dilakukan bersama-sama oleh seluruh daerah se-Indonesia yang mempunyai visi menyukseskan program eliminasi TB.

Kader TB sangat memerlukan refresh training agar para kader dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk mengidentifikasi & menemukan suspek TB dengan tepat, kader mampu mendiagnosa suspek yang diduga TB secara mikroskopis dan membantu mendampingi proses pengobatan pasien hingga sembuh. Sehingga penyegaran kader dalam KMP-TB itu dapat dapat bertujuan 1) Untuk mengaktifkan kembali kader TB yang berpotensi agar dapat menjadi ujung tombak dalam pencarian suspek TB, 2) memberikan penyegaran dan memberikan motivasi kembali kader TB dalam memberikan pendampingan kepada pasien BTA positive hingga pasien dapat sukses berobat. 3) Melatih kembali kader TB di masyarakat agar trampil menyuluh di komunitas. 4) Melatih kembali kader untuk trampil melakukan pendokumentasian yaitu melakukan pencatatan & pelaporan kasus TB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan Kader TB di KMP TB melalui penyuluhan, pelatihan PMO, dapat meningkatkan dan mengembangkan kegiatan dalam bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, sehingga dapat membantu program-program Pemerintah dalam Penanggulangan Tuberkulosis. Peningkatan peran kader TB ini akan dapat meningkatkan capaian suspek, dan dapat meningkatkan angka

kesembuhan pada penderita Tuberkulosis, sehingga akan berdampak pada peningkatan kesehatan dan masyarakat bebas dari Tuberkulosis. Hal ini terlihat dari capaian setiap tahun meningkat, baik capaian suspek, maupun Kesembuhan, Dimana diatas target indikator nasional.

Laporan Kegiatan Program Pemberdayaan Kader Tb Pada KMP-TB Di Kecamatan Puring

Tahap awal proses pemberdayaan kader TB di KMP-TB Kecamatan Puring, adalah dengan melakukan identifikasi masalah bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan pendekatan FGD, Focus Group Discussion. Kegiatan ini difasilitasi oleh Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gombong dengan mengundang unsur puskesmas, dinas kesehatan, kepala desa dan perangkatnya, kader TB, serta tokoh masyarakat. Dari hasil FGD dan analisa situasi didapatkan permasalahan sebagai berikut :

1. Penemuan kasus TB masih rendah
2. Success rate TB masih rendah



Gambar 14. Pengisian kuesioner dalam proses FGD

n pelayanan kesehatan sampai sembuh, peran keluarga dalam PMO juga dapat diawasi dan dievaluasi secara rutin oleh KMP-TB. Solusi yang ditawarkan oleh adalah :

1. Pelatihan Dasar yang dilaksanakan meliputi pelatihan tentang Komunikasi Dasar dan Konseling dan pelatihan teknik penyuluhan. Latar belakang dari kegiatan pelatihan ini adalah perlunya membangun kesadaran kepada penderita TB terhadap arti pentingnya kesehatan perlu pendekatan yang baik. Pendekatan yang baik kepada pasien dan keluarga diperlukan kemampuan komunikasi yang baik. Dengan bekal teknik komunikasi yang baik serta kemampuan menyampaikan informasi (penyuluhan) yang baik, harapannya masyarakat bisa menerima informasi- informasi yang diberikan KMP-TB. Hal ini sesuai dengan hasil riset yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kader di Puskesmas Sruweng. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah tingkat pengetahuan. Penelitian lain yaitu Analisa TB di Kabupaten Kebumen (2014) menyebutkan peran kader di masyarakat kebumen belum optimal, salah satunya adalah cara berkomunikasi belum bagus. Sehingga dengan adanya pelatihan ini dapat mengatasi masalah yang ada. Luaran dari kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan KMP-TB tentang komunikasi, konseling dan penyuluhan, yang diukur dengan evaluasi penilaian menggunakan instrumen yang disediakan
2. Pelatihan inti terkait dengan Penanggulangan TB, meliputi ceramah tentang penyakit TB dan penanggulangannya, cara Deteksi TB dan pengobatan TB. Latar belakang dari pelatihan ini adalah adanya permasalahan yang berkaitan

dengan angka penemuan dan *success rate* TB yang masih rendah, dapat diatasi dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan KMP-TB tentang TB dan penanggulangannya. Apabila KMP-TB sudah dibekali pengetahuan dan keterampilan yang cukup, harapannya dapat menemukan pasien TB yang ada di masyarakat sekitarnya lebih cepat, dimotivasi untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan secara tuntas. Luaran kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan KMP-TB tentang TB dan penanggulangannya. Kegiatan dapat diukur dengan instrumen pengukuran pengetahuan pre dan post test

3. Simulasi

Praktek skreening TB, pengambilan sampel dahak Penemuan kasus TB yang masih rendah dapat diantisipasi dengan peningkatan peran KMP-TB dalam menemukan kasus di masyarakat sekitar. KMP-TB dibekali dengan cara batuk untuk pengambilan dahak pasien untuk dibantu diperiksa di laboratorium puskesmas setempat. Apabila menemukan pasien dengan tanda dan gejala yang mengarah TB, KMP-TB dapat cepat membawa pasien untuk periksa ke layanan kesehatan terdekat atau membantu membawakan sampel dahak orang tersebut. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu Analisa situasi TB Kabupaten Kebumen (2014) didapatkan hasil keterampilan kader masih rendah, sehingga dengan adanya pelatihan dengan metode simulasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan keterampilan kader dalam KMP-TB. Luarannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan KMP-TB, kegiatan dapat diukur dengan instrumen pengukuran simuasi. Peserta akan dinilai berdasarkan SOP komunikasi, penyuluhan dan konseling yang sudah diberikan.

Akan dinilai kesesuaiannya dengan SOP yang ada.

4. **Praktek Lapangan.** Praktek lapangannya meliputi praktek penyuluhan Kesehatan (TB) oleh Kader KMP-TB, praktek penyuluhan kepada keluarga terkait dengan PMO. praktek pengambilan sampel dahak pada keluarga beresiko yang akan dilaksanakan dalam kegiatan “Gerakan ketuk 100 pintu” dan pemberian makanan tambahan (PMT) dan lomba rumah sehat. Kegiatan terakhir yang akan diberikan kepada KMP-TB adalah terjun langsung ke masyarakat dengan metode praktek lapangan. Peserta pengabdian masyarakat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh pada saat pelatihan. Dengan adanya praktek lapangan yang didampingi oleh Tim Pengabdian masyarakat, keterampilan peserta dapat dimonitor kekurangannya dan dapat diberikan masukan untuk perbaikan. Hal ini sesuai dengan penelitian peneliti yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kader, salah satunya adalah keterampilan. Dengan meningkatnya keterampilan kader dalam kmp-tb, makan permasalahan TB dapat teratasi. Luaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan KMP-TB, kegiatan dapat diukur dengan dengan instrumen pengukuran praktek lapangan dan video kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat kader pada KMP-TB ini terbagi dalam tiga sesi, yaitu :

1. **Tahap Persiapan.** Tim pemberdayaan masyarakat melakukan koordinasi awal dengan mitra terkait dengan pelibatan mitra dalam pelaksanaan, perijinan dan sarana prasaranan yang dibutuhkan. Rapat internal bersama tim. Koordinasi lintas sektor. Tim pemberdayaan masyarakat melakukan koordinasi

lintas sektor dengan puskesmas, dan koordinasi dengan narasumber yang akan dilatant. Tim pemberdayaan masyarakat menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan, seperti leflet, media pembelajaran lembar balik, alat peraga, logbokk dan lain lain.

2. Tahap Pelaksanaan program ini meliputi berbagai jenis kegiatan 1) Pelatihan . Jenis Pelatihan yang diberikan adalah Pelatihan Komunikasi promosi kesehatan , penyuluhan dan konseling; Pelatihan TB dan penanggulangannya dan Pelatihan TB tentang pengobatan) serta pemberian dukungan psikologi untuk para kader, 2) Simulasi . Kegiatan simulasi tentang pemberian edukasi tentang penyakit TB dan pengobatan TB dan 3) Praktek Lapangan . Praktek lapangan ini terdiri dari Penyuluhan Kesehatan oleh Anggota KMP-TB sekaligus pemberian makanan tambahan (PMT).
3. Tahap Evaluasi. Tahap evaluasi meliputi : 1) Evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilakukan pada setiap kegiatan, diukur penilaian sebelum dan sesuai kegiatan dengan pre dan post tes, 2) Evaluasi sumatif evaluasi sumatif akan diukur setelah semua kegiatan selesai, untuk melihat ketercapaian tujuan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan dalam mengatasi masalah yang ditentukan

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan pemberdayaan masyarakat ini adalah adanya peningkatan dampak sosial berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang 1)promosi Kesehatan, 2) Perawatan dan Pengobatan TB. Anggota KMP-TB dapat menjadi *change-agent* di masyarakat. Anggota KMP-TB juga dapat menjadi *role model*, memberikan edukasi terkait TB dalam forum-forum sosial di masyarakat. Hal ini dirasa cukup efektif dan langsung dapat diterima oleh masyarakat. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan anggota KMP-TB diukur dengan pre dan post test,

dengan hasil sebagai berikut: KMP-TB merupakan mitra yang aktif berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Pada saat persiapan pelaksanaan kegiatan, Anggota KMP- TB yang diwakili oleh Ibu Wisnu, Ibu Khotimah dan Ibu Sumiyati membantu dalam persiapan kegiatan dalam bentuk menyiapkan tempat kegiatan yaitu Gedung Dakwah-Puring, berkoordinasi dengan anggota lain dalam distribusi undangan, serta bersama dengan tim dan mahasiswa berperan aktif dalam berdiskusi menentukan model media pembelajaran yang akan digunakan, yaitu ceramah, diskusi dan video Pada saat pelaksanaan kegiatan, mitra berperan aktif dalam mempersiapkan sarana prasarana yang diperlukan, serta berperan aktif selama proses kegiatan berlangsung. Mitra juga membantu tim dalam berkoordinasi dengan stakeholder, serta membantu menyiapkan masyarakat yang teridentifikasi beresiko terkena TB untuk diikutsertakan pada saat kegiatan simulasi, penyuluhan dan pembagian KMP. Peran mitra dirasa sangat aktif membantu terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat ini.

Rencana selanjutnya dari kegiatan ini adalah adanya sinergisitas dari stakeholder terhadap keberadaan KMP-TB dengan adanya komitmen untuk mendukung KMP-TB dalam bentuk pembinaan dan dukungan terhadap kegiatan KMP-TB yang sinergis dengan program kesehatan di desa, kecamatan dan puskesmas. Apabila keberadaan KMP-TB sudah dapat eksis di masyarakat, maka harapannya program pemerintah Indonesia Bebas TB dapat terealisasi



Gambar 15. Pendampingan kader ke keluarga pasien TBC



Gambar 16. Pemberian penyuluhan oleh kader TB ke masyarakat beresiko

Analisis Dan Kesimpulan

Penulis mencoba melakukan analisis model pemberdayaan kader yang ada di KMP-TB Kecamatan Puring Kabupaten Puring. Diawali pada tahap awal identifikasi permasalahan lokal yang ada di masyarakat. Kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah kesehatan, penyebab terjadinya masalah dan menggali potensi sumber daya yang ada untuk mengatasi permasalahan masih perlu diaktifkan. Hal ini mungkin karena sebagian besar berusia 40-60 tahun, tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata hanya sampai SMP dan SMA, akses informasi tentang kesehatan melalui media masa, media sosial, TV dan radio masih terbatas. Sesuai dengan konsep pemberdayaan, bahwa perumusan masalah harus berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat, bukan dari pemberi dana atau pemerintah. Penentuan masalah bisa menggunakan berbagai pendekatan survey, wawancara, focus group discussion, rapat desa, observasi, diskusi kelompok dan sebagainya. Dilanjutkan dengan penetapan program, yang dilakukan bersama-sama oleh fasilitator dan anggota KMP-TB . Penetapan program ini dirumuskan prioritas masalah yang segera ditangani dan ditetapkan tujuan dari programnya. Sesuai dengan prinsip Community Development dari Ife (2002) tentang keadilan sosial. Dimana dalam prinsip tersebut terdapat aspek mendefinisikan kebutuhan (*need definition*). Mengajak masyarakat untuk berdialog agar masyarakat betul-betul memahami kebutuhan mereka yang sesungguhnya, sehingga bukan menentukan definisi kebutuhan yang dibuat oleh pihak lain. Posisi masyarakat saat ini bukanlah sebagai obyek penerima manfaat (*beneficiary*) yang menunggungkan pada pemberian dari pihak lain seperti pemerintah, founding dan lain-lain, akan tetapi saat ini masyarakat sebagai subyek yaitu agen atau partisipan yang bertanggungjawab secara mandiri. Masyarakat secara mandiri mempunyai arti bahwa masyarakat dapat mengembangkan potensinya dengan sumber daya yang dimiliki, ikut berproses dan berpartisipasi dan proses

pembangunan. Hal ini sangat sesuai dengan paradigma dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri yang disampaikan juga oleh Chambers, dalam Mardikato dan Soebianto, 2012. Partisipasi sangat penting, karena yang akan membangun, bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya secara mandiri adalah masyarakat itu sendiri. Sehingga pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk membangun daya masyarakat sendiri agar mampu meningkatkan kemampuan dalam memperbaiki kualitas kehidupannya mereka sendiri

Terkait dengan prinsip ekologis, program pemberdayaan kader KMP-TB juga menganut unsur perkembangan organik. KMP-TB mempunyai anggota yang beraneka ragam dengan berbagai latarbelakang, oleh karena itu dalam program pengembangan ini diharapkan mampu saling menghormati, saling menghargai berbagai karakteristik dalam masyarakat yang memungkinkan saling mendorong sesuai dengan karakterisnya masing-masing. Disamping itu dalam prinsi ekologi, program pemberdayaan ini juga menjunjung tinggi keseimbangan antara lokal dan global, antara hak dan tanggungjawab, dan gender. Harapannya unsur keberlanjutan juga diterapkan, tidak hanya selesai dalam satu waktu tapi berkelanjutan dengan peningkatan terus menerus

Pada Prinsip Keadilan Sosial, program pemberdayaan kader pada KMP-TB ini menganut unsur pemberdayaan, program ini dibentuk untuk menciptakan kader, masyarakat yang berdaya dan berkeadilan social, dengan tidak memarjinalkan atau melemahkan Sebagian masyarakat yang lain

Pada saat pelaksanaan pemberdayaan kader dalam KMP-TB juga menggunakan Prinsip Menghargai Lokal (Valuing the local), program ini mengikutsertakan seluruh sumber daya lokal yang tersedia seperti kader kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pasien dan keluarga masyarakat yang beresiko dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di masyarakat setempat. Program ini

juga menghargai kebudayaan lokal (*Valuing local culture*) semua kegiatan yang dilaksanakan mengikuti kebiasaan budaya setempat, seperti menggabungkan kegiatan pemberdayaan dengan kegiatan masyarakat serta disesuaikan dengan budaya setempat yang berlaku. Menurut Shucksmith (2013) pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan *bottom-up* untuk membangun suatu desa, didorong dari alam atau disebut sebagai endogen, dengan asumsi bahwa sumber daya spesifik alam, manusia dan budaya memegang kunci untuk perkembangan suatu masyarakat.

Pada Prinsip Proses, menurut Ife (2002) bahwa *community development* lebih mengedepankan suatu proses daripada hasil. Pada prinsip ini diperlukan adanya suatu partisipasi aktif dalam masyarakat. Pada Program pemberdayaan kader di KMP-TB, Analisis partisipasi dari masyarakat menjadi sangat penting. Pengetahuan dan keterampilan perlu ditingkatkan untuk dapat memaksimalkan peran partisipasi untuk menjadi sentral proses *bottom-up*. Dalam hal ini karakteristik masyarakat di Kecamatan Puring sebagian besar pendidikan adalah SMP dan SLTA, perlu adanya peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan terkait dengan kesehatan khususnya tuberkulosis. Semua golongan masyarakat yang terkait dengan mengesampingkan gender, golongan, ras maupun etnis terlibat dalam kegiatan ini. Sebagai contoh tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat ikut melakukan penyebaran informasi tentang TB pada forum kegiatan di masyarakat seperti pengajian, rapat RT/RW atau arisan RT.

Pada prinsip Global dan Lokal, pada implementasi pemberdayaan masyarakat keterkaitan antara global dan lokal telah menjadi satu. Pada pemberdayaan kader di KMP-TB pengaruh global dapat diterima oleh masyarakat lokal, seperti adanya perkembangan media sosial untuk penyebaran informasi. Hal ini tidak dapat ditolak keberadaannya dalam upaya perkembangan masyarakat. Prinsip global dan lokal ini memuat tentang praktik anti kolonis. Menurut Ife

(2022) implementasi praktik ini adalah dengan berbagai cara seperti adanya kesadaran diri (self-awareness), menyedukakan ruang untuk memunculkan wacana dan tindakan alternatif, tidak terburu-buru melakukan tindakan, menjaga solidaritas dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Husaini, Husaini and Lenie, Marlianae (2016) *Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan*. Universitas Lambung Mangkurat Press, Banjarbaru.
- Ife, Jim. 1997. *Community Development, Creating Community Alternatives Vision, Analysis and Practice*. Melbourne: Addison Wesley Longman.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2008. *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardikanto, Totok. 2019. *pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. rev.ed. Bandung: Alfabeta.
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktek*. Jakarta: Pustaka Kencana Prenada Media Group

UPAYA PENCEGAHAN HIV/AIDS MELALUI PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Lutfia Uli Na'mah

Program Studi D III Kebidanan, Universitas Muhammadiyah
Gombong
Email: lutfia.uli@gmail.com

Upaya Pencegahan Hiv Di Dunia

HIV merupakan penyakit menular paling mematikan di dunia dan saat ini belum ada obat yang efektif dan vaksin untuk pengobatan. Menurut data dari *World Health Organization* (WHO) tahun 2017 menyatakan terdapat kasus orang meninggal sebanyak 940.000 orang karena terkena HIV. Ada sekitar 36,9 juta orang yang hidup dengan HIV pada akhir tahun 2017 memiliki 1,8 juta infeksi baru di seluruh dunia pada tahun 2017. Secara global, diperkirakan lebih dari 30% dari total populasi terinfeksi HIV pada remaja berusia 15 sampai 25 tahun. Ini diikuti oleh anak-anak yang menjadi remaja yang terinfeksi saat lahir dan harus menghadapi kondisi HIV-positif. Sebanyak sekitar 5 juta orang muda hidup dengan HIV .(WHO, 2017). Pada tahun 2017, kejadian infeksi HIV dan AIDS baru di kalangan anak muda di kawasan Asia-Pasifik menunjukkan bahwa 250.000 orang muda hidup

dengan HIV dan AIDS. Infeksi HIV baru telah menurun sebesar 14% sejak 2010, yang merupakan alasan penurunan tersebut adanya 39% orang yang terinfeksi HIV/AIDS meninggal dunia (UNAIDS, 2017).

Data HIV/AIDS semakin meningkat setiap tahunnya, menurut data dari Ditjen P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terdapat informasi sebanyak 57.580 orang terinfeksi HIV/AIDS, 48.300 terinfeksi HIV, dan 9.280 terinfeksi AIDS, dan data tersebut berdasarkan tahun 2017. Persentase kelompok umur tertinggi adalah 2.549. (Dirjen P2P, Kementerian Kesehatan RI, 2018). Kelompok usia ini merupakan usia produktif yang dapat menurunkan produktivitas. Kabupaten Kebumen 18 tahun 2003-2021 meningkatkan kejadian HIV/AIDS sebesar dan penurunan. Walaupun mengalami penurunan tetap saja angka HIV/AIDS di Jawa Tengah tinggi dan belum teratasi. Jumlah kasus HIV tahun 2003 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 1.732 dengan kasus HIV sebanyak 733 kasus, jumlah kasus AIDS sebanyak 999 kasus dan yang meninggal sebanyak 606 kasus. Kabupaten Kebumen antara Januari-september 2021 menempati peringkat ke 3 dengan jumlah 130 kasus dari 10 kota yang ada di Jawa Tengah, untuk kasus AIDS sebanyak 47 kasus dan menempati peringkat pertama dari 10 kota di Jawa Tengah.

A. Sejarah HIV/AIDS

Sejarah HIV/AIDS diawali di Afrika Selatan yang pada saat itu ada sejenis simpanse yang menularkan HIV ke manusia. Simian Immunodeficiency Virus (SIV) dipercaya pembawa virus ke tubuh manusia, mutasi menjadi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*). Virus perlahan-lahan menular dan menyebar keseluruh Afrika hingga seluruh penjuru dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa asal HIV dari kesalahan produk penelitian biologi namun pernyataan tersebut tidak benar karena epidemic muncul pertama di tahun 1975 belum adanya teknologi yang bisa merancang varian virus tersebut. Di tahun 1986 sejenis HIV 2 ditemukan dan di karantina dari pasien AIDS

Afrika Selatan. Infeksi ini mirip dengan infeksi HIV 1. Pada pasien yang terinfeksi virus HIV2, jalur menuju AIDS dikatakan lebih lambat dan mudah dibandingkan pada pasien yang terinfeksi virus HIV1. Selain itu, pada tahap awal infeksi HIV2 lebih rendah dari penularan infeksi HIV2 dan lebih tinggi dari penularan infeksi HIV1. Infeksi HIV2 lebih sering terjadi di daratan Afrika. Kasus awal infeksi HIV2 didapatkan di Amerika Serikat pada tahun 1987, dan kasus infeksi HIV2 berikutnya ditemukan di tempat lain di dunia. Penularan HIV menyebar dengan cepat di seluruh dunia, terutama melalui kontak dan infeksi menular seksual. 75% kasus terjadi karena faktor risiko ini, terutama saat berhubungan seksual sesama jenis. Penyebaran HIV/AIDS di USA terjadi tepat bersamaan dengan isu seks sesama jenis. Seiring berjalannya waktu HIV AIDS makin dikenal tetapi tidak dibarengi dengan pengetahuan yang benar. Sejatinnya HIV dan AIDS adalah berbeda. HIV adalah virus yang menginfeksi tubuh sedangkan AIDS adalah kumpulan gejala penyakit karena infeksi HIV.

HIV AIDS mempunyai sejarahnya tersendiri sehingga mempunyai rentang kejadian panjang dari masa dahulu sampai dengan saat ini dari suatu wilayah ke wilayah lain. Kasus HIV di Indonesia pertama kali dilaporkan terjadi pada orang berkebangsaan Belanda di Bali pada bulan April 1987. Sejak pertama kali ditemukan sampai dengan tahun 2011, kasus HIV/AIDS tersebar di 368 dari 498 Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi di Indonesia dan terus meningkat. Jumlah kejadian HIV/AIDS di Indonesia semakin banyak setiap tahunnya, terutama dari tahun 2009 hingga 2010, yang cukup pesat. Hal ini dikarenakan semakin peningkatan teknologi informasi yang meningkatkan deteksi dan pelaporan kasus HIV/AIDS yang ada di komunitas dan diketahuinya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk menjangkau masyarakat rentan di masyarakat. Kemudian, pada tahun 2011, jumlah kasus HIV/AIDS sedikit menurun. Hal tersebut mungkin dikarenakan oleh kematian pasien dan dampak dari pelaksanaan dan pelaksanaan program 100

Persen (CUP) kondom.

B. Cara Penularan

HIV tidak saja menular pada orang dewasa, akan tetapi menginfeksi dan menularkan pada anak-anak, bayi sejak dalam rahim. HIV menular karena kegiatan seksual, transfusi darah, jarum suntik bergantian sera penularan dari ibu ke bayi (perinatal).

a. Penularan melalui hubungan seksual

Penularan HIV lebih rentan terjadi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki (3 sampai 8 kali lebih rentan) dan orang yang menderita infeksi menular seksual (IMS) akan lebih mudah tertular HIV (2 sampai 18 kali lebih rentan)

b. Penularan melalui darah

Risiko penularan HIV melalui darah lebih besaryaitu 100% (pasti menular), misalnya dengan tindakan transfusi darah atau transplantasi (pemindahan) organ tubuh dan jarum suntik yang bergantian yang biasanya dilakukan oleh pengguna narkoba. Bergantian jarum suntik menjadi penyebab yang paling tinggi tertularnya HIV.

c. Penularan dari ibu ke anak

Mayoritas bayi dari ibu yang positif tidak tertular HIV. Risiko penularan AIDS dari ibu kepada bayinya berkisar antara 20-50%.

Tabel 9. Resiko penularan HIV/AIDS dari ibu ke bayi

No	Waktu Penularan	Besarnya Risiko	Kemungkinan menular jika
1.	Selama Kehamilan	5-10%	Menderita suatu penyakit pada masa kehamilan dapat menyebabkan kerusakan

			ari-ari, sehingga HIV dapat lewat menembus ari-ari. Contohnya adalah penyakit malaria. Tertular HIV pada saat hamil, sehingga muatan virusnya sangat tinggi.
2.	Waktu Persalinan	10-20%	Bayi yang terkontak darah ibu dan lendir ibu pada saat persalinan: -Ketuban Pecah Dini -Persalinan dengan banyak kontak bayi dengan darah ibu
3.	Melalui ASI	10-15%	-Ada luka pada payudara ibu -Ibu yang tertular HIV pada masa menyusui -Ibu yang positif AIDS -Gizi ibu yang buruk

Resiko tertularnya HIV meningkat jika terdapat perilaku:

- a. Tidak setia pada pasangan/bergantian
- b. Tanpa pengaman atau kondom saat berhubungan seks bebas
- c. Pemakaian *needle* atau jarum suntik yang tidak steril dan digunakan bersama.

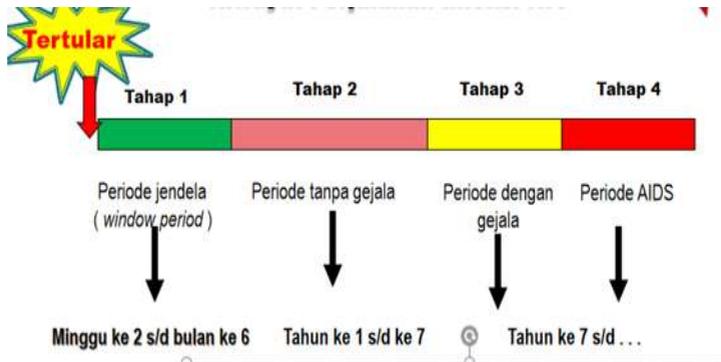
AIDS tidak akan menular melewati ciuman, pelukan, sentuhan, alat makan yang bersamaan, wc, gigitan nyamuk, tinggal serumah dengan orang yang terinfeksi HIV. HIV juga tidak menular melalui air mata, air seni, air ludah, keringat tetapi terbukti menular melalui darah, keputihan, air mani dan ASI.

C. Tanda Gejala

Biasanya tidak ada gejala khusus pada orang-orang yang terinfeksi HIV selama 5-10 tahun, setelah itu mulai berkembang dan menunjukkan gejala-gejala.

- a. Infeksi akut yang terjadi pada 1 bulan pertama dengan tidak muncul gejala yang khas, kecuali gejala mirip flu yang kemudian sembuh sendiri. Masa jendela terjadi pada 3 bulan pertama, pada masa ini kadar antibody HIV belum cukup banyak sehingga belum bisa dideteksi dan hasil pemeriksaan negatif tetapi sesungguhnya telah terjadi infeksi dan sudah bisa menularkan HIV.
- b. Masa inkubasi terjadi 3-10 tahun (bisa sampai 15 tahun) : tidak menunjukkan gejala apapun selama bertahun-tahun
- c. Tahap terakhir (AIDS): akibat kekebalan tubuh yang sudah sangat lemah timbul berbagai penyakit infeksi (disebut infeksi oportunistik) dan kanker, Pembengkakan kelenjar getah bening, diare, penurunan berat badan, infeksi jamur di mulut dan herpes. Penyakit pada paru-paru (TB dan *pneumonia*), gangguan saraf, *kaposi sarcoma* (kanker kulit).

Riwayat perjalanan infeksi HIV



Gambar 17. Riwayat perjalanan infeksi HIV

Selama periode jendela, penderita terinfeksi HIV tetapi tidak terdeteksi oleh tes darah tetapi penderita mungkin terinfeksi karena viral load yang tinggi dalam darah.

D. Cara Pencegahan

HIV-AIDS sebetulnya dapat dicegah, dengan cara:

a. Pencegahan secara umum

- mendapatkan pengetahuan yang benar mengenai HIV/AIDS
- berperilaku yang bertanggung jawab, yang tidak mengarah kepada risiko penularan AIDS, misalnya menggunakan narkoba atau mabuk
- tidak menstigma dan mendiskriminasi ODHA
- melakukan tes darah secara sukarela untuk mengetahui status HIV secara dini jika merasa berisiko telah tertular
- pengobatan ARV bagi orang dengan HIV yang memenuhi syarat pengobatan

- memberikan dukungan, perawatan dan pengobatan bagi ODHA
- b. Pencegahan penularan melalui seks bebas
- jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah
 - bagi yang sudah menikah setia pada pasangan
 - pengobatan infeksi menular seksual (IMS) sedini mungkin
 - sirkumsisi pada laki-laki
- c. Pencegahan penularan melalui darah/cairan tubuh lain
- penerapan kewaspadaan umum di semua pelayanan kesehatan yaitu penggunaan jarum suntik satu kali pakai, alat steril, pengelolaan limbah dengan tepat, perlindungan diri petugas
 - jarum suntik sekali pakai untuk pengguna narkoba suntik
 - tes skrining untuk darah pendonor/organ tubuh untuk transplantasi
- d. Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak
- pengetahuan yang benar tentang AIDS dan kesehatan reproduksi pada remaja perempuan
 - konseling mengenai penyakit HIV dan tes HIV untuk ibu hamil
 - bagi ibu yang sudah mengetahui terinfeksi HIV untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan
 - pemberian ARV pada ibu dan bayi yang terinfeksi HIV menjelang dan setelah persalinan
 - persalinan secara operasi (seksio sesaria), kecuali jika sudah minum ARV secara teratur selama paling sedikit 6 bulan

- konsultasi dengan petugas kesehatan mengenai pemberian ASI untuk bayi
- dukungan bagi keluarga dengan ibu yang HIV positif

E. Pentingnya Permasalahan

Salah satu cara untuk meningkatkan upaya penanggulangan HIV/AIDS yaitu dengan melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dapat mendukung pencegahan HIV/AIDS. Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan dan keinginan untuk bertindak bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sangat penting ketika mempertimbangkan kebutuhan untuk bertindak demi kebaikan bersama. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan misi yang dapat menghantarkan capaian yang maksimal, adapun misinya yaitu dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat seperti Tingkat Kelurahan untuk memberikan warga informasi yang relevan tentang HIV / AIDS. Kegiatan tersebut perlu dilakukan untuk mencegah infeksi baru di masyarakat luas serta mengurangi prasangka dan diskriminasi terhadap ODHA. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk pencegahan HIV di masyarakat umum yaitu:

a. Peningkatan pendekatan agama & ketahanan keluarga

Peran keluarga sangat dibutuhkan untuk membangun karakteristik anak, dengan pendekatan agama seperti memberikan kajian islam mengenai hukum seks bebas akan mencegah tertularnya HIV.

b. Peningkatan pendidikan sebaya/pemberdayaan remaja dan generasi muda: *“say NO to drugs & free sex”*.

Memberikan pengetahuan mengenai seks bebas dan bahayanya HIV AIDS pada remaja dengan melakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan.

- c. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan remaja putri.
- d. Sosialisasi yang benar dan berkesinambungan tentang HIV/AIDS.

F. Strategi pemerintah pusat

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 (“Permenkes 21/2013”) tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, maka strategi yang dapat dilakukan untuk memerangi HIV dan AIDS antara lain:

- a. Memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan HIV dan AIDS melalui kerjasama nasional, regional dan global dalam aspek hukum, organisasi, keuangan, medis dan manusia;
- b. Prioritaskan kewajiban nasional dan internasional;
- c. Mempromosikan advokasi, penjangkauan dan pengembangan kapasitas;
- d. Memperkuat upaya memerangi HIV dan AIDS secara adil, terjangkau, berkualitas, adil dan berbasis bukti dengan penekanan pada upaya pencegahan dan promosi;
- e. Meningkatkan jangkauan pelayanan kepada kelompok berisiko tinggi, tertinggal, perbatasan dan pulau terpencil dengan masalah kesehatan;
- f. Meningkatkan pendanaan untuk pencegahan HIV dan AIDS;
- g. Meningkatkan pembangunan dan penguatan sumber daya manusia yang merata dan berkualitas dalam pencegahan HIV dan AIDS.

- h. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan terapi, skrining untuk mendukung HIV dan AIDS, serta menjamin keamanan, khasiat, dan mutu formulasi dan bahan/alat yang diperlukan untuk pencegahan HIV dan AIDS; dan
- i. Bertanggung jawab, transparan, efisien dan efektif untuk meningkatkan manajemen penanggulangan HIV dan AIDS.

Tingginya kasus HIV dan AIDS saat ini antara lain disebabkan oleh kurangnya pengetahuan umum tentang cara penanggulangan HIV dan AIDS. Peningkatan dalam hal ini dapat diamati dari beberapa perspektif. Salah satunya dari segi kesehatan. Infeksi HIV dan AIDS memiliki rute penularan tanpa gejala dari 7 sampai 10 tahun. Mereka yang terinfeksi terlihat seperti orang sehat, padahal dalam tubuhnya sudah ada HIV yang bisa menular kepada orang lain dan kepadamereka yang belum memiliki gejala dari penyakit tersebut. Sehingga bagi mereka yang berperilaku berisiko, tanpa menyadari, mereka telah menularkan virus tersebut pada orang lain, termasuk pasangannya.

Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi HIV sebagai penyakit menular melalui **Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular:**

Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dalam Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui kegiatan:

- a. promosi kesehatan;
- b. surveilans kesehatan;
- c. pengendalian facto risiko;
- d. penemuan kasus;

- e. penanganan kasus;
- f. pemberian kekebalan (imunisasi)
- g. pemberian obat pencegahan secara massal; dan
- h. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 (“Permendagri 20/2007”) tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Terkait Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah menyatakan:

- a. Komite Penanggulangan AIDS Negara dibentuk sehubungan dengan penanggulangan HIV dan AIDS negara.
- b. Panitia AIDS kabupaten/kota dibentuk dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di kabupaten/kota.
- c. Panitia AIDS negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Gubernur.
- d. Panitia Penanggulangan AIDS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden Bupati/Walikota.

Misalnya, di tingkat negara bagian, Pasal 5 Permendagri 20/2007 menyatakan: Misi Komisi Penanggulangan AIDS Negara dalam Pasal 2 Ayat 1 adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan terkait pencegahan HIV dan AIDS sesuai dengan kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

- b. Memimpin, mengelola, mengelola, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan HIV dan AIDS di negara bagian;
- c. Mengumpulkan, mengerahkan, menyediakan dan menggunakan sumber daya yang bersumber dari bantuan pusat, daerah, lokal dan luar negeri untuk kegiatan pencegahan HIV dan AIDS;
- d. Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga yang menjadi bagian dari keanggotaan KPANegara;
- e. Pelaksanaan kerjasama regional terkait pencegahan HIV dan AIDS;
- f. Menyebarkan informasi tentang upaya HIV dan AIDS kepada pejabat dan masyarakat umum;
- g. Promosi KPA Kabupaten/Kota;
- h. untuk mempromosikan pembentukan LSM / kelompok yang menangani HIV dan AIDS; dan
- i. Memantau dan menilai pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS, kemudian melaporkan secara berkesinambungan kepada KPA (Komisi Penanggulangan AIDS Nasional).

G. Pemberdayaan Masyarakat di Sektor Kesehatan

Self Reliance yang disebut kemandirian merupakan pemberdayaan masyarakat di sektor Kesehatan yang mana masyarakat secara mandiri baik individu maupun kelompok dapat memelihara dan melindungi kesehatannya secara berdaya dan mandiri. Dengan strategi global promosi Kesehatan yaitu *empowerment* menggunakan sasaran komunitas. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara,

melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Dalam bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat ialah upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat yaitu

- a. Tumbuhnya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman kesehatan bagi individu, kelompok dan masyarakat.
- b. Timbulnya Kemauan atau kehendak sebagai bentuk tindak lanjutan dari kesadaran dan pemahaman terhadap objek, dalam hal ini Kesehatan. Kemauan ini dinamakan sikap atau niat.
- c. Adanya inisiatif dalam komunitas pada bidang Kesehatan sehingga terwujudnya kemauan atau niat dalam berbentuk tindakan.

Masyarakat mempunyai *empowerment* dalam bidang kesehatan jika

- a. Semua masalah Kesehatan dan seluruh faktor yang berpengaruh dapat dikenali oleh masyarakat, serta memahami kesehatan dengan benar.
- b. Masyarakat baik secara individu, kelompok maupun di komunitas dapat proteksi diri terhadap ancaman dan bahaya kesehatan.
- c. Masyarakat melakukan upaya promotif seperti bencana alam yang berdampak pada penyakit pencernaan, kulit dan lain-lain.
- d. Masyarakat dapat menyelesaikan sendiri problem kesehatan seperti kebutuhan air bersihsecarabersama-sama dalam komunitas.

- e. Masyarakat secara mandiri berperan serta dalam peningkatan kesehatan secara continue (*health promoting community*).

Pemberdayaan Masyarakat menurut Departemen Kesehatan: Masyarakat mampu menemukan masalah merencanakan sampai dengan penyelesaian masalah menggunakan sumber daya setempat dan sarana prasarana yang ada dimana kerjasama antara instansi lintas sectoral/ LSM serta tokoh masyarakat, perlu adanya upaya fasilitas bersifat non instruktif.

Prosedur dan hasilnya:

- a. *Empowerment* dengan hasil masyarakat yang lebih baik
- b. *Empowerment* atau Pemberdayaan adalah cara menuju perbaikan masyarakat
- c. Kemandirian masyarakat merupakan hasil dari kerja keras masyarakat sendiri

Pokok-pokok pemberdayaan masyarakat:

- a. Merangsang keaktifan dan sumber daya yang ada di dalam masyarakat yang biasa disebut potensi, hal ini berarti kemampuan masyarakat tersebut yang belum tergali. Potensi disini dikelompokkan menjadi 2, yaitu SDM (Sumber Daya Manusia) dan SDA (Sumber Daya Alam)
- b. Mengaktifkan kegiatan gotong royong. Gotong royong menumbuhkan potensi di dalam komunitas, hal ini merupakan warisan leluhur bangsa Indonesia, posisi tokoh masyarakat disini sangat penting untuk pendekatan gotong royong. Peran petugas memotivasi dan memfasilitasinya. Menggali kontribusi masyarakat

misalnya dalam bentuk ide, tenaga, keuangan, material dll. Posisi petugas bersama toma mencanangkan kontribusi untuk peran aktif masyarakat.

- c. Membangun hubungan kerja sama antara beberapa sector seperti *gaverment*, instansi swasta dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM). Posisi petugas adalah untuk mempromosikan advokasi di bidang pembangunan, seperti Pemerintah Daerah, Kinplus Will, dll.
- d. Desentralisasi pada *empowerment* masyarakat dimana dapat diberikan kesempatan untuk menumbuh kembangkan potensinya, sehingga semua keputusan diserahkan kepada tingkat operasional, masyarakat setempat. Peran lembaga-lembaga di atas adalah peran mediator dan motivator. Peran petugas dalam pemberdayaan masyarakat adalah bekerjasama dengan masyarakat, bukan bekerja untuk masyarakat dengan detail melainkan:
 - e. Menyediakan masyarakat untuk semua acara pemberdayaan
 - f. Mendorong masyarakat bergotong royong menjalankan rangkaian program kegiatan yang bermanfaat.
 - g. Mengubah dan membangun pengetahuan, *skill* serta teknologi di masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dapat dicirikan:

- a. Ketua di masyarakat (*community leaders*), yaitu tokoh resmi yang diakui missal ketua RT/RW, kepala desa, kepala urusan dll. Tokoh yang tidak resmi misalnya ketua adat. Kyai yang harus ada pendekatan di masyarakat paternalistik.

- b. Lembaga nonprofit, seperti PKK, organisasi kepemudaan, dan Dewan Tacrim, dioptimalkan sebagai mitra kerja.
- c. Dana Masyarakat Contoh: Dana Sehat, Tabulin, Tasia (Tabungan Ibu dan Suami Penyayang Anak) Peran pejabat adalah mendukung.
- d. Materi komunitas.
- e. Pengetahuan masyarakat sebuah pendekatan berbasis masyarakat untuk pendidikan kesehatan. Contoh: perlombaan poster atau leaflet PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat).
- f. *Community technology*.

Parameter dari *empowerment community*:

- a. Masukan/Input, talent jumlah partisipasi toma, dana pemberdayaan masyarakat, perbekalan, alat dan perbekalan lainnya.
- b. Prosedur. Contoh indikatornya adalah jumlah konsultasi kesehatan yang dilakukan, macam-macam *training* kesehatan, toma atau pelaksana yang terlibat dan musyawarah.
- c. Kinerja UKBM, kualitas dan kuantitas jenisnya, peningkatan pengetahuan warga, peningkatan fasilitas umum.
- d. Hasil: Penurunan angka kesakitan di masyarakat, penurunan angka kematian dari semua penyebab di masyarakat. Menurunkan angka fertilitas di masyarakat dan meningkatkan status gizi anak di bawah usia 5 tahun

Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan HIV/AIDS

HIV/AIDS menjadi masalah serius karena bukan hanya merupakan masalah kesehatan atau persoalan pembangunan, tetapi juga masalah ekonomi, sosial, dan lain-lain. Berdasarkan sifat dan efeknya, sangatlah unik karena AIDS mematikan kelompok yang paling produktif dan paling efektif secara reproduksi dalam masyarakat, yang kemudian berdampak pada mengurangi produktivitas dan kapasitas dari masyarakat. Dampak yang ditimbulkan AIDS terhadap masyarakat dapat bersifat permanen atau setidaknya berjangka sangat panjang.

AIDS secara sosial tidak terlihat (*invisible*) meski demikian kerusakan yang ditimbulkannya sangatlah nyata. HIV/AIDS karena sifatnya yang sangat mematikan sehingga menimbulkan rasa malu dan pengucilan dari masyarakat yang kemudian akan mengiring pada bentuk-bentuk pembungkaman, penolakan, stigma, dan diskriminasi pada hampir semua sendi kehidupan. Hampir semua orang yang diduga terinfeksi AIDS tidak memiliki akses terhadap tes HIV, inilah yang membuat usaha-usaha pencegahan dan penyembuhan menjadi sangat rumit. Program pencegahan penyebaran HIV/AIDS harus segera dilaksanakan, tak terkecuali area Lembaga Pemasaryakatan ataupun Rumah Tahanan.

Dengan melihat angka HIV/AIDS di Indonesia yang selalu tinggi, diharapkan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Untuk mencapai harapan tersebut masyarakat membutuhkan edukasi tentang bahaya penyakit HIV/AIDS dan bagaimana cara penularannya yang benar agar stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dapat diluruskan. Dengan

adanya pemberdayaan masyarakat akan mempermudah masyarakat mendapatkan informasi mengenai kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anasari, T., & Trisnawati, Y. (2018). Hubungan Dukungan Keluarga Dan Pengetahuan Dengan Kepatuhan Ibu Hamil Dengan HIV Dalam Mengonsumsi ARV Di RSUD PROF. DR. Margono Soekarjo Purwokerto. *Bidan Prada : Jurnal Publikasi Kebidanan* 9 (1).
- Ardani I, Handayani S. *Stigma terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) sebagai Hambatan Pencarian Pengobatan: Studi Kasus pada Pecandu Narkoba Suntik di Jakarta*. Buletin Penelitian Kesehatan. 2017;45:81 - 8.
- Berliana Situmeang, Syahrizal Syarif, R. M. *Hubungan Pengetahuan HIV / AIDS dengan Stigma terhadap Orang dengan HIV / AIDS di Kalangan Remaja 15-19 Tahun di Indonesia* (Analisis Data SDKI Tahun 2012) Relationship HIV / AIDS Knowledge related Stigma towards People Living with HIV / AIDS among Adole. 1, 35–43 (2017).
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI (Ditjen P2P Kemenkes RI), 2018. *Laporan Situasi Perkembangan HIV-AIDS & PIMS di Indonesia Januari-Desember 2017*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Dwi, A. and Tri, E. (2018) ‘Correlation Analysis Of HIV Stadium With Opportunistic Infection In Pregnant Women At IbnuSina General Hospital Gresik’, *A person’s HIV-positive status can only be proven by a voluntary blood test conducted by VCT (Voluntary Counseling and Testing). Communities can only know if PLWHA discloses HIV positive status to counselor with confidentiality. VCT is a major component i*, 3(2), pp. 76–83.
- Gerakan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Panduan Perawatan Orang Dengan HIV AIDS Untuk Keluarga dan Masyarakat. HIV/AIDS [Internet]. World Health Organisation. 2018. Available from:

- <http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids>
https://myklassfik.umy.ac.id/pluginfile.php/55949/mod_resource/content/1/PEMBERDAYAAN%20MASYARAKAT%20DI%20SEKTOR%20KESEHATAN%20%20dr.%20kusbaryanto.pdf
- Komisi Penanggulangan HIV AIDS. Strategi dan Rencana Aksi Nasional 2015- 2019 Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. (2015).
- Lapau, B. (2015). *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Logie, C. H. *et al.* Pathways from HIV-related stigma to antiretroviral therapy measures in the HIV care cascade for women living with HIV in Canada. *J. Acquir. Immune Defic. Syndr.* 77, 144–153 (2018).
- Marlinda, Y., & Azinar, M. (2017). Perilaku Pencegahan Penularan HIV/AIDS. *Journal Of Health Education*, 2 (2).
- Nakigozi, G. *et al.* A qualitative study of barriers to enrollment into free HIV care: Perspectives of never-in-care HIV-positive patients and providers in Rakai, Uganda. *Biomed Res. Int.* 2013, (2013).
- Noviana N. *Catatan Kuliah Kesehatan Reproduksi dan HIV/AIDS*. Jakarta: Trans Info Media; 2013.
- Runiari, N., & Ruspawan, I. D. M. (2018). Dukungan Sebaya Dengan Harga Diri Wanita Usia Subur Yang Terinfeksi HIV. *Jurnal Poltekkes Kemenkes Denpasar*.
- United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) (2017). Global AIDS Monitoring 2018, Europe (UNAIDS). *United National on AIDS* 2017. (2017).
- WHO. *World Health Statistics 2017 : monitoring health for the SDGs, Sustainable Development Goals*. (2017).
- World Health Organization- HIV Department (2016) ‘Global summary of the HIV/AIDS epidemic’, June, p. 1. doi: http://www.who.int/hiv/data/epi_core_2016.png?ua=1

PENGEMBANGAN MASYARAKAT OLEH PERUSAHAAN: SEBUAH KEWAJIBAN ATAU KESUKARELAAN?

Miftah Faridl Widhagdha

Prospect Institute

Email: miftah@arjunawijaya.co

Perkembangan Pengembangan Masyarakat

Istilah pengembangan masyarakat terus berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan berkembangnya paradigma pembangunan alternatif yang menawarkan partisipasi dan demokrasi sebagai pintu masuk pengembangan masyarakat. Partisipasi mendorong bentuk-bentuk keterlibatan yang lebih aktif sedangkan demokrasi memperkuat kedudukan masyarakat dalam pengambilan keputusan sehingga saat ini kita semakin mengenal konsep pengembangan masyarakat dengan berbagai bentuk implementasinya. Gagasan tentang pengembangan masyarakat berfokus pada proses pembentukan atau pembentukan kembali struktur-struktur sosial masyarakat yang memungkinkan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia (Ife & Tesoriero, 2008). Dalam pandangan Ife, gagasan tentang pengembangan masyarakat tidak terbatas pada memberi kekuatan (*power*) pada masyarakat yang tidak berdaya (*powerless*) saja melainkan serangkaian konsep dan struktur untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan mengerahkan sumber daya, keahlian dan kearifan komunitas itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Pradip Thomas (2008) tentang cara pandangnya terhadap kemiskinan masyarakat yang bersumber dari ketidakmampuan dan ketiadaan akses dalam mengolah sumber daya yang mereka miliki untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Komunitas seperti yang digambarkan oleh Thomas tentu merupakan komunitas yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tidak mencapai tingkat kesejahteraan yang selayaknya dan menjadi rentan akan hal-hal yang mengancam keberlanjutan kehidupannya.

Gagasan tentang pengembangan masyarakat pada dasarnya dibangun untuk komunitas tersebut, yang konsep utamanya adalah meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan komunitas melalui sumber daya yang mereka miliki untuk dapat mengembangkan kesejahteraan mereka berdasarkan kemampuan yang mereka sendiri. Pengembangan masyarakat sendiri tidak bisa lepas dari visinya yaitu menciptakan keadilan sosial dan lingkungan (*Ecological & Social Justice*) melalui pembangunan alternatif yang ditawarkan dalam konsep-konsep seperti pembangunan dari bawah (*Bottom-up development*), kebijaksanaan kaum tertindas (*The wisdom of the oppressed*), partisipasi komunitas hingga perkembangan demokrasi. Visi ini menjadi semangat bagi setiap pihak yang terlibat atau memiliki perhatian terhadap upaya-upaya pengembangan masyarakat. Lalu pertanyaannya, siapa yang harus melakukan pengembangan masyarakat?

“Tanggung jawab” inisiatif pengembangan masyarakat terus bergulir mulai dari pemerintah, pasar / korporasi, institusi keagamaan bahkan keluarga dan komunitas (Ife & Tesoriero, 2008). Pandangan ini sejalan dengan gagasan negara pasca-kesejahteraan yang mengedepankan prinsip keberlanjutan yang identik dengan label “berbasis masyarakat”. Jika merujuk pada Kartono (2022) pengembangan masyarakat menjadi kewajiban sebuah negara (*state*) dalam fungsinya sebagai pelaksana pembangunan nasional, namun Kartono juga menekankan bahwa peran negara yang terlalu kuat dalam pembangunan justru akan mengurangi ruang bagi masyarakat (*community*) untuk mengembangkan dirinya sendiri, sehingga menurut Kartono

masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan dirinya sendiri. Pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri atau dalam pembahasan ini disebut sebagai komunitas sebenarnya juga telah banyak dilakukan. Praktik pengembangan masyarakat oleh komunitas dapat kita lihat sehari-hari melalui beragam praktik pengembangan masyarakat. Budaya kolektivisme dan gotong royong yang masih mengakar kuat di Indonesia membuat praktik ini tumbuh subur, setidaknya masih dapat kita jumpai di daerah pedesaan yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan.

Praktik pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh komunitas dapat kita lihat mulai dari adanya *rewangan* yang dilakukan oleh masyarakat Jawa saat salah seorang anggota komunitas memiliki kegiatan upacara keagamaan atau kebudayaan. Atau juga dapat kita lihat pada budaya *Turun Kapal* yang dilaksanakan oleh masyarakat Melayu pesisir setiap hendak menurunkan kapal dari daratan yang digunakan untuk melaut (Widhagdha, Wahyuni, & Sulhan, 2019), juga praktik-praktik lain yang dapat dengan mudah kita temui di berbagai wilayah Indonesia yang menunjukkan nilai kolektivisme dan gotong royong yang tinggi sebagai modal dasar dalam pengembangan masyarakat. Praktik pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh komunitas itu sendiri telah sesuai dengan ciri pengembangan masyarakat yaitu merupakan bentuk partisipasi dan upaya kolektivisme komunal dalam upaya memberi kekuatan dan keberdayaan bagi komunitas itu untuk mampu menyelesaikan permasalahan mereka. Lantas, jika masyarakat atau komunitas telah mampu melaksanakan upaya pengembangan masyarakatnya, apakah ada lagi pihak yang dibutuhkan dalam melakukan pengembangan masyarakat?

Meskipun masyarakat, khususnya komunitas masyarakat di Indonesia memiliki modal sosial yang kuat dalam kolektivisme, tetap saja komunitas memiliki batasan-batasan yang tidak mereka miliki untuk menyelesaikan setiap masalah yang mereka terima. Masyarakat dalam hal ini membutuhkan pendamping atau fasilitator yang mengarahkan keberdayaan mereka dapat berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Selain pemerintah dan masyarakat, terdapat satu

pihak yang juga dapat terlibat dalam proses pengembangan masyarakat, yaitu perusahaan / korporasi.

Namun, apakah betul perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengembangan masyarakat? Mengingat satu-satunya tujuan dominan, dasar dan jangka panjang dari dibentuknya korporasi / perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit (Levitt, 1958) dan isu sosial termasuk pengembangan masyarakat bukan merupakan fokus utama dari korporasi (Friedman, 1962), maka perlu ada regulasi yang mengatur pelaksanaan pengembangan masyarakat ini oleh perusahaan. Carroll (1991) dalam piramida CSR yang terkenal menjelaskan bahwa kemauan perusahaan untuk menjadi filantropis tidak muncul begitu saja, melainkan bertahap dari dorongan ekonomi (*Economical Responsibility*) sebagai faktor paling dasar tentang alasan perusahaan melaksanakan pengembangan masyarakatnya. Faktor ketaatan terhadap hukum (*Law Responsibility*) menjadi tahap lanjutan yang mendorong perusahaan melakukan kewajiban dalam tanggung jawab sosialnya, kemudian disusul pertimbangan etis (*Ethical Responsibility*) dan terakhir adalah kesukarelaan (*Philantrophy Responsibility*) perusahaan untuk terlibat aktif dalam pengembangan masyarakat. Sehingga, debat mengenai apakah perusahaan memiliki kewajiban dalam pengembangan masyarakat sangat ditentukan dari level kesadaran perusahaan berdasarkan piramida CSR tersebut. Kemudian, apakah mungkin membuat perusahaan yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan juga memiliki kewajiban atau bahkan kesukarelaan untuk ikut dalam pengembangan masyarakat?

Sejarah Peran Perusahaan dalam Pengembangan Masyarakat

Sejarah mengenai keterlibatan perusahaan dalam pengembangan masyarakat setidaknya bisa kita runut dari tahun 1800an ketika industrialis pabrik baja Andrew Carnegie mendonasikan keuntungannya untuk Pendidikan dan penelitian bagi masyarakat (Thomas, 2019). Konsep pengembangan masyarakat oleh perusahaan yang lebih modern diperkenalkan oleh Howard R. Bowen melalui istilah tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam buku *Social*

Responsibility of Businessman pada tahun 1953, Bowen kemudian dikenal sebagai “Bapak CSR”. Konsep pengembangan masyarakat oleh perusahaan kemudian disempurnakan lagi pada tahun 1991 lewat pemikiran Donna J. Wood (1991) tentang Corporate Social Performance Revisited yang menjabarkan tentang model CSR melalui kerangka kerja yang lebih jelas tentang luaran dan dampak yang harus dihasilkan oleh program tanggung jawab sosial. Archie B. Carroll (1991) pada tahun yang sama juga melengkapi dengan pemikirannya tentang piramida CSR yang menjelaskan tahapan implementasi CSR oleh perusahaan mulai dari legitimasi ekonomi hingga kesukarelawan perusahaan, tahapan tertinggi dari proses pengembangan masyarakat oleh perusahaan. Pada tahun 2006, Porter & Kramer melalui artikelnya di *Harvard Business Review* menuliskan dengan sangat baik konsep *Creating Shared Value* yang diharapkan menjadi titik temu antara kebutuhan masyarakat dan peran strategis perusahaan dan pada tahun 2016, Chandler melengkapinya dengan pandangannya tentang *Sustainable value of CSR* (Agudelo, Jóhannsdóttir, & Davídsdóttir, 2019) dan Widhagdha (2022) merancang model *Social Innovation Canvas* yang membuat perusahaan lebih partisipatif dalam mengembangkan program tanggung jawab sosialnya berbasis kebutuhan masyarakat lokal melalui inovasi sosial.

Tabel 10. Periode Perkembangan Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

No	Periode	Tokoh	Teori & Sumbangsih Pemikiran
1	1800an	Andrew Carnegie	Donasi terhadap Pendidikan dan penelitian dari industri pabrik baja
2	1971	Committee for Economic Development, United States of America	Pemahaman tentang peran korporasi dalam melayani masyarakat “ <i>Business exists to serve society?</i> ”

3	1953	Howard R. Bowen	<i>Social Responsibility of Businessman</i>
4	1991	Donna J. Wood	<i>Corporate Social Performance</i>
5	1991	Archie B. Carroll	<i>Pyramid of CSR</i>
6	2006	Porter & Kramer	<i>Creating Shared Value</i>
7	2016	Chandler	<i>Sustainable value of CSR</i>
8	2022	Widhagdha	<i>Social Innovation Canvas</i>

Sumber: Analisis Penulis, 2022

Perusahaan sebagai Agen Pengembangan Masyarakat

Melihat sejarah Panjang peran perusahaan dalam pengembangan masyarakat, sebenarnya bukan hal baru apabila perusahaan baik dalam perannya dalam fungsi bisnis maupun tanggung jawab sosial melakukan program dan kegiatan pengembangan masyarakat. Selain itu, jika dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan (regulasi) yang mewajibkan perusahaan melakukan tanggung jawab sosial, baik berupa donasi ataupun sampai tahap pemberdayaan, maka kegiatan itu juga bisa dipandang sebagai pengembangan masyarakat meskipun dalam ruang lingkup yang sangat terbatas. Namun jika dilihat dari peran perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif secara mandiri dan sukarela untuk terlibat dalam penyelesaian masalah sosial di sekitar masyarakat dan kemudian merancang nilai bersama (*creating shared value*) maka gambaran ini lebih kuat menunjukkan peran perusahaan sebagai agen pengembangan masyarakat. Perbedaan inisiatif dari kewajiban regulasi menuju kepada kesukarelawanan merupakan titik tolak penting untuk mengeksplorasi peran perusahaan dalam pengembangan masyarakat, apakah merupakan kewajiban atau kesukarelawanan.

Jika kita mengeksplorasi peran perusahaan sebagai agen pengembangan masyarakat, maka kita perlu mengurai beberapa tipe dan praktik agen dalam pengembangana masyarakat. Pertama, perusahaan berperan sebagai penyedia dana / donatur dalam program pengembangan masyarakat, peran ini melihat perusahaan sebagai aktor

yang memiliki anggaran untuk bisa dialokasikan dalam program pengembangan masyarakat. Kedua, perusahaan berperan sebagai tenaga ahli atau narasumber yang memberikan informasi dan pengetahuan terkait kompetensi utama yang dimiliki perusahaan untuk diberikan kepada masyarakat dalam rangka menyelesaikan permasalahan masyarakat. Ketiga, perusahaan sebagai fasilitator dalam program pengembangan masyarakat, fungsi ini menekankan pada peran perusahaan yang mempertemukan dan memfasilitasi berbagai aktor lain dalam rangka kegiatan pengembangan masyarakat. Keempat, perusahaan berperan sebagai perekayasa sosial (*social engineer*) dalam proses pengembangan masyarakat, fungsi ini menekankan pada inisiatif dan partisipasi perusahaan untuk terlibat dalam penyelesaian dan solusi atas permasalahan masyarakat.

Keempat peran tersebut dapat kita lihat dalam praktik pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan. Tentu kita akan berharap perusahaan sebagai agen pengembangan masyarakat melakukan keempat peran tersebut secara proporsional, yaitu sebagai penyedia anggaran, menjadi narasumber dalam membagikan kompetensi inti, memfasilitasi program hingga terlibat aktif dalam rekayasa sosial yang diperlukan masyarakat. Namun komitmen perusahaan dalam melaksanakan kerja-kerja pengembangan masyarakat dalam perspektif kewajiban atau kesukarelawan kembali memegang peran penting sampai tahap mana perusahaan akan memainkan perannya dalam pengembangan masyarakat.

Pengembangan Masyarakat: Praktik Beberapa Perusahaan

Terlepas dari perdebatan mengenai kewajiban dan kesukarelawanan, kita tentu tidak bisa begitu saja mengesampingkan peran pengembangan masyarakat yang telah dilakukan oleh perusahaan. Di Indonesia, partisipasi perusahaan dalam mengembangkan layanan sosial masyarakat juga telah berkembang pesat, setidaknya terdapat regulasi pada tahun 2014 ketika Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan (PROPER) dijalankan yang

membagi praktik pengelolaan lingkungan oleh perusahaan ke dalam dua tahap yaitu tahap ketaatan (*Compliance*) dan tahap melebihi ketaatan (*Beyond Compliance*) atau regulasi tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 dan disempurnakan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1824K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Regulasi-regulasi tersebut setidaknya mengatur pedoman ketaatan dan pelaksanaan program pengembangan masyarakat di sejumlah perusahaan terutama perusahaan yang berhubungan dengan pengolahan sumber daya alam di Indonesia.

Meskipun penilaian tentang pengembangan masyarakat berada pada tahap melebihi ketaatan dan digerakkan oleh regulasi (*Regulatory-Driven*) namun praktik pengembangan masyarakat perlahan menjadi budaya yang diadaptasi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Melalui regulasi yang ada, perusahaan diajak untuk semakin terlibat dan sukarela dalam pengembangan masyarakat yang ada di sekitar wilayah operasionalnya. Kenapa kesukarelaan? Karena jika tidak melaksanakan praktik pengembangan masyarakat, tidak ada sanksi atau hukuman (*punishment*) yang diatur secara jelas kepada perusahaan, dan jika perusahaan melaksanakan praktik pengembangan masyarakat, juga tidak terdapat hadiah (*reward*) yang diberikan oleh Pemerintah kepada perusahaan, melainkan berupa apresiasi pemingkatan. Apresiasi pemingkatan ini kemudian menjadi penting karena berhubungan dengan reputasi dan citra perusahaan di mata publik, investor atau pemangku kepentingan lainnya.

Dalam penilaian PROPER, pengembangan masyarakat dilaksanakan dengan mengadopsi manajemen model dari UN Global Compact yang membagi tahapan pelaksanaan program mulai dari penetapan komitmen dan kebijakan, alokasi sumber daya manusia dan anggaran, perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, hingga publikasi dan pelaporan (Widhagdha, 2019). Tahapan ini hendak memastikan perusahaan menjalankan langkah-langkah pengembangan

masyarakat mendapat dukungan baik dari sisi komitmen, anggaran hingga implementasi program, karena seringkali program pengembangan masyarakat yang tidak mendapat dukungan dari manajemen perusahaan dapat berhenti kapan saja tanpa menghasilkan dampak yang signifikan. Pelaksanaan program pengembangan masyarakat juga diharapkan mendapat dukungan dari pemangku kepentingan di luar perusahaan, seperti pemerintah dan Lembaga swadaya masyarakat yang memiliki ketertarikan yang sama terhadap pengembangan masyarakat. Maka sejak tahun 2021, terdapat pembaruan yang cukup signifikan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 1 Tahun 2021 yang mengatur tentang PROPER dimana hubungan antar pemangku kepentingan (*stakeholders engagement*), *creating shared value*, dan penciptaan inovasi sosial menjadi perhatian dalam pengembangan masyarakat. Dalam pandangan penulis, serangkaian regulasi tersebut tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi faktor pendorong bagi perusahaan untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan program pengembangan masyarakat mereka melalui skema tanggung jawab sosial.

Pengembangan Masyarakat oleh Perusahaan berdasarkan Kewajiban

Dalam konteks perusahaan pertambangan, keberadaan Rencana Induk Program Pengembangan Masyarakat (RI-PPM) memang memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan. Apa yang dilakukan sebuah perusahaan batu bara di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan dengan menyelenggarakan beasiswa Pendidikan bagi masyarakat lokal mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dianggap telah mampu menyediakan akses Pendidikan yang merata bagi masyarakat lokal, selain itu kesempatan yang diberikan juga terbukti telah mampu mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat menuju ke kehidupan yang lebih baik. Program pemberian beasiswa ini tentu merupakan komitmen yang luar biasa, mengingat program beasiswa Pendidikan membutuhkan waktu yang relatif panjang dengan hasil yang tidak berdampak langsung pada operasi perusahaan, kesediaan perusahaan dalam menjalankan program

beasiswa Pendidikan ini perlu mendapat kredit tersendiri meskipun keputusan terhadap pelaksanaan program merupakan amanat dari kewajiban RI-PPM terutama di bidang Pendidikan.



Gambar 18. Siswa SMK Bukit Asam dalam Program Beasiswa Pendidikan (Sumber: ptba.co.id, 2020)

Cerita lain tentang kewajiban perusahaan dalam pengembangan masyarakat juga dapat kita baca melalui program pengembangan perkebunan kakao dari perusahaan batu bara di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Program ini dimulai dari kewajiban perusahaan untuk melaksanakan kegiatan reklamasi pasca tambang dengan mengelola lahan bekas tambang menjadi lahan produktif dengan menginisiasi penanaman tanaman kakao. Perusahaan kemudian melibatkan pusat penelitian pertanian setempat untuk mengembangkan metode pertanian kakao yang sesuai dengan kondisi lahan dan mengajak masyarakat yang awalnya membudidaya kakao secara tradisional menjadi lebih modern dengan teknologi pertanian dan pengolahan pasca panen yang lebih lengkap.

Program ini kemudian berkembang dari program tanggung jawab

sosial menjadi suatu entitas bisnis mandiri, memiliki pabrik pengolahan kakao yang diresmikan oleh Menteri ESDM Republik Indonesia pada tahun 2019 dan menjadikan kakao sebagai produk unggulan Kabupaten Berau serta melibatkan masyarakat lokal menjadi untuk aktif petani kakao hingga pengolahan produk kakao menjadi coklat hingga mampu dipasarkan di tingkat nasional.

Meskipun berawal dari kewajiban pelaksanaan RI-PPM, perusahaan tidak hanya melaksanakan program pengembangan masyarakat secara tekstual saja, namun juga mengembangkan inovasi dalam pelaksanaan program pengembangan masyarakat sesuai dengan karakteristik dan kondisi masyarakat lokal. Hal ini yang kemudian menjadikan program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh perusahaan berbasis pada kewajiban tetap memiliki nilai penting dan dampak yang masif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kunci dalam keberhasilan pengembangan masyarakat oleh perusahaan berbasis kewajiban adalah dengan tidak berhenti menciptakan inovasi dan selalu menyesuaikan konteks lokal agar program pengembangan masyarakat yang dirancang dapat diterima dan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat lokal.



Gambar 19. Petani Kakao di Berau (Sumber: beraucoalenergy.co.id,

Pengembangan Masyarakat oleh Perusahaan berdasarkan Kesukarelaan

Pelaksanaan program pengembangan masyarakat juga dapat kita lihat pada praktik yang dilakukan oleh perusahaan pengolahan minyak nasional yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Ketika bencana kebakaran hutan dan lahan melanda wilayah tersebut pada periode 2015 hingga 2019, perusahaan sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk ikut terlibat dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan gambut, namun karena perusahaan memiliki kepedulian, sumber daya dan pengetahuan yang mencukupi untuk ikut dalam penanganan kebakaran, maka perusahaan kemudian membuat program mitigasi kebakaran hutan dan lahan gambut yang diinisiasi pada tahun 2017 dengan membentuk masyarakat peduli api sebagai relawan pemadaman kebakaran lahan gambut berbasis masyarakat (Widhagdha, Purwanto, & Hidayat, 2020).

Program ini dimulai dari kepedulian perusahaan terhadap kondisi krisis dan bencana yang melanda, sedangkan perusahaan memiliki cukup sumber daya seperti infrastruktur pemadaman kebakaran yang canggih dan personil pemadaman kebakaran yang bersertifikasi internasional karena memang dibutuhkan dalam mengelola operasi perusahaan. Kemudian perusahaan secara sukarela mempergunakan infrastruktur yang dimiliki untuk membantu proses pemadaman kebakaran, hingga secara sukarela memberikan pengajaran dan transfer kompetensi pemadaman kebakaran dari personil mereka yang tersertifikasi kepada masyarakat. Hal ini diperkuat dengan dukungan program tanggung jawab sosial yang mengelola kelembagaan sosial masyarakat agar mampu mengelola kegiatan pemadaman kebakaran secara mandiri dan berkelanjutan.



Gambar 20. Pelatihan Pemadaman Kebakaran di Sungai Pakning, Bengkalis (Sumber: Dokumenasi Penulis, 2019)

Selain upaya pemadaman kebakaran lahan gambut, perusahaan bersama masyarakat juga mengembangkan sistem mitigasi kebakaran dengan memanfaatkan lahan bekas terbakar dan berisiko terbakar menjadi area pertanian gambut yang produktif dengan mengembangkan budidaya pertanian nanas, serai wangi dan sayuran. Upaya budidaya pertanian ini tidak hanya mampu mengurangi risiko kebakaran di lahan gambut, namun juga meningkatkan produktifitas lahan gambut dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh perusahaan di Kabupaten Bengkalis ini bukan merupakan kewajiban karena perusahaan tidak terkena regulasi apapun yang mewajibkan perusahaan untuk mengembangkan program seperti di atas, namun perusahaan dengan inisiatif dan semangat pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial mengembangkan program pengembangan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat agar lebih berdampak bagi kesejahteraan masyarakat lokal.

Cerita lain dari pelaksanaan program pengembangan masyarakat dapat kita baca dari upaya perusahaan minyak di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang mengembangkan teknologi pengolahan

limbah untuk sebuah kampung yang menjadi sentra produksi tempe tradisional. Perusahaan menginisiasi pembuatan teknologi pengolahan limbah karena kampung tersebut memiliki masalah drainase dan pengelolaan limbah yang buruk, sementara kampung tersebut menjadi sentra produksi makanan yang seharusnya higienis agar makanan yang diproduksi dapat berkualitas, sehat dan aman untuk dikonsumsi. Maka sejak tahun 2020, perusahaan melakukan pendekatan kepada komunitas produsen tempe untuk mengetahui pola produksi dan intervensi yang mungkin dilakukan dalam rangka mengolah limbah cair hasil produksi tempe agar tidak mencemari lingkungan (Widhagdha & Anantanyu, 2022).



Gambar 21. Kemasan Olahan Tempe (Sumber: bisnis.com, 2022)

Selain melakukan upaya pengelolaan limbah, perusahaan juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas agar produk tempe yang dihasilkan dapat lebih berkualitas dan beragam. Hal ini dikarenakan selama puluhan tahun, produk yang dihasilkan komunitas hanya terbatas pada satu produk tempe saja, yaitu tempe papan. Maka melalui pelatihan

dan pembukaan akses pasar baru, perusahaan memperkenalkan variasi produksi tempe yang bisa diolah oleh masyarakat tanpa mengganggu pasar yang sudah ada, sehingga pendapatan masyarakat dapat lebih meningkat. Upaya pengembangan masyarakat pada sentra perajin tempe ini bukan merupakan kewajiban perusahaan pengolahan minyak, namun karena melihat kondisi masyarakat yang membutuhkan serta melihat kompetensi yang dimiliki perusahaan dalam pengolahan limbah, maka secara sukarela perusahaan menginisiasi program pengembangan masyarakat tersebut agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas lingkungannya dan meningkatkan pendapatannya sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kesejahteraan mereka.

Pengembangan Masyarakat oleh Perusahaan: Dari Kewajiban menuju Kesukarelawanan

Praktik pengembangan masyarakat oleh perusahaan memang bermula dari adanya kewajiban seperti yang diatur oleh perundang-undangan dan sejumlah regulasi turunannya. Keberadaan regulasi ini penting untuk menjamin bahwa perusahaan memiliki kewajiban dalam bentuk tanggung jawab sosial agar tidak hanya memikirkan keuntungan semata, namun juga berdampak lebih kepada masyarakat terutama di sekitar wilayah operasionalnya atau lebih luas lagi kepada masyarakat umum yang menjadi konsumen produk dari perusahaan tersebut. Ketiadaan regulasi sama saja membebaskan perusahaan bertindak sesukanya dan berharap pada etika yang dimiliki perusahaan untuk turut memikirkan kemajuan komunitas, hal yang sangat absurd di zaman sekarang.

Adanya regulasi yang mengatur kewajiban tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial saja masih tak jarang coba diakali oleh sejumlah perusahaan untuk tidak menambah beban biaya yang harus dikeluarkan dengan berbagai macam cara, sehingga keberadaan regulasi yang menjadi kewajiban menurut penulis mutlak diperlukan dan diawasi pelaksanaannya untuk menjamin perusahaan taat dalam peraturan yang berlaku.

Namun kita juga tidak boleh hanya mengedepankan praduga

negatif tersebut. Bukti bahwa telah banyak perusahaan yang dengan inisiatifnya melaksanakan program pengembangan masyarakat di luar kewajiban tanggung jawab sosialnya juga patut diapresiasi. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menunjukkan kesukarelawanannya dalam mengembangkan program pengembangan masyarakat yang awalnya bermula dari adanya kewajiban hingga pada akhirnya berkembang menjadi inovasi yang melibatkan partisipasi dan berjalan secara berkelanjutan. Model adaptasi peraturan menjadi kebiasaan perilaku bagi perusahaan dalam menjalankan program pengembangan masyarakat menurut penulis diperlukan agar menjadi panduan, setidaknya dalam pelaksanaan program pengembangan masyarakat yang tidak dianggap membebani perusahaan, melainkan mengembangkan nilai bersama agar tujuan perusahaan dan masyarakat dapat berjalan secara beriringan. Meminjam istilah Porter & Kramer (2006) tentang *Creating Shared Value* yang dianggap akan menjadi titik temu antara kepentingan perusahaan dan kebutuhan masyarakat, sehingga pelaksanaan tanggung jawab sosial tidak lagi dianggap menjadi beban dan sekedar kewajiban, namun juga peluang untuk berinovasi agar operasi perusahaan dapat terus relevan dan mendapat dukungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Widhagdha, M. F., Wahyuni, H. I., & Sulhan, M. (2019). Bonding, Bridging and Linking Relationships of the CSR Target Communities of PT Pertamina Refinery Unit II Sungai Pakning. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication* 35 (4), 470-483.
- Boutilier, R. G., & Thomson, I. (2011). *Modelling and Measuring The Social License to Operate: Fruits of a Dialogue between Theory and Practice*. Retrieved from <https://sociallicense.com/publications/Modelling%20and%20Measuring%20the%20SLO.pdf>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholders Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Widhagdha, M. F., Wahyuni, H. I., & Sulhan, M. (2019). Bonding, bridging and linking relationships of the csr target communities of PT Pertamina refinery unit II sungai pakning. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 470-483.
- Hadi, P. (2013). *Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (Kasus PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant)*. Surakarta: UNS.
- Nurjanah, A. (2018). *Pemberdayaan masyarakat melalui sinergitas peran gender pada program CSR bank sampah mandiri PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant*. Surakarta: UNS.
- Wibowo, A. (2019). *Kelembagaan sosial ekonomi lokal dan kearifan lokal di bidang lingkungan dalam penerapan corporate social responsibility (Studi kasus CSR PT Tirta Investama Aqua Lestari)*. Surakarta: UNS.
- Pratama, M. A. (2020). *Pemberdayaan masyarakat melalui program indigo creativa nation (studi kasus corporate social responsibility PT Telkom Indonesia di Jogja Digital Valley)*. Surakarta: UNS.
- Korten, D., & Klauss, R. (1984). *People Centered Development: Contributions toward Theory and Planning Framework*. West Hartford DC: Kumarian Press.
- Mardikanto, T. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat oleh Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Surakarta: UNS Press.
- Morrison, J. (2014). *The social license: How to keep your organization legitimate*. London: Palgrave Macmillan.
- Boutilier, R. (2017). *A Measure Of The Social License to Operate for Infrastructure And Extractive Projects*.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thomas, P. (2008). Communication and the Persistence of Poverty: The Need for a Return to Basics. In J. Servaes, *Communication for Development and Social Change* (pp. 31-44). New Delhi: SAGE.
- Kartono, D. T. (2022). *Pengembangan Masyarakat*. Surakarta: UNS Press.
- Carroll, A. (2016). Carroll's pyramid of CSR: taking another look. *Int J Corporate Soc Responsibility* 1, 3.
- Levitt, T. (1958). The dangers of social responsibility. *Harvard business*

- review*, 41-50.
- Friedman, M. (1962). *Capitalism and freedom*. Chicago: University of Chicago Press.
- Thomas. (2019, September 25). *Business & Industry*. Retrieved from thomasnet: <https://www.thomasnet.com/insights/history-of-corporate-social-responsibility/>
- Bowen, H. R. (1953). *Social responsibility of businessman*. New York: Harper & Row.
- Agudelo, M. A., Jóhannsdóttir, L., & Davídsdóttir, B. (2019). A literature review of the history and evolution of corporate social responsibility. *International Journal of Corporate Social Responsibility* 4:1, 1-23.
- Widhagdha, M. F. (2019). Model Komunikasi Pengelolaan Lingkungan: Adaptasi UN Global Compact Management Model dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.3 Tahun 2014. In F. G. Sukmono, & T. Y. Wijayanti, *Komunikasi Lingkungan dan Komunikasi Bencana di Indonesia* (pp. 39-48). Yogyakarta: Litera Yogyakarta.
- Berau Coal. (2022, March 24). *Responsibility*. Retrieved from Berau Coal Energy: <https://www.beraucoalenergy.co.id/kembangkan-kakao-berkualitas-melalui-dampungan-berau-coal/>
- PTBA. (2020, September 18). *Berita CSR & Lingkungan*. Retrieved from Bukit Asam: <https://www.ptba.co.id/berita/berita-csr-lingkungan/ptba-kucurkan-beasiswa-rp-65-miliar-untuk-siswa-di-area-tambang-1282>
- Widhagdha, M. F., Purwanto, W., & Hidayat, R. (2020). *Kampung Gambut Berdikari*. Bengkalis: Arjuna Wijaya.
- Wulandari, D. (2022, March 18). *Bisnis Sumatra*. Retrieved from Bisnis: <https://sumatra.bisnis.com/read/20220318/534/1512413/pelaku-usaha-keripik-tempe-plaju-bertahan-di-tengah-gejolak-harga>
- Widhagdha, M. F., & Anantanyu, S. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Inovasi Sosial “Kampung Pangan Inovatif” di Plaju Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. *Prospect: Jurnal Pemberdayaan*

Masyarakat 1,2, 63-70.

PENGEMBANGAN MASYARAKAT DALAM PROMOSI KESEHATAN

Nadya Puspita Adriana

Universitas Kusuma Husada Surakarta

Email: nadyadriana91@gmail.com

Pengembangan masyarakat (*Community Development*) dan pemberdayaan masyarakat (*Community empowerment*), merupakan 2 hal yang saat ini populer dalam pembangunan suatu negara berkembang. Kedua konsep ini harus berjalan beriringan dalam suatu negara sehingga negara tersebut dapat mencapai pembangunan yang merata, tetapi perlu juga dilandasi dengan prinsip keadilan sosial, Kesetaraan partisipasi dan kerjasama, serta tercapainya kemandirian melalui keterlibatan atau partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat.

Pengembangan masyarakat sendiri muncul pada sebuah gerakan sosial di era 70an dengan munculnya kebutuhan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang terabaikan/lemah (*disadvantage*). Dari gerakan tersebut maka terpikirkanlah sebuah model kesejahteraan yang tujuannya untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam proses pembangunan (*participatory model*) (Winsome, 2005). Pemikiran tersebut merubah keberpihakan nasib-nasib masyarakat lemah dengan mengubah model gerakan sosial dari kontrol sosial ke arah bagaimana cara dalam melakukan pemberdayaan dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan hingga terlahir kolaborasi yang baik dan

partisipatoris. Dari aksi ini muncul pengembangan masyarakat, perencanaan sosial hingga advokasi (Winsome, 2005).

Pengembangan masyarakat merupakan proses restrukturisasi masyarakat dengan memberikan ide dalam mengelola-mengorganisasikan kehidupan sosial-ekonomi sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri (Zubaedi, 2013). Pengembangan masyarakat sendiri tidak hanya berdasarkan sektor sosial-ekonomi semata, tetapi capaian sektornya sudah semakin meluas, seperti pertanian, perdagangan, kehutanan, industri, pendidikan, lingkungan hidup, lalu lintas dan terakhir sektor kesehatan (Ife, 2016).

Di era ini perubahan pengembangan masyarakat telah siap dalam menghadapi isu-isu sektor diatas, tetapi setiap sektor tersebut cara melakukan pendekatannya berbeda tergantung dari organisasi masyarakat dalam melakukan pengembangannya. Dalam pengembangannya masyarakat memiliki keinginan dalam mensejahterakan dirinya dengan bisa bertanggung jawab dalam merumuskan kebutuhan mereka sendiri, untuk itu masyarakat bisa menjalankan dengan *supportive communities* (Zubaedi, 2013). Pada hakikatnya pengembangan masyarakat merupakan proses aktualisasi komitmen dalam memberikan solusi atau pemecahan masalah dalam Kesenjangan dan ketidakseimbangan antar kelompok masyarakat, seperti kurangnya sumber daya dan peluang, menjauhkan masyarakat dari berbagai tekanan sosial dan penyakit. Untuk itu dirancang bagaimana masyarakat tersebut diberikan sumber daya, ketrampilan dan peluang hidup untuk menjadi lebih baik. Cara ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan masyarakat yang berorientasi dalam memperbaiki kondisi kehidupannya.

Dalam penerapan dilapangan nantinya masyarakat bisa mensejahterakan dirinya tidak hanya dengan pengembangan tetapi dengan organisasi masyarakat yang ada disana. Untuk itu terdapat 6 tahap dalam melakukan pengembangan dan pengorganisasian masyarakat agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. keenam tap itu adalah Persiapan, perencanaan, aplikasi, pemantauan, penilaian dan ekspansi. Pada termin persiapan, maka dilakukan persiapan yg bersifat

intern petugas & persiapan sosial buat masyarakat. Persiapan petugas berupa hal-hal yg bersifat teknis-administratif & yg bersifat pilihan strategis pendekatan. Pada termin persiapan sosial, perlu mulai dilakukan sosialisasi masyarakat, sosialisasi perkara & selanjutnya diikuti menggunakan upaya penyadaran. Pada termin perencanaan, secara beserta disusun planning buat mengatasi perkara yg dihadapi & cara-cara penerapan planning tadi pada termin aplikasi. Selama aplikasi dilakukan pemantauan secara terjadwal & lalu dilakukan penilaian buat melihat pencapaian tujuan. Dari output aplikasi & penilaian termin berikutnya merupakan ekspansi kegiatan, baik yg bersifat kuantitatif juga kualitatif (Kurniati, 2015).

Pengembangan masyarakat pada hakikatnya adaah merubah pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam proses menolong masyarakat lemah dan memiliki niat dengan bekerja sama untuk kelompok. Atas dasar itu pengembangan masyarakat biasanya diimplementasikan dalam beberapa bentuk kegiatan dalam memenuhi kebutuhan mereka, pertama program pembangunan yang memungkinkan masyarakat dalam memuhi kebutuhannya dan kedua, melakukan aksi sosial telah memungkinkan kebutuhan bagi masyarakat yang kurang bisa dapat terpenuhi dengan layak (Payne, 1995). Secara khusus pengembangan masyarakat berhubungan dengan bagaimana upaya dalam pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat tidak mampu yang disebabkan oleh kemiskinan, intimidasi, diskriminasi berdasarkan kelas suku, sosial, jender, usia (Suharto, 2003).

Penerapan dan gagasan pengembangan masyarakat selalu berinitikan kegiatan sosial yang dapat mengorientasikan cara pemecahan masalah sosial yang ada di lingkungan (Darkenwald, 1982). Dalam pengembangannya ternyata masyarakat selalu memiliki batasan yang tipis antara belajar dan bekerja sehingga keduanya dapat berjalan bersama. Dari krisis yang ada di lingkungan tersebut maka Masyarakat dapat melihat eksistensinya dengan menerapkan perspektif ekologi dan keadilan sosial. Munculnya perspektif itu karena adanya para pecinta lingkungan "*Green*" yang menjelaskan bahwa tatanan lingkungan hancur karena berbagai faktor, seperti sosial, politik dan ekonomi bisa dianggap

tidak peduli pada krisis lingkungan. Berikut 10 Aliran "*Green*" menurut Ife (2016);

Tabel 11. Berbagai Aliran Pemikiran Green

No	Aliran	Pandangan tentang sumber utama masalah ekologi	Solusi yang diinginkan
1	Eko-sosialisme	Ideologi kapitalis	Sistem Masyarakat Sosialis
2	Eko-anarkisme	Hirarki, birokrasi, pemerintahan	Desentralisasi, dikontrol pada lokal dan penghapusan kontrol oleh pemerintah pusat
3	Eko-feminisme	Sistem Patriarki	Revolusi Feminisme, penghargaan kepada wanita dan penghapusan penindasan gender
4	Eko-ludisme	Teknologi	Teknologi bersekala kecil mengakhiri "kemajuan" teknologi tanpa batas
5	Anti-pertumbuhan	Pertumbuhan (konsumsi, ekonomi, penduduk)	Masyarakat tanpa pertumbuhan
6	Prinsip-prinsip ekonomi kelompok <i>green</i>	Teori ekonomi konvensional	1. Ekonomi berkelanjutan yaitu eksternalitas 2. Ekonomi desentralisasi
7	Pekerjaan dan pasar buruh	Definisi kerja dan buruh sebagai mekanisme distribusi	Definisi baru tentang kerja dan waktu luang, pendapatan dasar yang terjamin
8	Pembangunan global	Dominasi eksploitasi	Keadilan global
9	Filsafat lingkungan	Pandangan dunia yang antroposentris	Pandangan dunia yang egosentris

10	Pemikiran paradigma baru	Cartesian, <i>linear thinking</i>	Sistemik
----	--------------------------	-----------------------------------	----------

Dalam 10 aliran tersebut, Ife (2016), menjelaskan bahwa setiap aliran tersebut bersifat tidaklah saling menolak, tidak kontradiktif dan saling menguatkan. Unsur-unsur yang berada dalam ke sepuluh aliran tersebut dapat diringkas dalam perspektif ekologi sebagai berikut; *pertama* (Holisme) yang artinya bahwa setiap peristiwa yang terdapat dalam lingkungan itu saling ketergantungan. *Kedua* (Sustaibilitas) menjelaskan bahwa setiap sumber daya yang terdapat pada lingkungan dapat diperbaharui lagi atau dapat bertumbuh. *Ketiga* (Diversitas) menjelaskan bahwa jika terdapat suatu masalah maka jalan keluar itu ada banyak dalam memecahkan masalah. *Keempat* (Ekuilibrium) menjelaskan bahwa yang hubungan dan ketergantungan itu saling membutuhkan.

Dalam pengembangan masyarakat terdapat beberapa prinsip yang satu sama Yang lain saling berhubungan dan saling melengkapi. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan keberhasilan atau kegagalan kegiatan masyarakat, sudut pandang ekologis dan keadilan sosial. Berikut ini 22 prinsip pengembangan masyarakat menurut Ife (2016);

1. **Pembangunan Menyeluruh:** Pembangunan sosial, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, dan kepribadian dan otherworldly adalah aspek penting dalam kehidupan setiap masyarakat. Program pengembangan masyarakat harus dapat memperhatikan enam aspek diatas. Untuk itu ke enam aspek itu harus dapat berjalan bersama, tetapi jika pada kenyataan di lapangan tidak dapat berjalan bersama maka diperlukan skala prioritas dengan tidak meninggalkan aspek lainnya. spek prioritas pembangunan di atas harus selalu diperhatikan. Oleh karena itu, keputusan yang berfokus pada satu atau dua aspek tertentu (seperti aspek ekonomi atau sosial) bersifat sadar, berbasis komunitas, dan bukan keputusan. Yang diambil akan menjadi perencana atau pekerja pengembangan masyarakat hanya berdasarkan asumsi sepihak.

2. **Menangani Ketidakberuntungan Struktural;** Tujuan utama dari kegiatan program pembangunan kota adalah terwujudnya keadilan sosial. Semua hambatan struktural seperti diskriminasi ras/etnis dan berbasis agamaorientation dsb harus diperhitungkan. Untuk itu pengembangan masyarakat harus dapat fokus terhadap isu-isu, yang dapat merukak rasa keadilan masyarakat yang mengarah terhadap penindasan.
3. **Hak Asasi Manusia (HAM);** Pengembangan masyarakat mesti dapat menjunjung tinggi HAM. HAM sendiri dapat diperoleh dari para pekerja masuarakat baik pada *protection of human right* maupun *promotion of human right* atau pekerja negatif dan positif. Dalam pandangannya pengembangan masyarakat harus dirangkai dengan amat mempertimbangkan supaya hak asasi manusia tidak di langar.
4. **Keberlanjutan (Sustainability);** Pengembangan masyarakat merupakan satu cara didalam membangun, ekonomi, tatanan osial serta politik yang setiap prosesnya serta strukturnya harus berbasis berkesinambungan. Jika upaya ini tidak berkelanjutan atau bersifat sementara makan akan menjadi pengembangan masyarakat yang kirang baik dan berimbas terhadap lingkungan rusak yang lebih parah. Kelangsungan menuntut supaya penggunaan semua jenis sumberdaya tidak terbarukan seminimal mungkin. Prinsip ini mengandung akibat mudah terhadap penggunaan lahan, gaya hidup, proteksi asal daya alam & sebagainya.
5. **Pemberdayaan (Empowerment);** Pemberdayaan harus menjadi bagian integral dari upaya pengembangan masyarakat. Pemberdayaan berarti menyediakan masyarakat dengan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk membantu mereka meningkatkan kemampuan mereka untuk menentukan masa depan mereka.
6. **Personal dan politik;** Keterkaitan pengembangan masyarakat dengan politik, dan personal karena masalah-masalah yang dihadapi personal atau individu dapat menyebabkan masalaha

terhadap pandangan publik yang merupakan unsur penting dalam pembangunan sosial. Pengembangan masyarakat sendiri memiliki keterikatan potensi yang dapat membangun antara kepentingan pribadi dengan politik, oleh karena itu potensi tersebut dapat memberikan solusi terhadap pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu selalu ditingkatkan pemahaman masyarakat dalam hubungan pribadi dan politik serta sebaliknya, supaya pengembangan masyarakat gagal berhasil.

7. **Premise Kepemilikan & Peningkatan Rasa Memiliki ;** Pengembangan masyarakat harus menitik beratkan pada pengembangan kepemilikan serta rasa memiliki masyarakat atau menyediakannya kalau belum ada. Maksud dari rasa memiliki bersama yaitu secara proses, struktur dan material dimana ketiga hal tersebut yang dapat mengontrol dan memberikan kebijakan terhadap pembangunan masyarakat secara baik, sehingga rasa kepemilikan itu akan meningkatkan keterampilan dan rasa percaya diri masyarakat dalam mengembangkan kegiatannya.
8. **Kemandirian;** Kemandirian ingin menggunakan sumber daya yang tersedia dalam masyarakat dan meminimalkan penggunaan sumber daya eksternal. Prinsip ini berlaku untuk semua sumber daya eksternal (keuangan, teknis, alam, dan sumber daya manusia) yang dibutuhkan masyarakat. Rasa kemandirian ini akan terwujud jika masyarakat dapat terampil dan percaya diri dalam mengembangkan kapasitasnya di dalam lingkungan agar semua wujud atau keinginan dari masyarakat dapat terealisasikan.
9. **Independensi;** Prinsip kemandirian berkaitan dengan hubungan pemerintah serta pihak lainnya diluar kelompoknya. Negara sebagai bagian dari masyarakat selalu memberikan dukungan dalam pengembangan masyarakat, karena ini merupakan dukungan respon yang alamiah. Pemerintah sendiri butuh pengembangan masyarakat dalam berbagai aspek agar dapat memberikan rasa aman terhadap pembangunan nasional.

tetapi dukungan pemerintah tidak bisa serta merta dapat diterima, tergantung dari situasi, kondisi dan tujuan dari pemerintah dalam memberikan dukungan.

10. **Tujuan dan Visi Masa Depan;** Dalam tujuannya pengembangan masyarakat selalu saja ada pro dan kontra dalam setiap prosesnya. Pro dan kontra ini merupakan hal biasa dilakukan dalam memperjuangkan tujuan dan visi dari setiap kegiatan atau program yang akan dijalankan baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk alasan ini, lebih banyak energi perlu difokuskan untuk mencapai tujuan jangka pendek, yang hanya mengganggu pencapaian tujuan jangka panjang. Di sisi lain, menempatkan sebagian besar energi Anda untuk mencapai tujuan jangka panjang Anda dapat membuat putus asa karena sepertinya tidak ada yang terjadi sejauh ini. Tetapi orang sering tidak sabar menunggu sedikit lebih lama untuk mendapatkan hasil yang tahan lama.
11. **Pembangunan Organik;** Pengembangan masyarakat Ini adalah bidang seni daripada bidang sains dan teknologi. Komunitas memiliki kemampuan terpasang (unik) sendiri untuk mengembangkan kemungkinannya sendiri. Oleh karena itu, upaya pengembangan masyarakat adalah menciptakan kondisi yang tepat yang memungkinkan berkembangnya potensi tersebut dengan baik.
12. **Laju Pembangunan;** Hasil dari pembangunan organik adalah masyarakat sendiri perlu menentukan ritme pembangunan yang dilakukan sesuai dengan dinamikanya. Bekerja secara terburu-buru tanpa adanya konsep pemikiran strategi akan mengakibatkan hasil yang fatal. Dari hasil tersebut maka masyarakat bisa saja akan kehilangan rasa dalam prosesnya dan komitmen dalam pembangunan.
13. **Kebijakan Eksternal;** Pengembangan masyarakat merupakan pameran pembelajaran dari masyarakat itu sendiri. Pengembang komunitas, di sisi lain, mungkin ingin mempromosikan pameran dengan memberikan kuliah kepada

komunitas tentang apa yang harus dilakukan dan dengan sopan memberikan saran yang menarik. Tetapi hal itu bisa saja hilang tanpa adanya rasa ingin tahu dan belajar dari ahlinya, selain itu bisa saja kegagalan dalam masyarakat disebabkan oleh kurang mulusnya suatu proses dalam pembentukan organisasi masyarakat itu sendiri.

14. **Pentingnya Pembangunan Komunitas;** Pengembangan masyarakat mendorong masyarakat untuk berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat, membangun rasa persatuan, dan mempromosikan pertukaran yang efektif dan saling pengertian untuk pelaksanaan kegiatan dan tujuan bersama. Oleh karena itu, membangun komunitas, membangun bersama, dan komunikasi yang baik adalah kunci keberhasilan pengembangan komunitas.
15. **Proses dan Hasil;** Pendekatan pragmatis pada pengembangan komunitas harus mengutamakan hasil (*yield dan results*). Pendekatan ini dipandang sangat penting karena akan menentukan keberhasilan suatu program. Untuk itu perlu dilakukannya refleksi tujuan secara bersama dalam masyarakat agar setiap proses yang direncanakan akan sesuai dengan yang diharapkan.
16. **Keterpaduan Proses;** Proses sangat penting dalam pengembangan masyarakat. Oleh sebab itu proses dikatakan baik akan menghasilkan produk baik juga sebaliknya. Proses pengembangan masyarakat sendiri dapat dilihat dari tujuannya, jika tujuannya mencerminkan cita-cita dari visi yang sudah disetujui maka hal tersebut bukan tidak mustahil dapat mewujudkan cita-cita dalam jangka panjang.
17. **Non Kekerasan (Non Violence);** pendekatan dengan kekerasan akan berdampak buruk bagi pengembangan masyarakat. Karena pendekatan ini akan menjauhkan dari kata perdamaian yang dapat membuat proses, hasil, struktur dan organisasi masyarakat menjadi jauh dari visi dan misi.

18. **Keterbukaan;** Keterbukaan adalah salah satu perspektif dari perdamaian. Penerapan keterbukaan dalam proses akan menghasilkan rasa kepercayaan masyarakat dalam meningkatkan kepercayaan dirinya terhadap keberhasilan suatu program. Untuk itu keterbukaan perlu ditingkatkan dengan menghargai semua masukan atau saran dari masyarakat lain dalam keberhasilan tujuan yang sudah disepakati.
19. **Konsensus (Mufakat);** Pengambilan keputusan secara mufakat atau bersama merupakan salah satu keberhasilan dari proses pengembangan masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa mufakat tidak mudah begitu saja dapat dijalankan prosesnya terlebih jika banyak dari pihak lain yang merasa bahwa keputusan secara mufakat cenderung ke salah satu pihak saja. Untuk itu diperlukan rasa menerima, menjaga dan mematuhi setiap keputusan yang lahir dari mufakat tersebut.
20. **Kerjasama;** Pandangan ekologi dan keadilan sosial membutuhkan struktur kompetitif (kooperatif) daripada struktur kompetitif. Tantangan utama dalam mencapai prinsip ini adalah kenyataan bahwa sebagian besar institusi yang ada di semua masyarakat (pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi, dll.) dibentuk atas dasar struktur persaingan. Ini tidak hanya membutuhkan rasa kemenangan, tetapi juga kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
21. **Partisipasi;** Pengembangan masyarakat harus selalu memaksimalkan partisipasi, memungkinkan setiap orang dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses dan kegiatan masyarakat. Semakin aktif terlibat, semakin besar rasa memiliki dan tanggung jawab atas apa yang sudah dimiliki masyarakat dan apa yang menjadi tujuannya. Partisipasi bukan berarti setiap orang harus terlibat dalam segala hal. Setiap orang memiliki minat, keterampilan, dan kemampuan yang berbeda, dan partisipasi perlu dirancang sesuai dengan itu. Banyak metode telah dikembangkan untuk rencana partisipatif ini, antara lain PRA (Participatory Rapid Assessment), PLA (Participatory

Action and Learning), dan OOPP (Goal-Oriented Project Planning).

22. **Menentukan Kebutuhan;** terdapat dua prinsip yang digunakan dalam kebutuhan. Yang Pertama, pengembangan masyarakat dalam membuat suatu kesepakatan dari beberapa pihak. Kedua, Anggota masyarakat harus memegang teguh hak, prinsip dan rasa keadilan sosial demi dapat mengarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Berdasarkan penjelasan diatas, sudah jelas bahwa pengembangan masyarakat yang baik harus dapat menjalankan 22 prinsip dimana semua prinsip itu memiliki keterikatan dalam menentukan tujuan dari pengembangan masyarakat itu sendiri. Lalu bagaimana jika pemberdayaan masyarakat/ membuat suatu gagasan pengembangan masyarakat dalam bidang kesehatan ?. Pengembangan masyarakat merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat, dimana mendorong partisipasi masyarakat dalam mencari solusi masalah kesehatan dengan pemikiran pluaristik (Rappaort, 1981; Ferreira dan Castel, 2009). Untuk itu perlu adanya promotor kesehatan dengan masyarakat sebagai bagian dari proses yang dinamakan promosi kesehatan. Ada banyak teori yang menjelaskan bahwa ada keterikatan yang erat antara pemberdayaan masyarakat (pengembangan masyarakat) dengan promosi kesehatan, salah satunya dari Pemerintah melalui kebijakan Kesehatan Nasional, yang menjelaskan bahwa bentuk secara dalam perbaikan upaya kesehatan, baik perorangan dan kelompok masyarakat harus terencana, terpadu dan berkesinambungan agar tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Depkes, 2009). Selain itu bahwa konsep pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai proses, metode, program dan gerakan yang memiliki ide atau gagasan terhadap perubahan sosial dan perilaku serta praktik masyarakat (Sanders, 1958).

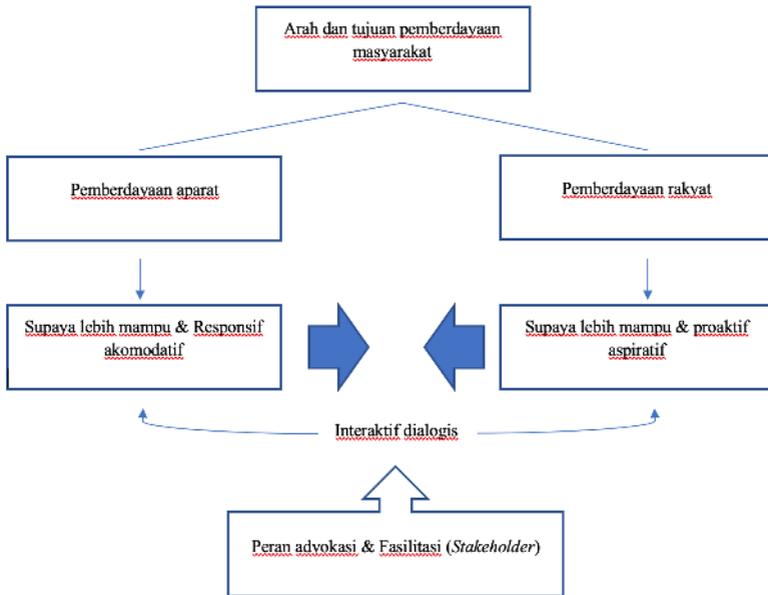
Dalam ranah kesehatan suatu pengembangan kesehatan tidak muncul begitu saja, tetapi butuh proses yang sangat panjang, terlebih lagi dalam prinsip preventif dan promotif yang biasa digaungkan oleh tenaga

promosi kesehatan. Model suatu promosi kesehatan didasari dari rasa kebutuhan masyarakat atau pemerintah dalam mencegah peningkatan suatu kasus penyakit. Oleh karena itu ada proses bagaimana rasa kebutuhan model promosi kesehatan itu dapat dikembangkan dan dibuat dalam mengatasi masalah kesehatan yang ada.

Banyaknya kasus kesehatan tidak serta merta bisa langsung dibuat model promosi kesehatan, tidak semua model promosi kesehatan dapat diterima dan diaplikasikan di suatu masyarakat. Untuk itu perlu adanya peranan masyarakat dan *stakeholder* pengambil kebijakan dalam merumuskan suatu model promosi kesehatan yang dapat diterima dan diaplikasikan di masyarakat. Menurut Ife (2016), peranan publik dan analisis kebijakan dalam memutuskan suatu tujuan melalui program yang dibangun/dibuat dibutuhkan rasa keadilan dan dalam partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara musyawarah.

Dalam tujuan pembangunan jangka panjangnya di bidang kesehatan, ada 5 tujuan utama yaitu; Pertama, penguatan kapasitas swadaya masyarakat di bidang kesehatan, kedua, peningkatan kualitas lingkungan untuk menjamin kesehatan, ketiga, peningkatan status gizi masyarakat, dan keempat, angka kesakitan dan kematian. keluarga yang berkualitas (Sulaeman, 2020). Berikut ini adalah gambar atau skema arah dan tujuan dari pemberdayaan masyarakat.;

Gambar 22. Arah dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat



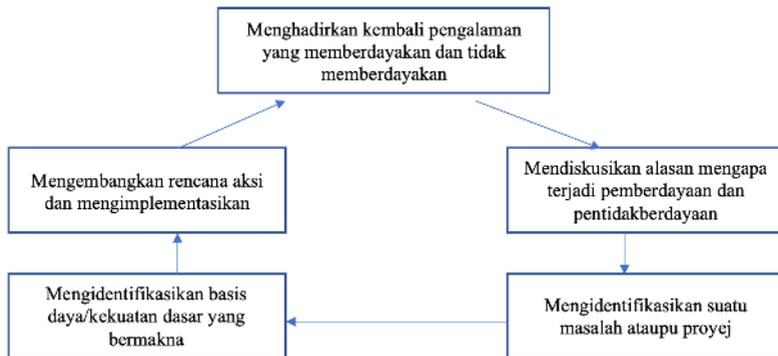
Sumber Taruna (2010). *Designs of Community Development Planning*

Dari gambar dapat dilihat bahwa peran advokasi (promotor kesehatan), merupakan peran penting sebagai fasilitator atau menjembatani antara tujuan pemberdayaan masyarakat dari pihak pemerintah (aparat) dengan pihak rakyat (masyarakat). Untuk melancarkan tujuan itu maka terdapat beberapa langkah; pertama, pengembangan peningkatan swadaya masyarakat di bidang kesehatan, kedua pengembangan pelayanan kesehatan (puskesmas) dalam mengatasi masalah kesehatan, ketiga, peningkatan upaya kesehatan khususnya bayi, anak-anak dan ibu, keempat, peningkatan kesehatan lingkungan, kelima, pengembangan pembiayaan kesehatan dan keenam, pembinaan keaktifan peran masyarakat dalam bidang kesehatan (Sulaeman, 2020).

Selain arah dan tujuan proses pemberdayaan masyarakat juga dijelaskan bagaimana proses pengembangan serta pemberdayaan

masyarakat dan intervensi komunitas yang saling ketergantungan satu dengan yang lain. Berikut ini gambar siklus pemberdayaan masyarakat (Hogan, 2000).

Gambar 23. Siklus Pemberdayaan



Ruang lingkup promosi kesehatan dalam pengembangan masyarakat

Ruang lingkup promosi kesehatan sangat luas, mulai dari kebijakan publik, kegiatan masyarakat hingga ke pelayanan kesehatan. Promosi kesehatan sendiri melalui pendidikan kesehatan menjadikan 5 pilar utama yang dipelopori oleh WHO lewat Ottawa Charter, dimana intinya bagaimana promosi kesehatan bisa menjadi media promosi untuk ruang lingkup kesehatan masyarakat. Berikut ini 5 pilar utama menurut WHO dalam (Sulistiowati, 2016).

1. *Build Healthy Public Policy* (Buat kebijakan publik yang sehat)
2. *Create Supportive Environment* (Ciptakan lingkungan yang mendukung)
3. *Strengthen Community Action* (Perkuat kegiatan masyarakat)

4. *Develop Personal Skills* (Kembangkan / tumbuhkan keterampilan pribadi)
5. *Reorient Health Services* (Orientasi ulang pelayanan kesehatan)

Untuk area aktivitas yang lebih operasional, Anda dapat merujuk ke definisi Green dan Kreuter dan kerangka PrecedeProceed. Ini mencakup (1) kegiatan pendidikan kesehatan, (2) kebijakan, peraturan, dan penciptaan dan pelaksanaan upaya organisasi. Kedua kegiatan tersebut merupakan tindakan, akar tindakan, atau intervensi langsung dalam lingkungan. Kegiatan lain yang mutlak diperlukan untuk menciptakan dan melaksanakan kegiatan di atas adalah (3) advokasi.

Becker (1974) membahas tiga bidang: pengetahuan kesehatan, sikap kesehatan, dan perilaku kesehatan dalam praktik kesehatan. Konsep perilaku sehat merupakan pengembangan lebih lanjut dari konsep perilaku yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom. Sebagai unit analisis, ada baiknya mengukur seberapa tinggi tingkat peningkatan perilaku kesehatan individu. Becker mengklasifikasikan perilaku kesehatan dalam tiga dimensi:

1. Pengetahuan Kesehatan.

Pengetahuan tentang kesehatan meliputi apa yang diketahui oleh seseorang terhadap cara-cara memelihara kesehatan, seperti pengetahuan tentang penyakit menular, pengetahuan tentang faktor-faktor yang terkait dengan pengetahuan tentang fasilitas kesehatan, mempengaruhi kesehatan serta pengetahuan dalam menghindari kecelakaan.

2. Sikap terhadap kesehatan.

Sikap kesehatan adalah pendapat atau penilaian individu tentang masalah yang berhubungan dengan perawatan kesehatan seperti: B. Sikap terhadap penyakit menular dan tidak menular, faktor yang berhubungan dengan kesehatan dan/atau yang berpengaruh, sikap fasilitas kesehatan, dan sikap menghindari kecelakaan.

Kebiasaan sehat untuk hidup sehat adalah semua kegiatan

manusia/masyarakat, atau kegiatan yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan yang baik, seperti pencegahan kecelakaan. Oleh karena itu, perlu adanya suatu metode yang dapat digunakan atau dilatih oleh para tokoh promosi kesehatan masyarakat untuk memberdayakan dan mengembangkan masyarakat khususnya di bidang kesehatan.

1. Metode Individual (Perorangan)

Pendidikan kesehatan menggunakan metode individual ini untuk mendorong perilaku baru dan mendorong mereka yang mulai tertarik dengan perubahan dan inovasi perilaku. Misalnya, seorang ibu yang baru saja menerimanya, atau seorang ibu hamil yang telah/baru saja menerima pendidikan kesehatan dan berminat untuk menerima vaksin tetanus toxoid (TT). Pendekatan yang digunakan untuk membuat ibu menjadi penerima yang gigih atau bagi ibu hamil untuk meminta vaksinasi segera harus ditangani secara individual. Di sini, seseorang tidak hanya berarti ibu yang terlibat, tetapi juga suami ibu dan keluarga. Dasar dari penggunaan pendekatan individual ini adalah bahwa setiap orang memiliki berbagai masalah atau alasan terkait dengan penerimaan atau perilaku baru. Agar profesional kesehatan tahu persis bagaimana membantu mereka, mereka perlu menggunakan pendekatan berikut.

a) Bimbingan dan penyuluhan (*guidance and counseling*)

Dengan cara ini, kontak antara pelanggan dan staf diperkuat. Kami dapat menyelidiki dan membantu Anda memecahkan masalah yang Anda hadapi. Pada akhirnya, klien secara sukarela, sadar, dan memahami serta menerima perilaku (perubahan perilaku).

b) Interview (wawancara)

Metode ini sebenarnya merupakan bagian dari bimbingan dan konseling. Wawancara dengan profesional kesehatan dan klien untuk mengetahui apakah klien memiliki kesadaran dan pemahaman yang kuat tentang informasi yang diberikan (perubahan perilaku yang diharapkan) dan mengapa mereka tidak menerima atau menerima perubahan tersebut Saya tertarik. Atau, jangan terima perubahan yang dikirimkan. Jika belum berubah, diperlukan konsultasi yang

lebih detail.

2. Metode Kelompok

Saat memilih metode kelompok, Anda perlu mempertimbangkan ukuran kelompok sasaran dan tingkat pendidikan formal kelompok sasaran. Untuk kelompok besar, caranya berbeda dengan kelompok kecil. Efektivitas metode tergantung pada ukuran tujuan pendidikan.

a) Kelompok Besar

Kelompok besar disini berarti peserta penyuluhan lebih dari 15 orang. Ceramah dan seminar adalah cara yang baik untuk kelompok besar ini.

1) Ceramah

Metode ini cocok untuk tujuan pendidikan tinggi dan rendah. Ini adalah cara untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan. Metode ini mudah diterapkan, tetapi penerima informasinya pasif, dan jika terlalu lama, aktivitasnya bisa membosankan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode ceramah:

Persiapan:

Perkuliahan akan berhasil jika instruktur menguasai materi yang disampaikan sendiri. Untuk itu, guru perlu mempersiapkan dan mempelajari materi secara sistematis. Lebih baik lagi jika ditempatkan dalam diagram atau skema. Menyiapkan bahan ajar seperti B. Kertas pendek, foil, spanduk, sound system, dan lainnya.

Pelaksanaan:

Kunci keberhasilan perkuliahan adalah instruktur dapat menguasai tujuan perkuliahan. Untuk dapat menguasai tujuan (dalam arti psikologis), pembicara dapat:

- Sikap persuasif dan sikap curiga dan tidak perlu takut.
- Suara harus keras dan jelas.
- Anda perlu melihat semua peserta dalam presentasi.
- Jangan berdiri di depan (tengah) dan duduk.

- Gunakan alat bantu dengar (AVA) bila memungkinkan

Seminar

Metode ini hanya cocok untuk pendidikan formal tinggi dan menengah. Seminar adalah disertasi ahli (presentasi) tentang topik yang mungkin penting. Itu dianggap tulus di masyarakat.

b) Kelompok Kecil

Apabila peserta kegiatan itu kurang dari 15 orang biasanya kita sebut kelompok kecil. Metode-metode yang cocok untuk kelompok kecil antara lain:

1) Diskusi Kelompok

Metode ini dilakukan terutama dalam bentuk diskusi antara informan dan penerima informasi untuk menyelesaikan masalah. Metode ini merupakan salah satu cara atau lebih bagi penerima informasi untuk berpikir kritis, mengemukakan pendapat secara bebas, menyumbangkan pemikirannya untuk memecahkan masalah bersama, dan memecahkan masalah berdasarkan pertimbangan yang matang. Mendorong Anda untuk memilih alternatif jawaban. Dalam diskusi kelompok, pengaturan tempat duduk peserta diatur saling berhadapan, seperti lingkaran dan persegi panjang, sehingga semua anggota kelompok bebas berpartisipasi dalam diskusi. Pewawancara juga duduk di antara peserta agar tidak memberikan kesan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, mereka perlu merasa pada tingkat yang sama bahwa setiap anggota kelompok memiliki kebebasan/keterbukaan untuk mengungkapkan pendapatnya. Fasilitator harus memberikan prompt untuk memulai diskusi. Prompt dapat berupa pertanyaan atau kasus yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Agar diskusi hidup berlangsung, pemimpin kelompok perlu memimpin dan mengatur setiap orang untuk memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri sehingga mereka

tidak mengarah pada kendali satu peserta. Kelemahan metode diskusi adalah:

- Tidak tersedia untuk grup besar.
- Panelis menerima informasi yang terbatas.
- Dikendalikan oleh mereka yang suka berbicara.
- Biasanya orang menginginkan pendekatan yang lebih formal.

2) Curah Pendapat (*Brain Storming*)

Metode ini merupakan modifikasi dari metode diskusi kelompok yang diawali dengan memberikan kasus atau trigger untuk merangsang reaksi peserta. Prinsipnya sama dengan metode diskusi kelompok. Bedanya, ketua kelompok pertama-tama yang menyebabkan masalah kemudian masing-masing peserta memberikan jawaban atau jawaban (*brainstorming*). Satu atau lebih jawaban akan ditempatkan dan dicatat pada flip chart atau papan tulis. Komentar tidak diperbolehkan sebelum semua peserta membagikan pandangan mereka. Hanya setelah semua anggota menyatakan pendapat mereka, setiap anggota dapat berkomentar dan diskusi akan berlangsung di akhir.

3) Bola Salju (*Snow Balling*)

Cara mencapai kesepakatan dengan memecah menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan kemudian bergabung dengan kelompok yang lebih besar. Kelompok dibagi menjadi pasangan (1 pasang, 2 orang) dan mengajukan pertanyaan dan masalah. Setelah sekitar 5 menit, kedua pasangan akan digabung menjadi satu. Mereka terus membahas masalah ini dan mencari kesimpulan. Setelah itu, setiap dua pasangan yang sudah beranggotakan empat orang akan bergabung kembali dengan pasangan yang lain, dan akhirnya semua anggota kelompok akan berdiskusi.

4) Kelompok-kelompok Kecil (*Buzz Group*)

Grup dengan cepat dipecah menjadi grup yang lebih kecil (grup buzz), yang dapat menyebabkan masalah yang mungkin atau mungkin tidak sama dengan grup lain. Setiap kelompok mendiskusikan masalah tersebut, kemudian hasilnya dan setiap kelompok mendiskusikan kembali dan mencari kesimpulan.

5) *Role Play* (Memainkan Peranan)

Metode ini menunjuk beberapa anggota kelompok dengan peran tertentu, seperti dokter puskesmas, perawat, dan bidan, sedangkan yang lain adalah pasien dan anggota masyarakat. Misalnya, tunjukkan cara berinteraksi atau berkomunikasi setiap hari saat melakukan tugas.

6) Permainan Simulasi (*Simulation Game*)

Metode ini merupakan kombinasi dari bermain peran dan intervensi kelompok. Pesan kesehatan ditampilkan dalam berbagai jenis permainan, seperti permainan Monopoli. Cara bermainnya sama dengan bermain eksklusif menggunakan dadu, gaco (pengarahan) selain bebeeran, dan papan permainan. Beberapa menjadi pemain, yang lain bertindak sebagai sumber daya.

Dalam metode penelitian terdapat hubungan yang kuat antara promosi kesehatan dan pengembangan masyarakat dalam proses informasi dan datanya. Data dan informasi tersebut menjadi bagian penting dalam terciptanya model promosi kesehatan. Dalam prosesnya dibutuhkan 2 cara dalam pengembangan model metode penelitian berbasis promosi kesehatan atau biasa disebut dengan *mixed method* dan *research developent* (RnD). *Mixed method* sendiri merupakan metode penelitian yang menggunakan 2 basis penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kedua metode ini terdiri dari partisipasi masyarakat dalam mengembangkan suatu model promosi yang nantinya akan dibuat dan diaplikasikan di masyarakat. Untuk itu diperlukan ide/gagasan, tujuan, proses, dan hasil akhir yang diharapkan antara pengembangan masyarakat dengan promosi kesehatan, karena tanpa adanya promosi

kesehatan semua rencana pengembangan masyarakat sulit untuk terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Becker MH. (1974). *The Health Belief Model and personal health behavior*. Health Education Monographs. 1974;2:324–508
- Darkenwald, Gordon., Sharan B Meriam. (1982). *Adult education : foundations of practice*. New York : Harper & Row.
- Departemen Kesehatan RI. (2009). Sistem Kebijakan Nasional. Jakarta
- Green, L & Kreuter, M.W, (2005). Health Promotion Planning, An Educational and Environmental Approach, Second Edition, Mayfield Publishing Company
- Hogan K. (2000). *Pitfalls of community based learning: how power dynamics limit adolescents' trajectories of growth and participation teachers college record*, 104(3), 586-624
- Ife, Jim . (2016). Community Development. Creating Community Alternative-Vision, Analysis and Practice. Melbourne:Addison Wesley Longman
- Kurniati, Desak Putu Yuli. (2015). Bahan Ajar Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat. Bagian Promosi Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Bali.
- Payne, Malcolm. (1995). *Social Work and Community Care*. Macmillan Press LTD
- Sanders IT. (1958). *Theories of Community Development*. Rural Sociology; 23; 1-12
- Suharto, Edi. (2003). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama,
- Sulaeman, Endang Sutisna. (2020). Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan. Teori dan Implementasi. Gadjah Mada University Press
- Sulistiowati, Dwi. (2016). Promosi Kesehatan. Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia

Winsome, Robert. (2005). *Taking Stock of Social Capital : where is social policy heading ? Looking Back, Looking Forward: a quarter century of social change*. University of Melbourne Australian Social Policy Conference,

Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat (Wacana dan Praktik)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM

PENINGKATAN STIMULASI TUMBUH KEMBANG BALITA

Ratih Prananingrum

Program Studi DIV Manajemen Informasi Kesehatan, Politeknik
Harapan Bangsa Surakarta

Email: ratihprananingrum@gmail.com

Tumbuh Kembang Balita

Beberapa tahun pertama kehidupan merupakan masa-masa krusial dan berpengaruh pada tahap perkembangan bayi, khususnya untuk usia 1 tahun pertama. Setiap bulannya bayi selalu menunjukkan perkembangan baru yang mendukung kemampuannya. Bahkan setiap harinya, stimulasi atau rangsangan yang diberikan pada bayi akan menunjukkan responnya berupa reflek. Reflek yang terjadi pada bayi tidak sama. Dimulai sejak lahir hingga usia 12 bulan atau satu tahun, bayi terus berkembang sinkron diusianya. Perkembangan ini dipandang dari keterampilan serta kemampuan yang pelan-pelan dapat dilakukan. Mengetahui tahap perkembangan bayi bisa menyampaikan rangsangan yang tepat untuk membantu proses tumbuh kembangnya. Selain itu, hal ini bertujuan untuk memantau dan menangani masalah atau gangguan yang mungkin datang pada proses tersebut. Tetapi tahap perkembangan didapatkan bayi baru lahir setiap bulan tidak bisa disamaratakan.

Gambar 24. Tumbuh Kembang Balita



Hal ini disebabkan kondisi kesehatannya pun tidak sama. Periode penting dalam tumbuh kembang anak ialah masa balita sebab di masa ini pertumbuhan dasar akan mensugesti dan menentukan pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Agar anak dapat mencapai pertumbuhan yang optimal, maka diperlukan suatu bentuk perawatan yang lebih intensif diantaranya berupa sentuhan dan stimulasi yang terus menerus. Salah satunya ialah dengan pemberian pijatan/ *massage*. *Massage* adalah upaya pemenuhan kebutuhan anak baik secara fisik, kasih sayang serta stimulasi mental. Tanpa disadari ketika memandikan bayi, mengeringkan tubuhnya dengan menggosok punggungnya, atau bermain-main menggunakan cara memijat kakinya, sebenarnya banyak rangsangan yang dilakukan pada bayi.

Pijat bayi yang kini demam isu atau populer di kalangan masyarakat pada umumnya diminati namun masih banyak yang melakukan pemijatan ke dukun bayi. Teknik pemijatan yang dilakukan di bayi tidak boleh sembarangan, karena dapat menyebabkan kesakitan. Teknik – teknik yang digunakan harus sinkron menggunakan yang diajarkan melalui pelatihan serta dipaparkan dengan sertifikat pembinaan. Walaupun dalam masyarakat yang masih tradisional, kiprah seorang dukun bayi tak bisa diabaikan keberadaan dan jasanya bagi

warga secara umum dalam upaya meninggikan tingkat kesejahteraan kesehatan ibu serta anak. Sebab dukun bayi adalah sistem pelayanan kesehatan tradisional yang memberi jasa pelayanan untuk menaikkan serta memelihara kesehatan ibu dan anak (KIA) menurut hal yang bisa dipercaya dan konsepsi-konsepsi adat tradisional serta kebudayaan rakyat yang bersangkutan. Sistem budaya dari pelayanan kesehatan tradisional yang dimiliki dukun bayi mengandung semua ilmu pengetahuan yang dibuatkan bagi sebagian berupa pengetahuan tradisional, sebagian berupa ilmu gaib dan sebagian lagi keyakinan-keyakinan religi. Pengetahuan tradisional itu tidak hanya tentang banyak sekali macam penyakit, penyebab penyakit, cara penularan penyakit dan cara penyembuhan serta pencegahan penyakit, tetapi juga tentang obat-obatan tradisional, tumbuh-tumbuhan berkhasiat serta makanan dan minuman.

Dalam era modernisasi kini ini nampaknya dukun bayi yang merupakan sistem budaya pelayanan kesehatan tradisional masih dibutuhkan dan masih hidup berdampingan bersamaan menggunakan sistem budaya pelayanan kesehatan terkini. Meskipun dukun bayi menjadi rujukan ke-2 yang dipilih oleh warga dalam penanganan kesehatan, pada beberapa daerah yang terdapat di Indonesia terutama di wilayah pedesaan, sebagian masyarakatnya masih percaya terhadap suatu kiprah dukun bayi dalam melakukan pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan. Hal ini yang masih sering terjadi serta mengakibatkan permasalahan kesehatan ibu dan anak (KIA) pada negara Indonesia, sebagai akibatnya merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masih tingginya angka kematian ibu dan kematian bayi di negeri sendiri.

Menyampaikan rangsangan pada bayi memang banyak caranya. Salah satu diantaranya melalui pijatan. Pijat merupakan bentuk ideal buat merealisasikannya, karena saat memijat bayi, ibu ”melatih” dirinya untuk lebih mengenal bayinya, sebab menggunakan memijat bagian demi bagian tubuh bayi secara lembut, ibu belajar mengenali tubuh serta bahasa tubuh bayinya secara individual. Dari sini akan diketahui pijatan mana yang menyenangkan bagi bayi serta mana yang tidak disukainya.

Masa usang kita akan menjadi lebih terampil serta percaya diri pada hal mengurus bayi. Dikalangan rakyat Indonesia, ilmu pijat bayi tradisional sudah lama dikenal, dan sampai saat ini di wilayah-wilayah masih tak jarang dilakukan oleh dukun pijat bayi. Ilmu pijat bayi umumnya mudah dipelajari dengan beberapa kali latihan, orang tua akan mahir melakukannya. Selain itu pijat bayi juga mudah karena hanya menggunakan minyak (*baby oil*).

Pijat Bayi

Pijat ialah salah satu bentuk dari terapi sentuh yang berfungsi menjadi salah satu teknik pengobatan krusial Sentuhan cinta menjadi salah satu stimulasi *multisensory* yang bisa mendorong perkembangan dan pertumbuhan bayi secara optimal, terutama bila dilakukan pada masa *golden period* 1000 hari pertamanya. Pijat bayi kini pun menjadi sangat ekspresi dominan atau populer di kalangan masyarakat. Bahkan menurut penelitian terkini, pijat bayi secara rutin akan membantu tumbuh kembang fisik serta emosi bayi, di samping mempertahankan kesehatannya. Manfaat pijat bayi tidak hanya dirasakan sang bayi saja, tapi demikian pula oleh ibu.

Touch aartinya sentuhan alamiah pada bayi yang dapat berupa tindakan mengusap, mengurut atau memijat. Jika tindakan ini dilakukan secara teratur, maka sentuhan ini dapat artinya bentuk stimulasi dan hegemoni yang bisa memberikan banyak manfaat untuk si bayi. Pijatan bayi merupakan rangsangan/ stimulasi taktilkinestetik, komunikasi verbal dan perwujudan rasa cinta kasih orang tua terhadap bayi. Pijatan berpengaruh positif terhadap tumbuh kembang bayi sebagai akibat stimulasi pijat seharusnya dilakukan sang ibu ataupun ayah dari bayi. Pijat merupakan terapi sentuh tertua serta terpopuler. Pada negara Cina telah dikenal sejak 3000 tahun sebelum masehi, lalu menyebar dan berkembang ke negara lain.

Gambar 25. Praktik Pemijatan Bayi



Pijat bayi pula merupakan terapi tertua yang dikenal insan dan yang paling terkenal, yang juga merupakan seni perawatan kesehatan serta pengobatan yang dipraktikkan sejak berabad-abad lampau. Bahkan, diperkirakan ilmu ini sudah dikenal sejak awal insan diciptakan ke dunia, mungkin karena pijat berafiliasi sangat erat dengan kehamilan dan proses kelahiran manusia. Pengalaman pijat bayi pertama yang dialami manusia merupakan ada di waktu dilahirkan, yaitu di waktu melalui jalan lahir. Proses kelahiran adalah suatu pengalaman traumatik bagi bayi sebab bayi yang lahir harus meninggalkan rahim yang hangat, safety, nyaman, serta dengan keterbatasan ruang gerak menuju ke suatu global dan fase kehidupan dengan kebebasan motilitas tanpa batas, yang meyeramkan, tanpa sentuhan-sentuhan yang nyaman dan safety pada sekelilingnya, mirip halnya ketika berada dalam rahim. Pijat bayi selain membantu tumbuh kembang fisik serta emosi bayi, dapat mempererat hubungan antara ibu dan si buah hati. Tanpa diketahui ketika memandikan bayi, mengeringkan tubuhnya dengan menggosok punggungnya atau bermain-main dengan memijat kakinya, sebenarnya banyak reflek dan taktil respon yang diberikan padanya. Menyampaikan rangsangan pada bayi memang banyak caranya, bagian satu diantaranya melalui pijatan (stroking).

Pijat bayi bermanfaat buat meningkatkan jumlah serta sitotoksisitas berasal melalui sistem immunitas (sel pembunuh alami), merangsang

fungsi pencernaan serta pembuangan, membantu melatih gerak leluasa, mengurangi depresi dan ketegangan, meningkatkan kesiagaan, mengurangi rasa sakit, mengurangi kembung dan kolik (sakit perut), menaikkan volume ASI, meningkatkan berat badan, mempertinggi pertumbuhan, meningkatkan konsentrasi bayi dan membuat tidur lelap, membina ikatan kasih sayang orang tua dan anak (*bonding*), serta memperbaiki sirkulasi darah dan pernapasan buat menerima manfaat yang optimal, pemijatan bayi tidak bisa dilakukan asal-asalan, terdapat cara yang harus diperhatikan, pada bayi usia 0 – 3 tahun, gerakan yang dilakukan lebih mendekati usapan-usapan halus, tekanan ringan, dan dengan tekanan, disarankan pemijatan dilakukan sekitar 15 menit, sesuai usia bayi serta saat yang semakin meningkat.

Lumurkan sesering mungkin minyak atau baby oil atau lotion yang lembut sebelum dan selama pemijatan. Setelah itu, lakukan gerakan pembukaan berupa sentuhan ringan di sepanjang sisi muka bayi atau usaplah rambutnya. Gerakan pembuka ini untuk memberitahukan bahwa ketika pemijatan akan segera dilakukan padanya. Secara awam, pemijatan usahakan dimulai dari kaki bayi karena biasanya bayi lebih menerima bila dipijat pada daerah kaki. Awal seperti ini akan menyampaikan kesempatan pada bayi untuk membiasakan dipijat sebelum bagian lain disentuh. Itu sebabnya, tahapan pemijatan bayi dianjurkan dimulai dari kaki, kemudian perut, dada, tangan, muka, dan diakhiri pada bagian punggung.

Namun pengetahuan wacana pijat bayi ini masih belum diketahui rakyat, dikarenakan rakyat masih mempercayakan pijat bayi pada dukun bayi serta kurangnya pengetahuan warga untuk melakukan pijat bayi pada energi kesehatan. Faktor lain yang menyebabkan rakyat lebih menentukan pijat bayi pada dukun bayi merupakan faktor tata cara norma yang masih kokoh dan berkembang secara turun temurun. Serta, adanya keyakinan bahwa dukun bayi disebut lebih mengerti serta mahir pada melakukan pijat bayi yang sudah dipraktekkan semenjak berabad-abad lampau.

Akibat positif yang ditimbulkan dari pijat bayi biasanya bayi yang menerima pijatan secara teratur akan lebih santai otaknya dan damai.

Melalui sentuhan pemijatan terhadap jaringan otot, aliran darah bisa semakin tinggi makin lancar, ataupun posisi otot bisa dipulihkan serta diperbaiki otomatis bisa menaikkan fungsi-fungsi organ tubuh menggunakan sebaik-baiknya. Sedangkan akibat tidak baik yang disebabkan andai pijat bayi dilakukan pemijatan menggunakan cara yang tidak sesuai serta tidak sinkron menggunakan ketentuan medis. Pengaruh berasal melalui kesalahan pemijatan diantaranya ialah pembengkakan, terdapatnya lebam, adanya rasa sakit pada bayi sebagai akibat bayi menjadi rewel, pergeseran urat, cedera, bahkan bisa mengakibatkan kematian bayi. Oleh sebab itu, banyak orang tua enggan melakukan pijat bayi, mereka takut akan terjadi resiko pijat bayi pada buah hatinya. Resiko pijat bayi tadi umumnya ditimbulkan oleh kelalaian praktisi pijat pada memijat, kesalahan pijat, serta kurangnya pengetahuan pemijat. Negara Indonesia pemijatan tidak hanya dilakukan jika bayi sehat, tetapi pula saat bayi sakit atau rewel serta sudah menjadi rutinitas perawatan bayi sesudah lahir.

Perbedaan Pijat Bayi Tradisional Dan Modern

Beberapa perbedaan pijat modern dengan pijat tradisional antara lain sebagai berikut :

Pijat Tradisional

- Pijat bayi masih dipegang peranannya sang dukun bayi dengan ilmu yang turun menurun
- Selama ini pemijatan tak hanya dilakukan ketika bayi sehat namun juga bayi sakit atau rewel
- Memakai ramuan – ramuan pemijatan yang kadang tidak terjamin safety bagi kulit bayi, contohnya parutan jahe, bawang atau dedaunan yang dihancurkan. Ramuan ini mengandung minyak asitri yang bisa menyebabkan gatal, panas atau perih pada kulit bayi.
- Hanya untuk menyembuhkan serta kadang disertai dengan jamu
- Umumnya buat mengatasi penyakit, pijat tradisional sering dipaksakan, akibatnya bayi menangis keras dan meronta – ronta. Setelah pijat, bayi lelap karena kelelahan menangis, bukan sebab tenang damai

Pijat Modern

- Pijat bayi terkini dilakukan orang tua, pengasuh serta terapis yang dilatih oleh pelatih professional bersertifikat international
- Memadukan antara ilmiah (kesehatan), seni, dan afeksi
- Hanya menggunakan baby oil yang terbuat dari buah-buahan atau tanaman (minyak bayi, minyak zaitun murni, minyak kelapa vco, minyak biji anggur)
- Pijat terbaru merupakan terapi sehat tanpa jamu atau obat apapun
- Pijat terkini justru ibu yang menunggu kesiapan bayi. Hal ini akan membuat bayi senang. Setelah itu, menjadi santai dan tidur karena puas dan nyaman

Prosedur Pijat Bayi

Satu hal yang sangat menarik di penelitian pijat bayi merupakan mekanika dasar pemijatan. Prosedur dasar pijat bayi memang belum terlalu diketahui, tetapi sekarang para ahli sudah mempunyai beberapa teori serta mulai menemukan jawabannya. Terdapat beberapa mekanisme yang mampu membuktikan prosedur dasar pijat bayi diantaranya ialah pengeluaran beta endorphine, kegiatan nervus vagus dan produksi serotonin.

1. Beta Endorphine menghipnotis prosedur pertumbuhan

Pijatan akan menaikkan pertumbuhan serta perkembangan anak. Tahun 1989, Schanberg berasal Duken University Medical School melakukan penelitian pada bayi – bayi tikus. Ahli ini menemukan bahwa apabila korelasi taktil (jilatan – jilatan) ibu tikus ke anaknya terganggu akan menyebabkan hal – hal berikut :

- a. Penurunan enzim ODC (Ornithinr Decarboxylase), suatu enzim yang peka bagi pertumbuhan sel dan jaringan
- b. Penurunan pengeluaran hormon pertumbuhan
- c. Penurunan kepekaan ODC jaringan terhadap pemberian hormon pertumbuhan
- d. Pengurangan sensasi taktil akan menaikkan pengeluaran neurochemical beta-endorphine yang akan mengurangi pembentukan hormon pertumbuhan karena menurunnya jumlah dan kegiatan ODC jaringan.

2. Kegiatan *nervus vagus* mensugesti prosedur penyerapan makanan

Penelitian Field serta Schanberg (1986) bahwa pada bayi yang dipijat mengalami peningkatan *tonus nervus vagus* (saraf otak ke-10) yang akan mengakibatkan peningkatan kadar enzim penyerapan gastrin serta insulin. Dengan demikian penyerapan makanan akan berubah lebih baik. Itu sebabnya mengapa berat badan bayi yang dipijat meningkatkan lebih banyak daripada yang tidak dipijat.

3. Kegiatan *nervus vagus* mempertinggi bertambahnya ASI

Penyerapan makanan yang menyebabkan perubahan disebabkan meningkatnya kegiatan *nervus vagus* menyebabkan bayi cepat lapar sehingga akan lebih sering menyusu pada ibunya. Akibatnya, ASI akan lebih banyak pula diproduksi, sebab seperti diketahui ASI akan semakin banyak diproduksi jika semakin banyak diminta. Selain itu, ibu yang memijat bayi akan merasa lebih damai serta hal ini berdampak positif pada

peningkatan volume ASI.

4. Produksi serotonin membentuk daya tahan tubuh

Pemijatan yang dilakukan akan mempertinggi kegiatan *neurotransmitter serotonin*, yaitu menaikkan grafik daya tampung sel reseptor yang mengikat *glucocorticoid (adrenalin)*. Proses ini akan mengakibatkan terjadinya penurunan kadar *hormone adrenalin (hormone stress)*. Penurunan kadar hormon tertekan kejiwaan ini akan menambah daya tahan tubuh, terutama IgM dan IgG.

5. Menmbarui gelombang otak

Pijat bayi akan menjadikan bayi tidur lebih lelap, menaikkan kesiagaan (*alertness*) serta konsentrasi. Ini disebabkan pijatan akan mengubah gelombang otak, yaitu dengan menurunkan gelombang *alpha* serta menaikkan gelombang *beta* serta *tetha*. Perubahan gelombang otak ini bisa dibuktikan dengan investigasi EEG (*Electro Encephalogram*)

Manfaat bagi bayi :

- Membantu bayi untuk berlatih relaksasi
- Menjadikan tingginya kualitas tidur dan lama
- Menghasilkan semacam ikatan/*bonding* antara mereka
- Membantu pengaturan system pencernaan, system respirasi dan peredaran sistem tubuh
- Membantu meredakan ketidaknyamanan (kolik, tumbuh gigi)
- Menurunkan produksi hormon *stressor*
- Membantu mengatasi gangguan tidur
- Menenangkan serta mengurangi frekuensi menangis bayi
- Memperlancar pencernaan, serta mengurangi sakit perut, gas dan sembelit
- Menambah berat badan tiap hari
- Membantu bayi lebih simple beradaptasi menggunakan waktu tidur malam, dan membantunya tidur lebih nyenyak
- Meredakan sesak napas dan rasa tidak nyaman pada saat tumbuh gigi
- Membantu pembentukan, koordinasi dan kelenturan ototnya dipergunakan dengan baik.
- Meningkatkan kesadaran tubuhnya
- Mempertinggi sistem imunitas

- Menjadikan dasar kulitnya lebih baik
- Membantu orangtua serta bayi merasa damai dan tenang
- Menaikkan rasa percaya diri orangtua saat memegang bayinya

Manfaat Pijat Bayi bagi Bayi dan Orangtua

Memijat bayi secara rutin adalah bagian dari cara memberikan sesuatu yang lebih uniknya. Lebih banyak saat digunakan untuk menciptakan hubungan batin lebih banyak merangsang sensorik. Perkembangan bayi yang lebih sehat. Faktor paling bermakna disini buat perkembangan bayi yang sehat dan damai adalah sentuhan penuh kasih dari ibu. Menegaskan bahwasentuhan dan pijat bayi rutin dari orang tua/pengasuh adalah faktor yang digarisbawahi untuk pertumbuhan, komunikasi, serta proses belajar si kecil.

Manfaat buat orang tua :

- Meyampaikan perhatian spesifik serta mempererat keterdekatan dengan bayi
- Membantu orangtua mengetahui bahasa (isyarat) ekspresi bayi
- Membentuk rasa percaya diri pada saat mengasuh bayi
- Menaikkan komunikasi orangtua serta bayi
- Menaikkan kemampuan orangtua membantubayi relaksasi
- Meredakan hormon tertekan orangtua
- Membentuk kondisi yang damai

Saat Sempurna Dilakukan Pemijatan

Kapanpun ketika orang tua (ayah dan ibu) ingin memulai pemijatan pada bayi setiap hari yang dimulai dari usia bayi antara 6-7 bulan pertama usia bayi. Mampu juga dilakukan 2-3x dalam seminggu setelah usia 7 bulan ke atas.

Perhatian spesifik :

- Jangan memijat bayi sesudah makan/ disusui
- Jangan membangunkan bayi hanya buat dipijat
- Jangan memijat jika bayi sakit
- Jangan meijat secara paksa
- Jangan memaksakan posisi pijatan tertentu jika pemijatan

Hal-Hal Yang Wajib Diperhatikan Saat Melakukan Pemijatan

- Lakukan hubungan melalui kontak mata dengan bayi
- Nyanyikan lagu atau putarkan musik lembut supaya lebih rileks
- Mulai menggunakan sentuhan ringan serta perlahan tingkatkan tekanan pijatan ketika bayi merasa damai
- Perhatikan isyarat bayi (menangis, mangantuk, kehausan, rewel)
- Supaya lebih memudahkan dan tidak melukai kulit bayi pakai minyak pada kedua telapak tangan ketika memijat
- Mandikan atau seka badan anak setelah pemijatan menggunakan air hangat, apabila bayi masih di rumah, jauhkan minyak berasal mata bayi
- Apabila sakit atau pemijatan dilakukan di malam hari, maka bayi cukup diseke

Karakteristik Bayi (Cues, Reflex, dan Perilaku)

Cues / Isyarat

Karakteristik bayi yang ditunjukkan bayi padasaat dilakukan pemijatan antara lain:

Ekspresi bayi	Kontak mata & ekspresiwajah	Suara	Body Language
Menerima	Mata terbuka & cerah Menoleh kekanan kiri kemudian kembali ke depan & tersenyum Melihat langsung ke ortu/ terapis dengan wajah dan mata yang berseri	Mengoceh, tertawa, tersenyum, kadang menghisap	Terlentang dengan nyaman & tenang Gerakan lembut pada tangan & kaki Berusaha meraih ortu, kontak mata, tersenyum <i>Open body language</i>

Menolak	Mata memejam dalam kondisi sadar, menguap dan mengantuk Membuang muka atau memalingkan dan menggulingkan kepala kaku	cegukan, kemerahan marah dan menangis	berusaha merangkak pergi, berputar gerakan tak terkontrol, rewel selalu menjauhi saat di pegang, kaku dan menendang <i>closed bodylanguage</i>
---------	---	---------------------------------------	---

Refleks

Beberapa refleks yang ditunjukkan oleh bayi saat dipijat adalah :

Morro

Suatu respon tiba-tiba pada bayi yang baru lahir yang terjadi akibat suara atau gerakan yang mengejutkan.

Rooting

Rooting refleks terjadi ketika pipi bayi diusap (dibelai) atau disentuh bagian pinggir mulutnya.

Babinski

Refleks primitif di bayi dilihat dari gerakan jari-jari mencengkram ketika bagian bawah kaki diusap.

Palmar

Refleks ini biasanya ditunjukkan dengan menggenggam (*Grasping refleks*) adalah reflex gerakan jari-jari tangan mencengkram benda-benda yang disentuh ke bayi.

Asymetris Tonus Leher

Waktu kepala bayi digerakkan kesamping, lengan sisi akan lurus dan lengan yang berlawanan akan menekuk (kadang-kadang pergerakan sangathalus/lemah)

DAFTAR PUSTAKA

- Aco, Tang. 2018. Pengaruh Pijat Bayi Terhadap Kualitas Tidur Bayi Usia 1–4 Bulan. *Global Health Science* 3(1): 12–16.
- Akib & Merina. 2018. Pengaruh pijat bayi terhadap kuantitas tidur bayi di Desa bedadung kecamatan sumbersari Kabupaten Jember. *Jurnal Kesehatan dr. Soebandi*. 6(1). 462-468
- Anggraini & Sari. 2020. Pengaruh pijat bayi terhadap kualitas tidur bayi Usia 0-6 bulan. *Jurnal Penelitian Kesehatan*. 8(1). 25-32
- Aswitami & Udayani. 2019. Pengaruh terapi pijat terhadap durasi tidur bayi umur 1-3 bulan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*. 7(2). 1-6
- Bennet.c. (2015). Cochrane Review Summary: Massage for promoting mental and physical health in typically developing infants under the age of six months. *Primary Health Care Research & Development*, 16(1), 3–4.
<https://doi.org/10.1017/S1463423614000462>
- Cahyani, Mailiza, and Betty Prastuti. 2020. Pengaruh Pijat Terhadap Kualitas Tidur Bayi Usia 3-6 Bulan Di Klinik Cahaya Bunda. *JOMIS (Journal of Midwifery Science)* 4(2): 39–45.
- Globalmed Learning Center. 2015. *Baby Massage Aktivitas Sehat Ibu Dan Bayi*. Bali: Aimee.
- Goleman, Daniel, Richard. Boyatzis, and Annie Mckee. 2018. Pengaruh Baby Massage Terhadap Kualitas Tidur Pada Bayi Usia 3-12 Bulan. *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.
- Hatice Ball Yilmaz. 2014. *The Effect of Massage by Mothers on Growth in Healthy Full Term Infants*. Ege University, School Of Nursing, Bornova, Izmir, Turkey.
- Hiscock. 2012. *Data Masalah Tidur Bayi*.
<http://ojs.unud.ac.id/index.php>. Diakses 22/03/2018
- Ifalahma, Darah et al. 2012. Efektivitas Pijat Bayi Terhadap Kualitas

Tidur Bayi. 56

- Irva, Tri Sasmi et al. 2013. Pengaruh Terapi Pijat Terhadap Peningkatan Berat Badan Bayi.: 1–9.
- Khasanah, Uswatun. 2017. “Pengaruh Pijat Bayi Terhadap Pola Tidur Pada Bayi Usia 3 – 6 Bulan.” : 1–13.
- Kurniadi.2020. The Effect of Bima Traditional Baby Massage on Sleep Pattern among Infants aged 5-12 Months. Indonesian Journal of Medicine. 05(02). 142-147. eISSN: 2549-0265. doi.org/10.26911/theijmed.2020.05.02.08
- Kusumastuti, Tamtomo & Salim.2016. Effect of Massage on Sleep Quality and Motor Development in Infant Aged 3-6 Months. Journal of Maternal and Child Health. 1(3).161-169. doi.org/10.26911/thejmch.2016.01.03.03
- Mansur, H. 2015. Psikologi Ibu dan Anak untuk Kebidanan. Jakarta : Salemba Medika.
- Mardiana, L. 2018. 2018. Pengaruh Pijat Bayi Terhadap Kuantitas Tidur Bayi di Program Studi Ilmu Keperawatan STIKES Dr . Soebandi Jember. 6(1): 462–68.
- Marzali, Amri. 2016. Menulis Kajian Literatur. ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia 1(2): 27–36.
- Minarti, Aris. 2012. Pengaruh Pijat Bayi Terhadap Kualitas Tidur.pengaruh pijat bayi terhadap kualitas tidur 7(6): 1–25.
- Motors, General, and Western Europe. 2016. Pengaruh Pijat Bayi Terhadap Kualitas Tidur Bayi Umur 0-6 Bulan Di Puskesmas Kartasura. (June).
- Mutyah, Diyan, and Dia Anggraeni. 2017. Pengaruh Pemberian Pijat Bayi Terhadap Kualitas Dan Kuantitas Tidur Bayi Usia 6-12 Bulan Di Masyarakat Pesisir Surabaya.Publikasi Riset Kesehatan untuk Daya Saing Bangsa ISSN 2581: 8.
- Nurmalasari, Devi Indah, Erika M Agung, and Pepin Nahariani. 2016. Pengaruh Pijat Bayi Dengan Kualitas Tidur Bayi Usia 3-6 Bulan Di Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten

- Jombang. Jurnal Ilmiah Kebidanan 1.
- Oliver, J. (2013). Pengaruh Baby Massage Terhadap Kualitas Tidur Bayi Usia 3-6 Bulan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ouda. (2012). Pengaruh Pijat Bayi Terhadap Kualitas Tidur Bayi Usia 3-6 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Ii Denpasar Timur Tahun 2012. 66, 37–39.
- Pamungkas Bintang Aji. (2016). Pengaruh Pijat Bayi terhadap Kualitas Bayi Umur 0-6 Bulan di Puskesmas Kartasura. Universitas Muhammadiyah. 57
- Prasetyono, D. . (2013). Buku Pintar Pijat Bayi. Buku Biru.
- Roesli, 2015. Pedoman Pijat Bayi. Jakarta : Trubus Agriwidya.
- Riksani, Ria. 2012. Cara Mudah Dan Aman Pijat Bayi. jakarta: Dunia Sehat.
- Suprihatin, Kusmini, Melyana Nurul Widyawati, and Sutarmi. 2014. Mom Massage, Baby Massage and Spa. Semarang: IHCA.
- Suryani, Irma Lilis, and Berat Badan. 2017. Pengaruh Pijat Bayi Terhadap Peningkatan Berat Badan Pada Bayi Jurnal Kesehatan Holistik (The Journal of Holistic Healthcare), Volume 11 , No . 2 , April 2017 : 72-76. 11(2): 72–76.
- Suryati, Suryati, Naelatur Rizqiyah, and Eka Oktavianto. 2019. Pengaruh Pijat Bayi Terhadap Peningkatan Kualitas Tidur Bayi Usia 3-10 Bulan Di Desa Tamanan Wilayah Kerja Puskesmas Banguntapan II. Riset Informasi Kesehatan 8(1): 75.
- Susan, G. Salvo. 2013. Massage Therapy Principles And Practice. Six Editio.
- Susila, Ida. 2017. Pengaruh Teknik Pijat Bayi Terhadap Kenaikan Berat Badan Bayi Usia 0-7 Bulan. 9(2): 14–19.
- Utami, Roesli. 2013. Pedoman Pijat Bayi Prematur & Bayi Usia 0-3 Bulan. jakarta: Jakarta Trubus Agriwidya.

- Utami, Roesli. 2016. Pedoman Pijat Bayi. Jakarta: Jakarta Trubus Agriwidya.
- Wati, Erna. 2012. Pengaruh Pijat Bayi Terhadap Kuantitas Tidur Bayi Usia 3 - 6 Bulan Di Desa Ngunut Kecamatan Jumangtono Kabupaten Karanganyar

PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERKOTAAN UNTUK PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

Sulistiyani Prabu Aji

Pusat Studi Kedokteran Tropis, Universitas Gadjah Mada

Email:sulistyaniprabuaji@student.uns.ac.id

Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat (community development) merupakan wawasan dasar bersistem tentang asumsi perubahan sosial terancang yang tepat dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan teori dasar pengembangan masyarakat yang menonjol pada saat ini adalah teori ekologi dan teori sumber daya manusia. Teori ekologi mengemukakan tentang “batas pertumbuhan”. Untuk sumber-sumber yang tidak dapat diperbarui perlu dikendalikan pertumbuhannya. Teori ekologi menyarankan kebijaksanaan pertumbuhan diarahkan sedemikian rupa sehingga dapat membekukan proses pertumbuhan (zero growth) untuk produksi dan penduduk (Lubis and As-syafiiyah 2020).

Teori sumber daya manusia memandang mutu penduduk sebagai kunci pembangunan dan pengembangan masyarakat. Banyak penduduk bukan beban pembangunan bila mutunya tinggi. Pengembangan hakikat manusiawi hendaknya menjadi arah pembangunan. Perbaikan mutu sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif dan kewirausahaan.

Teori sumber daya manusia diklasifikasikan ke dalam teori yang menggunakan pendekatan yang fundamental . Pengembangan Masyarakat ini memiliki sejarah panjang dalam praktek pekerjaan sosial. Sebagai sebuah metode pekerjaan sosial, pengembangan masyarakat memungkinkan pemberi dan penerima pelayanan terlibat dalam proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi. Pengembangan masyarakat meliputi berbagai pelayanan sosial yang berbasis masyarakat mulai dari pelayanan preventif untuk anak-anak sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah.

Sebagai strategi pekerjaan sosial, peningkatan area lokal memberdayakan koperasi spesialis dan penerima manfaat untuk dikaitkan dengan proses persiapan, pemeriksaan, dan penilaian. Pengembangan wilayah mencakup berbagai layanan sosial berbasis wilayah mulai dari layanan pencegahan untuk anak-anak hingga layanan pengobatan dan pengembangan untuk keluarga berpenghasilan rendah.

Pengembangan masyarakat memiliki peran penting dalam pekerjaan sosial, pengembangan masyarakat belum sepenuhnya menjadi ciri khas praktek pekerjaan sosial. pengembangan masyarakat masih menjadi bagian dari kegiatan profesi lain, seperti perencana kota dan pengembang perumahan. Pengembangan masyarakat juga masih sering dilakukan oleh para voluntir dan aktivis pembangunan yang tidak dibayar (Lubis and As-syafiiyah 2020).

Ruang Lingkup Pengembangan Masyarakat

Pemberdayaan wilayah lokal menurut makna semantik adalah interaksi, teknik, demonstrasi membuat terlibat, khususnya kapasitas untuk menindaklanjuti dengan sesuatu atau kapasitas untuk bertindak sebagai alasan, tenaga atau tenaga.(Suharto 2006) .

Masyarakat adalah suatu kesatuan dari keberadaan manusia yang bekerja sama sesuai dengan pengaturan khusus dari adat-istiadat yang terus-menerus, dan yang dibatasi oleh perasaan kepribadian bersama. Dalam beberapa kajian tentang peningkatan wilayah lokal,

penguatan wilayah lokal seringkali diartikan sebagai sebuah karya untuk memberi kekuatan sehingga suara mereka terdengar untuk menambah tatanan dan pilihan yang mempengaruhi wilayah lokal mereka.

Penguatan adalah cara paling umum untuk mengubah dari kondisi kelemahan ke kondisi relatif memerintah atas kehidupan, penentuan, dan iklim seseorang. Sebagaimana ditunjukkan oleh Mubarak, penguatan kelompok masyarakat dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk membangun kembali atau bekerja pada kapasitas suatu daerah untuk memiliki pilihan untuk bertindak sesuai dengan kemampuannya dalam melakukan keterbatasannya sebagai individu dari daerah setempat.

Pengembangan masyarakat memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pengembangan masyarakat seringkali diimplementasikan dalam bentuk (Lubis and As-syafiiyah 2020)

a) proyek-proyek pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya atau melalui

b) kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggung jawab.

Pengembangan masyarakat (community development) terdiri dari dua konsep, yaitu “pengembangan” dan “masyarakat”. Secara singkat, pengembangan atau pembangunan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bidangbidang pembangunan biasanya meliputi beberapa sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial-budaya. Masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep, yaitu:

1) Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah

pedesaan.

2) Masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus para orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat fisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental.

Istilah masyarakat dalam pengembangan masyarakat biasanya diterapkan terhadap pelayanan-pelayanan sosial kemasyarakatan yang membedakannya dengan pelayanan-pelayanan sosial kelembagaan. Pelayanan perawatan manula yang diberikan di rumah mereka dan/atau di pusat-pusat pelayanan yang terletak di suatu masyarakat merupakan contoh pelayanan sosial kemasyarakatan. Sedangkan perawatan manula di sebuah rumah sakit khusus manula adalah contoh pelayanan sosial kelembagaan. Istilah masyarakat juga sering dikontraskan dengan “negara”. Misalnya, “sektor masyarakat” sering diasosiasikan dengan bentuk-bentuk pemberian pelayanan sosial yang kecil, informal dan bersifat bottom-up.

Sedangkan lawannya, yakni “sektor publik”, kerap diartikan sebagai bentuk-bentuk pelayanan sosial yang relatif lebih besar dan lebih birokratis. Pengembangan masyarakat yang berbasis masyarakat seringkali diartikan dengan pelayanan sosial gratis dan swadaya yang biasanya muncul sebagai respon terhadap melebarnya kesenjangan antara menurunnya jumlah pemberi pelayanan dengan meningkatnya jumlah orang yang membutuhkan pelayanan (-, -, and Hariyoga 2013).

Pengembangan masyarakat juga umumnya diartikan sebagai pelayanan yang menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih bernuansa pemberdayaan (empowerment) yang memperhatikan keragaman pengguna dan pemberi pelayanan. Dengan demikian, pengembangan masyarakat dapat didefinisikan sebagai metoda yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya.

Menurut Twelvetrees, pengembangan masyarakat adalah “the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions.” Secara khusus pengembangan masyarakat berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, jender, jenis kelamin, usia, dan kecacatan.

Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Suharto 2006) .

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya .

Pemberdayaan adalah proses transisi dari keadaan ketidakberdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan lingkungan . Menurut Mubarak, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat .

Pada pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi

partisipasi pada tahap-tahap berikutnya (Hadiyanti 2008).

Dalam menerapkan pendekatan interaksi, kemungkinan untuk melakukan perbaikan menyesuaikan orang. Dalam pandangan ini, inklusi wilayah lokal yang dikembangkan lebih dikoordinasikan pada jenis kepentingan, bukan pada kerangka pengaktifan itu. Ketertarikan daerah terhadap rencana program menjadikan daerah tersebut diposisikan sebagai pembeli program, sekaligus sebagai pembuat karena mereka telah terlibat dengan cara yang paling umum dalam membuat dan membentuknya, sehingga daerah merasa memiliki tanggung jawab untuk program dan memiliki kewajiban tentang kemakmurannya dan memiliki lebih banyak inspirasi untuk kemakmurannya. kerjasama dalam tahap berikut: (Hadiyanti 2008).

Pengertian Penyakit

Tanpa pemahaman tentang ide-ide yang berbeda dari infeksi, kita tidak dapat memiliki alasan yang kuat untuk membedakan dan memahami perbedaan yang ditemukan dalam perawatan medis saat ini. Kesenjangan antara gagasan penyakit yang diambil oleh pekerja kesehatan dan yang dianut oleh masyarakat setempat sering membuat kekecewaan terhadap upaya untuk lebih mengembangkan kesejahteraan secara lokal. Berikutnya adalah pentingnya dan arti dari penyakit:

a. KATHLEEN MEEHAN ARIAS

Penyakit adalah infeksi yang biasanya memiliki sesuatu seperti dua dari standar ini: spesialis etiologi yang diketahui, kumpulan gejala dan efek samping yang dapat dikenali, atau perubahan anatomi yang stabil. (Suharto 2006)

b. DR. BEATE JACOB

Penyakit adalah penyimpangan dari kondisi khas tubuh atau ketidakharmonisan jiwa. WAHYUDIN RAJAB, M. Epid Penyakit adalah kondisi tujuan dan penderitaan adalah abstrak

c. DR. EKO DUDIARTO

Penyakit adalah kekecewaan dari komponen variasi dari suatu entitas organik untuk merespon dengan baik untuk perbaikan atau ketegangan, membawa pengaruh yang mengganggu dalam kapasitas atau konstruksi organ atau kerangka tubuh.

d. THOMAS TIMMRECK

Infeksi adalah suatu keadaan dimana terjadi gangguan pada struktur dan kapasitas tubuh sehingga dalam keadaan tidak normal.

e. ELIZABETH J. CROWN

Penyakit adalah tentang adanya sekelompok reaksi tubuh yang tidak biasa terhadap spesialis, di mana orang praktis tidak memiliki resistensi

f. GEORGE PICKETT dan JOHN J. HANLON

Penyakit adalah elemen dari kekuatan spesialis penyebab dan perlawanan tubuh manusia

g. AZIZAN HAJI BAHARUDDIN

Penyakit adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh kerusakan keseimbangan kapasitas tubuh

Pengertian Penyakit Menular

Penyakit menular adalah penyakit tak tertahankan yang disebabkan oleh mikroorganisme, misalnya, infeksi, mikroba, parasit, atau organisme, dan dapat dipindahkan ke individu padat lainnya. Beberapa penyakit normal yang tak tertahankan di Indonesia dapat dicegah melalui imunisasi dan gaya hidup yang bersih dan sehat. Infeksi yang tak tertahankan dapat dikomunikasikan secara langsung atau dengan implikasi.

Penularan langsung terjadi ketika mikroba pada individu yang musnah dipindahkan melalui kontak yang sebenarnya, misalnya melalui kontak dan ciuman, melalui udara saat mengi dan meretas, atau melalui kontak dengan cairan tubuh seperti kencing dan darah.

Orang yang mengomunikasikannya mungkin tidak menunjukkan efek samping dan tampaknya bukan orang yang musnah, jika dia hanyalah pengangkut (transporter) penyakit. Selain cara penyebaran di atas, penyakit yang tidak dapat dicegah juga dapat ditularkan melalui gigitan hewan, atau kontak langsung dengan cairan tubuh hewan, serta melalui makanan dan minuman yang tercemar mikroorganisme penyebab infeksi.

Penyakit yang tak tertahankan juga dapat dipindahkan secara tidak langsung. Misalnya, ketika Anda menghubungi pegangan pintu, keran air, atau gagasan tentang kereta yang tercemar. Mikroba dapat mencemari jika Anda menyentuh mata, hidung, atau mulut Anda tanpa membersihkan sebelum menyentuh sesuatu.

Penyebab Penyakit Menular.

Berikut ini adalah beberapa jenis penyakit menular yang disebabkan oleh penyakit yang banyak ditemukan di Indonesia, dilihat dari penyebabnya: Kontaminasi virus Virus adalah penyebab kontaminasi yang paling banyak dikenal. Beberapa penyakit infeksi virus yang masih banyak ditemukan di Indonesia antara lain ISPA, flu, cacar, campak, hepatitis, demam berdarah, HIV/AIDS, dan gastroenteritis. Sementara itu, kontaminasi virus yang lebih jarang termasuk flu burung, kontaminasi bakteri, penyakit bakteri, dan infeksi tak tertahankan yang masih umum ditemukan di Indonesia. Beberapa contoh penyakit tak tertahankan bakteri yang dirujuk adalah::

- a. Demam tifoid
- b. Tuberkulosis (TB)
- c. Pneumonia
- d. Meningitis
- e. Infeksi saluran kemih
- f. Difteri
- g. Batuk rejan (pertusis)

h. Sepsis

Penyakit parasit Jamur efektif tumbuh subur di lingkungan tropis dan hangat dengan kelembapan tinggi, salah satunya di Indonesia. Hal ini membuat kontaminasi menular sangat normal di Indonesia. Beberapa contoh penyakit menular yang sering terjadi adalah thlete's foot atau penyakit parasit kaki. b. Metode Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Untuk mengurangi perjudian dan mencegah terjadinya penyakit yang tak tertahankan, penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan penyakit yang tak tertahankan berikut ini:

a. Mulailah mencuci tangan dengan pembersih dan air, terutama setelah buang air kecil dan besar, membuang sampah, sebelum memasak, dan sebelum makan.

b. Menyiapkan makanan atau minuman sampai matang sebelum digunakan.

c. Gunakan penutup ketika Anda berada di luar rumah atau ketika Anda disapu bersih.

d. Cobalah untuk tidak berbagi peralatan kebersihan individu, seperti sikat gigi, pisau cukur, handuk, dan peralatan makan, dengan orang lain.

e. Lengkapi vaksinasi seperti yang ditunjukkan oleh jadwal yang disarankan oleh spesialis atau saat melakukan perjalanan ke daerah dengan penyakit endemik.

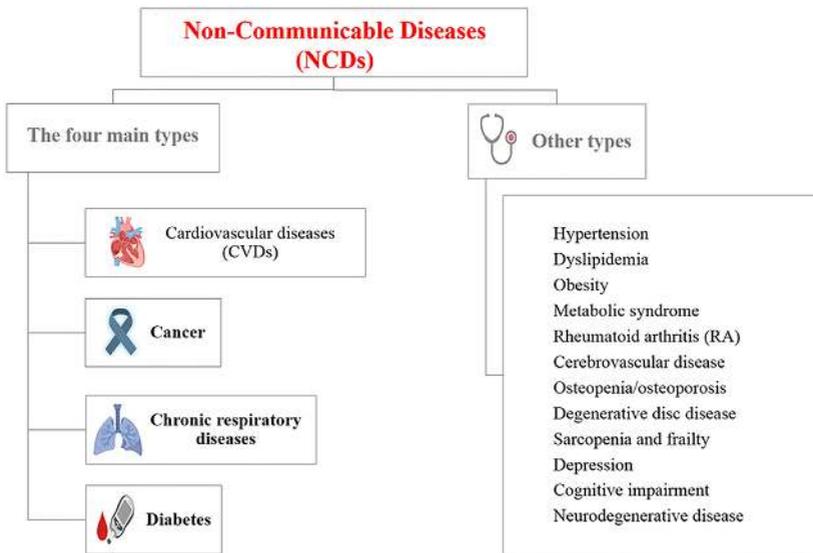
f. Melakukan seks yang aman, khususnya menggunakan kondom saat berhubungan seksual dan tidak berganti-ganti pasangan seksual.

g. Jaga agar iklim tetap bersih. Salah satunya adalah tidak membuang sampah sembarangan.

Penyakit tidak menular (PTM), juga dikenal sebagai penyakit kronis, adalah kondisi medis yang berhubungan dengan jangka waktu yang lama dan perkembangan yang lambat (Gambar 1). Sebagian besar PTM tidak menular dan merupakan hasil dari beberapa faktor,

termasuk faktor genetik, fisiologis, perilaku, dan lingkungan . Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), PTM adalah penyebab utama kematian di seluruh dunia, bertanggung jawab atas 71% dari total jumlah kematian setiap tahun. Empat pembunuh teratas di antara PTM dengan jumlah kematian tertinggi adalah penyakit kardiovaskular (17,9 juta kematian per tahun), kanker (9,0 juta), penyakit pernapasan (3,9 juta), dan diabetes (1,6 juta) (Gambar 1). Namun, istilah PTM telah diperluas untuk mencakup berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit hati, ginjal, dan gastroenterologis, gangguan endokrin, hematologi, dan neurologis, kondisi dermatologis, kelainan genetik, trauma, gangguan mental, dan kecacatan. misalnya buta dan tuli). Faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap PTM melibatkan pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, penggunaan tembakau, dan penyalahgunaan alkohol. Oleh karena itu, sebagian besar penyakit ini dapat dicegah karena pada akhirnya berkembang di awal kehidupan karena aspek gaya hidup(Whiting et al., 2011).

Ada kekhawatiran yang meningkat bahwa pola makan yang buruk telah meningkatkan potensi risiko, menyebabkan penyakit kronis, dan masalah gizi di sektor kesehatan masyarakat. Secara historis, banyak PTM secara langsung dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan disebut sebagai “penyakit orang kaya”. Kini, beban PTM di negara berkembang semakin meningkat. Selanjutnya, kematian di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah telah melipatgandakan beban PTM. Meningkatnya minat terhadap kesejahteraan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, berdasarkan Gross National Happiness (GNH), baru-baru ini menarik lebih banyak perhatian. Epidemio PTM menghambat kemajuan GNH karena kesehatan yang baik diperlukan untuk mencapai kebahagiaan. Pengalaman Bhutan menunjukkan bahwa peluang strategis untuk meminimalkan PTM dan meningkatkan kesejahteraan penduduk dapat dimanfaatkan dengan menggabungkan sektor kesehatan dengan sektor lain di tingkat individu dan organisasi(Arora et al., 2011).

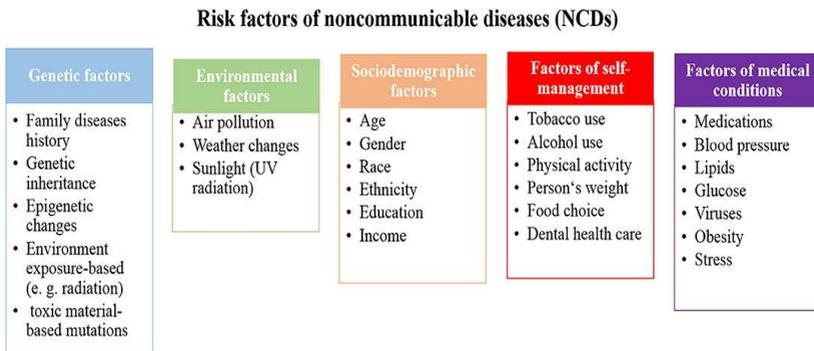


Gambar 26. Daftar penyakit tidak menular (PTM)

Faktor Risiko Utama PTM

Beberapa faktor dapat meningkatkan jumlah peluang untuk mengembangkan PTM dan dapat diklasifikasikan dengan cara yang berbeda. Dalam satu pendekatan, faktor risiko diklasifikasikan sebagai faktor yang dapat dimodifikasi atau tidak dapat dimodifikasi yang masing-masing dapat memiliki kondisi yang dapat diubah atau tidak dapat diubah. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi meliputi tekanan darah tinggi, merokok, diabetes mellitus, kurangnya aktivitas fisik, obesitas, dan kolesterol darah tinggi, sedangkan faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi meliputi usia, jenis kelamin, faktor genetik, ras, dan etnis. Menariknya, meskipun usia dan jenis kelamin merupakan faktor yang tidak dapat dimodifikasi, sebagian besar faktor terkaitnya dapat dimodifikasi. Gambar 2 merupakan model untuk mengklasifikasikan faktor risiko PTM. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi juga dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelas (Norat et al., 2002):

- a. Faktor biologis, seperti kelebihan berat badan, dislipidemia, hiperinsulinemia, dan hipertensi;
- b. Faktor perilaku, seperti pola makan, kurang aktivitas fisik, merokok tembakau, dan konsumsi alkohol; dan
- c. Faktor sosial, yang melibatkan kombinasi kompleks dari interaksi parameter sosial ekonomi, budaya dan lingkungan. Pada bagian berikutnya, contoh faktor risiko yang diidentifikasi untuk PTM, termasuk usia, diet, dan konteks ekonomi, disorot.



Gambar 27. Sebuah model yang diusulkan untuk mengklasifikasikan faktor risiko PTM.

Penjelasan Faktor Resiko

1. Usia

Sementara PTM biasanya dikaitkan dengan orang tua, semua usia berisiko, bahkan sebelum lahir. Penyakit ini dapat dimulai pada tahun-tahun awal kehidupan dan terus berkembang selama masa kanak-kanak, remaja, dan usia tua. Namun, 15 juta kematian akibat PTM tercatat dari orang berusia antara 30 dan 69 tahun dan lebih dari 82% dari kematian "dini" ini berasal dari negara berpenghasilan rendah dan menengah. Perspektif perjalanan hidup adalah bukti asal mula PTM dewasa, yang ditentukan di dalam rahim. Barker

menunjukkan bahwa gizi ibu memainkan peran penting dalam penyakit orang dewasa (On & Past, 2005). Dia menemukan bahwa menyesuaikan janin manusia dengan suplai nutrisi yang terbatas menghasilkan perubahan struktur dan metabolisme yang permanen. Selanjutnya, perubahan terprogram tersebut mungkin dikaitkan dengan beberapa penyakit, seperti penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi di kemudian hari. Selain itu, bayi yang belum lahir tidak hanya dipengaruhi secara negatif oleh kebiasaan ibu, seperti diet, obat-obatan, stres, alkohol dan konsumsi tembakau selama kehamilan, tetapi faktor lingkungan, seperti polusi udara, juga berpengaruh. Faktor-faktor ini mempengaruhi perkembangan otak janin dan awal, misalnya, berat badan lahir rendah disebabkan oleh kesehatan jangka panjang yang buruk dan kognisi yang buruk (Gu et al., 2009).

Pada masa kanak-kanak, risiko PTM baru dapat muncul karena mudahnya akses makanan dan minuman tidak sehat di taman kanak-kanak dan sekolah. Dengan demikian, hal ini menyebabkan tingginya jumlah anak yang kelebihan berat badan dan obesitas. Setelah tahap kehidupan tersebut, remaja pada tahap remaja dapat memperoleh kebiasaan baru dan berbahaya, seperti merokok dan minum alkohol, yang secara signifikan dapat berkontribusi pada risiko PTM. Kebiasaan buruk ini dapat berlanjut selama masa dewasa dengan aspek tambahan yang dihadapi orang dewasa di tempat kerja, termasuk tekanan keuangan, pengangguran, karir yang tidak memuaskan, dan keterlibatan sosial yang rendah, yang mempengaruhi kemajuan PTM. Pensiun dan meninggalkan tempat kerja dapat memberikan tantangan baru di antara orang tua dan mempengaruhi perkembangan PTM. Nutrisi yang buruk, kurangnya aktivitas fisik, penggunaan alkohol dan tembakau, isolasi sosial, dan tekanan keuangan secara langsung mempengaruhi orang tua dan sangat mempromosikan PTM (Johnston et al., 2019).

Pencegahan dan pengendalian PTM dapat dilakukan pada semua umur. Status kesehatan ibu sebelum dan selama kehamilan mempengaruhi kerentanan anak terhadap PTM di kemudian hari. Ini adalah strategi yang paling penting untuk mengendalikan PTM karena menargetkan akar masalahnya. Menerapkan standar tinggi untuk makanan dan minuman, meningkatkan aktivitas fisik di sekolah dan

tempat kerja, selain memantau kualitas udara dan menawarkan zona bebas asap rokok, sebagian besar dapat mencegah PTM di semua tahap kehidupan. Namun, perpajakan dan pembuatan kebijakan terbatas untuk pemasaran makanan tidak sehat, minuman manis, tembakau, dan alkohol sebagian besar dapat meningkatkan statistik kesehatan. Lebih lanjut, karena anak-anak dan orang tua yang obesitas berisiko tinggi mengalami isolasi sosial, penting bagi kesehatan mental dan fisik mereka untuk terlibat dalam kegiatan sosial (Blundell & Hine, 2019).

2. Diet dan Gaya Hidup

Di masa lalu, penyakit infeksi dan parasit merupakan penyebab utama kematian, tetapi dalam beberapa dekade terakhir, PTM telah menggantikannya dan menjadi penyebab utama kematian. Hal ini dapat dikaitkan dengan perubahan pola makan dan gaya hidup selama bertahun-tahun, yang dapat diklasifikasikan sebagai pergeseran pola penyakit pada manusia. Berbagai faktor diet, seperti daging, produk gandum utuh, pola diet sehat, konsumsi minuman manis, dan diet berbasis zat besi memiliki hubungan yang jelas dengan PTM. Selain itu, tingginya konsumsi daging olahan dan minuman manis, dikombinasikan dengan faktor gaya hidup tidak sehat lainnya, seperti indeks massa tubuh (BMI) yang tinggi, kurangnya aktivitas fisik, dan merokok memiliki hubungan yang jelas dengan PTM. Produk gandum utuh tidak bergantung pada BMI dan memiliki efek perlindungan, karena kandungan seratnya yang tinggi dan kemampuannya untuk melepaskan glukosa secara perlahan ke dalam sirkulasi; selanjutnya, ini mengurangi respon insulin postprandial dan dapat meningkatkan sensitivitas insulin (Pullar et al., 2018).

Transisi diet menggambarkan perubahan dalam produksi, pemrosesan, ketersediaan, konsumsi makanan, dan pengeluaran energi. Selanjutnya, konsep tersebut menjadi lebih luas dan melibatkan komposisi tubuh, parameter antropometrik, dan aktivitas fisik. Penggunaan istilah transisi pola makan muncul karena adanya pergeseran pola makan ke barat khususnya di negara berkembang. Makanan tradisional di sebagian besar negara lebih sehat, alami, dan lebih kaya serat, dan sereal telah digantikan oleh makanan olahan

yang tidak sehat yang kaya akan gula dan lemak, makanan sumber hewani, dan karbohidrat olahan. Oleh karena itu, negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah telah melihat perubahan cepat dalam transisi nutrisi dan peningkatan cepat PTM. Konsumsi makanan yang tinggi dan penurunan tingkat aktivitas fisik terjadi secara bersamaan, sehingga mengakibatkan PTM. Faktor utama, yang disebabkan oleh kurangnya aktivitas fisik, adalah perkembangan teknologi yang cepat dan berkelanjutan. Akses mudah ke teknologi modern dan manufaktur di rumah dan tempat kerja, termasuk mesin, kendaraan dan teknologi hemat tenaga kerja, membuat hidup lebih mudah tetapi tidak sehat dari sudut pandang pengurangan risiko PTM(Willett, 1995).

3. Konteks Ekonomi

PTM sudah umum di negara maju dan menyebar dengan cepat. Menyebarkan gaya hidup barat di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, karena penuaan populasi global dan tekanan komersial untuk diet dan rokok yang tidak sehat, berkontribusi pada peningkatan tingkat PTM di negara-negara ini. Ada hubungan langsung antara kesehatan yang buruk dan pendapatan rendah, yang berkontribusi terhadap kemiskinan pangan, pembelian produk makanan yang lebih murah dan tidak sehat, dan perawatan yang mahal, di samping faktor psikososial. Orang dengan pendapatan rendah memiliki perasaan bahwa mereka menempati status yang lebih rendah dalam masyarakat, yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial(Mikkelsen et al., 2019).

Namun, kemiskinan makanan, mobilitas yang buruk dan kurangnya aktivitas fisik juga merupakan masalah serius di negara-negara berpenghasilan tinggi).Ada kecenderungan yang berkembang untuk mempertimbangkan sistem sosial, politik, dan ekonomi sebagai faktor penting yang mempengaruhi PTM selain perilaku/gaya hidup individu. Teori Ekososial Krieger menyoroti distribusi penyakit ekososial yang menggambarkan bagaimana keragaman antara kondisi historis, sosial, dan ekologis secara signifikan berkontribusi terhadap perubahan hasil kesehatan berbagai kelompok sosial. Misalnya, sisi buruk dari ketimpangan ekonomi dan kesehatan yang sudah ada

selama bertahun-tahun menjadi jelas dengan pandemi virus corona COVID-19 saat ini. Menurut penelitian Krieger, jumlah kematian COVID-19 yang lebih tinggi di Afrika-Amerika daripada orang kulit putih di AS dikaitkan dengan beberapa faktor yang melibatkan tinggal di tempat-tempat ramai, menggunakan transportasi umum untuk pergi bekerja, bekerja di pekerjaan layanan dalam kontak dekat dengan orang lain, dan kekurangan peralatan pelindung di tempat kerja. Selain itu, kurangnya akses ke perawatan kesehatan dan asuransi kesehatan, dan kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya dapat meningkatkan risiko COVID-19 pada populasi Afrika-Amerika (Imamura et al., 2015).

Penyakit Utama

a. Penyakit Kardiovaskular (CVD)

CVD adalah kontributor utama beban penyakit global di antara PTM dan merupakan penyebab kematian terbanyak di seluruh dunia setiap tahun—bahkan lebih dari jumlah kematian akibat kanker dan penyakit pernapasan kronis digabungkan. Penyakit jantung koroner adalah sekelompok gangguan yang tidak hanya terkait dengan kondisi jantung, seperti penyakit jantung iskemik (IHD), stroke, penyakit jantung bawaan, penyakit jantung koroner, penyakit serebrovaskular, penyakit arteri perifer, dan penyakit jantung rematik, tetapi juga penyakit darah. pembuluh darah yang melibatkan hipertensi, dan kondisi yang terkait dengan sirkulasi serebral, karotis, dan perifer). Sementara CVD sama-sama mempengaruhi kedua jenis kelamin, pria menderita insiden yang lebih tinggi daripada wanita. Namun, CVD adalah penyebab utama kematian wanita di negara maju.

Selain itu, banyak studi epidemiologi menunjukkan hubungan antara penyakit periodontal (PD) dan penyakit kardiovaskular. Bentuk PD ringan mempengaruhi 75% orang dewasa di AS, dan bentuk yang lebih parah mempengaruhi 20 sampai 30% orang dewasa. Karena PD adalah umum, itu bertanggung jawab untuk proporsi yang signifikan dari risiko terkait infeksi yang diusulkan dari penyakit kardiovaskular (Aune et al., 2009).

Menurut American Heart Association, ada tujuh faktor dan perilaku kesehatan utama yang berkontribusi pada peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke: nutrisi, merokok, kelebihan berat badan/obesitas, kurangnya aktivitas fisik, tekanan darah yang tidak terkontrol, peningkatan kadar kolesterol, dan gula darah.

Kebanyakan CVD dapat dicegah dengan mengatasi tujuh faktor risiko, yang melibatkan diet sehat, aktivitas fisik secara teratur, menghindari merokok dan perokok pasif, mencapai dan mempertahankan berat badan yang sehat, dan menjaga tekanan darah, kolesterol, dan kadar gula darah terkendali(De La Monte & Wand, 2014).

b. Kanker

Kanker merupakan masalah kesehatan masyarakat utama dan penyebab kematian utama kedua secara global. Ini berbagi faktor risiko umum dengan penyakit utama PTM lainnya dan beberapa faktor yang diidentifikasi dan tidak diidentifikasi dapat dikaitkan dengan kanker. Penyebab kanker dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, termasuk:

- 1) Karsinogen biologis (misalnya, infeksi virus, bakteri, atau parasit, faktor hormonal dan genetik);
- 2) Karsinogen kimia (seperti kontaminasi makanan dan air, dan merokok tembakau); dan
- 3) Karsinogen fisik (seperti ultraviolet dan radiasi pengion). Namun, merokok tembakau dianggap sebagai penyebab utama kanker, diikuti oleh pola makan yang buruk).

Selain itu, bersama-sama, berat badan dan kurangnya aktivitas fisik juga dikaitkan dengan kanker yang paling umum, termasuk kanker payudara (pascamenopause), usus besar, endometrium, ginjal, dan kerongkongan. Menurut laporan WHO tahun 2018, kanker terbanyak adalah kanker paru, payudara, kolorektal, prostat, kulit, dan perut, sedangkan kematian akibat kanker terbanyak adalah kanker paru, kolorektal, lambung, hati, dan payudara(Endris, 2008).

Penurunan yang nyata dalam angka kematian akibat kanker

paru-paru, payudara, usus besar/rektum, dan prostat dicapai di negara-negara berpenghasilan tinggi, tetapi masih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Lebih lanjut, kejadian beberapa kanker, termasuk paru-paru, payudara, prostat, usus besar, dan rektum, umumnya meningkat bersamaan dengan perkembangan ekonomi. Sebaliknya, insiden kanker perut menurun seiring dengan perkembangan ekonomi. Pedoman pencegahan penyakit onkologi dan deteksi dini didasarkan pada penilaian risiko kanker, termasuk riwayat medis masa lalu, faktor gaya hidup, riwayat penyakit keluarga, dan pengujian genetik(Liu et al., 2004).

Kanker paru-paru, yang merupakan kanker paling umum di dunia, terutama disebabkan oleh merokok dan risiko meningkat pada perokok berat . Lebih lanjut, beberapa penelitian melaporkan asupan buah, sayuran, dan nutrisi terkait yang rendah pada pasien kanker paru-paru. Oleh karena itu, pencegahan kanker paru dapat dilakukan dengan menghentikan kebiasaan merokok dan memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Selain itu, kebiasaan makan dan aktivitas fisik berkontribusi terhadap kanker payudara, yang merupakan kanker paling umum kedua di dunia dan kanker paling umum di kalangan wanita. Kelebihan adipositas dan mekanisme hormonal tampaknya memainkan peran kunci dalam perkembangan kanker payudara, dan dipengaruhi oleh asupan makanan selama masa kanak-kanak dan remaja(Jefferis et al., 2002). Oleh karena itu, menjaga berat badan yang sehat sepanjang hidup dapat meminimalkan kemungkinan kanker payudara.

Jenis kanker lain yang sangat terkait dengan diet adalah kanker kolorektal. Asupan tinggi daging dan lemak, dan rendahnya asupan buah dan sayuran, serat makanan, vitamin dan mineral terkait dengan peningkatan risiko kanker kolorektal . Oleh karena itu, meminimalkan atau menghentikan konsumsi daging, terutama daging yang diawetkan, dapat mengurangi risiko kanker ini. Kanker perut adalah penyebab utama kematian secara global, tetapi saat ini menurun di negara-negara industri. Hal ini terkait dengan kebiasaan diet dan asupan vitamin C. *Helicobacter pylori*infeksi dianggap sebagai karsinogen tipe I dan sebagai faktor risiko terkuat yang diketahui dari kanker lambung. Kanker yang disebabkan oleh infeksi tiga kali lebih

rendah di negara maju daripada di negara berkembang. Penting untuk menghindari infeksi untuk mencegah kanker, dan itu dapat dicapai dengan makan makanan yang disiapkan dengan benar, minum air dari sumber yang bersih, mengonsumsi vitamin sesuai dengan jatah diet yang direkomendasikan, dan menghindari penggunaan antibiotik secara berlebihan agar untuk mengurangi strain resisten antibiotik .

c. Penyakit Pernafasan Kronis (CRD)

CRD mencakup berbagai penyakit di saluran udara dan struktur paru-paru lainnya. Sebagian besar morbiditas dan mortalitas CRD meningkat seiring bertambahnya usia. CRD termasuk penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), penyakit paru-paru akibat kerja, asma dan alergi pernapasan, sindrom apnea tidur, dan hipertensi pulmonal. Asma dan COPD merupakan penyebab sebagian besar kematian di antara CRD di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Faktor genetik dan lingkungan merupakan faktor risiko CRD; faktor lingkungan lebih dominan. Faktor-faktor ini termasuk paparan polusi udara, termasuk asap tembakau dan asap tembakau bekas, polusi udara dalam dan luar ruangan, paparan pekerjaan, dan faktor sosial ekonomi.

CRD tidak sepenuhnya reversibel dan sebagian dapat dicegah. Selama kehamilan, ibu yang merokok berkontribusi terhadap disfungsi paru-paru pada anak saat lahir. Selanjutnya, pada awal kehidupan, kesehatan anak mempengaruhi kesehatan pernapasan mereka selanjutnya. Dengan demikian, mengikuti gaya hidup sehat di usia awal kehidupan, menghindari infeksi pernapasan, dan menghindari agen lingkungan dan pekerjaan dapat secara efektif mencegah CRD. Mencegah paparan polutan dalam dan luar ruangan dapat dicapai dengan penyaringan dan ventilasi, selain penggunaan gas alam.

d. Diabetes mellitus

Diabetes telah menarik perhatian dunia karena prevalensi dan insidennya yang meningkat. Ini bukan hanya penyakit kronis, tetapi juga kondisi akut yang mengancam jiwa. Lebih lanjut, hal itu dapat menyebabkan penyakit serius lainnya seperti penyakit jantung, gagal ginjal, dan kerusakan mata, yang selanjutnya dapat menyebabkan

kebutaan, dan borok kaki, yang mungkin memerlukan amputasi anggota badan. Dua jenis diabetes yang utama sama-sama menyebabkan hiperglikemia. Pada tipe 1, sel pankreas tidak dapat memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup, sedangkan pada tipe 2, sel-sel tubuh tidak dapat merespon insulin dengan baik. Jenis diabetes lainnya melibatkan diabetes mellitus gestasional, yang terjadi pada wanita hamil dengan intoleransi glukosa), dan diabetes tipe 3, yang berhubungan dengan penyakit Alzheimer, di mana neuron di otak tidak dapat merespon insulin. Sementara diabetes dapat diturunkan sebagian, beberapa faktor gaya hidup, seperti obesitas, konsumsi gula yang tinggi, dan kurangnya aktivitas fisik dapat secara signifikan berkontribusi pada perkembangan diabetes. Namun, perubahan gaya hidup dapat mencegah diabetes dan komplikasi jangka panjang dari diabetes. Pasien dengan diabetes tipe 2 dapat mengontrol atau bahkan membalikkan diabetes dengan mengubah gaya hidup dan kebiasaan makan mereka. Istilah "pola makan sehat" mencakup berbagai pola makan dan faktor gizi, misalnya mengurangi konsumsi daging merah dan olahan, minuman manis dan alkohol, serta meningkatkan konsumsi produk gandum

Manajemen Faktor Risiko dan PTM

Bagian berikut menguraikan strategi yang dikembangkan dan diusulkan untuk mengelola PTM dan faktor risikonya dari beberapa perspektif.

a. Manajemen Faktor Risiko

Penyebab paling umum dari PTM adalah faktor risiko metabolik dan perilaku dan sebagian besar dapat dicegah dengan beberapa cara yang tersedia. Sebagian besar diskusi global menyangkut faktor risiko manajemen diri (konsumsi tembakau dan alkohol, aktivitas fisik, berat badan, makanan, dan perawatan kesehatan gigi) dan fokus pada peran tanggung jawab individu untuk mengelola faktor risiko PTM. Spesialis perawatan kesehatan harus mendidik pasien tentang nilai gizi mereka dan meningkatkan profil didaktik, praktikum, dan lokakarya dalam praktik sehari-hari. Selanjutnya, pengelolaan PTM adalah prioritas sektor kesehatan masyarakat di sebagian besar negara, karena manajemen di

masyarakat adalah arah utama strategi pencegahan PTM(Wroblewski et al., 2010).

Intervensi digunakan dalam manajemen kesehatan masyarakat dalam upaya untuk mempromosikan perilaku kesehatan yang baik. Misalnya, India, dengan keragaman sosiokultural, ekonomi, dan geografisnya yang luas, menerapkan tindakan multi-sektor (kemitraan antar sektor yang berbeda) untuk mencegah PTM, termasuk program kesehatan sekolah, inisiatif Program Pengendalian Kanker Nasional, program Pengendalian Trauma Nasional, Program Nasional Program Pengendalian Kebutaan, Program Kesehatan Mental Nasional, Program Pengendalian Tembakau Nasional, dan Program Nasional Pengendalian Diabetes, Stroke, dan inisiatif Penyakit Kardiovaskular. Dari pendekatan lain, peneliti juga menyoroti faktor lingkungan (polusi udara, perubahan iklim, sinar matahari) dan dampaknya terhadap perkembangan PTM. Polusi udara akan menjadi tantangan penting di masa depan dan teknologi baru, seperti microchip, akan lebih berdampak pada pemantauan udara.

Karena diet merupakan faktor risiko umum di antara sebagian besar PTM, hal ini menarik lebih banyak perhatian dalam upaya menemukan strategi yang efektif untuk menyediakan makanan sehat bagi masyarakat dan di semua tahap kehidupan. Intervensi nutrisi berbasis bukti harus menjadi prioritas kesehatan global dan peran lemak makanan yang dipelajari harus menjadi variabel yang dapat dimodifikasi dalam pencegahan PTM. Bukti terbaru menunjukkan bahwa diet yang tinggi lemak sehat dan kaya asam lemak tak jenuh mencegah perkembangan penyakit metabolik dan mengurangi kejadian kardiovaskular. Banyak intervensi yang menangani kemiskinan dan pembangunan berdampak pada prevalensi dan risiko PTM). Bukti saat ini terbatas pada diet, dan efek positif dari program ketahanan pangan berbasis pertanian pada indikator diet telah disarankan. Diet suboptimal adalah faktor risiko utama untuk PTM dan konsumsi makanan tertentu, daripada makronutrien atau mikronutrien; mungkin merupakan faktor risiko paling signifikan untuk PTM. Komunikasi kesehatan strategis dalam intervensi populasi-lebar termasuk melibatkan industri makanan untuk mengurangi kandungan garam dalam makanan. Konsep diet

berkelanjutan menggabungkan masalah kesehatan dan lingkungan dan memasukkan faktor risiko yang disebutkan di atas sebagai bagian dari rekomendasi untuk mengurangi konsumsi daging olahan dan untuk meningkatkan konsumsi biji-bijian (Sithey et al., 2018).

Aktivitas gaya hidup termasuk diet sehat dan fokus membatasi penggunaan garam, gula, dan lemak jenuh). Sementara tubuh kita dapat mensintesis banyak molekul yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik, nutrisi penting diperoleh dari makanan. Karbohidrat, protein, dan lemak merupakan komponen utama makanan. Mineral adalah zat gizi esensial anorganik yang harus diperoleh dari makanan. Omega-3 alfa-linolenat dan asam linoleat omega-6 adalah asam lemak esensial yang dibutuhkan untuk membuat beberapa fosfolipid membran. Vitamin (B, C, A, D, E, dan K) adalah kelas molekul organik esensial (seperti kofaktor) yang dibutuhkan dalam jumlah kecil agar sebagian besar enzim berfungsi dengan baik. Tidak adanya atau rendahnya tingkat vitamin dapat memiliki efek dramatis pada kesehatan.

Fokus pada kebutuhan untuk memenuhi asupan nutrisi penting yang cukup) melalui pola makan yang sehat dianggap sangat signifikan bagi masyarakat lanjut usia. Suplemen makanan adalah sumber nutrisi terkonsentrasi (mineral dan vitamin) atau zat lain dengan efek nutrisi atau fisiologis, yang dipasarkan dalam bentuk pil, kapsul, dan/atau cairan. Suplemen makanan ini menawarkan banyak manfaat, termasuk mempertahankan asupan nutrisi tertentu yang cukup, untuk memperbaiki kekurangan nutrisi, atau untuk mendukung fungsi fisiologis tertentu. Baru-baru ini, para peneliti telah mencari solusi baru untuk menerapkan proses produksi makanan yang efisien dan untuk menemukan manfaat limbah pati bagi kesehatan manusia.

b. Penatalaksanaan PTM

PTM adalah pembunuh diam-diam yang mengancam kesehatan tanpa menunjukkan gejala apa pun sampai masalah berkembang ke stadium lanjut. Pasien dengan PTM, atau orang dengan kerentanan untuk mengembangkannya, membutuhkan perawatan jangka panjang yang dipersonalisasi, proaktif, dan berkelanjutan. Perawatan kesehatan primer dapat mengatur dan

memberikan strategi perawatan kesehatan untuk mengelola PTM di setiap komunitas dan untuk mendeteksi penyakit pada tahap awal. Dengan demikian, mereka dapat secara signifikan mengatasi tantangan terkait dengan biaya tinggi di sektor kesehatan. Sebagai contoh, beberapa penelitian telah membuktikan bahwa faktor gaya hidup memiliki hubungan langsung dengan risiko kanker dan mengubah gaya hidup, dalam pendekatan yang positif, dapat sangat meminimalkan beban kanker.

Faktor risiko utama kanker adalah usia, jenis kelamin, alkohol, merokok, riwayat penyakit keluarga, dan makanan). Kanker dapat dicegah dengan mengubah perilaku: perbaikan pola makan, aktivitas fisik, pengendalian berat badan, manajemen obesitas, pencegahan tembakau, seks aman dan pengendalian virus onkogenik, perlindungan terhadap sinar matahari, obat-obatan, dan konsumsi alkohol yang lebih rendah

Penurunan dramatis dalam semua kematian terkait penyakit kardiovaskular telah dicatat di negara-negara berpenghasilan tinggi, sedangkan peningkatan yang signifikan tercatat di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Checkley dkk. melaporkan manajemen PTM di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Sementara beberapa orang di negara-negara ini dapat mengakses perawatan yang sama yang tersedia di negara-negara berpenghasilan tinggi, sebagian besar penduduk tidak memiliki akses. Kendala utama penyebab peningkatan jumlah penderita PTM di masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah adalah belum adanya perencanaan yang matang untuk menghentikan terjadinya dan penyebaran penyakit. Setiap negara perlu menyiapkan rencana pengelolaannya, tidak hanya dengan model penanggulangan dari negara-negara berpenghasilan tinggi. Beberapa model yang berhasil telah diverifikasi, dengan mempertimbangkan strategi berbiaya rendah untuk mencegah, mendiagnosis, dan mengobati PTM.

Misalnya, strategi hemat biaya telah dikembangkan di Kenya untuk mendiagnosis diabetes dan hipertensi pada tahap awal kehidupan. Sementara petugas kesehatan mengunjungi rumah untuk memeriksa infeksi human immunodeficiency virus (HIV), mereka juga

mengukur kadar glukosa darah dan tekanan darah. Lebih lanjut, diabetes tipe 2 adalah pandemi global yang sangat mempengaruhi kesehatan manusia dan perkembangan ekonomi global. Federasi Diabetes Internasional melaporkan bahwa ada 415 juta orang yang hidup dengan diabetes tipe 2 pada tahun 2015, dan diperkirakan jumlahnya pada tahun 2040 dapat meningkat menjadi 642 juta, yang disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan. Interaksi genetik-lingkungan menginduksi resistensi insulin dan disfungsi sel. Epidemio diabetes tipe 2 dalam beberapa dekade terakhir tidak hanya dikaitkan dengan perubahan kumpulan gen, tetapi perubahan lingkungan juga memainkan peran penting dalam peningkatan pesat dalam prevalensi diabetes tipe 2. Namun, epidemi diabetes mellitus global memerlukan pencarian pendekatan inovatif untuk pencegahan (Gluckman & Hanson, 2006).

c. Strategi Pencegahan PTM Kontemporer

Strategi pencegahan PTM dapat mencakup kerjasama manusia skala kecil dan besar. Pentingnya pencegahan PTM muncul dari dampak langsung PTM terhadap penurunan tingkat pendapatan nasional. Kehilangan produktivitas secara besar-besaran merupakan akibat dari ketidakmampuan bekerja dan seringnya tidak adanya ancaman terhadap perekonomian nasional. Strategi manajemen untuk mencegah PTM didasarkan pada manajemen faktor risiko yang menangani tingkat individu, masyarakat, negara, dan global, dengan tindakan, seperti alokasi sumber daya, kemitraan multi-sektor, manajemen pengetahuan dan informasi dan inovasi. Dimensi yang paling kritis dari strategi pencegahan adalah manajemen gaya hidup di tingkat individu dan dengan fokus pada tindakan, inovasi tersebut, yang dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesadaran manajemen faktor risiko, untuk mengambil keputusan kebijakan kesehatan di tingkat negara dan untuk mengembangkan strategi kesehatan di tingkat global.

Di tingkat global, WHO dan badan-badan PBB dapat bekerja sama untuk merancang kebijakan dan strategi untuk mengurangi risiko PTM. Penting untuk memantau PTM dan menilai kemajuannya di tingkat nasional, regional dan global. Organisasi ini dapat

mendukung penelitian dan mendorong kolaborasi antara lembaga kesehatan nasional dan internasional dan lembaga akademik. Selanjutnya, asap tembakau, sebagai faktor umum dari empat jenis utama PTM, harus dikendalikan. WHO menawarkan bantuan kepada perokok yang memiliki keinginan untuk berhenti menggunakan produk tembakau dan menerapkan aturan untuk mengusulkan lingkungan bebas asap rokok. Selanjutnya, WHO dapat, secara hukum, melindungi kebijakan pengendalian tembakau dari kepentingan komersial industri tembakau.

Di tingkat negara, setiap pemerintah perlu merancang rencananya berdasarkan ekonominya. Beberapa strategi berbiaya rendah dan sangat efektif tersedia untuk mencegah dan mengelola PTM. Misalnya, mendorong orang untuk berolahraga untuk aktivitas fisik adalah faktor paling efektif yang dapat dengan mudah mempengaruhi pencegahan PTM, dan pada saat yang sama hemat waktu dan biaya. Selain itu, alokasi anggaran yang lebih baik untuk mendukung sistem perawatan kesehatan primer harus dilakukan untuk memberikan layanan kesehatan kepada semua anggota masyarakat. Untuk mencapai kemajuan skala besar, kolaborasi antara pemerintah dan berbagai organisasi non-pemerintah, sekolah, dan universitas, untuk memberikan saran tentang modifikasi gaya hidup dan untuk memperingatkan orang-orang tentang risiko PTM, sangat dibutuhkan. Di tingkat masyarakat, pusat dan lembaga penelitian dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pencegahan PTM dengan melakukan proyek dan program penelitian. Fokus penelitian pada bioteknologi pangan dan pertanian memiliki pengaruh langsung terhadap risiko PTM (Mikkelsen et al., 2019).

Pengembangan alat diagnostik memungkinkan deteksi cepat biomarker PTM dengan sensitivitas tinggi untuk membantu mendeteksi penyakit pada tahap awal, yang selanjutnya berkontribusi pada pengobatan yang lebih mudah dan penyembuhan yang cepat. Namun, untuk mencapai standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, penting untuk mendorong individu dan keluarga untuk mengikuti gaya hidup sehat untuk mendapatkan respons yang efektif untuk pencegahan dan pengendalian PTM dan untuk meningkatkan hasil kesehatan

DAFTAR PUSTAKA

- Arora, M., Chauhan, K., John, S., & Mukhopadhyay, A. (2011). Multi-sectoral action for addressing social determinants of noncommunicable diseases and mainstreaming health promotion in national health programmes in India. *Indian Journal of Community Medicine*, 36(SUPPL.). <https://doi.org/10.4103/0970-0218.94708>
- Aune, D., Ursin, G., & Veierød, M. B. (2009). Meat consumption and the risk of type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis of cohort studies. *Diabetologia*, 52(11), 2277–2287. <https://doi.org/10.1007/s00125-009-1481-x>
- Blundell, H. J., & Hine, P. (2019). Non-communicable diseases: Ditch the label and recapture public awareness. *International Health*, 11(1), 5–6. <https://doi.org/10.1093/inthealth/ihy063>
- De La Monte, S. M., & Wand, J. R. (2014). Alzheimer ' s Disease Is Type 3 Diabetes — Evidence Reviewed. *Eur Neuropsychopharmacol.*, 24(12), 1954–1960.
- Endris, S. (2008). Gene Conserve - Articles - Articles - - Articles - - Articles - Gene Conserve - Articles - Articles - Volume 7 - Issue 30 - October / December , 2008 . Production, 7(27), 2008–2010. <https://doi.org/10.1007/s>
- Gluckman, P. D., & Hanson, M. A. (2006). Adult disease: Echoes of the past. *European Journal of Endocrinology, Supplement*, 155(1), 155–158. <https://doi.org/10.1530/eje.1.02233>
- Gu, W. Y., Hu, S. Y., He, B., Qiu, G. Q., Han, W. M., Weng, K. Z., Ma, J. H., Jiang, Q. B., & Chen, Z. X. (2009). Changes in levels of serum lipids in the treatment of acute promyelocytic leukemia with all-trans retinoic acid. *Tumor*, 29(2), 176–179. <https://doi.org/10.3781/j.issn.1000-7431.2009.02.017>
- Imamura, F., O'Connor, L., Ye, Z., Mursu, J., Hayashino, Y., Bhupathiraju, S. N., & Forouhi, N. G. (2015). Consumption of sugar sweetened beverages, artificially sweetened beverages, and fruit juice and incidence of type 2 diabetes: Systematic review, meta-analysis, and estimation of population attributable fraction. *BMJ (Online)*, 351, 1–12. <https://doi.org/10.1136/bmj.h3576>
- Jefferis, B. J. M. H., Power, C., & Hertzman, C. (2002). Birth weight,

- childhood socioeconomic environment, and cognitive development in the 1958 British birth cohort study. *British Medical Journal*, 325(7359), 305–308.
<https://doi.org/10.1136/bmj.325.7359.305>
- Johnston, E., Mathews, T., Aspary, K., Aggarwal, M., & Gianos, E. (2019). Strategies to Fill the Gaps in Nutrition Education for Health Professionals through Continuing Medical Education. *Current Atherosclerosis Reports*, 21(4).
<https://doi.org/10.1007/s11883-019-0775-9>
- Liu, S., Serdula, M., Janket, S. J., Cook, N. R., Sesso, H. D., Willett, W. C., Manson, J. A. E., & Buring, J. E. (2004). A prospective study of fruit and vegetable intake and the risk of type 2 diabetes in women. *Diabetes Care*, 27(12), 2993–2996.
<https://doi.org/10.2337/diacare.27.12.2993>
- Mikkelsen, B., Williams, J., Rakovac, I., Wickramasinghe, K., Hennis, A., Shin, H. R., Farmer, M., Weber, M., Berdzuli, N., Borges, C., Huber, M., & Breda, J. (2019). Life course approach to prevention and control of non-communicable diseases. *BMJ (Online)*, 364.
<https://doi.org/10.1136/bmj.l257>
- Norat, T., Lukanova, A., Ferrari, P., & Riboli, E. (2002). Meat consumption and colorectal cancer risk: Dose-response meta-analysis of epidemiological studies. *International Journal of Cancer*, 98(2), 241–256. <https://doi.org/10.1002/ijc.10126>
- On, P., & Past, T. H. E. (2005). Pathophysiology and Treatment of Diabetes. *Nutrition and Diabetes*, 383(9922), 136–137.
<https://doi.org/10.1201/9781420038798.sec2>
- Pullar, J., Allen, L., Townsend, N., Williams, J., Foster, C., Roberts, N., Rayner, M., Mikkelsen, B., Branca, F., & Wickramasinghe, K. (2018). The impact of poverty reduction and development interventions on noncommunicable diseases and their behavioural risk factors in low and lower-middle income countries: A systematic review. *PLoS ONE*, 13(2).
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193378>
- Sithey, G., Li, M., & Thow, A. M. (2018). Strengthening non-communicable disease policy with lessons from Bhutan: linking gross national happiness and health policy action. *Journal of*

- Public Health Policy, 39(3), 327–342.
<https://doi.org/10.1057/s41271-018-0135-y>
- Whiting, D. R., Guariguata, L., Weil, C., & Shaw, J. (2011). IDF Diabetes Atlas: Global estimates of the prevalence of diabetes for 2011 and 2030. *Diabetes Research and Clinical Practice*, 94(3), 311–321.
<https://doi.org/10.1016/j.diabres.2011.10.029>
- Willett, W. C. (1995). Diet, nutrition, and avoidable cancer. *Environmental Health Perspectives*, 103(SUPPL. 8), 165–170.
<https://doi.org/10.1289/ehp.95103s8165>
- Wroblewski, L. E., Peek, R. M., & Wilson, K. T. (2010). Helicobacter pylori and gastric cancer: Factors that modulate disease risk. *Clinical Microbiology Reviews*, 23(4), 713–739.
<https://doi.org/10.1128/CMR.00011-10>
- Akmaruzzaman, Sumardjo -, and Himawan Hariyoga. 2013. “Strategi Mensinergikan Program Pengembangan Masyarakat Dengan Program Pembangunan Daerah.” *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* 5(1): 47–60.
- Hadiyanti, Puji. 2008. “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Produktif Di Pkbn Rawasari, Jakarta Timur.” *Perspektif Ilmu Pendidikan* 17(IX): 90–99.
- Lubis, Zulkarnain, and Universitas Islam As-syafiyah. 2020. “DAKWAH MANAGEMENT OF COMMUNITY DEVELOPMENT Pergerakan Perjuangan Dalam Bidang Politik Yang Ditujukan Untuk Mengalahkan Bangsa Lewat Pertumbuhan Partai-Partai Politik , Gerakan Pemupukan Semangat Kebangsaan.” 2(1): 1–9.
- Suharto, Edi. 2006. “Pengembangan Masyarakat Dalam Praktek Pekerjaan Sosial.” (September): 1–30.

PENGEMBANGAN MASYARAKAT BIDANG PERTANIAN MELALUI PROGRAM *FOOD ESTATE*

Wida Pradiana

Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor
widapradiana75@student.uns.ac.id

Program *Food estate* : Sebuah Overview Teoritis

Food estate adalah istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas (\approx 25 ha) yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai system industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), modal serta organisasi, dan manajemen modern. Konsep dasar *Food estate* diletakkan atas dasar keterpaduan sector dan subsector dalam suatu system agribisnis dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan lestari dikelola secara professional, serta didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kokoh. *Food estate* diarahkan kepada sistem agribisnis yang berakar kuat dipedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat adat atau lokal yang merupakan landasan dalam pengembangan wilayah.

Program *Food estate* dikembangkan karena melonjaknya permintaan pangan dunia sebanding dengan pertumbuhan penduduk, lalu supply pangan dunia yang tidak sebanding dengan permintaan (*Global Food Crisis*), selanjutnya semakin tingginya laju alih fungsi lahan pertanian (khususnya dipulau Jawa dan Bali), dan

kebutuhan pangan nasional yang semakin meningkat, sehingga pangan menjadi komoditas strategis, selain itu juga outflow devisa negara untuk pembiayaan impor beberapa komoditas pangan, serta ketersediaan lahan potensial sebagai lahan cadangan pangan cukup luas (khususnya diluar pulau jawa dan Bali), namun belum tergarap secara optimal, dan membutuhkan modal investasi yang cukup besar, disisi lain dana pemerintah terbatas, sehingga perlu peran investor dalam pengembangan *Food estate*, dengan tetap memperhatikan atau melindungi kepentingan setempat.

Jenis komoditas pertanian yang dikembangkan dalam program *Food estate* ini adalah padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sorgum, bah-buahan, sayur-sayuran, sagu, kepala sawit, tebu dan ternak sapi atau ayam. Pengembangan *Food estate* dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, dimana pelaku usaha *Food estate* dapat dilakukan oleh perorangan/WNI, Badan Usaha yang berbentuk Badan hukum Indonesia, dan berkedudukan di Indonesia meliputi : 1). Badan usaha milik negara ; 2) badan usaha milik daerah; 3) badan usaha swasta atau ; 4) koperasi/BUMP.

Hal- hal yang Diatur dalam Pengembangan Program *Food estate*

Hasil Produksi *Food estate* diutamakan untuk memenuhi kebutuhan didalam negeri dan sisanya baru boleh untuk diekspor. Oleh karena itu pemerintah mengarahkan agar para pelaku usaha dapat bekerja sama secara terpadu dalam melakukan usaha pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan penanam modal, tetap mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia, khususnya warga masyarakat lokal.

Dalam pengembangan program *Food estate* dapat dikembangkan melalui Kerjasama kemitraan, yang dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dan diketahui oleh Bupati. Dalam kemitraan ini masyarakat lokal dapat memperoleh sejumlah saham perusahaan yang besarnya perlu dimusyawarahkan untuk mencapai permufakatan. Selanjutnya pemanfaatan bagi hasil perusahaan yang merupakan hak masyarakat lokal harus diutamakan, bagian terbesar adalah kesejahteraan masyarakat local, terutama untuk membiayai investasi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal.

Prosedur Investasi dalam Pengembangan *Food estate*

Syarat dan tatacara permohonan izin usaha pertanian diantaranya adalah agi pelaku usaha (calon investor) Badan Hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing yang akan melakukan usaha pertanian wajib mengajukan izin usaha kepada Bupati/walikota untuk usaha yang lokasi usahanya didalam wilayah satu Kabupaten/Kota, selanjutnya untuk usaha dimana lokasi usahanya dalam dua Kabupaten/Kota maka mengajukan izin usahanya kepada Gubernur

Pelaku usaha pertanian dapat terdiri dari perorangan WNI atau Badan Hukum Indonesia dan perorangan warga negara asing atau Badan Hukum Asing dan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perorangan WNI atau Badan Hukum Indonesia dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Adapun batas maksimal penggunaan areal pertanian oleh suatu perusahaan disesuaikan dengan jenis komoditinya seluas maksimal 10.000 ha, sedangkan khusus untuk wilayah Papua luas maksimum 20.000 ha seperti yang diatur dalam PP. No 18 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (3). Selain itu para investor juga harus mempunyai rencana kerja unit usaha pertanian diutamakan budidaya tanaman pangan. Selanjutnya wajib memiliki hasil analisis mengenai Dampak lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan hidup. Persyaratan lain yang wajib dipenuhi oleh investor adalah pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian, melkukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha dan pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pengembangan Masyarakat Pertanian melalui Program *Food Estate*

Sebagai bentuk dukungan untuk program *Food estate*, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian mengembangkan korporasi petani sebagai salah satu program strategis pembangunan pertanian nasional tahun 2021. Sebagai salah satu program utama, program ini dirancang

untuk mempersiapkan ketahanan pangan nasional dalam rangka merespon laporan Food and Agriculture Organization (FAO). Dalam keterangannya, FAO telah memberikan peringatan dini kepada seluruh pemimpin negara mengenai kemungkinan buruk dampak pandemi Covid-19 terhadap ketahanan pangan.

Pada kawasan pengembangan *Food estate* akan dibangun model bisnis korporasi. Pengembangan kawasan *Food estate* ini dilakukan dengan teknologi optimalisasi lahan rawa secara intensif guna meningkatkan produksi dan indeks pertanaman (IP). Komoditas utama yang dikembangkan dalam *Food estate* meliputi kentang sebagai bahan baku industri, bawang merah dan bawang putih. kawasan *Food estate* (lumbung pangan) di Kalimantan Tengah (Kalteng) akan digarap di lahan seluas 168.000 hektar (ha). Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor dibawah Kementerian Pertanian ikut mendukung program *Food estate* yang dicanangkan pemerintah dengan cara menurunkan alumni lulusannya untuk melakukan pendampingan pengembangan kawasan pertanian di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Bersinergi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar, Polbangtan Bogor berupaya menyukseskan pengembangan kawasan pertanian yang merupakan salah satu program super prioritas dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Pengembangan Kawasan *Food estate* dan Kawasan Pertanian di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah merupakan program terobosan untuk mengintegrasikan semua sektor penunjang di kawasan pangan sehingga dikala masa pandemi Covid-19 akan tetap mampu mendorong peningkatan produksi pangan. Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan pangan serta perubahan iklim menjadi alasan perlunya pengoptimalan di kawasan sentral pangan melalui program pengembangan kawasan *Food estate* dan kawasan pertanian. Disamping untuk peningkatan produksi pangan, pengembangan kawasan *Food estate* dan kawasan pertanian berbasis korporasi petani diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di lokasi program, karena didukung oleh potensi sumberdaya lahan yang cukup luas, sumberdaya air dan iklim yang sesuai, serta kelembagaan petani yang memiliki modal sosial budaya yang mendukung.



Gambar 28. Pengamatan Kawasan



Gambar 29. Kegiatan ubinan

Prinsip – Prinsip Pengembangan Masyarakat

Jim Ife (2002) mengutarakan 26 prinsip dalam pengembangan masyarakat yang dikelompokkan ke dalam prinsip ekologis, prinsip keadilan sosial, prinsip menghargai lokal, prinsip proses, serta prinsip global dan lokal. Ife menekankan bahwa prinsip-prinsip *community development* tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan

terkait. Prinsip-prinsip *community development* yang disampaikan oleh Ife (2002) adalah sebagai berikut ;

Pertama, prinsip-prinsip ekologis (*Ecological principles*). Dalam prinsip ini terdapat lima unsur yang menjadi basis *community development* yaitu; *Holisme (Holism)*, Keberlanjutan (*Sustainability*), Diversitas atau Keberagaman (*Diversity*), Pembangunan Bersifat Organik (*Organic development*) dan Pembangunan yang Seimbang (*Balanced development*).

Kedua, Prinsip Keadilan Sosial (*Social justice principles*). Dalam *community development*, penting untuk selalu memadukan pendekatan ekologis dengan gagasan keadilan sosial. Terdiri dari ; Memusatkan Perhatian pada Keadaan Struktur yang Merugikan (*Addressing structural disadvantage*), Memusatkan Perhatian pada Wacana yang Merugikan (*Addressing discourses of disadvantage*), Pemberdayaan (*Empowerment*), Mendefinisikan Kebutuhan (*Need definition*) dan Hak Asasi Manusia (*Human rights*).

Ketiga, Prinsip Menghargai Lokal (*Valuing the local*). Aksi dari berbasis kesadaran lokal dewasa ini menjadi perhatian berbagai kalangan. Tema ini menjadi menguat ketika sentralisme terbukti gagal dalam pelaksanaan pembangunan. Prinsip lokal tersebut bisa dimaknai sebagai ; Menghargai Pengetahuan Lokal (*Valuing local knowledge*), Menghargai Kebudayaan Lokal (*Valuing local culture*), Menghargai Sumber Daya Lokal (*Valuing local resources*), Menghargai Keahlian Lokal (*Valuing local skills*), Menghargai Proses Lokal (*Valuing local processes*)

Keempat, Prinsip Proses (*Process principles*). *Community development* memandang lebih penting pada prosesnya daripada hasilnya, oleh karena itu banyak penerapan prinsip-prinsip penting *community development* terfokus pada gagasan proses. Terdiri dari ; Proses, Hasil, dan Visi (*Process, outcome and vision*), Keterpaduan Proses (*The integrity of process*), Meningkatkan Kesadaran (*Consciousness raising*), Partisipasi (*Participation*), Kerjasama dan Konsensus (*Cooperation and consensus*), Gerak Pembangunan (*The pace of development*), Damai dan Tanpa Kekerasan (*Peace and non-violence*), Inklusif (*Inclusiveness*), Membangun Masyarakat (*Community building*).

Kelima, Prinsip Global dan Lokal (*Global and local principles*). Hubungan antara global dan lokal saat ini telah menjadi bagian yang nyata dari seluruh praktik *community development*, dan perlu

dijadikan bagian untuk menyadarkan setiap *community worker*. Prinsip global dan lokal dalam hal ini adalah Mengkaitkan Global dan Lokal (*Linking the global and the local*) dan Praktik Anti Penjajah (*Anti-colonialist practice*)

Tabel 12. Pengembangan Masyarakat Berdasarkan Prinsip Ekologis

PRINSIP-PRINSIP		Kondisi Nyata	
E K O L O G I S	1	Holisme	Sistem usahatani yang holistic, yaitu konsep pertanian berkelanjutan yang memenuhi aspek ekonomi, ekologi, social dan budaya
	2	Keberlanjutan	Memanfaatkan potensi SDM dan SDA pertanian yang dimiliki melalui pemberdayaan masyarakat
	3	Keanekaragaman	Menghargai perbedaan, tidak ada jawaban tunggal, Desentralisasi, Komunikasi jejaring dan lateral, Teknologi tingkat rendah.
	4	Perkembangan Organik	Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya alam spesifik local/organik
	5	Keseimbangan	Proses aktualisasi komitmen dalam memecahkan masalah kesenjangan atau ketidak-seimbangan antar kelompok dalam masyarakat, termasuk mengatasi masalah kelangkaan sumber daya pertanian, kesempatan serta menjauhkan masyarakat dari penderitaan sosial.

Tabel 13. Pengembangan Masyarakat Berdasarkan Prinsip Keadilan Sosial

KEADILAN SOSIAL	6	Mengatasi struktur yang merugikan	<p>proses pengembangan masyarakat dalam memperkokoh struktur2 penindasan yg dominan</p> <p>Pekerja Masyarakat pertanian perlu membantu masyarakat dalam memecahkan masalah sesuai dengan kebutuhannya.</p>
	7	Mengatasi wacana2 yang merugikan	<p>Memberikan hak istimewa secara efektif dan memberdayakan masyarakat, sementara memarginalkan dan melemahkan sebagian masyarakat lainnya.</p>
	8	Pemberdayaan	<p>Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan kemampuan dan memandirikan masyarakat tani dalam meraih kesejahteraan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu strategi yang dapat memberdayakan petani dalam meningkatkan produktivitasnya .</p> <p>Membantu menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan secara sosial, dan pemberdayaan untuk anggota masyarakat lokal, terciptanya struktur berbasis agribisnis dan menjadikan masyarakat lebih efektif.</p>
	9	Hak Asasi Manusia	<p>Hak Asasi Manusia penting bagi kerja masyarakat baik dalam pengertian negatif (perlindungan hak asasi manusia), maupun pengertian positif (promosi mengenai hak asasi manusia). Dalam pengertian negatif, sangat diperlukan bahwa proyek pengembangan masyarakat selaras dengan prinsip2 dasar hak asasi manusia, antara lain hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk kebebasan berkumpul, dan hak kebebasan berekspresi perlu dilindungi (dokumen PBB).</p>
	10	Definisi kebutuhan	<p>sesuatu yang mutlak harus dipenuhi, jika tidak maka akan mengganggu kualitas hidup</p>

Tabel 14. Pengembangan Masyarakat Berdasarkan Prinsip Menghargai Lokal

11

11	Menghargai pengetahuan lokal	pengetahuan lokal berorientasi untuk memenuhi kebutuhan hidup segera dan menjadi solusi permasalahan riil kehidupan masyarakat lokal. mencerminkan serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota komunitas, diwujudkan dalam perilaku yang memungkinkan terjalannya kerjasama sehingga dapat mendorong kemampuan dan kapabilitas bekerjasama serta berkoordinasi menghasilkan kontribusi terhadap keberlanjutan produktivitas. merupakan modal utama masyarakat dalam membangun dirinya tanpa merusak tatanan sosial.
12	Menghargai budaya lokal	Menghargai budaya lokal diperlukan untuk mengatasi persoalan globalisasi budaya yang merampas identitas budaya masyarakat, dan bahwa tradisi dan proses budaya lokal diakui dan didukung sebagai bagian dari proses pengembangan masyarakat, dengan catatan budaya lokal itu tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, keberlanjutan dan kebutuhan untuk mengatasi struktur dan wacana yang merugikan.
13	Menghargai sumber daya lokal	Gagasan mengenai menetapkan kebutuhannya sendiri (self-reliance) pada prinsip no. 10, mengimplikasikan bahwa masyarakat seharusnya berupaya memanfaatkan sumber dayanya sendiri (sumber daya finansial, teknik, alam dan manusianya), bukan mengandalkan dukungan dari luar.
14	Menghargai keterampilan masyarakat lokal	Bagaimanapun, masyarakat lokal adalah orang2 yang paling mengetahui masyarakat dan konteks lokalnya, serta kemahiran dan pengalaman yang dikembangkan secara lokal menjadi kompetensi yang akan sangat dibutuhkan dalam lingkungan tersebut.
15	Menghargai proses lokal	struktur dan proses berbasis masyarakat dipandang sebagai alternatif yang lebih tepat.

Tabel 15. Pengembangan Masyarakat Berdasarkan Prinsip Proses

		Merupakan keikutsertaan dari petani baik secara individu maupun secara kelompok dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dalam bidang usaha pertanian. Partisipasi juga merupakan faktor yang sangat penting dalam melaksanakan berbagai aktivitas ataupun program pertanian.
16	Partisipasi	<p>Pekerja masyarakat perlu memahami kompleksitas partisipasi, cara yang diperjuangkan dan tujuan yang berbeda yang hendak dicapai. Golongan, gender, dan ras/etnis perlu diperhatikan dalam partisipasi (unjuk, menjaga inklusivitas)</p> <p>Sebuah analisis partisipasi sebagai pemberdayaan sangatlah penting. Suatu apresiasi dari serangkaian pengetahuan dan keterampilan sangat diperlukan untuk memaksimalkan partisipasi dan penggunaan keterampilan ini menjadi sentral untuk proses bottom-up.</p>
17	Proses, hasil dan visi	Sangat untuk membicarakan visi, bukan hasil; hal ini memang kurang spesifik dibandingkan gagasan mengenai hasil, tapi masih menekankan pentingnya menempatkan gagasan mengenai dimana kita mulai, dan untuk apa semua itu, serta penting bahwa ide ini dicakup dalam mempertimbangkan proses, karena ide tersebut memberikan visi yang menetapkan tujuan bagi proses.
18	Integritas proses	Proses dalam pengembangan masyarakat lebih penting daripada hasil, tetapi dalam pengertian yang sesungguhnya hasil tetap penting; bagaimanapun, tujuan diharapkan untuk membangun proses masyarakat yang dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, proses harus sesuai dengan, dan juga mencerminkan harapan visi atau hasil, menyangkut isu-isu keberlanjutan, keadilan sosial dan hak asasi manusia.
19	Menumbuhkan kesadaran	Pekerja masyarakat perlu dapat melihat dan menggunakan peluang apapun untuk melakukan penumbuhan kesadaran secara informal, selama percakapan sehari-hari dengan orang2 di masyarakat.

		Ada empat aspek penumbuhan kesadaran, yaitu : hubungan personal dan politik, mengembangkan hubungan dialogis, berbagi pengalaman tentang penindasan, dan membuka kemungkinan untuk bertindak.
20	Kerja-sama dan konsensus	Perspektif ekologis dan pendekatan tanpa kekerasan, keduanya menekankan pentingnya struktur kooperatif, bukan struktur kompetitif. Oleh karena itu, perlu membangun struktur dan proses alternatif, yang didasarkan pada kerjasama, bukan konflik, dengan pembuatan keputusan secara mufakat atau konsensus.
21	Langkah pembangunan	Konsekuensi alamiah dari perkembangan organis, yaitu bahwa masyarakat itu sendiri yang harus menentukan langkah untuk melakukan perkembangan. Usaha untuk 'mendorong' proses pengembangan masyarakat yang terlalu cepat dapat menimbulkan proses yang dikompromikan, masyarakat jadi kehilangan rasa memiliki proses itu, dan hilang juga komitmen orang2 yang terlibat.
22	Perdamaian dan anti-kekerasan	Dalam konteks ini, prinsip anti kekerasan menyatakan lebih dari sekadar membebaskan kekerasan fisik di antara orang-orang. Gagasan tentang kekerasan struktural berarti bahwa struktur dan institusi sosial dapat dipandang sebagai suatu bentuk kekerasan. Bahwa proses harus mencoba untuk menegaskan, bukan menyerang, untuk mencakup, bukan mengucilkan, bekerja berdampingan, bukan bersaing, dan menengahi, bukan menghadapi.
23	Inklusivitas	Bahwa proses yang berjalan selalu mencoba untuk merangkul bukan mengucilkan; semua orang pada hakikatnya dihargai sekalipun mereka menyampaikan pandangan yang bersebrangan, dan orang2 dimungkinkan memiliki peluang untuk mengubah posisi mereka dari suatu persoalan tanpa 'wajah kekalahan'.
24	Membangun masyarakat	Selalu berupaya menyadarkan orang2nya, memperkuat ikatan di antara anggota2nya dan menekankan ide tentang saling- ketergantungan (interdependen), bukan

Tabel 16. Pengembangan Masyarakat Berdasarkan Prinsip Global & Lokal

			ketergantungan (dependen), bukan juga kemandirian (independen). Jadi memperkuat hubungan di antara orang2 melalui membangun masyarakat (community building).
GLOBAL & LOKAL	25	Menghubungkan yang global dan lokal	Dalam memahami suatu masyarakat, seorang pekerja masyarakat harus mampu memahami global maupun lokal, dan bagaimana keduanya saling mempengaruhi/berinteraksi
	28	Praktik anti-kolonialis	<p>Pekerja Masy. perlu melawan praktek kolonialis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melalui kesadaran diri yang kritis (self-awareness), kesadaran politik dan perenungan 2. pekerja yg menempatkan dirinya dalam budaya yg dominan atau menguasai perlu menjabarkan implikasinya 3. menyediakan ruang utk memunculkan wacana dan tindakan alternatif, mengungkapkan perlawanan alamiah dari pihak yang terjajah 4. dengan melangkah mundur, mendengar dan belajar, sebelum terburu-buru mengambil tindakan 5. menjaga solidaritas dengan masyarakat dan berbagi agenda umum 6. bekerja dengan masyarakat 7. menerapkan uji timbal balik, dan bertanya bagaimana pekerja akan merasakan jika situasinya terbalik, dan dirinya yang dikenai 'pembangunan' yang diajukan untuk masyarakat

Program *Food estate* ditinjau dari Prinsip - Prinsip Pengembangan Masyarakat

Bila ditinjau dari prinsip-prinsip *Community Development* Ife (2002), Program *Food estate* sudah mengacu pada prinsip-prinsip pengembangan masyarakat, dimana prinsip-prinsip *community development* tersebut tidak berdiri sendiri, namun saling berhubungan dan terkait, seperti yg disampaikan oleh Jim ife (2002). program *Food estate* yang dilaksanakan sudah menganut pada **prinsip pertama** : prinsip ekologis (*Ecological principles*), dimana Program *Food estate* sudah berprinsip pada lima unsur yang menjadi basis *community development*, sebagai contoh Pengembangan Kawasan *Food estate* dan Kawasan Pertanian di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah merupakan program terobosan untuk mengintegrasikan semua sektor penunjang di kawasan pangan {Keterpaduan Proses (*The integrity of process*)}, sehingga dikala masa pandemi Covid-19 akan tetap mampu mendorong peningkatan produksi pangan dengan mengelola usahatani berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa kegiatan *Food estate* di Kabupaten karangayar kecamatan matesih sudah berprinsip berkelanjutan (*Sustainability*), juga hal lain menunjukkan bahwa segala bentuk kegiatannya dipandang sebagai sesuatu yang utuh dan bukan merupakan kesatuan dari bagian-bagian yang terpisah (*Holism*)

Prinsip kedua adalah Prinsip Keadilan Sosial (*Social justice principles*), dalam hal ini program *Food estate* diarahkan kepada system agribisnis yang berakar kuat dipedesaan berbasis **pemberdayaan masyarakat lokal (*Empowerment*)** yang merupakan landasan dalam pengembangan wilayah. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial di masyarakat (kelompok) yang meliputi penguatan *modal social* (apabila kita sudah memiliki Kepercayaan (*trusts*), Patuh aturan (*role*), dan Jaringan (*networking*) serta memiliki modal social yang kuat maka kita akan mudah mengarahkan dan mengatur (*direct*) masyarakat serta mudah mentransfer knowledge kepada masyarakat Agusta, 2002

Dengan memiliki modal social yang kuat maka kita akan dapat menguatkan *Knowledge*, modal (*money*), dan *people*. Jim Ife, (2002) menyatakan bahwa pengembangan masyarakat tidak hanya

sebatas teori tentang bagaimana mengembangkan daerah pedesaan tetapi memiliki arti perkembangan di tingkat masyarakat. Pembangunan masyarakat seharusnya mencerminkan tindakan masyarakat dan kesadaran atas identitas diri. Oleh karena itu, komitmen untuk pengembangan masyarakat harus mengenali keterkaitan antara individu dan masyarakat dimana mereka berada.

Masyarakat adalah sebuah fenomena struktural dan bahwa sifat struktural dari kelompok atau masyarakat memiliki efek pada cara orang bertindak, merasa dan berpikir. Tapi ketika kita melihat struktur tersebut, mereka jelas tidak seperti kualitas fisik dari dunia luar. Oleh karena itu pengembangan masyarakat memiliki epistemologis logis dan kewajiban sosial. Dalam rangka mendorong kesuksesan program *Food estate* harus dilakukan dengan memberdayakan kelompok masyarakat desa dan BUMDesa dalam mengembangkan sektor pertanian. Program *Food estate* harus didukung dengan kesiapan masyarakat desa, paling tidak masyarakat memahami dasar sistem produksi, distribusi, dan pola konsumsi konsumen sehingga tercipta iklim usaha pertanian yang berkelanjutan {**prinsip keberlanjutan (Sustainability)**}.

Jika dicermati secara substansial, persoalan-persoalan yang muncul dalam pemanfaatan sumber daya alam seperti diuraikan di atas sesungguhnya bersumber dari anutan paradigma pengelolaan sumberdaya alam yang bercorak sentralistik, berpusat pada negara (*state-based resource management*), mengedepankan pendekatan sektoral, dan mengabaikan perlindungan hak-hak asasi manusia. Paradigma seperti ini selain tidak mengutamakan kepentingan konservasi dan perlindungan serta keberlanjutan fungsi sumber daya alam, juga tidak secara utuh memberi ruang bagi partisipasi masyarakat, serta mengabaikan hak-hak masyarakat adat/lokal atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Berdasarkan hasil wawancara dari penyuluh yang ada di Kecamatan Matesih bahwa pemanfaatan sumber daya alam di kecamatan matesih sudah dikelola dengan sangat baik, dimana sumber daya permodalan usaha tani di Kecamatan Matesih ini sebagian besar dari Swadaya masyarakat/petani itu sendiri, dengan demikian ini menandakan bahwa semakin berdaya masyarakatnya maka integritas dan partisipasi dalam memajukan desanya juga semakin besar.

Sebagai bentuk nyata kegiatan yang dilakukan di Kecamatan Matesih adalah anjuran kepada para pelaku utama (petani dan keluarganya) agar adanya pengurangan penggunaan pupuk anorganik, para petani dalam kegiatan pendampingan diarahkan untuk selalu memanfaatkan kotoran hewan dan sisa tumbuhan untuk dijadikan pupuk organik (***Organic development***). Sehingga dilakukan kegiatan dengan cara memberdayakan petani dilokasi pendampingan dalam pembuatan pupuk organik (pupuk kompos).

Pembuatan kompos sebagai pupuk dilakukan dengan memanfaatkan kotoran hewan, sisa tumbuhan dan sampah rumah tangga dengan menggunakan aktifator MOL (Mikro Organisme Lokal) buatan sendiri, begitu pula dengan pestisida dicari dari tumbuhan berkhasiat sebagai pengendali hama. Dengan demikian biaya yang dikeluarkan menjadi lebih efisien dan murah. Disamping untuk peningkatan produksi pangan, pengembangan kawasan *Food estate* dan kawasan pertanian berbasis korporasi petani diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di lokasi program, karena didukung oleh potensi sumberdaya lahan yang cukup luas, sumberdaya air dan iklim yang sesuai, serta kelembagaan petani yang memiliki modal sosial budaya yang mendukung (*Balanced development*)

Ketiga, Prinsip Menghargai Lokal (*Valuing the local*), Program *Food estate* diarahkan kepada sistem agribisnis yang berakar kuat dipedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat lokal yang merupakan landasan dalam pengembangan wilayah. Kelompok tani di Kecamatan Matesih umumnya mulai terbentuk pada tahun 2008, hal tersebut dilatarbelakangi oleh terbitnya Lampiran Permentan No : 273/Kpts/Ot.160/4/2007, tanggal: 13 April 2007, yang menyatakan bahwa pembentukan kelompok petani harus berdasarkan **domisili**. Berdasarkan hal tersebut maka dibentuklah kelompok tani di setiap dusunnya yang selanjutnya dikukuhkan oleh Bupati Karanganyar. Kelompok tani di Kecamatan Matesih memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan fungsinya sebagai unit produksi. Sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang kartu tani, kelompok tani memiliki peran penting dalam penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan TUPI. Kelompok tani bertanggung jawab dalam menyusun data RDK dan RDKK yang diperoleh dari hasil analisis data oleh kepala

dusun. Data tersebut selanjutnya akan dijadikan sebagai landasan dalam penentuan kuota pupuk bersubsidi bagi petani setiap tahunnya yang dapat diakses melalui kartu tani.

Kelompok tani di Kecamatan Matesih umumnya menjalankan kegiatan simpan-pinjam dengan baik. Kegiatan ini sangat membantu petani dalam keberlangsungan usaha pertanian, sejalan dengan kebutuhan akan modal usaha petani. Sistem simpan pinjam di kelompok ini tidak memberatkan petani dengan sistem bunga, tetapi sistem pengembalian dan lebihnya diberikan hak sepenuhnya kepada petani. Selain itu, kelompok tani juga berperan penting dalam peningkatan dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan petani dalam budidaya melalui kegiatan pertemuan kelompok yang dilakukan secara rutin setiap bulannya. Kegiatan tersebut dijadikan sebagai forum untuk diskusi mengenai berbagai permasalahan yang sedang terjadi di kelompok, perumusan rencana kegiatan kelompok, pelaporan kas anggaran kelompok, hasil produksi dan lain-lain.

Begitu juga untuk hasil Produksi *Food estate*, tentu diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sisanya baru boleh untuk diekspor. Oleh karena itu pemerintah mengarahkan agar para pelaku usaha dapat bekerja sama secara terpadu dalam melakukan usaha pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan penanam modal, tetap mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia, khususnya warga masyarakat lokal {Prinsip Menghargai Lokal (*Valuing the local*)}.

Keempat, Prinsip Proses (*Process principles*). *Community development* memandang lebih penting pada prosesnya daripada pada hasilnya, oleh karena itu banyak penerapan prinsip-prinsip penting *community development* terfokus pada gagasan proses. Konsep dasar *Food estate* diletakkan atas dasar keterpaduan sector dan subsector dalam suatu system agribisnis dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan lestari dikelola secara professional, serta didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kokoh.

Dalam pengembangan program *Food estate* seyogyanya dilakukan melalui Kerjasama kemitraan (*Cooperation and consensus*) sebagai bentuk nyata pada kegiatan pelaksanaan program *Food estate* di Kecamatan Matesih adalah dalam menjalankan fungsinya sebagai

wahana kerjasama, kelompok tani di Matesih telah melakukan berbagai kemitraan dengan pihak luar, salah satunya adalah dengan perusahaan setempat, seperti kerjasama dengan PT. Ase Putih yaitu bekerja sama dalam bidang budidaya kedelai putih, selain itu kerjasama juga dilakukan dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi pupuk, pestisida, dan nutrisi tanaman.

Dengan kerjasama, maka masing-masing pihak akan menghargai usaha dan kerja keras. Dengan demikian, kegagalan akan diminimalisasi karena mempertaruhkan modal dan tenaga para pihak. Kedepan pembagian kerja dan komitmen sangat dibutuhkan. Pemerintah mengurus infrastruktur, seperti jalan irigasi, alsintan dan pendampingan. Urusan petani laksanakan sesuai SOP, offtaker menampung semua hasil panen dan memberikan pendampingan, perbankan memberikan permodalan. Jadi masing-masing memilikitanggungjawab sendiri-sendiri untuk mencapai tujuan Bersama. Menurut Marzuki (2011), keberhasilan pembangunan tidak bisa dilakukan oleh satu orang/kelompok masyarakat namun tetap dilakukan secara partisipatif dan bersinergi, karena keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari fisik belaka namun harus mampu dirasakan secara non fisik/bermanfaat secara berkesinambungan sehingga pembangunan itu tidak mubazir yaitu hanya bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh segelintir masyarakat. Oleh karena itu dengan berpartisipasi dalam membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang akan lebih baik tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri (*Participation*)

Kelima, Prinsip Global dan Lokal (***Global and local principles***). Hubungan antara global dan lokal saat ini telah menjadi bagian yang nyata dari seluruh praktik *community development*, dan perlu dijadikan bagian untuk menyadarkan setiap *community worker*. Prinsip global dan lokal dalam hal ini adalah Mengkaitkan Global dan Lokal (*Linking the global and the local*) dan Praktik Anti Penjajah (*Anti-colonialist practice*). Program *Food estate* dikembangkan karena melonjaknya permintaan pangan dunia sebanding dengan pertumbuhan penduduk, lalu supply pangan dunia yang tidak sebanding dengan permintaan (*Global Food Crisis*).

Melalui Program *Food estate* dilakukan konsep pertanian sebagai system industrial yang berbasis IPTEK dan dilaksanakan atas dasar

keterpaduan sector dan subsector dalam suatu system agribisnis secara professional, yang dilakukan dengan bekerjasama dengan para investor dalam dan luar negeri dengan tetap memperhatikan dan melindungi kepentingan masyarakat setempat atau lokal. *Food estate* merupakan program yang luar biasa dimana pemilihan benih, budidaya, panen dan paca panen dilakukan melalui pendampingan dan pengawasan yang melibatkan banyak pihak. *Food estate* merupakan jawaban untuk menyediakan pangan bagi 273 juta jiwa penduduk Indonesia, dimana stabilitas suatu negara dipengaruhi oleh stabilitas suatu daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan Analisa Pengembangan Masyarakat melalui Program *Food estate* maka dapat disimpulkan bahwa: Program *Food estate* merupakan bentuk kegiatan pengembangan masyarakat yang sejatinya merupakan proses terintegrasi yang mengandung prinsip-prinsip ekologis (*Ecological principles*), keadilan sosial (*Social justice principles*), menghargai Lokal (*Valuing the local*), proses (*Process principles*), dan prinsip Global dan Lokal (*Global and local principles*).

Proses pengembangan Masyarakat melalui program *Food estate* berupaya menyadarkan orang-orang dalam memperkuat ikatan diantara anggota-anggotanya, memperkuat hubungan diantara orang-orang melalui membangun masyarakat (*community building*) dan mencari cara untuk saling membuat kegiatan yang berorientasi pada kelompok (*group oriented*) bukan individualistis dengan mendorong kewajiban timbal balik dan saling menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Graha Ilmu; Yogyakarta Agier, Isabelle, Szafarz, Ariane. 2013. Microfinance and Gender : Is There a Glass Ceiling on Loan Size? Word Development.
- Agusta, I. 2002. Metode Evaluasi Program Pemberdayaan. Humaniora Utama Press; Bandung Anoraga, <https://www.litbang.pertanian.go.id/info-actual/file/Bagian-1.pdf>.
Buku Pintar *Food estate*

- Ife, J. (2002), *Community development*, Edisi ke-1, Pustaka Pelajar Yogyakarta 55167
- Iwi, Hasan. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Juniaty, S. 2005. *Penerapan Panca Usaha Tani Dalam Meningkatkan Produksi Padi Sawah di Desa Kelapa Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai*. Medan: Unimed.
- Marzuki, S. 2011. *Pembinaan Kelompok*. Jakarta: UT Press.
- Mardikonto, T. 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Surakarta: UNS Press.
- Mosher, AT. 2010. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. Jakarta: Yasaguna.
- Sutrisna A, dkk. (2021). *Laporan Kegiatan pendampingan Food Estatic di kecamatan matesih kabupaten karang Anyar*

GLOSARIUM

- Community development* : Pengembangan masyarakat
- Ecological Principles* : Prinsip ekologis holism, keberlanjutan, keekaragaman, perkembangan organic dan keseimbangan dalam pengembangan masyarakat.
- Social Justice Principles* : Prinsip Keadilan Sosial dan HAM dalam pengembangan masyarakat mencakup mengatasi struktur yang merugikan, mengatasi wacana yang merugikan, pemberdayaan, HAM dan definisi kebutuhan.
- Valuing The Local* : Menghargai pengetahuan, budaya, sumberdaya, ketrampilan masyarakat, proses lokal dan partisipasi dalam pengembangan masyarakat.
- Process Principles* : Prinsip Proses pengembangan masyarakat mencakup proses, hasil dan visi, juga integritas proses, menumbuhkan kesadaran, Kerjasama dan consensus, Langkah pembangunan, perdamaian dan anti kekerasan, inklusivitas, membangun masyarakat,
- Global and Local Principles* : Prinsip global dan lokal pengembangan masyarakat terdiri atas menghubungkan yang global dan lokal dan parktik anti kolonialis
- Host Family* : Keluarga angkat yang menerima siswa internasional di rumah untuk belajar tentang budaya baru dan berbagi budaya dan nilai-nilainya. Keluarga angkat menyediakan lebih dari sekadar tempat tinggal dan makanan.

- Hosting Programm* : Program menerima siswa internasional berusia 15-18 tahun terbagi dalam *year program* (durasi 3-10 bulan), *short programm* (durasi 2-11 minggu), maupun program lainnya.
- Akuifer* : lapisan yang terdapat di bawah tanah yang mengandung air dan dapat mengalirkan air.
- Karst* : daerah yang terdiri atas batuan kapur yang berpori sehingga air dipermukaan tanah selalu merembes dan mengalir ke dalam tanah.
- Policy brief* : hasil analisis terhadap suatu isu strategis dan kebijakan dalam bentuk naskah singkat.
- Ekosentris* : berpusat pada ekologi (hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya)
- Perspektif pluralis* : Proses menolong kelompok/individu yang dirugikan untuk bersaing secara efektif dengan kepentingan-kepentingan lain (dengan menolong maka ada proses belajar, menggunakan keterampilan, media, aksi politik dan memanfaatkan sistem)
- Perspektif elitis* : membutuhkan lebih dari kemampuan untuk berkompetisi, meningkatkan keterampilan dan berusaha masuk dalam kelompok elite untuk merubah dan mempengaruhi atau membangun jaringan/sekutu dengan elite
- Perspektif strukturalis* : merupakan proses perubahan sosial dimana perubahan sosial didorong untuk melucuti struktur-struktur opresif yang dominan

Perspektif post strukturalis : proses untuk menantang dan mengubah wacana

PROFIL PENULIS

Dini Hidayanti Herpamudji

Dini lahir di Semarang 37 tahun yang lalu. Ibu dari tiga orang anak ini, sedang menempuh S3 Ilmu Penyuluhan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat di UNS Surakarta. Lulusan S1 Ilmu Komunikasi UNDIP yang juga mantan presenter TVRI dan Cakra Semarang TV ini, setelah menyelesaikan S2 MIKOM UNDIP sempat menjadi dosen luar



UDINUS. Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) di Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah ini, telah menulis beberapa buku bersama, salah satunya “Jejak Langkah Sang Penggerak” yang menceritakan pengalaman pemberdayaan masyarakat PSM di seluruh Indonesia. Pengalamannya mengikuti Beasiswa Pertukaran Pelajar di Machida-shi Tokyo Jepang saat SMA dan menjadi relawan Bidang Antarbudaya menginspirasi menulis bab ini.

Ery Purwanti

Ery Purwanti, S.Si., M.Sc. lahir di Gombong, Kebumen, 3 Juli 1968. Pada tahun 1987 memulai pendidikan S1 Biologi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada tahun 2007 melanjutkan study S2 di Sekolah Pasca Sarjana Jurusan Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis, Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya pada tahun 2021 di terima sebagai mahasiswa Program Studi Doktor Penyuluhan Pembangunan Peminatan Promosi Kesehatan Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Sejak tahun 1994 menjadi staf pengajar di Prodi DIII Keperawatan Universitas Muhammadiyah Gombong.



Hastin Ika Indriyastuti

Hastin Ika Indriyastuti, S.Si.T., M.P.H lahir di Kebumen, 22 Juli 1980. Pada tahun 1996 memulai pendidikan perawat di Sekolah Perawat Kesehatan Rumah Sakit Dustira Kesdam III Siliwangi Bandung. Pada tahun 2001 memulai pendidikan kebidanan di Akademi Kebidanan Muhammadiyah Rumah Sakit Islam Jakarta dan menyelesaikannya



pada tahun 2004. Pada tahun 2006 menyelesaikan Pendidikan DIV Bidan Pendidik di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudi Waluyo Ungaran. Pada tahun 2013 menyelesaikan Pendidikan Pasca Sarjana di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada minat Kesehatan Ibu Anak dan Kesehatan Reproduksi. Selanjutnya pada tahun 2021 di terima sebagai mahasiswa Program Studi Doktor Penyuluhan Pembangunan Peminatan Promosi Kesehatan Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Sejak tahun 2006 menjadi staf pengajar di Prodi DIII Kebidanan, pada tahun 2022 berpindah menjadi staf pengajar di Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi di Universitas Muhammadiyah Gombong. Aktif di organisasi AIPKEMA (Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Muhammadiyah dan Aisyiyah se Indonesia) sebagai bendahara 1 dan aktif di organisasi profesi IBI (Ikatan Bidan Indonesia).

Helfi Agustin

Helfi Agustin adalah seorang dosen, peneliti dan promotor Kesehatan. Lahir di Solok, Sumatera Barat 15 Agustus 1974, Setelah tamat SMAN 1 Kota Solok ia melanjutkan Pendidikan S1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Medan, pendidikan S2 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Depok serta Pendidikan S3 di Prodi Penyuluhan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta. Semenjak tahun 2016, ia menjadi pegawai negeri di LLDikti V Yogyakarta penugasan di Peminatan Promosi Kesehatan-Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Mata kuliah yang diampu adalah Sosiologi dan Antropologi Kesehatan, Dasar Promosi Kesehatan, Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan, Pemasaran Sosial, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Ilmu Perilaku, Promosi Kesehatan Pariwisata. Penelitian dan publikasinya terutama berkaitan dengan kesehatan pariwisata, media promosi kesehatan, perilaku kesehatan.



Isma Yuniar

Ns Isma Yuniar, M.Kep lahir di Kebumen 24 Juni 1980, memulai pendidikan pada tahun 1999 di S1 Fakultas Ilmu Keperawatan- Universitas Indonesia, melanjutkan program magister di Magister Keperawatan UNPAD Bandung, dan saat ini sedang menempuh pendidikan program doktoral program studi Penyuluhan Pembangunan dengan



peminatan promosi kesehatan, UNS-Surakarta. Sejak tahun 2004 menjadi staf pengajar di prodi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Gombong, dengan bidang ilmu pada dasar keperawatan dan fokus penelitian pada bidang kesehatan tuberkulosis

Lutfia Uli Na'mah

Lutfia Uli Na'mah lahir di Kota Gombong, tahun 1986. Lulus dari Diploma empat Kebidanan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta tahun 2010 dan program Pasca Sarjana Magister Kesehatan di Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2014. Saat ini sedang studi lanjut Doktor Universitas Sebelas Maret program Studi Penyuluh Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Peminatan Promosi Kesehatan.



Saat ini berprofesi sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Gombong, Program Studi Kebidanan program Diploma Tiga, serta sebagai praktisi di Klinik dr. Monte. Menulis Lutfia lakukan di sela-sela kesibukannya mengajar dan bidan praktisi. Satu hal yang mendorong ia menulis adalah karena keprihatinannya terhadap rendahnya minat baca di tanah air, serta banyaknya informasi yang tidak mendidik di masyarakat.

Motto dalam hidupnya adalah: “Seorang pemberani bukanlah dia yang tidak pernah merasa takut, tetapi pemberani adalah seseorang yang berani mengatasi ketakutannya sendiri.”

Miftah Faridl Widhagdha

Miftah mendalami studi pembangunan terutama bidang pengembangan masyarakat, komunikasi pembangunan dan manajemen lingkungan, selain itu Miftah melalui Prospect Institute, ia juga berkiprah menjadi praktisi dan konsultan dalam pengembangan masyarakat oleh perusahaan di berbagai perusahaan di Indonesia.



Miftah menyelesaikan studi sarjana di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret dan melanjutkan studi magister di Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, saat ini Miftah sedang melanjutkan studi doctoral di Program Studi Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Selain itu, Miftah juga memiliki keahlian dan sertifikasi dalam praktisi keberlanjutan (*Certified Sustainability Practitioner*) dari Institute of Certified Sustainability Practitioner dan Penjamin Laporan Keberlanjutan (*Certified Sustainability Reporting Assuror*) dari Global Reporting Initiative. Miftah telah menerbitkan tulisan dan karya cipta terkait pengembangan masyarakat seperti Buku Relasi Sosial dalam Praktik CSR, Model Penilaian *Environmental Management Assesment & Survey* (EMAS), dan Model Kanvas Inovasi Sosial.

Nadya Puspita Adriana

Nadya Puspita Adriana, S.Psi., M.Psi. Tertarik di bidang Psikologi khususnya klinis (kesehatan). Ketertarikannya berkembang ke ranah remaja, keluarga dan perkawinan ketika menjadi dosen dan konselor keluarga dan remaja. Tahun 2010 mengambil kuliah di jurusan S-1 Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta dan lulus pada tahun 2014.



Melanjutkan studi S-2 nya Magister Psikologi klinis pada tahun 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan lulus pada tahun 2019. Setelah lulus pada tahun 2019 pada tahun yang sama bekerja sebagai dosen lepas di Stikes Kusuma Husada Surakarta dan pada tahun 2020, bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di tahun yang sama bekerja freelance di CV. Smart Solindo Consultama yang bergerak di bidang Konsultan Agen untuk proses Assesment, Recruitment, dan Selection serta Psychotes. Lalu di tahun 2021 dikontrak sebagai Konsultan Keluarga dan perkawinan di Paroki Santo Aloysius. Pada tahun 2022 Menjadi seorang Konsultan Remaja se Paroki Surakarta. Di tahun 2021 penulis juga aktif menjadi Volunteer salah satunya di Komunitas Tabu yang bergerak di bidang psikologi dan seksualitas, menjadi bagian dari divisi People Development, Engagement, dan Organization Branding Staff

Ratih Prananingrum

Ratih Prananingrum, S.ST., M.Kes. Lahir di Kota Surakarta, Jawa Tengah, 3 April 1988, status sudah menikah, mempunyai anak kembar. Tahun 2009 memulai pendidikan DIII Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Surakarta, Kerja di Jogja International Hospital tahun 2009 – 2011 sembari melaksanakan kuliah di DIV Bidan Pendidik Poltekkes Kemenkes



Surakarta dengan nilai yang memuaskan (*cumlaude*). Tahun 2010 diterima menjadi dosen di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta bersamaan dengan diterima di S2 Magister Kedokteran Keluarga Minat Pendidikan Profesi Kesehatan lulus tahun 2012 dan lagi lulus dengan nilai yang memuaskan (*cumlaude*).

Saat ini sedang bekerja di Politeknik Harapan Bangsa Surakarta dengan mengemban amanah dari bapak direktur sebagai Kepala Prodi DIV Manajemen Informasi Kesehatan. Sekaligus studi lanjut Doktor Universitas Sebelas Maret program Studi Penyuluhan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Peminatan Promosi Kesehatan diterima dan mendapatkan beasiswa dari Universitas Sebelas Maret Surakarta yaitu beasiswa Alumni berprestasi.

Sulistiyani Prabu Aji

Penulis adalah Peneliti di Pusat Kedokteran Tropis Universitas Gadjah Mada (UGM). Penulis merupakan lulusan S2 Kedokteran Keluarga UNS pada tahun 2015 dan saat ini penulis merupakan mahasiswa ikatan Dinas S3 Prodi Penyuluh Pembangunan peminatan Promosi Kesehatan di Universitas Sebelas Maret (UNS).



Karena kesempurnaan hanya milik Sang Maha Pencipta, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun lewat email : sulistyaniprabuaji@student.uns.ac.id

Wida Pradiana

Dosen (Lektor Kepala) pada Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Lahir di Bandung, 01 Maret 1975. Pendidikan terakhir Pascasarjana (S2) IPB Tahun 2001 pada Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Tahun 2001 diterima sebagai PNS di Kementerian Pertanian. Selanjutnya Tahun 2006 ditetapkan sebagai Dosen



pada Sekolah tinggi Pembangunan Pertanian Bogor (STPP Bogor) sekaligus sebagai staff pada Jurusan Penyuluhan Pertanian, Pada Tahun 2010 diberikan amanah sebagai Kepala Unit Diklat RIHP Penyuluh Pertanian di STPP Bogor lalu pada Tahun 2011 diangkat sebagai Ketua Jurusan merangkap Ketua Program Studi pada Jurusan Penyuluhan Pertanian Bogor. Selanjutnya Tahun 2015 diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Asrama merangkap Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sampai dengan Tahun 2021. Sejak Tahun 2018 Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP Bogor) telah bertransformasi menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, dan kembali diberikan amanah sebagai dosen dan Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sampai dengan November Tahun 2021. Pada Tahun 2022 diberikan kesempatan untuk melaksanakan Pendidikan Program Doktor (S3) di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, yang merupakan Beasiswa dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian.

Pengembangan masyarakat menjadi diskursus yang semakin berkembang seiring dengan semakin terbukanya wacana tentang kesetaraan dan keadilan sosial di tingkat global. Perkembangan pembangunan dunia melalui tujuan pembangunan berkelanjutan / sustainable development goals (SDGs) melalui semangatnya yaitu “No One Left Behind” juga semakin membuka wacana tentang bahwa masyarakat dalam konteks global harus selalu ditempatkan sebagai subjek dalam proyek-proyek pembangunan agar tidak menyisakan masalah baru dalam pembangunan.

Buku ini diharapkan dapat mengisi dan menyumbangkan wacana dalam kajian pengembangan masyarakat yang kini tidak bisa dilepaskan dari tren globalisasi, dimana keterkaitan satu sama lain semakin tidak bisa dihindari, baik itu keterkaitan antar negara sampai keterkaitan antar isu pembangunan menjadi semakin kompleks dan saling bersinggungan.

Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si.

Diterbitkan atas kerjasama

**Program Studi Doktor
Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat
Sekolah Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret**

dengan

Prospect Publishing

SOSIAL HUMANIORA

ISBN 978-623-5586-11-3

